



2024

Laporan Tahunan
Annual Report

Meraih Peluang Bisnis Menuju Pertumbuhan yang Maksimal dan Optimal

Seizing Business Opportunities Towards
Maximum and Optimal Growth

Sekilas Laporan Tahunan 2024

About the 2024 Annual Report

MUSEUM



Jamkrida
Jakarta

Penjelasan Tema

Theme Explanation



Meraih Peluang Bisnis Menuju Pertumbuhan yang Maksimal dan Optimal

Seizing Business Opportunities Towards
Maximum and Optimal Growth

Sebagai Lembaga keuangan, PT JAMKRIDA Jakarta memiliki peran menunjang program pemerintah di bidang pengembangan UMKM, khususnya di DKI Jakarta melalui kegiatan usaha penjaminan kredit yang diberikan Lembaga keuangan perbankan, serta Lembaga non perbankan. Hal ini menjadikan Jamkrida Jakarta terus bersikap optimistis, adaptif, dan tidak berhenti berinovasi untuk memaksimalkan peluang bisnis dan membangun pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melanjutkan tema tahun 2023 yang lebih berfokus untuk membangun ketahanan dan mengoptimalkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, pada tahun 2024 Jamkrida Jakarta mengangkat tema **MERAIH PELUANG BISNIS MENUJU PERTUMBUHAN YANG MAKSIMAL DAN OPTIMAL** yang berfokus dalam mengarahkan bisnis menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dengan berfokus mendapatkan lebih banyak mitra usaha baru dengan mengedepankan pelayanan prima, serta mengedepankan Visi dan Misi, serta menerapkan nilai kerja secara *Building Trust, Excellent Service, Teamwork, Accountable Wise, dan Innovative* (BETAWI).

Hal ini sejalan dengan filosofi logo Jamkrida Jakarta yang baru diluncurkan sehingga JAMKRIDA Jakarta akan terus berproses untuk menciptakan bisnis yang lebih tangguh dan berkelanjutan dengan senantiasa berupaya menjalankan aktivitas bisnis yang inklusif dan bertanggung jawab untuk dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan peri kehidupan. JAMKRIDA Jakarta senantiasa terus meningkatkan kontribusi nyata kepada seluruh pemangku kepentingan dan senantiasa menjaga kualitas layanan perusahaan untuk tetap menjadi mitra pilihan masyarakat dalam bisnis penjaminan.

As a financial institution, PT JAMKRIDA Jakarta plays a role in supporting government's programs in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), specifically in the Special Capital Region (DKI) of Jakarta (DKI Jakarta) through business activities in credit guarantee provided by bank and non-bank financial institutions. This makes Jamkrida Jakarta continuously optimistic, adaptive, and unceasingly innovative to maximize business opportunities and build sustainable growth.

Continuing the theme of 2023 that focused more on developing resilience and optimizing continuous business growth, in 2024 Jamkrida Jakarta raised the theme to **SEIZING BUSINESS OPPORTUNITIES TOWARDS MAXIMUM AND OPTIMAL GROWTH** that focused on directing business towards sustainable growth with the focal point on gaining more new business partners by prioritizing prime services as well as Vision and Mission, and by applying the work values of *Building Trust, Excellent Service, Teamwork, Accountable Wise, and Innovative* (BETAWI).

This is in line with the philosophy behind Jamkrida Jakarta's newly launched logo, JAMKRIDA Jakarta will continue to process to creating business that is more resilient and sustainable by always striving to carry out inclusive and responsible business activities in order to be able to provide benefits for the nation and the life of the people. JAMKRIDA Jakarta continues to increase its real contribution to all stakeholders and endlessly maintains the company's service quality to remain as the people's choice as partner in guarantee business.



Kesinambungan Tema

Continuity Theme

2023



Kiprah Jamkrida Jakarta Menuju Bisnis Penjaminan yang Berkelanjutan Jamkrida Jakarta's Journey Towards Sustainable Guarantee Business

Nilai-nilai keberlanjutan telah menjadi inti dari bisnis yang dijalankan PT Jamkrida Jakarta ("Jamkrida Jakarta"). Maka dari itu, Jamkrida Jakarta berusaha untuk terus tumbuh secara positif didorong oleh berbagai upaya transformasi berkesinambungan, baik melalui beragam inovasi produk ataupun layanan yang diluncurkan seraya tetap memegang komitmen untuk tidak berhenti memberikan kontribusi dukungan dan sinergi melalui berbagai pihak agar UMKM binaan Pemrov DKI Jakarta dapat naik kelas dan berdaya saing tinggi. Dengan mengarahkan perhatian pada keharmonisan bisnis yang memerhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, Jamkrida Jakarta optimis dapat melanjutkan kisah sukses di masa depan dengan merangkul pertumbuhan pendapatan yang lebih besar dan harapannya jumlah UMKMK yang dijamin pun semakin bertambah. Dengan cara inilah, Jamkrida Jakarta memiliki peluang untuk dapat terus berkarya dan mengukir makna keberlanjutan pada jangka panjang.

Sustainability values have become the core of the business of PT Jamkrida Jakarta ("Jamkrida Jakarta"). For this reason, Jamkrida Jakarta strives to continuously grow positively induced by various continual transformation efforts, both through various product and service innovations while maintaining the commitment to continue to provide support and synergy through various parties so that MSMEs fostered by the DKI Jakarta Provincial Government can raise its level and be highly competitive. By directing the attention to business harmony that takes into account economic, social and environmental aspects, Jamkrida Jakarta is optimistic to continuing its successful journey in the future by embracing greater revenue growth and the hope to increase the number of guaranteed MSMEs. This way Jamkrida Jakarta has the opportunity to continue to be productive and carve the true meaning of sustainability in the long term.

2021



Merangkul Krisis Akibat Pandemi Guna Menjadikannya Peluang Bisnis Bagi UMKM Embrace The Pandemic Crisis Into Business Opportunities For MSMEs

PT Jamkrida Jakarta terus mendorong layanan penjaminan kredit dan bantuan konsultasi manajemen kepada para pelaku bisnis UMKM, serta bekerja sama dengan lembaga keuangan bank maupun nonbank untuk mempermudah akses pinjaman modal kerja dan/atau investasi bagi koperasi dan UMKM. Atas dasar latar belakang tersebut, pada laporan tahunan 2021 ini, PT Jamkrida Jakarta memilih tema "Merangkul Keadaan Krisis Guna Menjadikannya Peluang Bisnis Bagi UMKM".

PT Jamkrida Jakarta continued to encourage credit guarantee services and management consulting assistance to all MSME business players, as well as to collaborate with banking and non-banking financial institutions for easier access to working capital loan and/or investment for cooperatives and MSMEs. On the basis of this background, in the 2021 annual report, PT Jamkrida Jakarta selected the theme "Embracing Crisis Into Business Opportunities for MSME".

2022



Sewindu Bersama Jamkrida Jakarta Bangkit Lebih Kuat & Bertumbuh Lebih Hebat Untuk Penjaminan UMKMK Eight Years With Jamkrida Jakarta Rise Stronger & Grow More Powerful For MSMEs Guarantee

Begitu banyak nilai-nilai kearifan yang diperoleh dari delapan tahun perjalanan Jamkrida Jakarta. Mulai dari pertama kali didirikan di tahun 2015, hingga peluncuran produk dan/atau layanan yang inovatif, dan jalinan kemitraan yang terus berkembang dengan berbagai pihak, semuanya itu membuktikan rekam jejak keberhasilan kami dalam menavigasi segala bentuk tantangan yang datang silih berganti selama sewindu berkarya.

So many values of wisdom gained from the eight years of Jamkrida Jakarta's journey. From when it was first established in 2015 until the launch of the innovative products and/or services, and the established partnership with various parties that continued to grow, all of which are proofs of our successful track record in navigating all forms of challenges that came and passed during the eight years in business.

2020



Menjaga Pertumbuhan Dan Ketahanan UMKMK Melalui Berbagai Tantangan Maintain Growth And Resilience For MSMEs Through Various Challenges

Di tengah prestasi UMKMK dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia, sayangnya terjadi pandemi COVID-19 yang 'menginfeksi' perekonomian global dan nasional menuju jurang resesi. PT Jamkrida Jakarta mendukung program pemerintah untuk membantu UMKMK, khususnya di DKI Jakarta, menghadapi berbagai tantangan dengan terus mendorong layanan penjaminan kredit dan bantuan konsultasi manajemen kepada para pelaku bisnis UMKMK.

Amidst MSME's performance in supporting Indonesia's economic growth and development, it was unfortunate that COVID-19 "infected" global and domestic economy towards recession. PT Jamkrida Jakarta supported the government's programs to help MSME, specifically in Jakarta, to face the various challenges by continued support in credit guarantee services and management consulting assistance to MSME business players.

Daftar Isi

Table of Content

01

Ikhtisar Utama Performance Highlight



8	Ikhtisar Kinerja 2024 2024 Performance Overview
10	Ikhtisar Keuangan Financial Highlights
13	Kinerja Penjaminan Guarantee Performance
14	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators
16	Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Soundness Level
17	Penghargaan dan Sertifikasi tahun 2024 Awards and Certifications in 2024
18	Peristiwa Penting Significant Events

02

Laporan Manajemen Management Report



26	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioner Report
32	Laporan Direksi Board of Directors Report

03

Profile Perusahaan Company Profile



46	Identitas Perusahaan Corporate Identity
48	Sekilas Jamkrida Jakarta Jamkrida Jakarta at a Glance
52	Tonggak Sejarah Milestones
54	Visi dan Misi Vision and Mission
55	Nilai-Nilai Perseroan Corporate Values
56	Asas dan Tujuan Principles and Objectives
57	Kegiatan Usaha Business Activities
58	Produk dan Layanan Products and Services
59	Wilayah Operasional Operational Areas
60	Struktur Organisasi Organizational Structure
61	Keanggotaan dalam Asosiasi dan Organisasi Membership in Associations and Organizations
62	Perubahan Komposisi Manajemen Changes of Management Composition
64	Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners
66	Profil Direksi Profile of the Board of Directors
70	Profil Dewan Pengawas Syariah Profile of the Sharia Supervisory Board
73	Profil Kepala Divisi Profile of the Head Division
78	Sumber Daya Manusia Human Resources
82	Informasi Tentang Struktur Modal dan Pemegang Saham Information About Capital and Shareholders
83	Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Bersama Subsidiaries, Associated Companies, Joint Venture Companies
83	Kronologi Pencatatan Saham dan Efek Lainnya Chronology of Listing of Shares and Other Securities
84	Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan Company Supporting Institutions and Professions
85	Perkenalan Pergantian Website Introduction to New Website



04

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis



88	Tinjauan Ekonomi, Perkembangan UMKM, dan Industri Penjaminan Review of the Economic, MSMEs Development, and Guarantee Industry
91	Tinjauan Bisnis Business Review
92	Tinjauan Operasional Operational Review
98	Tinjauan Keuangan Financial Review

05

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance



05

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

112	Tentang Tata Kelola Perusahaan About Good Corporate Governance
115	Mekanisme dan Struktur GCG GCG Structure and Mechanism
117	Penilaian Penerapan GCG Tahun 2024 The Assessment of the Implementation of GCG in 2024
118	Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Atas Penerapan GCG The Result of the Self-Assessment on the Implementation of GCG
119	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)

121	Dewan Komisaris Board of Commissioners
127	Direksi Board of Directors
132	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors
133	Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama Affiliate Relations of the Board of Commissioners, Board of Directors, Main Shareholders
134	Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors
136	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board
139	Komite Audit Audit Committee
142	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
146	Satuan Pengawas Internal (SPI) Internal Supervisory Unit (SPI)
150	Auditor Eksternal External Auditor
152	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
155	Sistem Manajemen Risiko Risk Management System
161	Kepatuhan Compliance
163	Perkara Hukum Legal Cases
164	Sanksi Administratif Administrative Sanctions
164	Kode Etik Code of Conduct
166	Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Providing Long-Term Compensation
166	Kebijakan Transparansi Kepemilikan Saham Policy on Transparency of Share Ownership
166	Sistem Pelaporan Pelanggaran Violation Reporting System
171	Kebijakan Anti-Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Anti-Bribery Policy and Gratuity Control
174	Keterbukaan Informasi dan Akses Informasi Perusahaan Disclosure And Access To Company Information

06

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility



180	Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Policy
180	Komitmen Terhadap Pelaksanaan Program CSR Commitment To CSR Program Implementation
181	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup Corporate Social Responsibility Towards the Environment
182	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety and Health (OHS)
185	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Masyarakat Corporate Social Responsibility Towards Social and Community Development
188	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Mitra Kerja Corporate Social Responsibility Towards Partners
189	Kemitraan Partnership
191	Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2024 Liability Statement of the 2024 Annual Report

Transisi Logo

Logo Transition



Pada November 2023, Jamkrida Jakarta mengalami transformasi organisasi yang signifikan, yang ditandai dengan peluncuran logo baru. Logo ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas visual, tetapi juga secara filosofis mencerminkan harapan baru Jamkrida Jakarta.

Secara lebih rinci, filosofi di balik elemen-elemen logo baru Jamkrida Jakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

In November 2023, Jamkrida Jakarta experienced a significant organizational transformation, signified by the launching of the new logo. This logo not only functions as a visual identity, but also philosophically reflects new hopes for Jamkrida Jakarta.

Furthermore in details, the philosophy behind the new logo elements of Jamkrida Jakarta is described as follows:



Huruf J

The Letter J

Logo Jamkrida Jakarta memiliki desain yang mencerminkan identitas perusahaan serta asal domisili. Huruf J yang terdapat dalam logo tersebut melambangkan nama Perseroan, yaitu Jamkrida Jakarta dan nama kota Jakarta sebagai lokasi pendirian perusahaan. Dengan demikian, mencerminkan keterkaitan antara identitas perusahaan dan kebanggaan akan budaya lokal Jakarta.

The design of Jamkrida Jakarta's logo reflects the company's identity and domicile. The letter J contained within the logo symbolizes the Company's name, namely Jamkrida Jakarta and the name of the city of Jakarta as the location where the Company was established. Thus, it reflects the connection between the Company's identity and pride in Jakarta's local culture.



Tugu Monas

The Monas Monument

Tugu Monas, sebagai ikon kota Jakarta, memancarkan karakteristik ciri khas yang sangat kuat. Tugu Monas juga menjadi simbol perwujudan semangat kemajuan Jakarta. Tinggi monument yang menjulang ini mencerminkan aspirasi dan keyakinan bahwa kota Jakarta akan terus berkembang, serta menggambarkan harapan Jamkrida Jakarta terhadap pertumbuhan bisnis yang positif dan berkelanjutan.

Tugu Monas (the National Monument), as the icon of the city of Jakarta, emits a strong unique characteristic. The National Monument is also a symbol of the embodiment of the spirit of progress in Jakarta. The towering height of the monument reflects the aspiration and belief that the city of Jakarta will continue to develop as well as it portrays the hopes of Jamkrida Jakarta for positive and continuous business growth.



Centang/Ceklis

Tick/Check Mark

Centang atau ceklis pada logo Jamkrida Jakarta bukan semata-mata elemen desain, melainkan mencerminkan filosofi bahwa Jamkrida Jakarta dirancang untuk menjadi sebuah perusahaan yang mudah diakses dan memiliki fungsi yang komprehensif. Simbol tersebut tidak hanya sekadar elemen desain, tetapi juga merepresentasikan tugas dan fungsi Jamkrida Jakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dibentuk dengan tujuan utama untuk meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional.

The tick sign in the logo of Jamkrida Jakarta is not merely a design element, but it also depicts the philosophy that Jamkrida Jakarta is designed to become a company that is easy to access and has a comprehensive function. The symbol is not only a mere design element, but also represents the duties and functions of Jamkrida Jakarta as a Regional Owned Enterprise (BUMD), established with the main objective to improve the level of the national financial inclusivity.



Filosofi Logo

Logo Philosophy

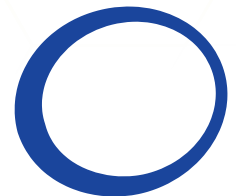


Tangan Terbuka

Open Hands

Visualisasi tangan terbuka pada logo Jamkrida Jakarta memiliki filosofi bahwa Jamkrida Jakarta senantiasa memberikan pelayanan terbuka, serta mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Jakarta melalui kegiatan menjalankan usaha penjaminan kredit dan bantuan konsultasi manajemen untuk terciptanya kemajuan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Jakarta.

Visualization of the open hands on the Jamkrida Jakarta logo retains the philosophy that Jamkrida Jakarta always provides open servicess, as well as supports and encourages economic growth of the Jakarta region through activities in credit guarantee business and management consulting assistance to generate advancement in the Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSME and Cooperatives).in order to improve the welfare of the people of Jakarta.



Sustainability Secara 6 Nilai (BETAWI)

Sustainability According to 6 Corporate Values (BETAWI)

Lingkaran berwarna biru secara filosofis melambangkan *Sustainability* secara 6 Nilai Betawi, yang meliputi: *Building Trust* (Membangun Kepercayaan) untuk menciptakan ikatan yang kuat. *Excellent Service* (Pelayanan Terbaik) mampu memberikan dan terciptanya kepuasan yang optimal. *Teamwork* (Kerja Sama Tim) untuk mencapai tujuan bersama atau dapat menyelesaikan tugas dengan cara yang efektif dan efisien. *Accountable* (Akuntabel) bertanggung jawab dan siap menghadapi dan menyelesaikan masalah. *Wish* (Harapan) langkah yang akan menuntun ke kesuksesan dan keberhasilan. *Innovative* (Inovatif) gagasan atau ide yang dapat mengembangkan Jamkrida Jakarta..

The blue circle philosophically symbolizes Sustainability of the 6 "BETAWI" Values which include the following: Building Trust to create strong ties; Excellent Service capable of providing and generating optitmal satisfaction; Teamwork to accomplish common goals or to complete tasks effectively and efficiently; Accountable to take responsibility and be ready to face and manage problems to completion; Wish for the steps to take that lead to success and achievement. Innovative with notions or ideas to develop Jamkrida Jakarta.

01

Ikhtisar **Utama**

Performance Highlight



Ikhtisar Kinerja 2024 2024 Performance Overview	8
Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	10
Kinerja Penjaminan Guarantee Performance	13
Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	14
Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Soundness Level	16
Penghargaan dan Sertifikasi tahun 2024 Awards and Certifications in 2024	17
Peristiwa Penting Significant Events	18

Ikhtisar Kinerja 2024

2024 Performance Overview

Rp600 Miliar
Billion

Peningkatan Modal Dasar
Increase in Business Capital



Rp30,83 Triliun
Trillion

Realisasi Penjaminan Kredit
Realization of Credit Guarantees



Rp339,78 Miliar
Billion

Penerimaan IJP/IJK secara kas per 31 Desember 2024
IJP/IJK Cash receipts as of 31 December 2024



5.114.149 UMKM
MSMEs

Yang dijamin sampai akhir tahun 2024
Guaranteed until the end of 2024



Rp27,40 Miliar
Billion

Pembukuan Laba Bersih
Net Profit for the year





Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

Dalam Jutaan Rupiah
In Million Rupiah

Aset Asset	2024	2023	2022
ASET LANCAR CURRENT ASSETS			
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	102.618	97.169	96.328
Investasi Investment			
Deposito Time Deposit	129.610	55.750	64.250
Reksa dana Mutual Fund	84.772	39.709	51.306
Simpanan berjangka Term Deposit	-	100	100
Piutang hasil investasi Investment Receivables	7.881	6.144	4.352
Piutang penjaminan ulang Re-guarantee Receivables	16.536	30.637	15.096
Piutang penjaminan bersama Joint Guarantee Receivables	8.853	6.291	28.982
Aset penjaminan ulang Re-guarantee Assets	81.650	25.775	19.819
Pajak dibayar di muka Prepaid Tax	127	176	281
Biaya dibayar di muka dan uang muka jangka pendek Prepaid Expenses and Short-Term Advances	3.368	3.280	5.598
Jumlah Aset Lancar Total Current Asset	435.415	265.034	286.112
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS			
Investasi Investment			
Obligasi dimiliki hingga jatuh tempo Bonds held to maturity	614.242	459.722	361.194
Deposito yang dibatasi penggunaannya Restricted Deposits	83.000	63.000	10.000
Reksadana Mutual Funds	-	10.102	10.097
Biaya dibayar di muka dan uang muka jangka panjang Prepaid Expenses and Long-Term Advances	13.004	12.614	12.843
Aset pajak tangguhan Deferred Tax Assets	3.611	1.426	161
Aset tetap – bersih Fixed Assets – net	669	424	395
Aset hak guna – bersih Right of Use Assets – net	758	1.432	1.808
Aset lain-lain bersih Other assets – net	52	103	90
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	715.336	548.825	416.589
Jumlah Aset Total Assets	1.150.751	813.859	702.702



Dalam Jutaan Rupiah
In Million Rupiah

Liabilitas Liabilities	2024	2023	2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES			
Utang pajak Tax Payables	8.131	6.164	348
Utang penjaminan ulang Re-guarantee Receivables	23.114	20.241	10.370
Utang penjaminan bersama Co-guarantee Payables	15.835	7.763	25.063
Utang sewa pembiayaan Lease Payables	567	647	746
Beban akrual Accrued Expenses	22.997	15.027	9.348
Cadangan klaim Claim Reserve	189.085	100.585	51.605
Pendapatan ditangguhkan Deferred Income	32.036	32.921	21.313
Liabilitas lain-lain dalam penyelesaian Other Liabilities in Progress	27.998	32.251	40.249
Jumlah liabilitas jangka pendek Total Current Liabilities	319.763	215.603	159.042
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES			
Utang sewa pembiayaan Lease Payables	202	850	1.167
Pendapatan ditangguhkan Deferred Income	191.104	177.966	142.562
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Long-term Employee Benefits Liabilities	1.588	1.069	1.011
Jumlah liabilitas jangka panjang Total Non-Current Liabilities	192.894	179.886	144.740
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	512.657	395.490	303.782

Dalam Jutaan Rupiah
In Million Rupiah

Ekuitas Equity	2024	2023	2022
Modal Saham Capital Stock	600.000	400.000	400.000
Komponen ekuitas lainnya Other Equity Components	1.201	721.156	366
Saldo laba Retained Earnings			
Ditentukan penggunaannya Apropriated	10.923	18.110	17.842
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	25.969	(462)	(19.286)
Jumlah Ekuitas Total Equity	638.093	418.369	398.920
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.150.751	813.859	702.702

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Report on Profit Loss and Other Comprehensive Income

Dalam Jutaan Rupiah
In Million Rupiah

Pendapatan Penjaminan Guarantee Revenues	2024	2023	2022
Imbal jasa penjaminan/Kafalah Compensation for Guarantee Services/Kafalah	324.906	289.992	181.354
Pendapatan penjaminan lainnya Other Guarantee Revenues	24.112	26.902	18.027
Jumlah Pendapatan Penjaminan Total Guarantee Revenues	349.018	316.895	199.382
Beban Penjaminan Guarantee Expenses	2024	2023	2022
Beban klaim Claim Expenses	(124.012)	(100.950)	(79.056)
Beban penjaminan ulang Re-guarantee Expenses	(137.369)	(131.441)	(73.715)
Beban fee based income Fee-Based Income Expenses	(16.062)	(14.539)	(11.803)
Kenaikan (penurunan) estimasi klaim Increase (decrease) in Estimated Claims	(32.624)	(43.025)	(17.246)
Beban restitusi Restitution Expenses	(1.276)	(874)	(483)
Jumlah Beban Penjaminan Total Guarantee Expenses	(311.343)	(290.831)	(181.820)
Pendapatan Investasi Investment Income	2024	2023	2022
Pendapatan Investasi Investment Income	49.251	34.034	25.811
Beban Usaha Operating Expenses	2024	2023	2022
Beban sumber daya manusia Personnel Expenses	(24.539)	(18.764)	(19.344)
Beban operasional Operating Expenses	(4.841)	(5.062)	(3.199)
Beban cadangan kerugian penurunan diri Allowance for Impairment Losses	(14.243)	(4.884)	-
Beban administrasi dan umum General and Administrative Expenses	(7.972)	(4.725)	(4.404)
Beban sistem, teknologi dan pengembangan usaha System, Technology and Operating Development Expenses	(698)	(832)	(549)
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	(52.294)	(34.269)	(27.495)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	2024	2023	2022
Lain-lain, bersih Others – net	(1.273)	(1.515)	(686)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	2024	2023	2022
Pajak kini Current tax	(8.033)	(5.907)	-
Pajak tangguhan Deferred tax	2.078	1.053	97
Laba (rugi) tahun berjalan Current year profit (loss)	27.403	19.460	15.288
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income	724	75	(81)
Laba (rugi) tahun berjalan Current year profit (loss)	28.127	19.535	15.207



Kinerja Penjaminan

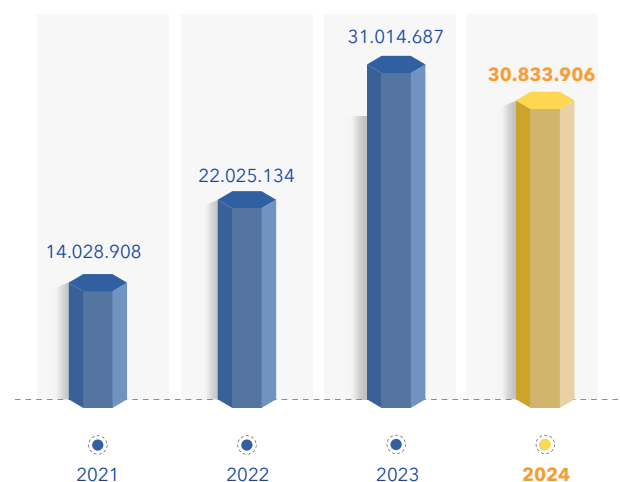
Guarantee Performance

Uraian Description	2024	2023	2022
Kredit Penjaminan (miliar rupiah) Guarantee Credit (billion rupiah)	30.833.906	31.014.687	22.025.134
Jumlah UMKMK Total MSMECOs	5.114.149	5.487.429	3.520.536
Jumlah Tenaga Kerja Number of Work Force	6.198.703	5.656.934	3.630.495

Kredit Penjaminan

Guarantee Performance

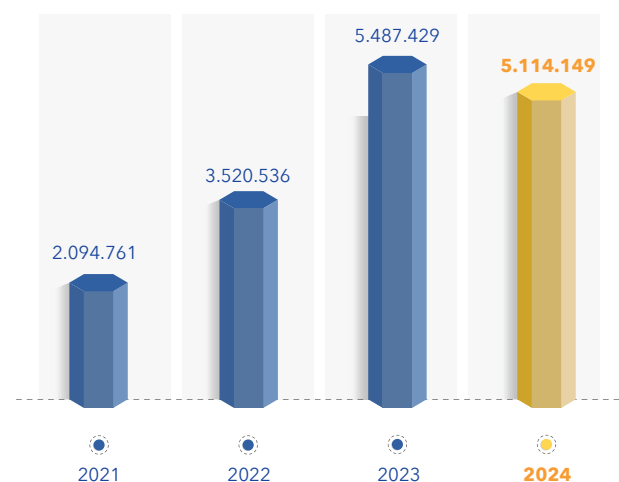
Dalam Jutaan Rupiah
In Million Rupiah



Jumlah UMKMK

Number of MSMECOs

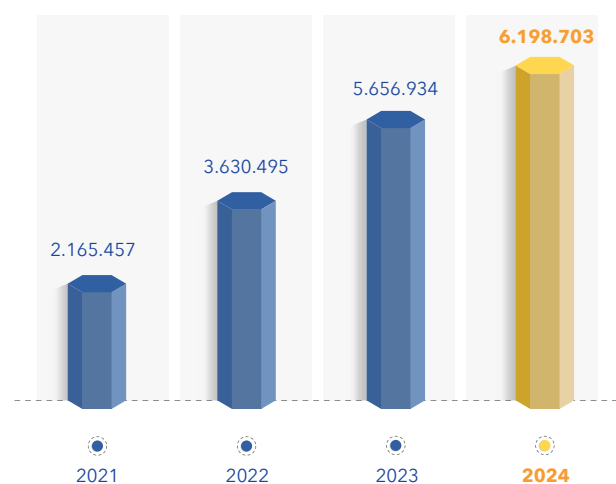
Dalam Jutaan Rupiah
In Million Rupiah



Jumlah Tenaga Kerja

Number of Workforce

Orang
Person



Indikator Kinerja Utama

Key Performance Indicators

Sebagaimana kontrak kinerja antara Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta dengan Direksi Jamkrida Jakarta tahun 2024, realisasi Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator/"KPI") Direksi sampai akhir tahun 2024 (31 Desember 2024) adalah sebagai berikut:

As per performance contract between the Head of theh DKI Jakarta Provincial BUMD Development Agency and the Board of Directors of Jamkrida Jakarta in 2024, realization of the Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Directors until the end of the year 2024 (31 December 2024) is as follows:

No	Sasaran Strategis Strategic Target	Target 2024 2024 Target	Realisasi 2024 2024 Realization	Realisasi Realization	Bobot Weight	Realisasi Bobot Weight Realization	Total Bobot Total Weight
Perspektif Finansial Financial Perspective							
1	Meningkatkan profitabilitas usaha Increase business profitability	25,29 Milyar	27,40 Milyar	108%	10%	11%	33%
2	Meningkatkan efisiensi biaya Increase cost efficiency	55%	53%	104%	5%	5%	
3	Meningkatkan kemampuan Perusahaan menghasilkan laba Increase the company's ability to generate profits	2,24%	2,38%	107%	5%	5%	
4	Meningkatkan Kapasitas Penjaminan Increase capacity guarantee	27,35	21,88	120%	5%	6%	
5	Meningkatkan penagihan subrogasi Increase subrogation billing	11,55 Milyar	11,74 Milyar	102%	5%	5%	
Persepektif pelanggan Customer Perspective							
1	Meningkatkan portofolio penjaminan kredit Increase credit guarantee portfolio	3,19%	-6.80%	0%	5%	0%	21%
2	Diversifikasi produk Penjaminan Product Diversification Guarantee	500 Milyar	1.164 Milyar	120%	10%	12%	
3	Mendapatkan mitra baru Expanding new partners	800 Milyar	750 Milyar	94%	5%	5%	
4	Meningkatkan kepuasan pelanggan Increase customer satisfaction	5	4,7	94%	5%	5%	



No	Sasaran Strategis Strategic Target	Target 2024 2024 Target	Realisasi 2024 2024 Realization	Realisasi Realization	Bobot Weight	Realisasi Bobot Weight Realization	Total Bobot Total Weight
Perspektif Internal Proses Bisnis Business Process Internal Perspective							
1	Mengembangkan digitalisasi penjaminan dan klaim Develop digitalize guarantee and claims	100%	100%	100%	5%	5%	20%
2	Meningkatkan kualitas layanan (SLA) Improve service quality (SLA)	100%	100%	100%	5%	5%	
3	Mempekuat Keandalan Sistem GCG (BPKP) Strengthen GCG implementation	85%	76,01%	89%	5%	4%	
4	Mempekuat keandalan sistem GCG (OJK) Strengthen reliability of GCG system	85	94,60	111%	5%	6%	
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Learning and Growth Perspective							
1	Meningkatkan kapabilitas & produktivitas SDM Improve HR capability & productivity	4,10 Milyar	4,88 Milyar	119%	10%	12%	26%
2	Meningkatkan kapabilitas SDM Improve HR capability	4.497%	18.656%	120%	5%	6%	
3	Efektifitas Kompensasi dan Motivasi Kerja Compensation Effectiveness and Work Motivation	100%	65%	65%	5%	3%	
4	Meningkatkan kinerja karyawan Improve employee performance	100%	101%	101%	5%	5%	
						Total Skor Total Score	100%

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Soundness Level

Hasil Perhitungan Penilaian Kesehatan Perusahaan sesuai surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) adalah sebagai berikut:

Results of the Company's Soundness Assessment according to the Financial Services Authority (SEOJK) circular are as follows:

No	Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	Hasil Result	Indikator Indicator
1	Rasio Likuiditas Liquidity Ratio	136%	1
2	Gearing Ratio	21,88	1
3	Rentabilitas Profitability		
a.	Rasio Return on Asset Return on Asset Ratio	3,0%	2
b.	Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Costs on Operational Revenues	86%	2
c.	Rasio Klaim Terhadap Pendapatan IJP Ratio of Claims to Guarantee Fee Revenue	85%	3
4	Self-Assessment	94,60	1
		Total Skor Total Score	1,47 (Sangat Sehat)



Penghargaan dan Sertifikasi tahun 2024

Awards and Certifications in 2024



4 Star of TOP GRC Award 2024

Top Business
TOP GRC Awards 2024
TOP GRC Award 2024 # 4 Star

9 November 2024
November 9, 2024

The Most Committed GRC Leader 2024

Top Business
TOP GRC Awards 2024
TOP GRC Award 2024 # 4 Star

9 November 2024
November 9, 2024

Peristiwa Penting

Significant Events



23 Januari 24

23 January 24

PKS Cogar Askrindo.
PKS Cogar Askrindo.

9 Januari 24

9 January 24

Townhall Meeting.
Townhall Meeting.



31 Januari 24

31 January 24

PKS Cogar Jamkrida Jabar.
PKS Cogar Jamkrida of West Java.

2 Februari 24

2 February 24

FGD Penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
FGD Strengthening the People's Business Credit (KUR).



22 Maret 24

22 March 24

RUPS Tahun Buku 2023.
GMS of Fiscal Year 2023.





16 Mei 24

16 May 24

Kerja Sama *Customs Bond* Bea Cukai Jogja.
Cooperation on Customs Bond with Yogyakarta Customs.

22 Mei 24

22 May 24

Kunjungan kerja Jamkrida Sumatera Barat.
Working Visit of Jamkrida of West Sumatera.



22 Mei 24

22 May 24

Kunjungan Kerja Jamkrida Jawa Barat.
Working Visit of Jjamkrida of West Java.



14 Juni 24

14 June 24

Kunjungan Kerja Jamkrida Jawa Timur.
Working Visit of Jamkrida East Java.



26 Juni 24

26 June 24

Kunjungan Kerja DPRD Sumatera Barat.
Working Visit of Regional People's Representative
Assembly (DPRD) of West Sumatera.





15 Juli 24

15 July 24

Penandatanganan CO *Guarentee* Jamkrindo.
Signing of Jamkrindo Co-Guarantee.



17 Juli 24

17 July 24

Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat.
Socialization of People's Business Credit.



24 Juli 24

24 July 24

Sosialisasi *Surety Bond* di Dinas Bina Marga Jakarta.
Socialization of *Surety Bond* at Jakarta Department of Highways.



24 Juli 24

24 July 24

Sosialisasi *Surety Bond* di PAM Jaya.
Socialization of *Surety Bond* at Drinking Water Company (PAM) Jaya.



28 Agustus 24

28 August 24

Pemeringkatan Pefindo.
Pefindo Rating.



30 Agustus 24

30 August 24

Penandatanganan PKS CO *Guarentee* Jamkrida Jabar.
Signing of PKS Co-Guarantee of Jamkrida West Java.

11 September 24

11 September 24

Top GRC Awards 2024.
Top GRC Awards 2024.



20 September 24

20 September 24

Sosialisasi Produk *Surety Bond* dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Socialization of Surety Bond with DKI Jakarta Education Authority.

20 September 24

20 September 24

Konsinyering H2H Jamkrida Jakarta dengan MPM.
H2H Jamkrida Jakarta Consignment with MPM.



25 September 24

25 September 24

PKS Kontra Bank Garansi UUS dengan BSI.
PKS on Sharia Business Unit (UUS) Contra Bank Guarantee with BSI.



29 Oktober 24

29 October 24

PKS SME Value Chain BSI.
PKS on SME Value Chain with BSI.



31 Oktober 24

31 October 24

Penandatanganan PKS dengan LPDB.
Signing of PKS with LPDB.



10 November 24

10 November 24

HUT 10th Semasa Dasawarsa Jamkrida.
10th Anniversary of Jamkrida.



19 November 24

19 November 24

Kunjungan Kerja Jamkrida Sumbar.
Working Visit of Jamkrida West Sumatera.



7 Desember 24

7 December 24

Penandatanganan PKS Kontra Bank Garansi dengan PT Bank BRI.
Signing of PKS Contra Bank Guarantee with PT Bank BRI.



17 Desember 24
17 December 24

RUPS LB (Pengesahan RKA Tahun 2024).
Extraordinary GMS (Ratification of 2024 Work Plan & Budget).

19 Desember 24
19 December 24

Kunjungan Kerja DPRD NTB.
Working Visit of the Regional People's
Representatives Assembly (DPRD) on West Nusa Tenggara.



24 Desember 24
24 December 24

Bersyukur Bersama.
Be Grateful Together.



02

Laporan
Manajemen

Management Report



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioner Report

26

Laporan Direksi

Board of Directors Report

32

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioner Report

Andrianto Wahyu Adi

Komisaris Utama
President Commissioner

"Kami menilai bahwa Direksi telah berupaya secara maksimal menjalankan operasional perusahaan dengan efisien dan efektif. Direksi beserta jajaran manajemen telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan pendapatan, mengelola risiko, dan berupaya maksimal untuk menerapkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku".

"We assess that the Board of Directors has given its maximum efforts carry out the Company's operations efficiently and effectively. The Board of Directors and its management team have shown high commitment to increasing income, manage risks, and ensure compliance with applicable regulations."





Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, PT JAMKRIDA Jakarta dapat melewati tahun ini dengan berbagai pencapaian yang membanggakan. Izinkan kami segenap Dewan Komisaris, mengucapkan salam dan terimakasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perjalanan Perseroan di sepanjang tahun 2024. Terlebih, kami sangat menghargai peran penting dan kerja sama yang solid dari setiap Insan Perseroan sehingga Perseroan mampu memperkuat eksistensinya dalam industri, di tengah kondisi yang cukup menantang di tahun 2024.

Dengan semangat yang tinggi, kami berkomitmen untuk memelihara komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, kami akan terus berkomitmen serta untuk terus melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pengawas dengan penuh dedikasi. Selaras dengan hal tersebut, Dewan Komisaris berharap bahwa Laporan Tahunan ini dapat menjadi acuan yang komprehensif bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Perseroan di tahun 2024 yang penuh dengan tantangan.

Situasi Perekonomian 2024

Perekonomian global menunjukkan dinamika yang beragam pada triwulan III tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi global stabil walaupun cenderung moderat dan mencerminkan disparitas regional. Risiko ekonomi global terus meningkat seiring dengan ketegangan geopolitik yang semakin intens dan fragmentasi dalam perdagangan internasional. Pada triwulan III tahun 2024, ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura tumbuh masing-masing sebesar 2,7; 4,6; 0,3; 1,5; dan 5,4 persen (YoY).

Dan di sisi lain, Ekonomi di Indonesia pada periode yang sama juga mampu tumbuh sebesar 4,95% (yoy), 1,5% (qtq), atau sebesar 5,03% (ctc) ditengah masih tingginya ketidakpastian dan berbagai tantangan global yang masih membayangi, seperti fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik, hingga proyeksi ekonomi global yang tumbuh 3,2% pada 2024 dan 2025, dimana masih di bawah rata-rata historis.

Proyeksi ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 menunjukkan optimisme yang disertai dengan sikap kehati-hatian. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Lebih lanjut, tahun 2024, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia, berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 60,51%, serta menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja

Distinguished Shareholders and Stakeholders,

In praise to the presence of God Almighty, we extend our gratitude for His grace and blessings that PT JAMKRIDA Jakarta was able to pass through this year with various proud achievements. Allow us, the entire Board of Commissioners, to extend our greetings and appreciation to all stakeholders involved in the Company's journey throughout the year 2024. Moreover, we greatly appreciate the important role and solid hard work of each Company Personnel that the company was able to strengthen its presence in the industry, amidst quite the challenging year of 2024.

With high spirit, we are committed to maintain open and continuous communication with all stakeholders. Apart from that, we will continue to be committed and to carry out the functions and responsibilities as supervisor with full dedication. In line with this, the Board of Commissioners hope that this Annual Report serves as a comprehensive reference for the shareholders and all stakeholders, to understand the extent of the Company's development in the quite fully challenging year of 2024.

Economic Situation in 2024

Global economy showed diverse dynamics in the third quarter of 2024. Global economic growth was stable although tend to be moderate and reflected regional disparity. Global economic risks continued to rise along with the increasingly straining geopolitical tensions and fragmentation in international trade. Global inflation trend showed some improvement, with the reduced price of energy and the stable supply chain. Nevertheless, inflation in the service sector remained difficult to control in many regions, that it triggered prudent monetary policies. In the third quarter of 2024, the economy of developed countries such as the United States, China, Japan, South Korea, and Singapore grew respectively by 2.7; 4.6; 0.3; 1.5; and 5.4 percent (YoY).

Indonesia's economy in the third quarter of 2024 grew by 4.95% (yoy), 1.5% (qtq), or 5.03% (ctc) amidst the high uncertainty and the various global challenges that remained overshadowing, such as the geo-economic fragmentation, geopolitical tensions, to global economic projections that grew by 3.2% in 2024 and 2025, which was still below the historical average.

Indonesia's economic projections for 2025 show optimism accompanied by a cautious attitude. The government targets economic growth of 5.2% in accordance with the 2025 State Revenue and Expenditure Budget (APBN).

Furthermore, in 2024, the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) became one of the national economic pillars as MSME covers some 99% of the total business units in Indonesia, contributing to the national Gross Domestic Product (PDB) up to 60.51%, and absorbed almost 97% of the total workforce in

di Indonesia. Saat ini, kontribusi UMKM kepada ekspor nasional saat ini baru mencapai sekitar 15,7% dari total ekspor nasional, masih di bawah Singapura (41%) dan Thailand (29%).

Penilaian Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya

Berfungsi sebagai pengemban aspirasi pemegang saham dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan arahan terhadap kebijakan dan pengelolaan Direksi terhadap Perseroan, Dewan Komisaris menyambut baik pencapaian kinerja yang ditunjukkan Perseroan sepanjang tahun 2024. Direksi telah menunjukkan ketahanan dan ketajaman strategis yang patut diapresiasi dalam mempertahankan hasil kinerja bisnis.

Berdasarkan data *audited* per 31 Desember 2024, dapat dilihat adanya peningkatan kinerja operasional. Untuk kinerja keuangan selama tahun 2024, realisasi penjaminan per 31 Desember 2024 sehingga dibukukan menjadi sebesar Rp30,83 triliun atau tercapai 114% dari RKAP 2024 sebesar Rp26,97 triliun dengan jumlah UMKMK yang dijamin sebanyak 5.114.149 UMKMK dan tenaga kerja yang terserap sebanyak 6.198.703 tenaga kerja. Sementara itu, jumlah beban klaim per 31 Desember 2024 dibukukan sebesar Rp124,01 miliar, meningkat 123% dari tahun sebelumnya sebesar Rp100,95 miliar. Dari sisi rentabilitas, Direksi beserta jajaran manajemen lainnya juga telah menunjukkan kemampuannya dalam membukukan peningkatan laba bersih yang signifikan dari sebesar Rp19,46 miliar pada 2023 menjadi sebesar Rp27,40 miliar di tahun 2024.

Berdasarkan pencapaian tersebut di atas, kami menilai bahwa Direksi telah berupaya secara maksimal menjalankan operasional perusahaan dengan efisien dan efektif. Direksi beserta jajaran manajemen telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan produktivitas, mengelola risiko, dan berupaya maksimal untuk menerapkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dewan Komisaris secara aktif terlibat dalam pengawasan terhadap perumusan dan implementasi strategi perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Melalui pertemuan rutin, laporan keuangan berkala, dan evaluasi kinerja, Dewan Komisaris senantiasa mengupayakan secara maksimal dalam mengawasi Direksi agar selalu bertanggung jawab atas keputusan strategis yang diambil, dengan tetap memperhatikan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemangku kepentingan.

Terlihat bahwa disepanjang tahun 2024, Perseroan tetap tangguh dan solid. Di bawah kendali para jajaran Direksi, Perseroan telah mampu menunjukkan kemampuan dan pengalamannya dalam mengatasi kondisi yang serba menantang tersebut.

Oleh karena itu, Perseroan merasa penuh keyakinan dan optimisme dalam menatap tahun 2025 serta akan terus memperkuat manajemen risiko dan Transformasi digital. Selanjutnya, Dewan Komisaris meminta kepada jajaran manajemen untuk terus memperhatikan aspek kehati-hatian (*prudent*), profesionalisme, inovatif, dan selalu menjaga integritas untuk bisa mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Indonesia. Currently, MSME contribution to national export only reached 15.7% from total national export, still below Singapore (41%) and Thailand (29%).

Performance Assessment of the Board of Directors and Basis of Assessment

Functioning as the executor of shareholders' aspirations in carrying out the supervisory duty and providing direction on the policies and management of the Board of Directors towards the Company, the Board of Commissioners welcomes the performance achievements demonstrated by the Company throughout 2024. The Board of Directors has shown resilience and strategic sharpness that deserves appreciation in maintaining business performance results.

Based on audited data as of 31 December 2024, it was evident that there was an increase in operational performance. For the financial performance during the year 2024, guarantee realization as of 31 December 2024 was consequently recorded at Rp30.83 trillion or reaching 114% of the 2024 RKAP target of Rp26.97 trillion with 5,114,149 total guaranteed MSMEs and absorbed the workforce of 6,198,703 workers. In the meantime, the amount of claim weight as of 31 December 2024 was recorded at Rp124.01 billion, an increase of 123% from the previous year of Rp100.95 billion. On profitability perspective, the Board of Directors and other members of its management team have also showed their capabilities in logging a significant net profit increase of Rp19.46 billion in 2023 to Rp27.40 billion in 2024.

We assessed that the Board of Directors has strived to maximize the company's operations efficiently and effectively. The Board of Director and its management team have showed such high commitment in improving productivity, managing risks, and ensuring compliance with applicable regulations.

The Board of Commissioners is actively involved in supervising the formulation and implementation of the Company's strategy carried out by the Board of Directors. Through routine meetings, periodic financial reports, and performance assessments, the Board of Commissioners ensures that the Board of Directors is responsible for the strategic decisions undertaken, with keeping attention to the long interests of the Company and stakeholders.

Evidently, that throughout the year 2024, the Company remained resilient and solid. Under the control of the Board of Directors, the Company was able to show its capabilities and experiences in overcoming such challenging conditions.

The Company will face the year 2025 in full confidence and optimism as well as continue to strengthen its risk management and digital transformation. Subsequently, the Board of Commissioners asks the management to continue to pay attention to the aspects of prudence, professionalism, innovative, and always maintain integrity to achieve sustainable growth.



Peran Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Implementasi Strategi yang Diterapkan Direksi dan Frekuensi Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Fokus utama kami sebagai Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan yang cermat terhadap implementasi strategis yang dirumuskan oleh Direksi. Komitmen ini selaras dengan peran kami sebagai pengawas pengelolaan Perseroan, berupaya maksimal untuk menerapkan kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Pedoman Kode Etik Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan. Secara khusus, fungsi pengawasan dan pembinaan Dewan Komisaris dilaksanakan dengan tujuan untuk mengarahkan Perseroan agar senantiasa berada pada jalur yang benar dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Dewan Komisaris juga berupaya menjaga komunikasi intensif dengan Direksi untuk menerapkan fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha Perseroan agar lebih fokus dan terstruktur. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris turut andil dalam pengawasan ketat terhadap proses implementasi strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan secara rutin dengan fokus menyajikan informasi terkait isu-isu strategis terbaru dan kinerja Perusahaan. Pada periode ini, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat bersama Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali. Dalam setiap sesi rapat, Dewan Komisaris secara aktif menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat, saran, dan rekomendasi mengenai rencana bisnis yang akan ditetapkan dan disepakati bersama. Rekomendasi dari Dewan Komisaris merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses perumusan strategi Perusahaan. Strategi dan kebijakan strategis yang telah disepakati dan disetujui kemudian diartikulasikan ke dalam target kinerja, perencanaan operasional, program kerja dan pencapaiannya tergambar dalam *Key Performance Indicator (KPI)*.

Pemberian Rekomendasi kepada Direksi

Rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi terutama dalam rangka mengatasi tantangan ditahun mendatang, baik dari sisi keuangan maupun operasional Perusahaan, sebagai berikut:

- Menjaga reputasi perusahaan menjadi hal yang utama
- Transformasi digital secara bertahap melalui digitalisasi proses operasional.
- Fokus pada mitra usaha baru
- Pembagian tugas Direksi yang bekerja mencari bisnis (*frontliner*) dan yang bertugas untuk mengurus permasalahan internal perusahaan (*back office*).
- Perbaikan SOP disesuaikan dengan struktur organisasi dan penguatan GCG dengan selalu melibatkan fungsi manajemen risiko.

The Supervisory Role of the Board of Commissioners on the Strategies Implemented by the Board of Directors and the Frequency of Providing Advices to the Board of Directors

Our main focus, as the Board of Commissioners, is to conduct thorough supervision on the implementation of strategies established by the Board of Directors. This commitment is in line with our role as the supervisor of the Company's management, ensuring compliance with the Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Company's Code of Conduct and applicable laws and regulations, in order to achieve the Vision and Mission of the Company. Specifically, the supervisory and coaching functions of the Board of Commissioners are carried out with the objective to ensure the Company is on the right track and capable of continuous growth. The Board of Commissioners also strives to maintain intensive communication with the Board of Directors to ensure that supervision on the Company's business activities is more focused and structured. Throughout the year 2024, the Board of Commissioners took part in the strict supervision of the previously established strategic implementation process. Joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors are conducted regularly with the focus on presenting information related to the latest strategic issues and the Company's performance. In this period, the Board of Commissioners held 12 (twelve) joint meetings. In each meeting session, the Board of Commissioners actively took the role in supervising and providing advices, suggestions and recommendations on the business plan that will be established and mutually agreed. The recommendations from the Board of Commissioners is an inseparable part of the formulation process of the Company's strategy. Strategies and strategic policies agreed and approved will be articulated into performance targets, operational plans, work programs and achievements portrayed in the *Key Performance Indicator (KPI)*.

Providing Recommendations to the Board of Directors

Recommendations provided by the Board of Commissioners to the Board of Directors, especially in the context of overcoming challenges in the upcoming year both in the Company's financial and operational perspectives, are as follows:

- Maintain company's reputation as a main priority
- Digital transformation gradually through the digitization of operational processes
- Focus on new business partners
- Division of duties within the Board of Directors who work as front-liner and who work to manage the company's back office.
- Improvement of SOP in adjustment with the organizational structure and strengthening of GCG by continuously involving risk management function.

Pandangan Atas Prospek Usaha yang Disusun oleh Direksi

Dewan Komisaris menilai target 2025 yang diusulkan Direksi merupakan target yang cukup realistis. Hal tersebut juga bersamaan dengan beragam kebijakan yang dilakukan oleh manajemen dalam mendukung prospek usaha yang telah disusun. Lanskap perekonomian global dan domestik terus menghadirkan beragam tantangan dan peluang. Ketidakpastian yang masih ada dalam kondisi global mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi, yang merupakan faktor penting dalam lingkungan yang dinamis ini.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun 2025, memperkirakan sedikit penguatan menjadi 5.1%. Proyeksi ini juga dibayangi oleh risiko yang sedang berlangsung terkait dengan ketegangan ekonomi dan geopolitik. Sebaliknya, IMF memperkirakan produk domestik bruto (PDB) global akan meningkat 3.2% tahun depan, lebih rendah 0.1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya. Meskipun pertumbuhan global diramal tidak setinggi tahun lalu, kami tetap optimis akan potensi usaha Perseroan pada tahun 2025, diperkirakan akan tumbuh stabil. Tahun 2025 diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja investasi. Kepercayaan konsumen dan belanja diperkirakan akan tetap kuat, didukung oleh peningkatan mobilitas dan upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Berbekal proyeksi tersebut, Direksi melalui konsultasi dengan Dewan Komisaris telah mempertimbangkan dan menetapkan strategi bisnis berbasis manajemen risiko sehingga implementasi strategi tersebut lebih akurat dan terarah. Kami percaya bahwa pendekatan bisnis yang tangguh, adaptif, dan inovatif, yang berfokus pada kepuasan pelanggan, akan menjadi landasan keberhasilan persaingan di masa depan. Dewan Komisaris yakin akan prospek positif di tahun mendatang dimana kondisi pasar diharapkan lebih kondusif sehingga mampu mendongkrak kinerja Perseroan.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Peran kami sebagai Dewan Komisaris tidak hanya untuk mengupayakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan namun juga mengawasi dengan cermat proses yang mengarah pada hasil tersebut. Proses-proses ini harus selaras dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Pengelolaan Perusahaan yang berada di bawah pengawasan kami tidak hanya mematuhi undang-undang dan peraturan terkait, namun juga menunjukkan peningkatan progresif dalam kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) dalam operasionalnya. Peningkatan tersebut terlihat dari semakin kuat dan komprehensifnya mekanisme dan instrumen GCG yang diterapkan Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen terus meningkatkan praktik GCG untuk mempertahankan standar tertinggi tata kelola perusahaan, dengan berupaya maksimal dalam menerapkan praktik GCG tersebut dengan efektif namun juga transparan dan akuntabel. Kami

Views on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

The Board of Commissioners views that the 2025 targets proposed by the Board of Directors are quite realistic. This also coincides with the various policies implemented by the management to support the set business prospects. The landscape of global and domestic economy continue to present a variety of challenges and opportunities. Uncertainties that remain in the global conditions affect the level of consumption and investment, which are important factors in this dynamic environment.

The International Monetary Fund (IMF) projects the increasing economic growth in 2025 will slightly strengthened by 5.1%. This projection also overshadowed by ongoing risks related to economic and geopolitical tensions. On the other hand, IMF estimates that gross domestic product (PDB) will increase by 3.2% in the coming year, lower by 0.1 point percent from the previous projection. Although global growth's estimation will not be as high as last year, we remain optimistic of the Company's business potential in 2025, estimated to grow steadily in 2025 and bring about some impact on investment performance. The consumers' trust and spending are estimated to remain strong, supported by the increase in mobility and government's efforts to maintain the people's buying power.

Equipped with these projections and through consultation with the Board of Commissioners, the Board of Directors have considered and determined business strategies based on risk management that implementation of the strategies will be more accurate and directed. We believe that a resilient, adaptive and innovative business approach that focus on customer satisfaction will be the foundation for future competitive success. The Board of Commissioners is confident with the positive prospects in the coming year where the market conditions will be more conducive that it will jack up the Company's performance.

Views of the Board of Commissioners on the Implementation of Good Corporate Governance

Our role as the Board of Commissioners is not only to ensure the achievement of desired results but also to closely monitor the processes leading to those results. These processes must be in line with applicable regulations and procedures. The Company's management under our supervision not only complies with related laws and regulations, but also shows progressive improvement in the quality of good corporate governance (GCG) implementation in operations. This improvement is visible from the increasingly strong and comprehensive GCG mechanism and instruments implemented by the Company.

The Company is committed to continue improving GCG practices to maintain the highest standard of corporate governance, by ensuring that our process is not only effective but also transparent



percaya bahwa ketekunan dalam menerapkan dan meningkatkan praktik GCG merupakan bagian integral dari pertumbuhan dan kesuksesan Perusahaan yang berkelanjutan.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Di tahun 2024, Dewan Komisaris memiliki komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit. Kami menilai Komite Audit telah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sesuai bidang masing-masing. Kami berharap agar Komite Audit dapat menjaga standar kinerja tinggi dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat terus memberikan kontribusi positif yang bermakna bagi keberlanjutan dan keberhasilan Perseroan.

Perubahan Susunan Komposisi Dewan Komisaris

Sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris, yaitu Bapak Arief Goentoro digantikan oleh Bapak Andrianto Wahyu Adi selaku Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 871 Tahun 2023 dan 527/072 tanggal 15 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Perseroan. Bapak Andrianto Wahyu Adi dinyatakan lolos fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 7 Maret 2024 dan ditetapkan dalam Akta Nomor 37 tanggal 15 Maret 2024 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah).

Apresiasi

Apresiasi terdalam kami tujuikan kepada segenap jajaran Direksi, karyawan, Badan Pembina BUMD yang terus memberikan pembinaan berkala kepada Jamkrida dan seluruh badan pengawas yang terkait, pihak Terjamin, mitra usaha, dan pemangku kepentingan lainnya yang senantiasa mendukung Perseroan untuk tumbuh dan berkembang. Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa keberhasilan Perusahaan di masa depan akan sangat tergantung dari kesungguhan semua pihak untuk bersama-sama membawa Perseroan ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Dewan Komisaris akan selalu berkomitmen untuk melandaskan diri pada praktik bisnis terbaik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Perusahaan.

and accountable. We believe that persistence in implementing and improving GCG practices is an integral part of the Company's sustainable growth and success.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

In the year 2024, the Board of Commissioners retains a subordinated committee, namely the Audit Committee. We assessed the Audit Committee as having fulfilled its duties and responsibilities in accordance with the set standards and in line with its respective scope of field. We hope that the Audit Committee will be able to maintain its high performance standard in carrying out its duties that its meaningful positive contributions will continue to endorse the Company's sustainability and success.

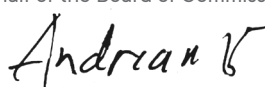
Change in the Composition of the Board of Commissioners

Until 31 December 2024, a change was made in the composition of the Board of Commissioners, namely as follows: Arief Goentoro was replaced by Andrianto Wahyu Adi as President Commissioner based on the Decision of the Shareholders No. 871 of Year 2023 and No. 527/072 dated 15 December 2023 regarding the Dismissal and Appointment of Commissioners of the Company. Andrianto Wahyu Adi was confirmed to have passed the fit and proper test from the Financial Services Authority (OJK) on 7 March 2024 stipulated in Deed No. 37 dated 15 March 2024 regarding the Statement of the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Regional Company).

Appreciation

We extend our deepest appreciation to all members of the Board of Directors, employees, BUMD Advisory Board who continue to periodically provide guidance to Jamkrida and all related supervisory bodies, Guaranteed parties, business partners and other stakeholders who always support the Company to grow and develop. The Board of Commissioners is confident that the Company's future success will be highly dependent on the sincerity of all parties to jointly lead the Company in a better direction into the future. The Board of Commissioners will always be committed to base itself on best business practices in an effort to realize the Company's vision and mission.

Atas nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners


Andrianto Wahyu Adi
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors Report

Agus Supriadi

Direktur Utama
President Director

“Melanjutkan strategi yang sudah dikembangkan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024, Perseroan bersikap *agile* dan terus menggali potensi bisnis ke depan.”

“Continuing the developed strategy in the past years, in 2024, the company remained agile and continue to explore future business potentials”





Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunianya PT JAMKRIDA Jakarta ("Perseroan") mampu menghadapi dinamika bisnis yang terjadi di tahun 2024. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan dan mempercepat laju pertumbuhan Perseroan. Di tahun 2024, Perseroan telah menjalankan strategi dan menerapkan kebijakan strategis dalam menjalankan operasional usaha. Seluruh Perseroan telah kami libatkan untuk terus memberikan kontribusi dan kinerja terbaik untuk menggapai tujuan Perusahaan. Direksi beserta jajarannya sudah sangat baik melakukan pengelolaan Perusahaan, sehingga di tahun 2024 Perseroan mencatatkan hasil pencapaian dengan kinerja pertumbuhan.

Selain itu, segala upaya perbaikan telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas Perseroan. Pelaksanaan bisnis telah berjalan dengan tata kelola yang baik dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Seluruh organ telah menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sehingga dapat dipastikan bahwa pelaksanaan operasional dapat berjalan dengan baik. Hal ini diharapkan, kinerja terbaik yang dilakukan oleh seluruh insan Perseroan dapat memberikan dampak positif untuk keberlanjutan bisnis Perusahaan. Dengan demikian, izinkan kami selaku jajaran Direksi menyampaikan informasi dan kondisi terkini mengenai Perusahaan. Melalui Laporan Tahunan ini, kami akan sampaikan kinerja keuangan Perseroan selama tahun 2024 dan aktivitas pengelolaan operasional Perseroan selama tahun 2024. Kami berharap para pemegang saham, dan pemangku kepentingan Perusahaan dapat mengetahui, serta memahami informasi mengenai Perseroan di tahun 2024.

Dinamika Ekonomi Global dan Nasional

Ketahanan ekonomi dunia terindikasi membaik. Seperti dikutip dari laporan World Economic Outlook edisi April 2024, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global stagnan di level 3,2% secara tahunan (*year on year*) untuk tahun ini. Sedangkan perekonomian Amerika Serikat tumbuh 2,5% YoY seiring solidnya kinerja ekonomi domestik. Dinamika ekonomi keuangan global pada 2024 berubah sangat cepat dengan kecenderungan ke arah negatif akibat eskalasi perang di Timur Tengah dan ketegangan yang makin tinggi. Kebijakan moneter AS yang mempertahankan suku bunga lebih lama dan penundaan pemangkasan suku bunga serta tingginya *yield* US *Treasury* menyebabkan arus modal portofolio keluar dari negara berkembang pindah ke AS. Dan ini menyebabkan penguatan dolar AS dan melemahnya berbagai mata uang dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi global tetap stabil dan diperkirakan berkisar 2,5%, peningkatan sebesar 0,2% dari proyeksi IMF pada Oktober 2024. Perkiraan pertumbuhan ekonomi global terus membaik hingga 3,2% di 2024. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di AS, di mana kebijakan moneter ketat masih bekerja dan menunggu untuk diturunkan.

Our praise and gratitude to the presence of God Almighty, for His grace and blessings that PT JAMKRIDA Jakarta ("Company") was able to face the business dynamics that occurred in 2024. Various efforts we have extended to improve and accelerate the Company's growth rate. In the year 2024, the Company implemented strategies and strategic policies in running business operations. We have involved the entire Company to continuously contribute and extend good performance to achieve Company goals. The Board of Directors and the management team were superb in managing the Company, that in 2024 the Company recorded achievement results with growth performance.

Furthermore, all improvement efforts were carried out to increase the Company's quality. Business implementation was conducted with good governance and with attention to the principle of prudence. All Company organs have exerted their functions in accordance with their respective duties and responsibilities, thus, it is ensured that operational implementation can be properly carried out. It is hoped that the best performance executed by all Company personnels can provide positive impact on the sustainability of the Company's business. Accordingly, allow us, as the Board of Directors, to convey the most recent information and conditions of the Company. Through this Annual Report, we provide the Company's financial performance and operational management activities during the year 2024. We hope that the Company's shareholders and stakeholders will be well informed and comprehend the information provided on the Company in 2024.

Global and National Economic Dynamics

Indications show that global economic resilience was recovering. As quoted in the World Economic Outlook report of April 2024 edition, IMF projected that world economic growth would remain stagnant at 3.2% level annually for the year (*year on year*). While US economy grew by 2.5% YoY in line with solid domestic economic performance. The dynamics of the global financial economy in 2024 rapidly changed with a negative tendency due to the escalation of the war in the Middle East and the increasing tensions. The US monetary policy of maintaining interest rates for longer period and delaying interest rate cuts as well as the high US treasury yields have caused a portfolio of capital outflow from developing countries to the US. And this resulted in the strengthening of the US dollar and the weakening of currencies from various other countries, including Indonesia.

Global economic growth remained stable and estimated at around 2.5%, an increase of 0.2% from IMF's projection in October 2024. Estimation for global economic growth continued to improve up to 3.2% in 2024. IMF estimated a better economic growth in the US, where tight monetary policy remained in placed and waiting to be lifted.

Setelah melewati berbagai dinamika sepanjang 2024, halang rintang ekonomi Indonesia di tahun ini pun dinilai masih akan sangat menantang. Sejumlah lembaga pun memproyeksi pertumbuhan ekonomi Tanah Air masih belum akan beranjak dari angka 5%. Dalam laporannya yang dirilis pada Oktober 2024, Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5,1%. Sama seperti prediksi Bank Dunia

Tingkat pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2024 didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali di rentang sasaran 2,5% $\pm$ 1% yaitu 1,71% di bulan Oktober 2024 dengan rasio utang yang terkendali pada 39,4% di bulan Juni 2024. Kinerja ekonomi Indonesia juga tetap solid, bahkan lebih baik dibandingkan negara maju atau negara berkembang lainnya, seperti Singapura (4,1%), Arab Saudi (2,8%), dan Meksiko (1,5%). Seluruh komponen pengeluaran juga mengalami pertumbuhan positif. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 4,91% dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,55% yang didorong oleh peningkatan di sektor hotel dan restoran. Sementara itu, PMTB tumbuh sebesar 5,15%, yang didorong investasi pemerintah dan swasta, terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Sektor perbankan Indonesia kembali menunjukkan daya tahan di tengah ketidakpastian global dan tantangan ekonomi domestik. Pertumbuhan perbankan di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan tren positif, dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penurunan rasio kredit bermasalah. DPK tercatat tumbuh sebesar 7,54% YoY, dan rasio kredit bermasalah menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 9,82%.

Di sisi lain, perkembangan UMKM Tanah Air sepanjang tahun 2024 ditandai dengan peningkatan jumlah UMKM yang bertransformasi digital. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), berkomitmen memajukan sektor UMKM melalui langkah konkret berupa Program UMKM *Level Up*. Melalui program itu, pemerintah mempersiapkan UMKM untuk bersaing di pasar global. Untuk itu Kementerian Kominfo telah merancang untuk membantu pelaku UMKM di Indonesia agar lebih siap dalam menghadapi tantangan era digital, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan intensif untuk proses on boarding ke platform digital.

Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 65 juta unit UMKM dimana provinsi yang memiliki jumlah UMKM terbanyak adalah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 1,1 juta unit UMKM. UMKM ini tersebar di berbagai sektor, termasuk kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknologi digital dan sektor perdagangan besar dan eceran serta pertanian. Meskipun di Tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan berdampak negatif pada UMKM, namun tidak menurunkan penyaluran kredit yang dilakukan perbankan terhadap UMKM, sehingga pertumbuhan kredit UMKM di tahun 2024 tetap tumbuh sebesar 4,76% di banding tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, UMKM DKI Jakarta pun tumbuh sebesar 15,54% YoY.

Having gone through various dynamics throughout the year 2024, Indonesia's economic obstacles during the year were considered very challenging. A number of institutions projected that Indonesia's economic growth would remain at 5%. In its report released in October 2024, the International Monetary Fund (IMF) predicted that Indonesia's economy would grow to about 5.1%. Similarly as predicted by the World Bank.

The economic growth rate in 3rd Quarter of 2024 was supported by the low and controlled inflation in the target range of 2.5% + 1%, namely 1.71% in October 2024 with a controlled debt ratio of 39.4% in June 2024. Indonesia's economic performance also remained solid, even better than the developed countries or other developing countries, such as Singapore (4.1%) Saudi Arabia (2.8%), and Mexico (1.5%). All components of expenditure also grew positively. Household consumption increased by 4.91% and became the highest source of growth of 2.55% driven by the improvement in the hotels and restaurants sector. Meanwhile, PMTB grew by 5.15%, driven by both government and private investments, especially in infrastructure development.

Indonesia's banking sector showed resilience amidst global uncertainty and domestic economic challenges. Growth in Indonesia banking sector in 2024 reflected a positive trend, with increment in Third Party Funds *DPK) and a decline in non-performing credit ratio. DPK was recorded with a growth of 7.54% YoY, and the non-performing credit ratio was showing a downward trend to 9.82%.

On the other hand, the country's MSME development throughout the year 2024 was indicated with an increase in the number of MSMEs that transformed into digital. The Government, through the Ministry of Communication and Information (Kominfo), is committed to advancing MSME sector by means of concrete steps in the form of MSME Level Up Program. Through this program, the government prepared MSME to compete in the global market. For this purpose, the Kominfo Ministry designed to assist MSME members in Indonesia to be more prepared in facing the challenges of the digital era, by providing intensive training and mentoring for on-boarding process to the digital platform.

Currently, Indonesia retains more than 65 million units of MSME whereby the province with the most number of MSME is DKI Jakarta, namely 1.1 million MSMEs. These MSMEs are spread in various sectors, including culinary, fashion, handicraft, to digital technology and wholesale and retail trade as well as agriculture. Although amidst uncertain global economic conditions and negatively affecting MSMEs, however, this did not reduce the level of banks' credit distribution to MSMEs, that MSME credit in 2024 remained with a growth of 4.76% compared to the previous year. In line with this, MSME of DKI Jakarta as well grew by 15.54% YoY.



Pada awal 2024, Pemerintah telah mengeluarkan pengumuman berakhirnya stimulus restrukturisasi kredit perbankan. Kebijakan tersebut konsisten dengan pencabutan status pandemi Covid-19 oleh Pemerintah pada Juni 2023, serta mempertimbangkan perekonomian Indonesia yang telah pulih dari dampak pandemi, termasuk kondisi sektor riil. Namun kebijakan tersebut memberikan dampak meningkatnya kredit macet diperbankan sehingga berdampak pada penyaluran kredit UMKM terutama kredit program yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu KUR penyaluran kredit menurun dibandingkan tahun 2023 secara nasional dampak tersebut berpengaruh juga terhadap penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Jamkrida mengalami penurunan. Kendati demikian, Perseroan tetap optimis bahwa kinerja produksi KUR ini akan terus ditingkatkan kedepannya.

Kebijakan Strategis dan Implementasinya

Dalam rangka memberikan kinerja Perseroan yang positif namun juga berdampak besar bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, Direksi menyusun kebijakan strategis yang telah disesuaikan dengan berbagai pertimbangan penting. Setiap tahun, Direksi menetapkan target usaha, anggaran, strategi dan kebijakan strategis dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) berdasarkan gambaran umum kondisi eksternal dan internal.

Kehadiran kebijakan strategis ini dipandang krusial dalam menjalankan pengelolaan Perseroan dan memanfaatkan berbagai peluang yang timbul seiring dengan perkembangan kondisi eksternal dan internal Perseroan.

Beberapa kebijakan strategis yang telah disusun dan diimplementasikan secara menyeluruh antara lain meningkatkan implementasi manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan standar pencapaian risiko keuangan, mempertahankan peringkat Perseroan, serta memaksimalkan sistem Teknologi Informasi (TI) dalam rangka memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, kebijakan strategis yang telah dijalankan oleh Perseroan antara lain penjaminan produktif terutama untuk jangka pendek dan penambahan mitra-mitra baru baik Bank Swasta maupun Bank BUMN yang telah menaikkan penjaminannya di Jamkrida di tahun 2024.

Di sisi lain, posisi *gearing ratio* per 31 Desember 2024 tercatat sebesar 21,87%, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 38,21%. Penurunan *gearing ratio* tersebut merupakan output dari langkah Direksi dalam memastikan akan pemantauan ketat terhadap posisi *gearing ratio* Perseroan untuk menjamin tingkat kesehatan Perseroan tetap sehat.

Tantangan yang dihadapi Perseroan sepanjang tahun 2024 yaitu terkait klaim, yang mana jika produksinya tinggi, linier klaimnya juga tinggi. Jika klaim yang dihadapi Perseroan tinggi maka akan ada kesulitan dalam likuiditas. Dalam memberikan jaminannya, kami juga melakukan pembagian ke Reas yang kami sebut *Interest Sharing* (berbagi risiko), sehingga pada saat ada

At the beginning of 2024, the Government issued an announcement ending the banking credit restructuring stimulus. This policy was consistent with the lifting of the Covid-19 pandemic status by the Government in June 2023, and with consideration of Indonesia's economy already recovering from the impact of the pandemic, including the real sector. However, the policy has caused impact on the increasing banking's non-performing credits that it affected MSME credit distribution, especially the credit program established by the government, namely KUR, that its credit declined nationally compared to 2023, and nationally, this impact also affected the guarantee of Jamkrida People's Business Credit (KUR) which experience a decline. Nevertheless, the Company remained optimistic that, going forward, KUR production performance will continue to improve.

Strategic Policy and Its Implementation

In the effort to providing the Company's positive performance yet also significantly impact the shareholders and stakeholders, the Board of Directors prepared strategic policies that have been adjusted to various important considerations. Every year, the Board of Directors determines the business targets, budget, strategies and strategic policies in the form of Work Plan and Budget (RKAP) based on the overview of external and internal conditions.

The presence of such strategic policies is viewed as crucial in carrying out the Company's management and taking advantage of the opportunities that arise in line with developments of the Company's external and internal conditions.

Several strategic policies prepared and implemented, among others, were on improving the implementation of risk management and good corporate governance, improving financial risk achievement standards, maintaining the Company's rating, and maximizing the Information Technology (IT) system in order to provide the best services. In addition, strategic policies implemented by the Company included productive guarantees especially for the short-term and the addition of new partners, both Private Banks and State-Owned Banks, which increased their guarantees in Jamkrida in 2024.

On the other hand, the *gearing ratio* position as of 31 December 2024 was noted at 21.87%, a decrease from the previous year's of 38.21%. This decline in *gearing ratio* was the output from the Board of Directors' steps in ensuring strict monitoring of the Company's *gearing ratio* position to ensure the Company's soundness level to remain as sound.

Challenges faced by the Company throughout the year 2024 were related to claims, that if production is high, then linear claims are also high. If claims faced by the Company are high then difficulties in liquidity emerge. In providing guarantees, we also distribute to Reas, referred to as *Interest Sharing*, that when there is a claim, then it is shared by 60:40, 60% covered by JAMKRIDA and 40%

klaim, maka sharing nya yaitu 60:40, 60% ditanggung JAMKRIDA dan 40% ditanggung Reas, termasuk juga Imbal Jasa Penjaminan (IJP), sehingga Perseroan melakukan selektif ketat, mitigasi risiko dengan menyeleksi produk-produk yang berkualitas daripada fokus pada produk yang tidak memberikan impact signifikan bagi Perseroan.

Lebih lanjut, tantangan lainnya terkait risiko gagal bayar oleh pihak Terjamin. Apabila kondisi ini terjadi, maka beban klaim yang ditanggung Perseroan meningkat. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan secara terus menerus melakukan perbaikan atau pembenahan syarat dan ketentuan model bisnis dan imbal jasa penjaminan yang disesuaikan dengan asas prinsip kehati-hatian yang disesuaikan dengan *risk profile* objek tertanggung. Selain itu, Perseroan juga menjalin kerja sama dengan perusahaan asuransi jiwa untuk penjaminan jiwa Terjamin.

Seluruh kebijakan strategis tersebut diimplementasikan dengan komitmen penuh oleh Direksi dan didukung oleh partisipasi dari berbagai pihak, terutama Manajemen dan seluruh insan Perseroan. Direksi mendorong Perseroan untuk dapat memiliki kemampuan dalam penyesuaian diri dan adaptasi secara fleksibel pada upaya menemukan penyelesaian terbaik dalam pembuatan keputusan tanpa mengabaikan tujuan yang telah dimiliki Perseroan.

Dari implementasi kebijakan strategis ini, Perseroan memprioritaskan dan memastikan perbaikan kondisi keuangan, secara umum tantangan tersebut dapat disikapi dan menjaga perbaikan perusahaan tetap pada *track*-nya. Dengan terus berkembangnya kondisi perekonomian dan industri keuangan nasional, Direksi optimis bahwa kinerja positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan hingga seterusnya di masa depan.

Peranan Direksi dalam Perumusan Kebijakan Strategis Perseroan

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi tidak hanya bertanggung jawab dalam perumusan strategi, namun juga memegang peranan penting dalam implementasi strategi-strategi tersebut agar dijalankan sesuai rencana dan tujuannya. Untuk memastikan prosesnya berjalan dengan lancar, Direksi senantiasa meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada seluruh pihak terkait, terutama untuk melakukan proses akseptasi risiko dengan prinsip manajemen risiko yang baik dan yang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat namun tepat.

Direksi juga mengupayakan untuk selalu responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan perubahan kebijakan sehingga implementasi dapat tetap berjalan kendati situasi terus bergerak secara dinamis. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, Direksi akan mengambil tindakan korektif berupa perubahan strategi, penyesuaian rencana, atau perbaikan proses sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari Perseroan. Disamping itu, Kepala Divisi Perseroan juga turut berperan dalam menetapkan perumusan kebijakan strategi perusahaan. Setiap kepala Divisi diberikan wewenang untuk memberikan masukan kepada Direksi untuk

by Reas, including the Guarantee Service Fee (IJP), so that the Company conducts tight selection, risk mitigation by selecting products that are of quality instead of focusing on products that do not generate significant impact on the Company.

Furthermore, other challenges were related to risks of default by the Guaranteed party. When this occur, then the weight of the claim covered by the Company is higher. To mitigate this risk, the Company continuously strives to improve or revise the terms and conditions of the business model and guarantee service fees that are adjusted to the principles of prudence and adjusted to the risk profile of the insured object. Apart from that, the Company also maintain cooperation with life insurance companies to assure the life of the Guaranteed.

All strategic policies are implemented with full commitment by the Board of Directors and supported by participation from various parties, especially the Management and all Company personnels. The Board of Directors encourages the Company to be able to have the ability to adjust and adapt flexibility in the effort to find the best solution in decision-making without ignoring the Company goals.

From the implementation of this strategic policy, the Company prioritizes and ensures improvements in financial conditions, in general, these challenges can be addressed and maintained to keep company's improvements on track. With the increasing advancement in the economic and financial industry's conditions, the Board of Directors is optimistic that positive performance can be continuously maintained and improved in times ahead.

The Role of the Board of Directors in Formulating the Company's Strategic Policies

In carrying out its duties, the Board of Directors is not only responsible in formulating strategies, but also plays an important role in implementing these strategies so that they are carried out in accordance with plans and objectives. To ensure the process runs smoothly, the Board of Directors always improve communication and coordination with all related parties, especially to carry out risk acceptance process with the principle of good risk management and that requires quick yet accurate decision-making.

The Board of Directors also strives to always remain responsive to changes in the business environment and changes in policies that implementation can remain on course although the situation keeps moving dynamically. If discrepancies are found, the Board of Directors will take corrective actions in the form of strategy change, plan adjustment, or process improvement in accordance with the prevailing conditions and needs of the Company. Apart from that, the Company's Division Heads also take part in determining company strategic policies. Every Division Head is given the authority to contribute feedbacks to the Board of



menetapkan suatu kebijakan, dan selanjutnya Direksi akan menindaklanjuti kebijakan yang diusulkan tersebut. Dengan demikian, implementasi strategi Perseroan bisa menjadi lebih terarah dan berjalan dengan terencana sehingga memungkinkan Perseroan untuk tetap relevan dengan situasi bisnis dan tetap kompetitif dalam pasar yang terus berubah.

Perbandingan antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan Tahun 2024

Kinerja Perseroan di tahun 2024 terpantau mencatatkan hasil yang memuaskan. Di tengah kondisi yang penuh tantangan sekaligus peluang yang beragam di sepanjang tahun, Perseroan mampu mempertahankan performanya dengan strategi yang matang dan komitmen yang kuat dari seluruh insan Perseroan.

Untuk tahun 2024, Perseroan telah menetapkan fokus bisnis yang jelas untuk memperkuat posisi di pasar dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan menegaskan komitmennya pada pemberian layanan terbaik. Secara keseluruhan kinerja bisnis Perseroan mengalami peningkatan. Kinerja penjaminan Perseroan per 31 Desember 2024 dibukukan mencapai Rp30,83 triliun atau 114% dari target RKAP 2024 sebesar Rp26,97 triliun dengan realisasi serapan UMKMK yang dijamin sebanyak 5.114.149 UMKMK dan tenaga kerja yang terserap sebanyak 6.198.703 tenaga kerja. Pendapatan IJP/IJK secara kas tercatat sebesar Rp339,78 miliar atau 95% dari target RKAP 2024 sebesar Rp357,71 miliar. Pengakuan IJP/IJK dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, diakui secara *accrual basis* sebesar Rp324,90 miliar atau terealisasi 112% dari anggaran 2024 sebesar Rp288,83 miliar, sesuai jangka waktu kredit yang dijamin.

Peningkatan kinerja penjaminan sepanjang tahun ini telah mendorong kenaikan aset Perseroan menjadi sebesar Rp1.150 miliar di akhir 2024 atau tercapai 102% dari target RKAP 2024 sebesar Rp1.131 miliar. Dari sisi *bottom line*, Perseroan berhasil mencatatkan peningkatan kinerja laba bersih yang signifikan sehingga diperoleh sebesar Rp27,40 miliar, naik 41% dari tahun sebelumnya senilai Rp19,46 miliar.

Dari sisi operasional, Realisasi beban operasional Perseroan sebesar Rp13,51 miliar atau 81% dari target RKAP 2024 sebesar Rp16,72 miliar. Realisasi Beban SDM Perseroan sebesar Rp24,53 miliar atau 95% dari target RKAP 2024 sebesar Rp25,72 miliar.

Melalui implementasi berbagai inisiatif strategi bisnis sebagaimana diuraikan sebelumnya, Perseroan tidak hanya berhasil menjaga tingkat kesehatan keuangan di level yang sehat, melainkan juga mampu mewujudkan kinerja operasional yang positif yang tercermin dari masuknya mitra-mitra baru di luar sinergi SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank BUMN, Bank Swasta serta Mitra Non Bank juga turut berkontribusi dalam mewujudkan kinerja operasional yang positif yaitu dalam meningkatkan produksi pada *custom bond* dan *surety bond*.

Directors to determine a policy, and subsequently the Board of Directors will follow-up with the recommended strategies. Thus, implementation of the Company's strategies may be more directed and run as planned that allows the Company to remain relevant with the business situation and remain competitive in the continuously changing market.

Comparison Between Results Achieved and Targeted in 2024

The Company's performance in 2024 is said to have recorded satisfactory results. Amidst conditions full of challenges and diversified opportunities throughout the year, the Company was able to maintain performance with mature strategies and strong commitment from personnels in the Company.

For the year 2024, the company set its clear business focus to strengthen its position in the market and improve its competitive excellence by affirming its commitment to providing best services. Overall, the Company's business performance accelerated. The Company's guarantee performance as of 31 December 2024 was recorded at reaching Rp30.83 trillion or 114% of 2024 RKAP target of Rp26.97 trillion with the realization of guaranteed MSME absorption of 5,114,149 MSMECOs and the absorbed workforce of 6,198,703 workers. IJP/IJK cash revenue was recorded at Rp339.78 billion or 95% of 2024 RKAP target of Rp357.71 billion. Recognition of IJP/IJK was based on applicable financial accounting standards, recognized on an accrual basis of Rp324.90 billion or realized by 112% of the 2024 budget of Rp288.83 billion, according to the guaranteed credit term.

Improvement in guarantee performance through the year was endorsed by the increase in the Company's assets to Rp1,150 billion by the end of the year 2024 or 102% of the 2024 RKAP target of Rp1,131 billion. From the bottom line perspective, the Company successfully recorded a significant net profit performance increase reaching Rp27.40 billion, a 41% increase from the previous year of Rp19.46 billion.

From operational perspective, realization of the Company's operational expenses was noted at Rp13.51 billion or 81% of the 2024 RKAP target of Rp16.72 billion. Realization of the Company's HR Expense was Rp24.53 billion or 95% of the 2024 RKAP target of Rp25.72 billion.

Through the implementation of various business strategic initiatives, the Company not only managed to maintain its financial soundness at a healthy level, but also capable of manifesting a positive operational performance which is reflected from the entry of new partners outside the synergy of SKPD and Regionally-Owned Enterprises (BUMD) such as BUMN Banks, Private Banks and Non-Bank Partners that also contributed to actualizing positive operational performance, namely in increasing production of custom bonds and security surety bonds.

Selain kinerja yang dijabarkan di atas, Jamkrida juga memperoleh pendapatan dari investasi dalam bentuk deposito, obligasi dan reksadana. Pada tahun 2024, Jamkrida memperoleh pendapatan dari investasi yaitu sebesar Rp49,25 miliar, atau tercapai 138% dari target RKAP 2024 sebesar Rp35,76 miliar. Subrogasi juga berperan penting dalam menambah pendapat perusahaan, subrogasi *own risk* mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 25%.

Pencapaian kinerja Perseroan sepanjang tahun ini juga telah membuahkan beberapa penghargaan bergengsi dari pihak eksternal, antara lain:

1. TOP GRC Award 2024 # 4 Star
2. The Most Committed GRC Leader 2024

Beberapa pembenahan mendasar yang masih terus disempurnakan khususnya untuk lingkup Tata Kelola Perusahaan, penerapan prinsip Manajemen Risiko yang lebih menyeluruh, pemutakhiran *standard operating procedure* (SOP), integrasi proses kerja dengan teknologi informasi dan pemenuhan secara kuantitatif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diyakini memberikan penguatan dan lebih memberikan konsistensi pencapaian kinerja perusahaan dalam jangka waktu panjang.

Perseroan dipandang telah bergerak ke arah yang positif selama tahun 2024. Direksi mengawasi dengan cermat perbandingan antara hasil yang dicapai dan target yang telah ditetapkan pada awal tahun untuk menjaga laju Perseroan tetap positif. Direksi secara rutin mengevaluasi pencapaian kinerja Perseroan dan kami dengan bangga menyampaikan bahwa target Perseroan telah berhasil melampaui batas target. Sementara untuk laba tahun berjalan dan ekuitas Perseroan terpantau sudah tumbuh sangat baik mendekati target proyeksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Direksi berterima kasih kepada seluruh karyawan atas kontribusi mereka dalam pencapaian ini, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja Perseroan ke depan.

Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik Sepanjang 2024

Selain itu, Perseroan juga meningkatkan profesionalisme dan pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan penilaian kinerja yang lebih objektif, transparan dan wajar, serta menyesuaikan struktur organisasi yang efisien dengan fungsi, sistem dan pertanggungjawaban yang jelas. Sejalan dengan itu, Perseroan juga mengeluarkan pakta integritas setiap tahunnya untuk ditandatangani oleh seluruh Insan Perseroan sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan tugas dengan penuh integritas. Perseroan juga berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) melalui penerapan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam kegiatan perusahaan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penyuapan di lingkungan Perseroan. Penerapan SMAP ini bertujuan untuk meningkatkan program kepatuhan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan guna mengelola risiko penyuapan dan meminimalisir insiden penyuapan.

Aside from the above described performance, Jamkrida also acquired income from investment in the form of deposits, bonds and mutual funds. In 2024, Jamkrida recorded an income from investments at the amount of Rp49.25 billion, or reaching 138% of the 2024 RKAP target of Rp35.76% billion. Subrogation also played an important role in contributing to the company's income, own-risk subrogation inclined by 25% from the previous year 2023.

The Company's performance achievements throughout the year have also resulted in several prestigious awards from external parties, including the following:

1. TOP GRC Award 2024 # 4 Star
2. The Most Committed GRC Leader 2024

Several fundamental improvements still being refined, especially in the scope of Corporate Governance, a more comprehensive implementation of the Risk Management principle, update of the standard operating procedures (SOP), integration of the work processes with information technology and quantitative fulfillment and quality improvement of the human resources, are believed to provide strength and more consistency in company performance achievements in the long term.

The Company is viewed to have been moving in a positive direction during the year 2024. The Board of Directors meticulously supervised the comparison between results achieved and targets set at the beginning to maintain the Company's positive track. The Board of Directors routinely assessed the Company's performance achievement and we proudly convey that the Company's targets have successfully exceeded the target limit. In the meantime, the Company's current year's profit and equity are seen to have grown remarkably, nearing the previously set projection targets. The Board of Directors is grateful to all employees for their contribution in achieving this, and we are committed to continue to improve the Company's performance ahead.

Good Corporate Governance Practices Throughout 2024

Moreover, the Company also enhanced the professionalism and development of the human resources by conducting a more objective, transparent and fair performance assessment, as well as by adjusting the efficient organizational structure with clear function, system and accountability. In line with that, the Company also issued the integrity pact every year to be signed by all Company Personnels as a form of commitment in carrying out assigned duties with full integrity. The Company is also committed to apply the Anti-Bribery Management System (SMAP) through the implementation of ISO 37001:2016 Certificate regarding Anti-Bribery Management System in companies' activities to prevent and eradicate corruption and fraud within the Company. This implementation of SMAP was intended to improve the compliance program in identifying, preventing and detecting frauds in order to manage fraud risks and minimize fraud incidents.



Dalam rangka membangun lingkungan bisnis yang sehat, berintegritas, dan memiliki reputasi baik menjadi BUMD terpercaya yang memberikan layanan berkualitas, Perseroan telah Menyusun Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) sebagai sarana pelaporan guna menjaga kualitas dan integritas Perseroan. WBS berfungsi sebagai saluran untuk melaporkan pengaduan terkait tindakan dengan indikasi pelanggaran hukum, dugaan kecurangan, pelanggaran kode etik, atau pelanggaran benturan kepentingan yang mungkin terjadi di lingkungan Perseroan. Perseroan memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran yang disampaikan melalui WBS akan diterima dengan baik tanpa terkecuali, dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Langkah-langkah yang dilakukan tersebut di atas dalam rangka menerapkan tata Kelola Perusahaan yang baik bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pemegang saham dengan selalu melakukan pengkinian data/informasi material dan relevan secara transparan, akurat, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Perseroan juga memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan, dengan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta melaksanakan hubungan usaha yang sehat dan bertanggung jawab.

Prospek Usaha

Berbagai dinamika global seperti perang dagang dan suku bunga the Fed akan terus menjadi faktor yang turut memengaruhi perkembangan perekonomian nasional ke depan, dengan risiko berupa volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, meningkatnya suku bunga, kendala rantai pasok global, hingga kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim. Perang dagang Amerika dan China masih memanas. Perang dagang tersebut berpotensi berdampak negatif pada perekonomian Indonesia, seperti memperbesar defisit perdagangan dan melemahkan nilai tukar rupiah. Disamping itu, kebijakan moneter The Fed dalam penentuan suku bunga juga sangat mempengaruhi aliran modal global dan mempengaruhi pasar saham Indonesia. Lebih lanjut, ke depan risiko terkait penentuan suku bunga The Fed akan terus dicermati.

Kondisi-kondisi tersebut mendorong prospek ekonomi global diproyeksikan hanya tumbuh pada kisaran 3,2% pada 2024 dan 2025. Meski demikian, perekonomian nasional masih mencerminkan ketahanan dan daya saing dengan tetap tumbuh pada tingkat yang solid sebesar 4,95% (YoY) pada triwulan III-2024, dimana lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain, seperti Thailand dan Korea Selatan. Di sisi lain, Pertumbuhan kredit perbankan meningkat 10,92% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dari segmen korporasi yang baik sejalan dengan penjualan yang baik dan kemampuan bayar yang kuat. Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga berhasil menunjukan perkembangan yang baik dilihat dari fungsi intermediasi yaitu kredit yang tumbuh sebesar 7,55% dan DPK yang tumbuh mencapai 4,35 persen (YoY) serta ditopang oleh kondisi permodalan yang tinggi dengan rasio CAR mencapai 24,86 persen. Bank DKI juga mencatat pertumbuhan kredit yang positif yaitu tumbuh sebesar 15,54% YoY pada Q3 2024.

In the context of establishing a sound business environment with integrity, and a good reputation to be a trustworthy BUMD that provides quality services, the Company established the Violation Reporting System (*Whistleblowing System/WBS*) as the means for reporting complaints related to acts with indication of law violation, suspected fraud, violation of the code of conduct, or violation of conflict of interest that may occur within the Company's environment. The Company ensures that each violation report submitted through the WBS will be accepted appropriately without exception, and will be follow-up in accordance with applicable procedures.

These above steps carried out in the context of implementing good corporate governance aimed to enhance the trust of the investors and shareholders by always updating material and relevant data/information transparently, accurately, of quality and accountably. The company also pays attention to the interests of stakeholders, by clarifying the rights and obligations of each party, as well as maintaining healthy and responsible business relations.

Business Prospects

Various global dynamics such as trade wars and the Fed's interest rates will continue to be factors that affect the development of the national economy in the future, with risks in the form of high commodity price volatility, rising interest rates, supply chain constraints, and vulnerability to food and energy security due to climate change. The US-China trade war was still intense. This trade war has the potential to negatively impact Indonesia's economy, such as in expanding trade deficits and weakening the rupiah exchange rate. Aside from that, The Fed's monetary policy in determining interest rates also highly influences the flow of global capital and affects Indonesia's stock market. Furthermore, going forward, risks related to The Fed's steps to determine interest rates will continue to be closely observed.

These conditions drive global economic prospects to be projected only to grow at a range of 3.2% in 2024 and 2025. Nevertheless, the national economy still reflects resilience and competitiveness by continuing to grow at a solid rate of 4.95% (YoY) in the third quarter of 2024, which was higher than several other countries such as Thailand and South Korea. On the other hand, growth in banking credit rose by 10.92% compared to the previous year. This credit growth was affected by the increase in demand from good corporate segment in line with good sales and strong payment capacity. Regional Development Banks (BPD) also managed to show good developments seen from the intermediation function, namely credit with growth of 7.55% and DPK with growth of 4.35% (YoY) and supported by high capital conditions with a CAR ratio of up to 24.86%. Bank DKI also recorded a positive credit growth of 15.54% YoY in Q3 2024.

Selanjutnya, untuk menjaga momentum pertumbuhan agar tetap berlanjut, maka Pemerintah telah mengeluarkan juga berbagai Paket Stimulus Ekonomi yang telah dirilis di akhir tahun 2024 yang lalu. Stimulus tersebut diberikan kepada berbagai kelas masyarakat untuk menjaga momentum daya beli masyarakat dan meningkatkan daya saing usaha, berupa bantuan pangan/beras 10kg/bulan untuk 16 juta KPM, diskon listrik 50% selama 2 bulan, hingga PPN DTP properti, otomotif, dan insentif PPh 21 untuk sektor padat karya.

Perseroan sangat optimis serta memiliki keyakinan bahwa kinerja Perseroan juga akan mengalami peningkatan dari sisi finansial dan juga operasional. Direksi juga akan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan yang berkesinambungan kepada karyawan. Sementara itu, untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dalam jangka pendek, Direksi akan terus menyusun strategi dengan perencanaan yang matang dengan terus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam mengelola bisnis.

Direksi juga memandang seluruh organ perusahaan telah bersinergi dalam membangun landasan tata kelola yang kokoh untuk membentuk organisasi yang lebih transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, Direksi memastikan bahwa pengelolaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan *best practices* yang berlaku secara umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan komitmen Kominfo dalam memajukan sektor UMKM melalui langkah konkret berupa Program UMKM *Level Up*, Jamkrida juga terus meningkatkan transformasi digital di mana saat ini hanya *host to host* dengan mitra untuk penjaminan saja, namun kedepannya juga akan menyediakan layanan klaim dan subrogasi dalam bentuk sistem digital. Hal ini bertujuan untuk mempermudah customer dan mitra usaha dalam menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh Perseroan.

Penilaian Kinerja Komite Perseroan

Di tahun 2024, Perseroan memiliki komite-komite di bawah Direksi antara lain Komite Penjaminan, Komite Klaim, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Investasi dan Komite SDM. Kami selaku Direksi menilai para Komite telah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sesuai bidang masing-masing. Kami berharap agar para Komite dapat menjaga standar kinerja tinggi dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat terus memberikan kontribusi positif yang bermakna bagi keberlanjutan dan keberhasilan Perseroan.

Subsequently, to maintain growth momentum to continue, then the Government also issued various Economic Stimulus Package released at the end of the year 2024. This stimulus was provided to various classes of the society to maintain the momentum of people's purchasing power and to increase business competitiveness, in the form of food/rice assistance of 10 kg/month for 16 million KPM, 50% electricity discount for 2 months, to VAT DTP property, automotive, and PPh 21 incentives for labor-intensive sectors.

The Company is very optimistic and believes that the Company's performance will also improve from the financial and operational perspectives. The Board of Directors will also continue to strive to increase service quality through continuous training for employees. Meanwhile, to increase the Company's income in the short-term, the Board of Directors will continue to formulate strategies with thorough planning by continuing to uphold the principle of prudence in managing the business.

The Board of Directors views that all company organs have synergized in establishing a solid governance foundation to form a more transparent and accountable organization. Overall, the Board of Directors ensures that the management of the Company was carried out appropriately in accordance with generally applicable best practices as well as prevailing laws and regulations.

Apart from Kominfo's commitment in advancing the MSME actor through concrete steps in the form of MSME Level Up Program, Jamkrida also continues to improve digital transformation where currently it is only *host to host* with partners for guarantee, but going forward, it will also provide claims and subrogation services in the form of a digital system. This is intended to provide easeness for customers and business partners in using products and services provided by the Company.

Performance Assessment of Company Committees

In the year 2024, the Company retains committees under the Board of Directors, among others, including Guarantee Committee, Claim Committee, Information Technology Steering Committee, Risk Management Committee, Investment Committee and Human Resources Committee. As the Board of Directors, we assessed all Committees to have successfully fulfilled their duties and responsibilities in accordance with applicable standards and in according to each respective field. We hope that all Committees can maintain the high performance standard in carrying out their duties, so as to continue with meaningful and positive contribution for the sustainability and success of the Company.



Perubahan Komposisi Direksi

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat perubahan dalam komposisi Direksi Perseroan.

Apresiasi

Untuk mengakhiri laporan ini, perkenankan kami dari jajaran Direksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah berperan serta mendukung kami dalam mewujudkan kinerja Perseroan yang kuat. Kepada jajaran Dewan Komisaris dan para pemegang saham, kami berterima kasih atas kerja sama yang terjalin, hingga kepercayaan, nasihat, dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi sepanjang tahun 2024. Terima kasih dan apresiasi kami berikan juga kepada seluruh insan Perseroan atas komitmen dan dedikasi tinggi hingga hasil kerja dan kontribusi nyata di tahun 2024 sehingga dapat mewujudkan pencapaian yang membanggakan. Kepada pihak-pihak lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator, Badan Pembina BUMD yang terus memberikan pembinaan berkala kepada Jamkrida dan seluruh badan pengawas yang terkait, pihak Terjamin, mitra usaha, dan pemangku kepentingan lainnya diucapkan terima kasih atas kepercayaan dan hubungan baik yang terbina selama tahun 2024 dan mampu menunjang perkembangan positif Perseroan.

Kami menyadari sepenuhnya tahun-tahun ke depan merupakan tahun yang penuh tantangan tetapi juga sekaligus memberikan peluang bagi Perseroan untuk lebih maju dan terpercaya. Dengan dukungan dan kerjasama dari para pemangku kepentingan, kami optimis dapat mencapai kemajuan lebih baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan.

Change in Composition of the Board of Directors

During the year 2024, there were no changes in the composition of the Company's Board of Directors.

Appreciation

Closing this report, allow us from the Board of Directors, to express our gratitude to all related parties who have taken part in supporting us to realizing the Company's strong performance. To the Board of Commissioners and shareholders, we thank you for the cooperation established, the trust, advices and recommendations provided to the Board of Directors throughout the year 2024. Our gratitude and appreciation are also extended to all personnel of the Company for the high commitment and dedication to great accomplishments and real contributions in 2024 that we were able to reach proud achievements. To all other parties, the Financial Services Authority (OJK) as regulator, BUMD Advisory Board that continuously provide regular mentoring to Jamkrida and all related supervisory boards, the Guaranteed parties, business partners, and other stakeholders, we thank you for the trust and good relations we have maintained during 2024 and supportive of the Company's positive development.

We fully realize that years to come are years full of challenges, yet also opportunities for the Company to advance further and be more trustworthy. With the support and cooperation from stakeholders, we are optimistic with greater progress ahead in achieving the vision, mission and goals of the Company.

Atas nama Direksi
On behalf of Directors

Agus Supriadi
Direktur Utama
President Director





03

Profile

Perusahaan

Company Profile



Identitas Perusahaan Corporate Identity	46
Sekilas Jamkrida Jakarta Jamkrida Jakarta at a Glance	48
Tonggak Sejarah Milestones	52
Visi dan Misi Vission and Mission	54
Nilai-Nilai Perseroan Corporate Values	55
Asas dan Tujuan Principles and Objectives	56
Kegiatan Usaha Business Activities	57
Produk dan Layanan Products and Services	58
Wilayah Operasional Operational Areas	59
Struktur Organisasi Organizational Structure	60
Keanggotaan dalam Asosiasi dan Organisasi Membership in Associations and Organizations	61
Perubahan Komposisi Manajemen Changes of Management Composition	62
Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners	64
Profil Direksi Profile of the Board of Directors	66
Profil Dewan Pengawas Syariah Profile of the Sharia Supervisory Board	70
Profil Kepala Divisi Profile of the Head Division	73
Sumber Daya Manusia Human Resources	78
Informasi Tentang Struktur Modal dan Pemegang Saham Information About Capital and Shareholders	82
Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Bersama Subsidiaries, Associated Companies, Joint Venture Companies	83
Kronologi Pencatatan Saham dan Efek Lainnya Chronology of Listing of Shares and Other Securities	83
Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan Company Supporting Institutions and Professions	84
Perkenalan Pergantian Website Perkenalan Pergantian Website	85



Identitas Perusahaan

Corporate Identity



Nama Perusahaan

Name of Company

PT Penjaminan Kredit
Daerah Jakarta (Perseroda)



Tanggal Pendirian

Date of Establishmen

10 November 2014



Status Perusahaan

Company Status

BUMD Provinsi DKI Jakarta
Regional Owned Enterprise of Special
Kapital Region (DKI) Jakarta Province



Nama Panggil

Call Sign

PT Jamkrida Jakarta
("Jamkrida Jakarta")



Tanggal Beroperasi

Date of Operation

28 Agustus 2015
28 August 2015



Bidang Usaha

Line of Business

Penjaminan Kredit untuk Usaha Mikro,
Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
Credit Guarantee for Micro, Small,
Medium Enterprises and Cooperatives



Bentuk Badan Hukum

Legal form of Entity

Perseroan Terbatas
Limited Liability Company



NPWP

NPWP

71.630.828.3-061.000



SKDP

SKDP

96/27.1BU/31.71.01.1004/-071.562/e/2017



Jumlah Karyawan (per 31 Desember 2024)

Total Number of Employees (as of 31 December 2024)

79 karyawan
79 employees



Alamat Surat Elektronik

Electronic Letter Address

mail@jamkrida-jakarta.co.id



Komposisi Pemegang Saham

Composition of Shareholders

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (99,17%)
- Perumda Pasar Jaya (0,83%)
- Government of DKI Jakarta Province (99.17%)
- Pasar Jaya Regional Company (Perumda) (0.83%)



Modal Ditempatkan dan Disetor

Issued and Paid-Up Capital

Rp **600.000.000,00**



Modal Dasar

Authorized Capital

Rp **1.600.000.000,00**



Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Regina Kristiningsih



Situs Web

Website

www.jamkrida-jakarta.co.id



Alamat

Address

Gedung Dinas Teknis Abdul Muis
Lantai 14
Jl. Abdul Muis No.66 RT 004/RW 003
Kelurahan Petojo Selatan,
Kecamatan Gambir
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta - 10160

Gedung Dinas Teknis Abdul Muis
14th Floor
Jl. Abdul Muis No.66 RT 004/RW 003
Petojo Selatan, Subdistrict Gambir
Central Jakarta, DKI Jakarta - 10160



Telepon

Telephone

(021) 21203204
(021) 21203206



Faksimili

Facsimile

(021) 22346335



Sosial Media

Social Media

- Facebook : Jamkrida Jakarta
- X : @JamkridaJakarta
- Instagram : @jamkridajakarta
- Linked : Jamkrida Jakarta



Sekilas Jamkrida Jakarta

Jamkrida Jakarta at a Glance

Pendirian PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta ("PT Jamkrida Jakarta" atau "Perseroan") berawal dari adanya pertimbangan Pemprov DKI Jakarta yang menyadari bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) memiliki peran besar dan signifikan dalam mendukung perekonomian Provinsi DKI Jakarta sehingga dibutuhkan adanya sebuah lembaga penjaminan yang khusus untuk mendukung manajemen operasional UMKMK terutama untuk mendukung permodalan yang berkelanjutan. Atas dasar tersebut, maka dibentuklah PT Jamkrida Jakarta yang merupakan Badan Usaha Perseroan Terbatas Milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit bagi UMKMK.

Pemprov DKI Jakarta kemudian secara resmi membentuk PT Jamkrida Jakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dengan landasan hukum pendirian sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No. 13 tahun 2013 tanggal 27 November 2013 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah. Selanjutnya, pendirian Perseroan juga dituangkan dalam Akta Pendirian PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta No. 9 tanggal 10 November 2014, yang dibuat di hadapan Yualita Widyadhar, S.H., M.Kn., seorang Notaris di Jakarta.

Pendirian Perseroan dipastikan telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-62/D.05/2015, sehubungan dengan kehadirannya sebagai lembaga keuangan nonbank yang menjalankan kegiatan usaha penjaminan dengan penuh tanggung jawab sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Melalui kegiatan usaha penjaminan yang dijalankan, Perseroan meyakini keberadaannya membawa dampak positif bagi keberlanjutan ekosistem usaha UMKMK di DKI Jakarta, terutama dalam mendukung akses permodalan melalui berbagai sumber pembiayaan, baik dari Lembaga keuangan bank maupun nonbank. Lebih lanjut, kontribusi yang diberikan oleh Perseroan terwujud melalui pelaksanaan kegiatan penjaminan kredit yang diberikan oleh Lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan, serta badan usaha lain. Selain itu, Perseroan juga memberikan bantuan konsultasi manajemen dan terlibat dalam kegiatan usaha lain, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar.

The establishment of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta ("PT Jamkrida Jakarta" or "Company") began with the consideration of DKI Jakarta Regional Government's realization that the Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSME and Cooperatives), sector plays a big and significant role in supporting DKI Jakarta Province's economy that it requires a guarantee institution specifically established to support the operational management of MSME and Cooperatives, especially to provide continuous capital support. In this respect, thus, PT Jamkrida Jakarta was established as a Limited Liability Company owned by the Provincial Government ("Pemprov") of DKI Jakarta Province set up to carry out business activities in credit guarantee for MSME and Cooperatives.

Pemprov of DKI Jakarta then officially established PT Jamkrida Jakarta as a Regional Owned Enterprise (BUMD) under the auspices of DKI Jakarta Pemprov, with a legal basis of establishment as verified under the Regional Regulation of the Province of DKI Jakarta No. 13 year 2013 dated 27 November 2013 regarding the Establishment of Regional Owned Enterprises of Limited Liability Companies for Regional Credit Guarantee. Subsequently, the establishment of the Company is also contained in the Establishment Deed of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta No. 9 dated 10 November 2014, made before Yualita Widyadhar, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

The establishment of the Company is assured to have obtained the permission as per the Decision of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-62/D.05/2015, in connection with its presence as a non-bank financial institution that carries out guarantee business activities with full responsibility in accordance with the principles of good governance.

Through guarantee business activities, the Company believes that its presence pose a positive impact on the sustainability of the MSME business ecosystem in Jakarta, especially in supporting with access to capital through various sources of financing, both from bank and non-bank financial institutions. Furthermore, contributions provided by the Company are actualized through the implementation of credit guarantee activities extended by both bank and non-bank financial institutions, as well as other business entities. In addition, the Company also provides management consulting assistance and involves in other business activities in accordance with provisions contained in the Articles of Association.



Informasi Perubahan Nama

Berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 9 Juni 2023, PT Jamkrida Jakarta resmi mengubah nama dari **PT Jaminan Kredit Daerah Jakarta** menjadi **PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah)**.

Dasar Hukum Pendirian dan Legalitas Operasional

Adapun dasar hukum pendirian dan legalitas operasional yang dimiliki Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Penjaminan;
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah);
4. Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta No. 9 tanggal 10 November 2014 yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-34446.40.10.2014 tanggal 13 November 2014 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana perubahan terakhir dalam Akta No. 62 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, Mkn, Notaris di Jakarta dan telah diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0085816 tanggal 06 April 2024;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 71.630.828.3-061.000;
6. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 1221000412197.

Regulasi Usaha Penjaminan

Adapun regulasi sebagai acuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha Penjaminan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Penjaminan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin;
5. Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-58/NB.223/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
6. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-1315/NB.223/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pencatatan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penjaminan Syariah pada Unit Usaha Syariah PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
7. Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP- 62/D.05/2015 tanggal 15 Mei 2015;

Information on Name Change

Based on Notarial Deed No. 14 dated 9 June 2023, PT Jamkrida Jakarta officially changed its name from **PT Jaminan Kredit Daerah Jakarta** to **PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Regional Company)**.

Legal Basis of Establishment and Operational Legality

The legal basis of the establishment and the legality of operations retained by the Company, among others, are as follows:

1. Law No. 40 of year 2007 on Limited Liability Companies;
2. Law No. 1 of year 2016 on Guarantee Business;
3. Regional Regulation of the Province of DKI Jakarta No. 1 of year 2023 dated 14 March 2023 regarding Changes in the Legal Form of the Limited Liability Company of Jakarta Regional Credit Guarantee to the Limited Liability Company of Jakarta Regional Credit Guarantee (Regional Company);
4. Deed of Establishment of Limited Liability Company of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta No. 9 dated 10 November 2014 approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-34446.40.10.2014 dated 13 November 2014 which was amended in several occasions, as per the last change in Deed No. 62 dated 22 March 2024 made before Ashoya Ratam, SH, Mkn, Notary in Jakarta, received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0085816 dated 6 April 2024;
5. Tax Identification (NPWP) No. 71.630.828.3-061.000;
6. Business Identification (NIB) No. 1221000412197.

Regulations on Underwriting Business

The regulations that serve as reference for the Company to conduct its Guarantee business, among others, are as follows:

1. Law No. 1 of year 2016 on Underwriting Business;
2. Financial Services Authority (OJK) Regulation No.1/POJK.05/2017 on Business and Institutional Licensing of Guarantee Institutions;
3. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 2/POJK.05/2017 on Business Implementation of Guarantee Institutions;
4. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 3/POJK.05/2017 on Good Corporate Governance of Guarantee Institutions;
5. Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-58/NB.223/2019 dated 30 August 2019 on the Granting of Permit to Establish Sharia Business Unit of the Company to PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
6. Financial Services Authority (OJK) Letter No. S-1315/NB.223/2019 dated 26 Desember 2019 on the Registration of the Implementation of Sharia Guarantee Business Activities at the Sharia Business Unit of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
7. Business Permit from Financial Services Authority (OJK) No. KEP- 62/D.05/2015 dated 15 May 2015;

8. Pencatatan laporan produk penjaminan *Surety Bond* PT Jamkrida Jakarta di OJK No. S/5425/NB.2/2015 tanggal 7 Oktober 2015;
9. Pencatatan laporan produk penjaminan Kontra Bank Garansi PT Jamkrida Jakarta di OJK No. S/5431/NB.III/2015 tanggal 7 Oktober 2015;
10. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Konsorsium yang Dapat Memasarkan Produk *Suretyship*;
11. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-497/NB.111/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Pencatatan Laporan Produk Penjaminan Kepabeanaan (*Custom Bond*) PT Jamkrida Jakarta;
12. Akta Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn No. 61 Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jakarta dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0143902 tanggal 05 April 2024;
13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 51 tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Terkait Untuk Penyediaan dan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai dasar bagi PT Jamkrida Jakarta untuk melaksanakan penjaminan atas penyaluran kredit/ pembiayaan perolehan rumah bagi MBR (Penjaminan KPR DP 0 Rupiah);
14. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-248/ NB.22/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Pencatatan Kegiatan Usaha Penjaminan Pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dengan Prinsip Syariah (Kafalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri/SKBDN) dan Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Kafalah *Surety Bond*) PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
15. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-20/NB.213/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pencatatan Kegiatan Usaha Kafalah Kontra Bank Garansi PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
16. Surat Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan No. S-367/NB.222/2021 tentang PT Jamkrida Jakarta sebagai Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR);
17. Surat Rekomendasi KUR Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-409/NB.213/2022 tanggal 31 Maret 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Rekomendasi terkait Penunjukkan Unit Usaha Syariah (UUS) Jamkrida Jakarta Sebagai Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah;
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.05/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Penilaian Kualitas Atas Tagihan Subrogasi, Kegiatan Penjaminan, dan *Suretyship*.
8. Registration of Report on *Surety Bond* product guarantee of PT Jamkrida Jakarta at OJK No. S/5425/NB.2/2015 dated 7 October 2015;
9. Registration of Report on Counter Bank Guarantee product of PT Jamkrida Jakarta at OJK No. S/5431/NB.III/2015 dated 7 October 2015;
10. Financial Services Authority (OJK) Letter No. S-595/NB.2/2018 dated 4 October 2018 on the List of General Insurance Companies, *Surety* Companies, and Consortiums that Market *Suretyship* Products;
11. Financial Services Authority (OJK) Letter No. S-497/NB.111/2018 dated 30 January 2018 on the Registration of Report on Customs Guarantee Product (*Custom Bond*) of PT Jamkrida Jakarta;
12. Notarial Deed of Ashoya Ratam, SH, MKn No. 61 of Year 2024 dated 22 March 2024 on the Reappointment of the Sharia Supervisory Board of PT Jamkrida Jakarta and registered in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of No. AHU-AH.01.09-0143902 dated 5 April 2024;
13. Governor of DKI Jakarta Province Regulation No. 51 of year 2019 on the Assignment of Regional Owned Enterprises Related to the Provision and Financing of Housing Acquisition for Low-Income Communities (MBR) as basis for PT Jamkrida Jakarta to carry out guarantees for the distribution of credit/ financing for housing acquisition for MBR (Guarantee for Rupiah Housing Credit Loan with 0 Downpayment);
14. Financial Services Authority (OJK) Letter No. S-248/ NB.22/2020 dated 17 July 2020 on the Registration of Business Activities of Guaranteeing the Opening of Domestic Documented Credit Letter with Sharia Principles (Kafalah/SKBDN Domestic Documented Credit Letter) and Guaranteeing the Procurement of Goods and/or Services (Kafalah *Surety Bond*) of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
15. Financial Services Authority (OJK) Letter No. S-20/NB.213/2021 dated 11 January 2021 on the Registration of Kafalah Business Activities Kontra Bank Guarantee of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
16. Financial Services Authority (OJK) Recommendation Letter No. S-367/NB.222/2021 on PT Jamkrida Jakarta as a People's Business Credit Guarantor Company;
17. Financial Services Authority (OJK) Recommendation Letter on Sharia KUR No. S-409/NB.213/2022 dated 31 March 2022 on the Response to the Request for Recommendation concerning the Appointment of the Sharia Business Unit of Jamkrida Jakarta as Guarantor of Sharia People's Business Credit;
18. Financial Services Authority (OJK) Circular Letter No. 9/SEOJK.05/2024 dated 27 September 2024 on the Quality Assessment of Subrogation Claims, Guarantee Activities, and *Suretyship*.



Tonggak Sejarah

Milestones

Besaran modal berikut tanggal yang tercatat sebagai tonggak dalam perjalanan PT Jamkrida Jakarta sejak awal berdiri hingga 31 Desember 2021.

The amount of PT Jamkrida Jakarta total capital and the date recorded as milestones during the journey from its initial establishment until December 31, 2021.

2013

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No. 13 tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta.

The Provincial Government (Pemprov) of DKI Jakarta issued the Regional Regulations of DKI Jakarta Province No. 13 of year 2013 dated 27 December 2013 on the Establishment of Regional Owned Enterprises of Limited Liability Companies on Credit Guarantee for Jakarta Region.

2015

Perseroan telah memiliki izin kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-62/D.05/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta.

The Company obtained the license for business activities from the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-62/D.05/2015 dated 15 Mei 2015 on the Granting of Business License for Credit Guarantee Company to PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta.

2017

Dengan konsistensi tinggi, Perseroan terus memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM). Hingga akhir 2017, jumlah UMKM yang dijamin sebanyak 31.014 UMKM, dengan jumlah serapan tenaga kerja sebesar 57.225 tenaga kerja.

With high consistency, the Company continued to support the Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSME and Cooperatives). Until the end of 2017, a total of 31,014 MSME and Cooperatives were guaranteed, absorbing some 57,225 workforce.

2013

2015

2017

2014

2016

2018

2014

Perseroan didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta No. 9 tanggal 10 November 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Yulita Widyadhar, S.H., M.Kn. The company was established in Jakarta based on Deed of Establishment of Limited Liability Company (Persero) of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta No. 9 dated 10 November 2014, made before Notary Yulita Widyadhar, S.H., M.Kn.

2016

- Perseroan tercatat sebagai Perusahaan BUMD Penjaminan Kredit milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan modal disetor terbesar di Indonesia.
- Hingga akhir Desember 2016, Perseroan berhasil membukukan laba sebesar Rp2.027 juta.
- The Company was registered as a BUMD Company for Credit Guarantee owned by the Provincial Government of DKI Jakarta with the largest paid-up capital in Indonesia.
- Until the end of December 2016, the Company managed to book a profit of Rp2,027 million.

2018

Realisasi penjaminan kredit sebesar Rp4,26 triliun atau 120,63% dari target penjaminan kredit tahun 2018. Realization of credit guarantee reached Rp4.25 Trillion or around 120.6% from the credit guarantee target in 2018.



Keberhasilan Perseroan dalam mempertahankan keberlanjutan bisnisnya tidak hanya tercermin dari berbagai bentuk pencapaian yang berhasil diraih setiap tahun, melainkan juga ditunjukkan melalui peningkatan besaran modal yang tercatat sejak awal berdiri hingga 31 Desember 2024, sebagaimana tergambar dalam info grafis berikut ini:

The Company's success in maintaining business sustainability is not only reflected from the various forms of achievement acquired every year, but also from the increase in the amount of capital registered since the beginning of its establishment until 31 December 2024, as shown in the infographs below:



2019

Launching Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jakarta.
Launching of the Syariah Business of PT Jamkrida Jakarta.

2021

Pada ajang Audit Kearsipan Eksternal pada Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan berhasil meraih penghargaan dengan Kategori Sangat Baik dalam merawat dan mengelola arsip.

At the External Archives Audit event for BUMD, the Company successfully achieved the award in the Very Good Category for maintaining and managing archives.

2023

- Dalam ajang BUMD Awards 2023, Perseroan menjadi salah satu Penerima penghargaan BUMD Penjaminan Kredit (Jamkrida) Terbaik, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Kedua)
- Diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah).
- Pemberhentian secara terhormat Dewan Komisaris.
- Launching logo baru pada tanggal 10 November 2023.
- Menjuarai gerakan sadar tertib arsip 2023 dengan nilai sangat memuaskan.
- At the 2023 BUMD Awards event, the Company was one of the Winners for the Best BUMD Credit Guarantee (Jamkrida), organized by the Ministry of Internal Affairs through the Directorate General (Ditjen) of Regional Financial Development (Second)
- The issuance of the Regional Regulation of DKI Jakarta Province No. 1 of year 2023 dated March 14 2023, regarding Changes in the Legal Form of the Jakarta Regional Credit Guarantee Limited Liability Company to the Jakarta Regional Credit Guarantee Limited Liability Company (Regional Company).
- Dismissal With Honor of the Board of Commissioners.
- Launching of the new logo on 10 November 2023.
- Winner of the 2023 archive awareness movement with the score of very satisfactory

2019

2021

2023

2020

2022

2024

2020

Perseroan menerima beberapa penghargaan, sebagai berikut:

- Award Pusat Rekor Indonesia pada Kategori Rekor Prestasi Perusahaan Indonesia.
- Nusantara Award untuk BUMD pada Kategori Terbaik Dalam Pembinaan UMKM dan Koperasi.
- Indonesia Innovation Business Award pada dua kategori, yaitu: Kategori Innovation Finance Company Award Winner 2020; dan Kategori The Best Leadership and Professional Award 2020-2021.

The Company received several awards as follows:

- The Indonesia Record Center Award for the Indonesian Company Achievement Award Category.
- The BUMD Nusantara Award for The Best in Managing SMEs and Cooperatives.
- Indonesia Innovation Business Award for two categories, namely the 2020 Innovation Finance Company Award Winner Category, and The 2020-2021 Best Leadership and Professional Award Category.

2022

- Perseroan berhasil mencatatkan kinerja laba positif sebesar Rp15,28 miliar, meningkat 193,26% dari tahun sebelumnya.
- Untuk kedua kalinya, Perseroan menerima penghargaan kearsipan pada ajang Audit Kearsipan Eksternal pada Badan Usaha Milik Daerah, dengan kategori Sangat Baik (Nilai 70,29).
- The Company managed to record a positive profit performance of Rp15.2 billion, an increase of 193.26% from the previous year.
- For the second time, the Company received the archive award at the External Archives Audit event for BUMD, in Very Good Category (Score of 70.29).

2024

- Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2024.
- Mendapatkan TOP GRC Award 2024 #4 star tanggal 11 September 2024.
- Mendapatkan The Most Committed GRC Leader 2024 tanggal 11 September 2024.
- Launching website PT Jamkrida Jakarta pada tanggal 10 November 2024.
- Change in the Company's Organizational Structure on 31 May 2024.
- Received TOP GRC Award 2024 as #4 Star on 11 September 2024.
- Received The Most Committed GRC Leader 2024 on 11 September 2024
- Launching of PT Jamkrida Jakarta website on 10 November 2024.

Visi dan Misi

Vission and Mission



Visi
Vision

Visi Vision

Menjadi mitra yang peduli terhadap perkembangan UMKMK dan ekonomi daerah.

To become a partner that cares for the development of MSME and Cooperatives and the local economy.

Misi
Mission

Misi Mission

- **Menjalankan kegiatan usaha penjaminan untuk kemajuan UMKMK serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

To perform guarantee business activities for the advancement of MSME and Cooperatives as well as the improvement of the community's welfare.

- **Memberikan manfaat berkesinambungan bagi para pemangku kepentingan: *shareholder*, karyawan, mitra kerja, dan masyarakat.**

To provide sustainable benefits for the stakeholders: shareholders, employees, partners, and the community.

Tinjauan atas Visi dan Misi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara berkala melakukan peninjauan terhadap kesesuaian visi dan misi Perseroan agar tetap selaras dengan tujuan Perseroan. Pada tahun 2024, Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa visi dan misi Perseroan masih relevan dengan perkembangan bisnis dan tantangan yang dihadapi sehingga tidak diperlukan adanya perubahan.

Review of the Vision and Mission

The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company periodically review the conformity of the Company's vision and mission to remain in line with the Company's objectives. In the year 2024, the Board of Commissioners and the Board of Directors assessed that the vision and mission of the Company remain relevant with the business development and challenges faced, thus no changes were required.

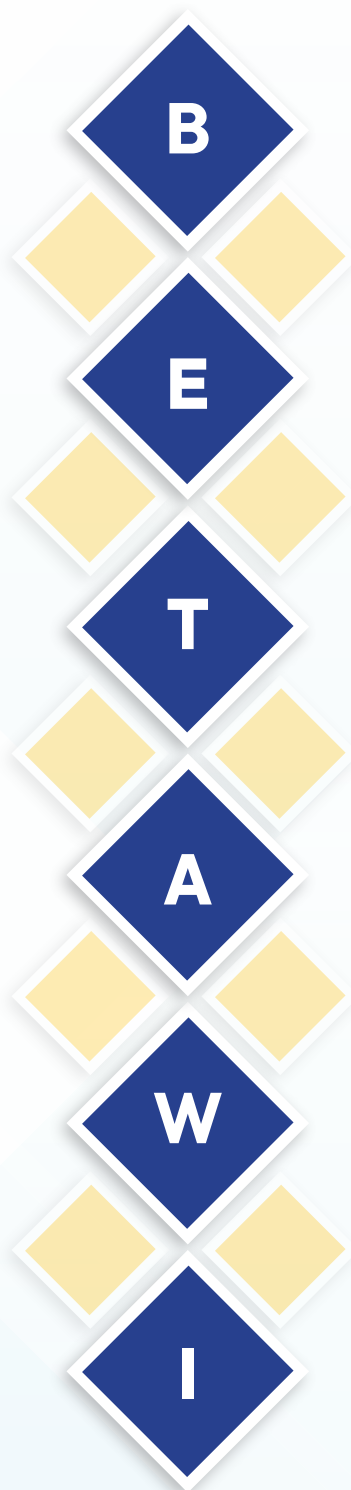


Nilai-nilai Perseroan

Corporate Values

Perseroan menganut nilai-nilai BETAWI sebagai budaya kerja insan Perseroan, yaitu:

The Company adheres to the BETAWI values as the work culture of Company personnels, namely as follows:



Building Trust

Berperilaku yang mencerminkan kesesuaian hati, perkataan, perbuatan, serta mengutamakan integritas dan profesionalisme di lingkungan kerja.
Behave in a way that reflects the harmony of the heart, words, and actions, and prioritize integrity and professionalism in the work environment.

Excellent Service

Berpenampilan menarik dan memberikan layanan prima serta mampu memberikan kesan baik secara konsisten kepada mitra kerja internal dan eksternal.
Maintain an attractive appearance and provide excellent services and consistently give good impression to internal and external partners.

Teamwork

Membina kerja sama, menjaga kekompakan, saling memotivasi, dan berpikir positif antar karyawan sehingga menghasilkan sinergi untuk mencapai tujuan Perseroan.
Foster cooperation, maintain solidarity, motivate each other, and think positively among employees to create synergy to achieve Company goals.

Accountable

Kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua perilaku yang ditampilkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Maintain the ability to take responsibility for all behavior displayed in order to achieve organizational goals.

Wise

Bersikap bijaksana dengan menghargai, menghormati, memiliki toleransi dan empati tinggi terhadap sesama karyawan serta mitra kerja.
Maintain the attitude to appreciate, respect, with high tolerance and empathy towards fellow employees and partners.

Innovative

Kemampuan berpikir dan bertindak yang menghasilkan ide baru secara berkesinambungan di unit kerja masing-masing untuk keberlangsungan bisnis Perseroan.
The ability to think and act to continuously generate new ideas in each work unit for the sustainability of the Company's business.

Asas dan Tujuan

Principles and Objectives

Asas

Kegiatan usaha penjaminan di Perseroan dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, *responsibility*, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme, efisiensi berkeadilan, edukasi, dan perlindungan konsumen.

Tujuan

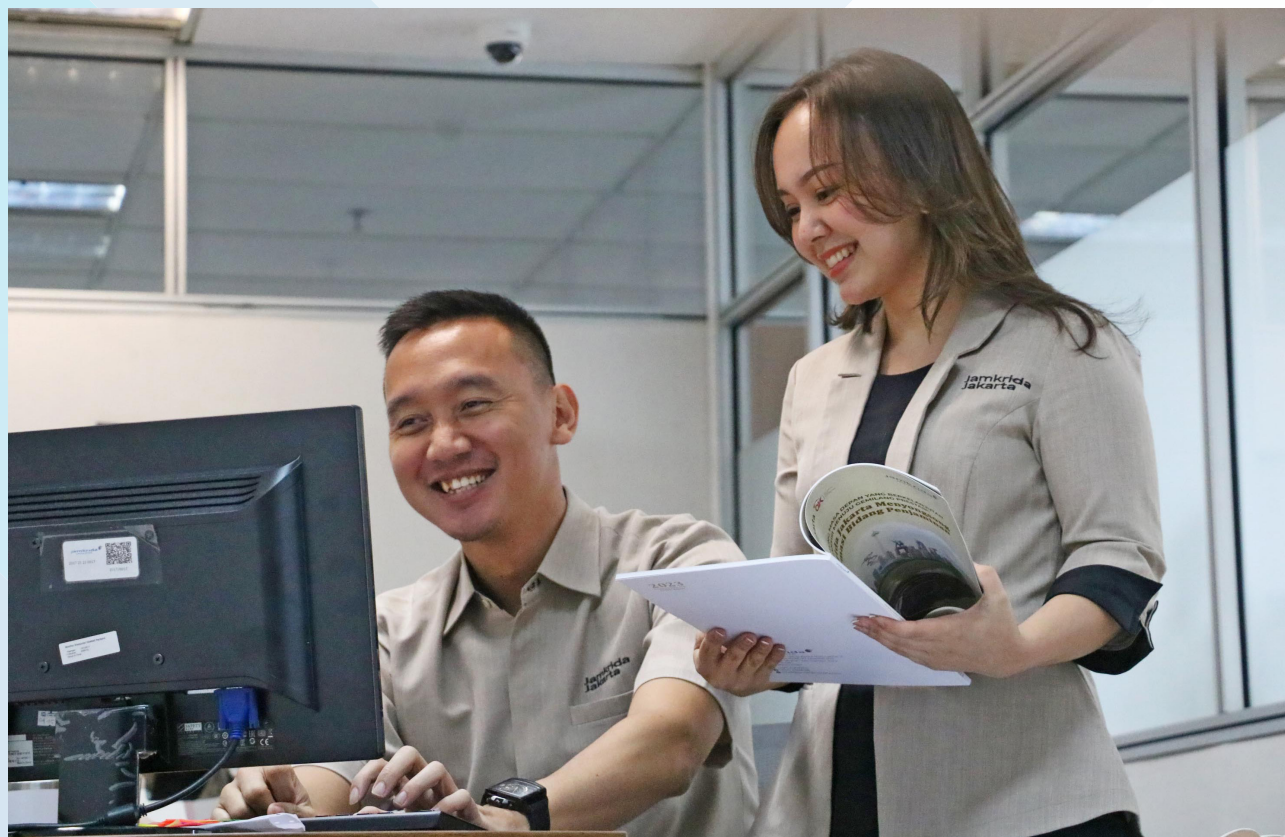
1. Menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha, khususnya UMKMK, serta usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan;
2. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya;
3. Mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis;
4. Meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi;
5. Mendukung pertumbuhan perekonomian nasional;
6. Meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional.

Principles

Guarantee business activities in the Company are carried out based on the principles of national interest, legal certainty, responsibility, transparency, accountability, professionalism, equitable efficiency, education, and consumer protection.

Objectives

1. Support government policies, especially in the context of encouraging business independency and empowerment, specifically with regard to MSME and Cooperatives, as well as other prospective business to financing sources;
2. Loan guarantee channeled by savings and loan cooperatives or cooperatives with savings and loan business for their members;
3. Encourage financing growth and generate conducive business climate for the improvement of strategic economic sectors;
4. Increase national production capabilities with high competitiveness;
5. Support the national economic growth;
6. Increase the level of the national financial inclusivity.





Kegiatan Usaha

Business Activities

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar terakhir, Perseroan merupakan lembaga keuangan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tujuan utamanya adalah mendukung program Pemerintah dalam bidang usaha penjaminan kredit, terutama untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Perseroan menyalurkan dan menjamin kredit yang berasal dari berbagai lembaga keuangan, termasuk perbankan, lembaga nonbank, dan badan usaha lainnya.

Selain itu, Perseroan juga memberikan bantuan konsultasi manajemen terkait kegiatan usaha penjaminan dan kegiatan usaha lainnya. Seluruh kegiatan usaha tersebut dijalankan dengan izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Secara ringkas, kegiatan usaha Perseroan untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan yang sesuai dengan Akta No. 60 tanggal 22 Maret 2024 - Reinstatement Akta Perusahaan dan Perubahan Masa Jabatan DPS Menjadi 4 Tahun, meliputi:

1. Penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan;
2. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi dengan unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
3. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman dalam program kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai bagian dari program kemitraan dan bina lingkungan.

Selain usaha penjaminan, Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha lain sesuai dengan ketentuan undang-undang sesuai UU nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan seperti:

1. Penjaminan atas surat utang;
2. Penjaminan pembelian barang secara angsuran;
3. Penjaminan transaksi dagang;
4. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*Surety Bond*);
5. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
6. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
7. Penjaminan *Letter of Credit* (L/C);
8. Penjaminan kepabeanan (*Customs Bond*);
9. Penjaminan cukai.

Kegiatan Usaha tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Perseroan masih berperan aktif dalam melaksanakan serangkaian kegiatan usaha sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Keberlanjutan usaha ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), sejalan dengan tekad untuk mencapai tujuan Perseroan.

Business Activities Based on Articles of Association

As contained in the latest Articles of Association, the Company is a financial institution established by the Provincial Government (Pemprov) of DKI Jakarta. The main objective is to support the Government's program in credit guarantee business sector, especially concerning the Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSME and Cooperatives) in the Province of DKI Jakarta area. The Company channeled and guarantee credit from various financial institutions, including banking and non-banking institutions, and other business entities.

Apart from that, the Company also provides management consulting assistance and other business activities. All such business activities are conducted with the license and supervision from the Financial Services Authority (OJK).

In brief, the Company's business activities support the Company's objectives in accordance with Deed No. 60 dated 22 March 2024 – Reinstatement of Company Deed and Change of DPS Term of Office to 4 years, which covers the following:

1. Credit Guarantee, financing or financing based on sharia principles from financial institutions;
2. Loan guarantee channeled by the Savings and Loan Cooperatives or Cooperatives with Savings and Loan business for members; and
3. Credit and/or loan guarantee within partnership programs distributed by the State-Owned Enterprises (BUMN) as part of the partnership and community development program.

Aside from guarantee business, the Company is also engaged in other business activities in line with the provisions of the laws according to Law No. 1 of 2016 concerning guarantees as follows:

1. Guarantee of debt securities;
2. Guarantee of goods purchased in installments;
3. Guarantee of trade transactions;
4. Guarantee of procurement of goods and/or services (*Surety Bond*);
5. Guarantee of bank guarantee (counter bank guarantee);
6. Guarantee of domestic documented credit letter;
7. Guarantee of *Letter of Credit* (L/C);
8. Guarantee of customs (*Custom Bond*);
9. Guarantee of excise.

Business Activities in 2024

Throughout the year 2024, the Company remained with its active role in the implementation of a series of business activities as the Company's commitment reflects, in supporting the Micro, Small and Medium Enterprises and the Cooperatives (MSME and Cooperatives) in line with the determination to achieving Company goals.

Produk dan Layanan

Products and Services

Produk Penjaminan

1. Penjaminan Kredit Mikro, Kecil dan Menengah
2. Penjaminan Kredit Multiguna
3. Penjaminan KPR
4. Penjaminan Kredit Konstruksi
5. Penjaminan Kredit Usaha
6. Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)
7. Penjaminan Kepabeanan (*Custom Bond*)
8. *Surety Bond*
9. Penjaminan *Letter of Credit* (L/C)
10. Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
11. Penjaminan Cukai
12. Penjaminan Surat Utang (Anjak Piutang) dan Penjaminan berbasis invoicing lainnya)
13. Penjaminan Transaksi Dagang
14. Penjaminan Pembelian Barang Secara Angsuran.

Produk Penjaminan Syariah

Produk yang Ada

1. Kafalah Pembiayaan Mikro, Kecil dan Menengah
2. Kafalah Pembiayaan Multiguna
3. Kafalah Pembiayaan KPR
4. Kafalah Pembiayaan Konstruksi
5. Kafalah Pembiayaan Usaha
6. Kafalah *Surety Bond*
7. Kafalah Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)
8. Kafalah SKBDN
9. Kafalah *Letter of Credit*
10. Kafalah Kepabeanan (*Custom Bond*)
11. Kafalah Transaksi Dagang.

Guarantee Products

1. Micro, Small and Medium Credit Guarantee
2. Multipurpose Credit Guarantee
3. Mortgage Guarantee
4. Construction Credit Guarantee
5. Business Credit Guarantee
6. Bank Guarantee (Contra Bank Guarantee)
7. Customs Guarantee (Custom Bond)
8. Surety Bond
9. Letter of of Credit (L/C) Guarantee
10. Domestic Documented Credit Guarantee
11. Excise Guarantee
12. Debt Securities Guarantee (Factoring) and other invoicing-based Guarantee
13. Trade Transaction Guarantee
14. Installment Purchase Guarantee.

Sharia Products Guarantee

Current Available Products

1. Micro, Small and Medium Financing Kafalah
2. Multipurpose Financing Kafalah
3. Mortgage Financing Kafalah
4. Construction Financing Kafalah
5. Business Financing Kafalah
6. Surety Bond Kafalah
7. Bank Guarantee Kafalah (Contra Bank Guarantee)
8. Domestic Documented Credit Guarantee Kafalah
9. Letter of Credit Kafalah
10. Customs Kafalah (Custom Bond)
11. Trade Transaction Kafalah



Wilayah Operasional

Operational Areas

Wilayah operasional Perseroan mencakup seluruh Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

The Company's areas of operation cover the entire Province of the Special Capital Region (DKI) of Jakarta.



Struktur Organisasi

Organizational Structure

Struktur organisasi Perseroan melibatkan berbagai fungsi, termasuk, namun tidak terbatas pada:

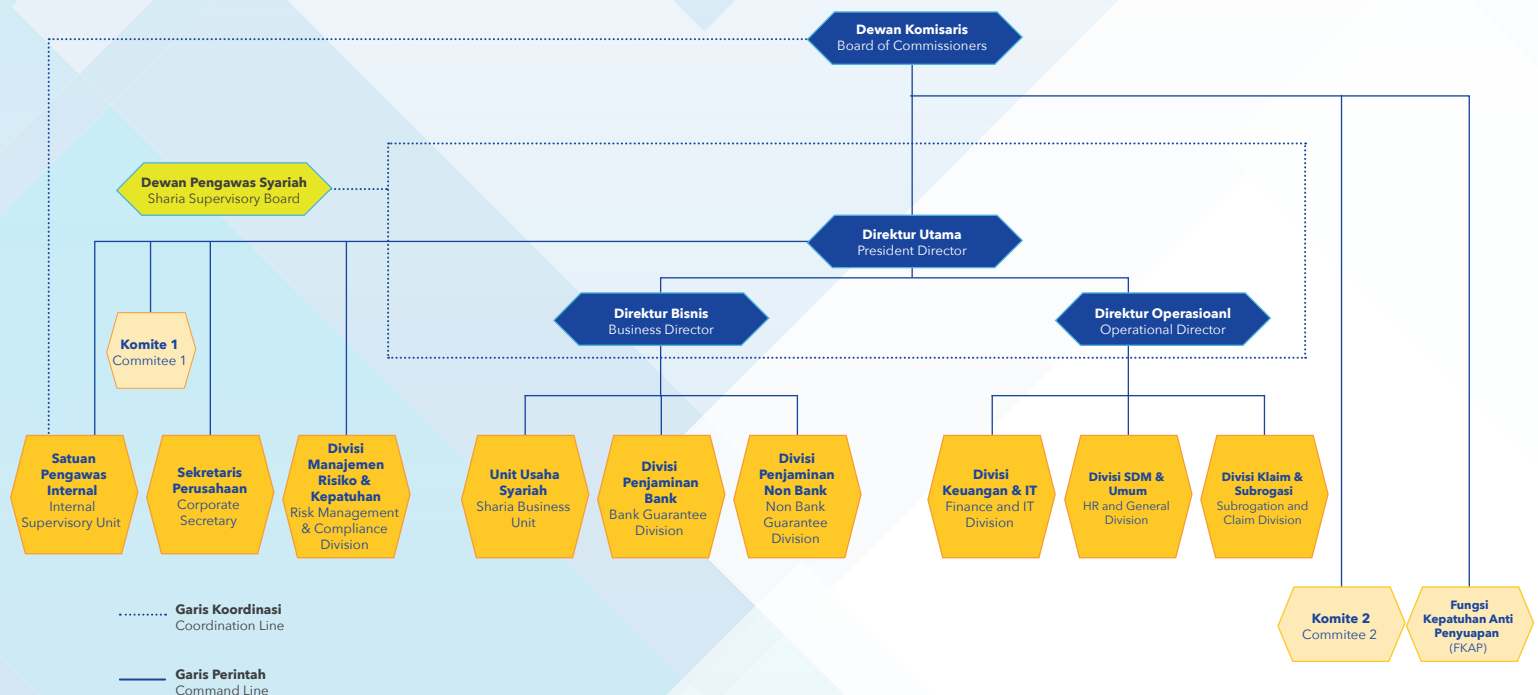
1. Fungsi Satuan Pengawas Internal
2. Fungsi Sekretaris Perusahaan
3. Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan
4. Fungsi Penjaminan Bank
5. Fungsi Penjaminan Non Bank
6. Fungsi Unit Usaha Syariah (UUS)
7. Fungsi Keuangan dan IT
8. Fungsi SDM dan Umum
9. Fungsi Klaim dan Subrogasi

Struktur organisasi Perseroan yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The Company's organizational structure involves the functions, including but not limited to, as follows:

1. Internal Supervisory Unit Function
2. Corporate Secretary Function
3. Risk Management and Compliance Function
4. Bank Guarantee Function
5. Non-Bank Guarantee Function
6. Sharia Business Unit (UUS) Function
7. Finance and IT Function
8. HR and General Affairs Function
9. Claim and Subrogation Function

The Company's applicable organization structure until 31 December 2024 is as shown below:



Keterangan | Description:

- **Komite 1 | Committee 1:**
Komite di bawah Direktur Utama yang mencakup Komite Investasi, Komite Penjaminan, Komite Klaim dan Komite SDM
Committees under the President Director consists of Investment Committee, Guarantee Committee, Claim Committee and Human Resource (HR) Committee
- **Komite 2 | Committee 2:**
Komite di bawah Dewan Komisaris seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan lainnya
Committees under the Board of Commissioners such as the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and others
- **FKAP**
Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
Anti-Bribery Compliance Function



Keanggotaan dalam Asosiasi dan Organisasi

Membership in Associations and Organizations

Dalam rangka memperluas kemitraan, meningkatkan kredibilitas, serta menginisiasi kolaborasi, Perseroan secara aktif berpartisipasi sebagai anggota aktif di sejumlah asosiasi industri dan organisasi, antara lain:

In the effort to expand partnership, improve credibility, as well as initiate collaboration, the Company's actively takes part as active member in a number of industrial and organizational associations, among others as follows:

No	Nama Asosiasi dan Organisasi Name of Association and Organization	Posisi Perseroan dalam Asosiasi dan Organisasi Compan's Position in Association and Organization	Lingkup Nasional atau Internasional National or International Scope
1	Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) Indonesian Association of Guarantee Compnies (ASIPPINDO)	Sekretaris Jenderal (Sekjen) Secretary General	Nasional National
2	Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (ASPENDA) Regional Associatio of Guarantee Companies (ASPENDA)	Wakil I Deputy I	Nasional National
3	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Alternative Dispute Settlement Association (LAPS)	Anggota Member	Nasional National

Perubahan Komposisi Manajemen

Changes of Management Composition

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris.

Change in Composition of the Board of Commissioners

Until 31 December 2024, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners.

Periode 1 Januari s.d 15 Maret 2024 Period of 1 January to 15 March 2024	Periode 15 Maret 2024.d 31 Desember 2024 Period of 15 March to 31 December 2024	Keterangan Description
Andrianto Wahyu Adi (Komisaris Utama) * *) Menunggu hasil <i>Fit and Proper Test</i> (President Committsioner)* *) Waiting for results of Fit and Proper Test	Andrianto Wahyu Adi (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Pengangkatan Komisaris Utama tertuang pada Akta No. 37 tanggal 15 Maret 2024. The appointment of the President Commissioner is stated in Deed No. 37 dated 15 March 2024

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024

Composition of the Board of Commissioners as of 31 December 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa dan Periode Jabatan Term of Office
Andrianto Wahyu Adi	Komisaris Utama President Commissioner	- Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 871 Tahun 2023 dan 527/072 tanggal 15 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Perseroan - Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" Nomor 37 tanggal 15 Maret 2024 - Shareholders Decree No. 871 of Year 2023 and 527/072 of 15 December 2023 on the Dismissal and Appointment of Commissioners of the Company - Deed of Statement of Decision Outside the General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Regional Company) or abbreviated as "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" No. 37 dated 15 March 2024	15 Desember 2023 – 15 Desember 2027 15 December 2023 – 15 December 2027

Perubahan Komposisi Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2024, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi.

Change in Composition of the Board of Directors

Until 31 December 2024, there were no changes in the composition of the Board of Directors.

Susunan Keanggotaan Direksi per 31 Desember 2024

Composition of the Board of Directors as of 31 December 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa dan Periode Jabatan Term of Office
Agus Supriadi	Direktur Utama President Director	Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Nomor 18 tanggal 21 Maret 2023 Deed of Statement of Decision Outside of the General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jjakarta No. 18 dated 21 March 2023	21 Maret 2023 – 3 September 2026 21 March 2023 – 3 September 2026
Jimmi Setya Budi	Direktur Operasional Director of Operations	Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Nomor 18 tanggal 21 Maret 2023 Deed of Statement of Decision Outside of the General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta No. 18 dated 21 March 2023	21 Maret 2023 – 6 Maret 2028 21 March 2023 – 6 March 2028



Perubahan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Sampai dengan 31 Desember 2024, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Pengawas Syariah.

Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa dan Periode Jabatan Term of Office
Masykuri Abdillah	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of Sharia Supervisory Board	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" Nomor 61 tanggal 22 Maret 2024 Deed of Statement of Decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Regional Company) or abbreviated as "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" No. 61 dated 22 March 2024	22 Maret 2024 – 21 Maret 2028 22 March 2024 – 21 March 2028
Euis Amalia	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" Nomor 61 tanggal 22 Maret 2024 Deed of Statement of Decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jjakarta (Regional Company) or abbreviated as "PT Jamkrida Jjakarta (erseroda)" No. 61 dated 22 March 2024	22 Maret 2024 – 21 Maret 2028 22 March 2024 – 21 March 2028

Change in Composition of the Sharia Supervisory Board

Until 31 December 2024, there were no changes in the composition of the Sharia Supervisory Board.

Composition of the Sharia Supervisory Board as of 31 December 2024

Kepala Divisi

Komposisi Kepala Divisi Perseroan per 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position
Regina Kristiningsih	- Plt. Kepala SPI dan Kepatuhan - Sekretaris Perusahaan - Acting Head of SPI and Compliance - Corporate Secretary
Sonny Setiawan	Kepala Divisi Penjaminan Bank dan Plt. Kepala Divisi Penjaminan Non Bank Head of Bank Guarantee Division and Acting Head of Non-Bank Guarantee Division
Subhan Sahlan	Kepala Divisi Keuangan, Informasi Teknologi, dan Sumber Daya Manusia Head of Finance, Information Technology and Human Resources Division
Mohamad Irwan Ramdhan	Kepala Divisi Kerja Sama Usaha, Subrogasi, dan Manajemen Risiko Head of Business cooperation, Subrogation, and Risk Management Division
Antoni Ludfi Arifin	Kepala Divisi Unit Usaha Syariah Head of Sharia Business Unit

Division Head

Composition of the Company's Division Heads as of 1 January 2024 is as follows:

Komposisi Kepala Divisi Perseroan per 1 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position
Wirendra Satwika Bimantara	Plt. Kepala SPI Acting Head of SPI
Regina Kristiningsih	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Mohamad Irwan Ramdhan	- Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan - Plt. Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi - Head of Risk Management and Compliance Division - Acting Head of Claim and Subrogation Division
Sonny Setiawan	Kepala Divisi Penjaminan Bank Head of Bank Guarantee Division
Reza Putra Yodhana	Plt. Kepala Divisi Penjaminan Non Bank Head of Non-Bank Guarantee Division
Sapto Bintoro	Kepala Unit Usaha Syariah Head of Sharia Business Unit
Subhan Sahlan	Kepala Divisi Keuangan dan Informasi Teknologi (IT) Head of Finance and Information Technology (IT) Division
Akhmad Fariz	Plt. Kepala Divisi SDM dan Umum Acting Head of HR and General Affairs Division

Composition of the Company's Division Heads as of 1 Decembmer 2024 is as follows:

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners



Andrianto Wahyu Adi*

Komisaris Utama
President Commissioner

Data Pribadi Personal Data

Warga Negara: Indonesia
Usia: 60 tahun
Domisili: DKI Jakarta
Nationality: Indonesian
Age: 60 years
Domicile: DKI Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No. 37 tanggal 15 Maret 2024.
Deed of Statement of Decision of the Shareholders Outside of the General Meeting of Shareholders (Circular) No. 37 dated 15 March 2024.

Riwayat Pendidikan Educational Background

- S1 Ekonomi Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (1989)
- S2 Magister *Marketing and Finance* dari Emory University, Atlanta, Georgia (1997).
- Bachelor's degree (S1) in Economic Management from Universitas Gadjah Mada (1989)
- Master's degree (S2) in Marketing and Finance from Emory University, Atlanta, Georgia (1997)

Riwayat Karier Professional Background

- Departemen *Head Trade Finance & Services* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005 – 2010);
- *Group Head Wholesale Transaction Banking Solution* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011 – 2014);
- *Group Head Product* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014 – 2015);
- *Group Head Transaction Banking Wholesale Product* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015);
- *Head of Transaction Banking 1* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 – 2017);
- Direktur Pengadaan Perum Bulog (2017 – 2018);
- Direktur Komersial Perum Bulog (2018);
- Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) (2018 – 2020).
- Departemen Head of Trade Finance & Services at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005 – 2010);
- Group Head of Wholesale Transaction Banking Solution at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011 – 2014);
- Group Head of Product at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014 – 2015);
- Group Head of Transaction Banking Wholesale Product at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015);
- Head of Transaction Banking 1 at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 – 2017);
- Director of Procurement at Bulog Company (2017 – 2018);
- Director of Commerce at Bulog Company (2018);
- President Director of PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) (2018 – 2020).

Rangkap Jabatan Concurrent Position

- *Senior Advisor* PT Bank BNI (Persero) Tbk (2023 – sekarang).
- Senior Advisor at PT Bank BNI (Persero) Tbk (2023 – Present).

Hubungan Afiliasi Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.
No affiliation with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with Major/Controlling Shareholder.

* Beliau menjabat sejak 15 Maret 2024
In office since 15 March 2024



Profil Direksi

Profile of the Board of Directors

Agus Supriadi

Direktur Utama
President Director

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara: Indonesia Usia: 57 tahun Domisili: DKI Jakarta Nationality: Indonesian Age: 57 years Domicile: DKI Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Nomor 18 tanggal 21 Maret 2023 Deed of Statement of Decision Outside of the General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta No. 18 dated 21 March 2023.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada (1992); • Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Islam Indonesia (1993); • Magister Manajemen dari Universitas Andalas (2002). • Bachelor's degree (Sarjana) in Law from Universitas Gadjah Mada (1992); • Bachelor's degree (Sarjana) in Economic Management from Universitas Islam Indonesia (1993); • Master's degree (Magister) in Management from Universitas Andalas (2002).
Riwayat Karier Professional Background	• Staf Muda I Bagian Penjaminan Komoditi Industri di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (1996 – 1998); • Staf Muda Bagian Pengendalian, Divisi Penjaminan Bank di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (1996 – 2000); • Staf Muda I Kantor Cabang Padang di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2000 – 2003); • Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Samarinda di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2003 – 2005); • Kepala Bagian SDM di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2005 – 2007); • Kepala Bagian Pengelola Gedung, Divisi SDM dan Umum di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2007 – 2008); • Kepala Bagian Operasional Samarinda di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2008 – 2009); • Kepala Bagian Pengendalian Syariah di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2009 – 2010); • Kepala Bagian Penjaminan Syariah 2 di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2010 – 2012); • Kepala Bagian Operasional 1, Kantor Cabang DKI di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2012); • Pemimpin Kantor Anak Cabang Banjarmasin di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2012 – 2013); • Pemimpin Kantor Cabang Banjarmasin di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2013 – 2016); • Pemimpin Kantor Cabang Samarinda di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2015 – 2016); • Pemimpin Kantor Cabang Semarang di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2016); • Pemimpin Kantor Cabang Surabaya di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2016 – 2017); • Pranata Utama Direktorat Bisnis Penjaminan di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2017); • Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2017 – 2018); • Pemimpin Wilayah III Jakarta di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2018 – 2021); • Direktur Bisnis dan Plt. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko di PT Jamkrida Jakarta (2021 – 2022); • Plt. Direktur Utama di PT Jamkrida Jakarta (2022 – 2023).



- Junior Staff I of Industrial Commodity Guarantee Division at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (1996 – 1998);
- Junior Staff of Control Division, Bank Guarantee Division at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (1996 – 2000);
- Junior Staff I of Padang Branch Office at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2000 – 2003);
- Head Operational Division of Samarinda Branch Office at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2003 – 2005);
- Head of HR Division at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2005 – 2007);
- Head of Building Management Division, HR and General Affairs Division at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2007 – 2008);
- Head of Samarinda Operations at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2008 – 2009);
- Head of Sharia Control at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2009 – 2010);
- Head of Sharia Guarantee 2 at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2010 – 2012);
- Head of Operations 1, DKI Branch Office at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2012);
- Head of Banjarmasin subsidiary Branch Office at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2012 – 2013);
- Head of Banjarmasin Branch Office at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2013 – 2016);
- Head of Samarinda Branch Office at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2015 – 2016);
- Head of Semarang Branch Office at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2016);
- Head of Surabaya Branch Office at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2016 – 2017);
- Main Officer of Guarante Business Directorate at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2017);
- Head of Claims and Subrogation Division at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2017 – 2018);
- Head of Region III Jakarta at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2018 – 2021);
- Business Director and Acting Director of Finance and Risk Management at PT Jamkrida Jakarta (2021 – 2022);
- Acting President Director at PT Jamkrida Jakarta (2022 – 2023).

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan di Perseroan dan Perusahaan lain.
No concurrent position in the Company and other companies.

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.
No affiliation with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with Major/Controlling Shareholder.



Jimmi Setya Budi
Direktur Operasional
Director of Operations

Data Pribadi
Personal Data

Warga Negara: Indonesia
Usia: 44 tahun
Domisili: Depok, Jawa Barat
Nationality: Indonesian
Age: 44 years
Domicile: Depok, West Java

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Nomor 18 tanggal 21 Maret 2023
Deed of Statement of Decision Outside of the General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta No. 18 dated 21 March 2023.

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya (2002);
- Bachelor's degree (Sarjana) in Civil Engineering from Universitas Brawijaya (2002)

Riwayat Karier
Professional Background

- *Operation Officer* di PT Bank Danamon Indonesia (2004-2007);
- *Flying Operational Officer* di PT Bank Danamon Indonesia (2007-2008);
- *Unit Manager* di PT Bank Danamon Indonesia (2009-2012);
- *Flying Unit Manager* di PT Bank Danamon Indonesia (2012-2013);
- *Cluster Manager* di PT Bank Danamon Indonesia (2013-2017);
- Kepala Divisi Klaim, Subrogasi, dan Manajemen Risiko di PT Jamkrida Jakarta (2018-2023).
- Operation Officer at PT Bank Danamon Indonesia (2004-2007);
- Flying Operational Officer at PT Bank Danamon Indonesia (2007-2008);
- Unit Manager at PT Bank Danamon Indonesia (2009-2012);
- Flying Unit Manager at PT Bank Danamon Indonesia (2012-2013);
- Cluster Manager at PT Bank Danamon Indonesia (2013-2017);
- Head of Claims, Subrogation, and Risk Management Division at PT Jamkrida Jakarta (2018-2023).

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan di Perseroan dan Perusahaan lain.
No concurrent position in the Company and other companies.

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.
No affiliation with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with Major/Controlling Shareholder.



Profil Dewan Pengawas Syariah

Profile of the Sharia Supervisory Board



Masykuri Abdillah
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Data Pribadi Personal Data

Warga Negara: Indonesia
Usia: 66 tahun
Domisili: Tangerang Selatan, Banten
Nationality: Indonesian
Age: 66 years
Domicile: South Tangerang, Banten

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Akta Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn No. 61 Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jakarta dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0143902 tanggal 05 April 2024.
Notarial Deed of Ashoya Ratam, SH, MKn No. 61 Year 2024 dated 22 March 2024 regarding Reappointment of the Sharia Supeprvisory Board of PT Jamkrida Jakarta and registered in the Legal Entity Adminstration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0143902 dated 5 April 2024.

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Sarjana Muda dari Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ), Jakarta (1981);
- Sarjana Jurusan Muamalat dari Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1985);
- Doktor (S3) Bidang Studi Islam, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Timur Tengah dari Universitas Hamburg, Jerman (1995).
- Bachelor (Sarjana Muda) from Sharia Faculty of Al-Quran Science College (PTIQ), Jakarta (1981)
- Bachelor's degree (Sarjana) in Muamalat from Sharia Faculty of IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1985);
- Doctorate (S3) in Islamic Studies, Middle Eastern History and Culture Major from University of Hamburg, Germany (1995)

Riwayat Karier Professional Background

- Ketua Jurusan Muamalat/Ekonomi Islam, Fakultas Syariah di IAIN Jakarta (1997 – 1998);
- Pembantu Rektor IV (Bidang Kerja Sama) di IAIN Jakarta (2000 – 2002);
- Pembantu Rektor I (Bidang Akademik) di UIN Jakarta (2003 – 2007);
- Sekretaris Anggota Wantimpres (2008-2014);
- Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Asuransi Squeslife Syariah (2008 – 2012);
- Direktur Sekolah Pascasarjana (SPs) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015 – 2019);
- Staf Khusus Wakil Presiden RI (2019-2024);
- Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Jamkrida Jakarta (2019 – sekarang).
- Head of Muamalah (Islamic Economics) Department, Faculty of Sharia at IAIN Jakarta (1997 – 1998);
- Vice Chancellor IV (Field of Cooperation) at IAIN Jakarta (2000 – 2002);
- Vice Chancellor I (Field of Academic) at UIN Jakarta (2003 – 2007);
- Secretary of Wantimpres Members (2008-2014);
- Chairman of Sharia Supervisory Board (DPS) at Squeslife Sharia Insurance (2008 – 2012);
- Director of Postgraduate School at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015 – 2019);
- Special Staff to the Vice President of the Republic of Indonesia (2019-2024);
- Chairman of the Sharia Supervisory Bard (DPS) at Jamkrida Jakarta (2019 – present).

Rangkap Jabatan Concurrent Position

- Dosen/Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum serta Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1996 – sekarang);
- Komisaris di perusahaan PLN Indonesia Power Services (2022 – sekarang).
- Professor at the Faculty of Sharia and Law and Postgraduate School at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1996 – present);
- Commissioner at PLN Indonesia Power Services (2022 – present).

Hubungan Afiliasi Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.
No affiliation with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with Major/Controlling Shareholder.



Euis Amalia

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of the Sharia Supervisory Board

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara: Indonesia Usia: 53 tahun Domisili: Tangerang Selatan, Banten Nationality: Indonesian Age: 53 years Domicile: South Tangerang, Banten
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Akta Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn No. 61 Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jakarta dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0143902 tanggal 05 April 2024. Notarial Deed of Ashoya Ratam, SH, MKn No. 61 Year 2024 dated 22 March 2024 regarding Reappointment of the Sharia Supeprvisory Board of PT Jamkrida Jakarta and registered in the Legal Entity Adminstration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0143902 dated 5 April 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Jurusan Peradilan Agama dari UIN Syarif Hidayatullah (1995); • Magister Pengkajian Islam dari UIN Syarif Hidayatullah (1999); • Doktor Pengkajian Islam/Konsentrasi Ekonomi Islam dari UIN Syarif Hidayatullah (2008). • Bachelor's degree in Religious Court from UIN Syarif Hidayatullah (1995); • Master's degree (Magister) in Islamic Studies from UIN Syarif Hidayatullah (1999); • Doctorate degree in Islamic Studies/Concentration on Islamic Economy from UIN Syarif Hidayatullah (2008).
Riwayat Karier Professional Background	• Ketua Jurusan/Program Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ekonomi Islam (2006 – 2014); • Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014 – 2019). • Head of Department/Study Program at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ekonomi Islam (2006 – 2014); • Assistant Dean for Departmemnt of Academics, Faculty of Sharia and Law at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014 – 2019).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Asesor di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) (2009 – sekarang); • Dewan Pengawas Syariah (DPS) di PT MBK Ventura Unit Syariah (2010 – sekarang); • Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN (S1, S2), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (S1, S3) dan Pascasarjana UIN (S2, S3) (2019 – sekarang). • Asesor at the National Accreditation Board for Higher Education (BAN-PT) (2009 – present); • Sharia Supeprvisory Board (DPS) at PT MBK Ventura Unit Syariah (2010 – sekarang); • Professor at Faculty of Sharia and Law at UIN (S1, S2), Faculty of Economics ang Business (S1, S3) and Postgraduate at UIN (S2, S3) (2019 – present).
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali. No affiliation with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with Major/Controlling Shareholder.





Profil Kepala Divisi

Profile of the Head Division

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara: Indonesia Usia: 38 tahun Domisili: DKI Jakarta Nationality: Indonesian Age: 38 years Domicile: DKI Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Tarumanagara; • Magister Manajemen dari PPM <i>School of Management</i>. • Bachelor's degree (Sarjana) in Mechanical Engineering from Universitas Tarumanagara; • Master's degree (Magister) in Management from PPM School of Management.
Riwayat Karier Professional Background	• <i>General Manager Asisstant for R&D</i> di PT Inter Pratama Studio Laboratorium (Interstudio) (2011-2012) • Mengawali karier di PT Jamkrida Jakarta sebagai Staf Keuangan, SDM dan Administrasi Umum (sejak 2016); • Mendapat tugas tambahan sebagai Staf Dewan Komisaris (2021 - 2022); • Kepala Bagian SDM (2021 - 2024); • Plt. Kepala SPI (2024 - sekarang). • Assistant to General Manager of R&D at PT Inter Pratama Studio Laboratorium (Interstudio) (2011-2012) • Started career at PT Jamkrida Jakarta as Staff to Finance, HR and General Administration (since 2016); • Additional duties as Staff to the Board of Commissioners (2021 - 2022); • Head of HR Section (2021 - 2024); • Acting Head of SPI (2024 - present).



Wirendra Satwika Bimantara
Plt. Kepala SPI
Acting Head of SPI

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara: Indonesia Usia: 50 tahun Domisili: Tangerang Selatan, Banten Nationality: Indonesian Age: 50 years Domicile: South Tangerang, Banten
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Manajemen Keuangan dari Universitas Dr. Soetomo, Surabaya; • Bachelor's degree (Sarjana) in Financial Management fom Universitas Dr. Soetomo, Surabaya;
Riwayat Karier Professional Background	• Manajer Keuangan, SDM, dan Administrasi Umum di PT Jamkrida Jatim (2009 - 2014); • Mengawali karier di PT Jamkrida Jakarta sebagai Manajer Keuangan, SDM, dan Administrasi Umum (sejak 2014); • Manajer Penjaminan Non Bank (2017 - 2019) • Kepala SPI dan Kepatuhan (2019 - 2022); • Plt. Kepala SPI dan Kepatuhan (2022 - 2024) • Sekretaris Perusahaan (2022 - sekarang) • Finance, HR and General Administration Manager at PT Jamkrida Jatim (2009 - 2014); • Started career at PT Jamkrida Jakarta as Manager of Finance, HR, and General Administration, (since 2014); • Manager of Non-Bank Guarantee (2017 - 2019) • Head of SPI and Compliance (2019 - 2022); • Acting Head of SPI and Compliance (2022 - 2024) • Corporate Secretary (2022 - present)



Regina Kristiningsih
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Profil Kepala Divisi

Profile of the Head Division



Mohamad Irwan Ramdhan

Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Plt. Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi
Head of Risk Management and Compliance
Acting Head of Claims and Subrogation

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara: Indonesia Usia: 40 tahun Domisili: Bekasi, Jawa Barat Nationality: Indonesian Age: 40 years Domicile: Bekasi, West Java
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Bachelor's degree in International Relations from Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Riwayat Karier Professional Background	- Operational Banking di Bank Muamalat (2008 – 2013); - Financing/Credit Analyst Manager di Bank Muamalat (2014 – 2019); - Credit Risk & Policy Department Head di Bank Sahabat Sampoerna (2019 – 2022); - Credit & Risk Manager di TaniHub Grup (2022); - Mengawali karier di PT Jamkrida Jakarta sebagai Kepala Divisi Klaim, Subrogasi dan Manajemen Risiko (sejak 2024); - Kepala Plt. Divisi Klaim dan Subrogasi (2024 – sekarang); - Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan (2023 – sekarang); - Operational Banking at Bank Muamalat (2008 – 2013); - Financing/Credit Analyst Manager at Bank Muamalat (2014 – 2019); - Credit Risk & Policy Department Head at Bank Sahabat Sampoerna (2019 – 2022); - Credit & Risk Manager at TaniHub Grup (2022); - Started career at PT Jamkrida Jakarta as Head of Claims, Subrogation and Risk Management Division (since 2024); - Acting Head of Claims and Subrogation Division (2024 – present); - Head of Risk Management and Compliance Division (2023 – present).



Sonny Setiawan

Kepala Divisi Penjaminan Bank
Head of Bank Guarantee Division

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara: Indonesia Usia: 47 tahun Domisili: Depok, Jawa Barat Nationality: Indonesian Age: 47 years Domicile: Depok, West Java
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi, Jurusan Manajemen dari Universitas Merdeka Malang. Bachelor's degree in Economics, Major in Management from Universitas Merdeka Malang.
Riwayat Karier Professional Background	- Financial Advisor di PT AIG Lippo Life (2002); - Kepala Gudang Area Malang, Penagihan Area Surabaya, dan Salesman Area Malang di PT Megacahaya Teknikatama (distributor resmi Phillips Lighting) (2002 – 2004); - Sales Officer Unit Lawang, Unit Manager Singosari dan Batu, Flying Unit Manager Malang, Cluster Manager Jember dan Banyuwangi, Regional Funding dan Services Manager Malang di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004 – 2015); - Mengawali karier di PT Jamkrida Jakarta sebagai Kepala Divisi Penjaminan (sejak 2015 – sekarang). - Financial Advisor at PT AIG Lippo Life (2002); - Head Warehouse for Malang Area, Collection for Surabaya Area, and Salesman for Malang Area at PT Megacahaya Teknikatama (official distributor of Phillips Lighting) (2002 – 2004); - Sales Officer of Lawang Unit, Manager Singosari and Batu Unit, Malang Flying Unit Manager, Cluster Manager for Jember and Banyuwangi, Regional Funding and Malang Services Manager at PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004 – 2015); - Started career at PT Jamkrida Jakarta as Head of Guarantee Division (since 2015 – present).



Data Pribadi Personal Data	Warga Negara: Indonesia Usia: 43 tahun Domisili: DKI Jakarta Nationality: Indonesian Age: 43 years Domicile: DKI Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Akuntansi dari Universitas Brawijaya Bachelor's degree (Sarjana) in Accounting from Universitas Brawijaya
Riwayat Karier Professional Background	- Akuntan di Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan (2006 - 2014); - Mengawali karier di PT Jamkrida Jakarta sebagai Manajer Akuntansi (sejak 2015). - Kepala Unit Usaha Syariah di PT Jamkrida (2019 - 2021); - Kepala Divisi Keuangan, IT & SDM Umum di PT Jamkrida (2021 - 2024); - Kepala Divisi Keuangan & IT (2024 - sekarang). - Accountant at Public Accountant Firm Bambang, Sutjipto Ngumar and Partners (2006 - 2014); - Started career at PT Jamkrida Jakarta as Accounting Manager (since 2015); - Head of Sharia Business Unit at PT Jamkrida (2019 - 2021); - Head of Finance, IT & General HR Division at PT Jamkrida (2021 - 2024); - Head of Finance & IT Division (2024 - present).



Subhan Sahlan
Kepala Divisi Keuangan dan informasi
Teknologi (IT)
Head of Finance and Information
Technology (IT) Division

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara: Indonesia Usia: 34 tahun Domisili: Depok, Jawa Barat Nationality: Indonesian Age: 34 years Domicile: Depok, West Java
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Jenderal Soedirman Bachelor's degree (Sarjana) in Electrical Engineering from Universitas Jenderal Sudirman
Riwayat Karier Professional Background	<i>Project Manager</i> Super Camp Singapore Infinity (2014 - 2015) - Mengawali karier di PT Jamkrida Jakarta sebagai Staf Divisi Penjaminan (sejak 2015); - Kepala Bagian Penjaminan Bank (2021 - 2024); - Plt. Kepala Divisi SDM dan Umum (2024 - sekarang). - Project Manager of Super Camp Singapore Infinity (2014 - 2015) - Started career at PT Jamkrida Jakarta as Staff of Guarantee Division (since 2015); - Head of Bank Guarantee Section (2021 - 2024); - Acting Head of HR and General Affairs Division (2024 - present).



Akhmad Fariz
Plt. Kepala Divisi SDM dan Umum
Acting Head of HR and General Affairs
Division



Reza Putra Yodhana
Plt. Kepala Divisi Penjaminan Non Bank
Acting Head of Non-Bank Guarantee
Division

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara: Indonesia Usia: 35 tahun Domisili: DKI Jakarta Nationality: Indonesian Age: 35 years Domicile: DKI Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Agribisnis dari Universitas Padjajaran Bachelor's degree (Sarjana) in Agribusiness from Universitas Padjajaran
Riwayat Karier Professional Background	• Staf Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Kehutanan dan Pertanian (2014 - 2017); • Mengawali karier di PT Jamkrida Jakarta sebagai Staf Divisi Penjaminan (sejak 2017); • Kepala Bagian Penjaminan Non Bank di PT Jamkrida (2021 - 2024); • Plt. Kepala Divisi Penjaminan Non Bank di PT Jamkrida (2024 - sekarang). • Staf in the Agriculture Section of the Department of Food Security, Forestry and Agriculture Service (2014 - 2017); • Strted career at PT Jamkrida Jakarta as Staff in Guarantee Division (since 2017); • Head of the Non-Bank guarantee Section at PT Jamkrida (2021 - 2024); • Acting Head of Non-Bank Guarantee Division at PT Jamkrida (2024 - present).



Sapto Bintoro
Kepala Unit Usaha Syariah
Head of the Sharia Business Unit

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara: Indonesia Usia: 48 tahun Domisili: Bekasi, Jawa Barat Nationality: Indonesian Age: 48 years Domicile: Bekasi, West Java
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta Bachelor's degree (Sarjana) in Economics from the Institute of Economic Science of Ahmad Dahlan Jakarta
Riwayat Karier Professional Background	• <i>Risk and Collection Officer</i> Divisi BSK (Bisnis Kartu) di PT Bank BNI (2000 - 2010); • <i>Manager Risk and Collection</i> Divisi Card Business Division (CBD) di PT Bank BNI (2010 - 2019); • Direktur Bisnis di PT. BPRS ATTAQWA (2019 - 2020); • <i>Head Collection</i> Region 3 Semarang, Jawa Tengah di PT Home Credit Indonesia (2020 - 2021); • <i>Deputy General Manager</i> Administrasi pembiayaan, Remedial dan Recovery Division di PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah (2021 - 2024); • Mengawali karier di PT Jamkrida Jakarta sebagai Kepala Unit Usaha Syariah (sejak 2024 - sekarang). • Risk and Collection Officer Divisi BSK (Card Business) at PT Bank BNI (2000 - 2010); • Manager of Risk and Collection of Card Business Division (CBD) at PT Bank BNI (2010 - 2019); • Director of Business at PT. BPRS ATTAQWA (2019 - 2020); • Head of Collection Region 3 Semarang, Central Java at PT Home Credit Indonesia (2020 - 2021); • Deputy General Manager of Financing Administration, Remedial and Recovery Division at PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah (2021 - 2024); • Started career at PT Jamkrida Jakarta as Head of Sharia Business Unit (since 2024 - present).



Sumber Daya Manusia

Human Resources

Komitmen Kesetaraan Terhadap Seluruh Karyawan

Perseroan menjamin proses rekrutmen terhadap seluruh karyawan dari semua jenjang telah dilakukan secara transparan dan adil yang didasarkan pada kualifikasi yang dibutuhkan. Prinsip kesetaraan gender juga diberlakukan secara tegas dan lugas, mulai dari proses rekrutmen hingga perlakuan kerja, termasuk promosi dan pemberian hak-hak karyawan. Tidak ada diskriminasi dalam setiap lingkungan kerja. Perseroan tidak memberikan keistimewaan tertentu terhadap jenis kelamin, suku, agama, dan ras, serta hal-hal lain yang tidak relevan dengan scope kebutuhan SDM. Dengan kata lain, setiap karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan mengembangkan karier berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Dalam menjaga konsistensi kinerja karyawan, Perseroan menerapkan sistem penilaian kinerja karyawan melalui *Key Performance Indicator* (KPI) yang dievaluasi setiap tahun. KPI mengukur dan menilai pencapaian dan penyelesaian kerja karyawan berdasarkan indikator indikator yang telah ditetapkan.

KPI juga menilai perilaku karyawan sesuai dengan tata nilai yang berlaku. KPI yang baik akan menentukan keputusan manajemen untuk peningkatan kesejahteraan tiap karyawan dan peningkatan jenjang karier di Perseroan. Dengan adanya sistem penilaian ini, Perseroan berharap semangat kerja karyawan terus meningkat, iklim kompetisi terbangun secara sehat, dan kreativitas maupun inovasi karyawan terus berkembang.

Promosi jabatan dan *grade* didasarkan pada penilaian kinerja melalui seleksi berjenjang. Setiap karyawan berhak mendapatkan program pelatihan secara intensif untuk mempercepat proses adaptasi dengan pekerjaan mereka di lapangan, juga sebagai bagian dari pengembangan karier.

Dibingkai semangat persatuan, Perseroan menjadikan keberagaman yang hadir di tengah lingkungan kerja sebagai modal untuk memperluas wawasan dan sudut pandang dalam menyusun strategi keberlanjutan yang tepat sehingga Perseroan senantiasa dapat mempertahankan roda bisnisnya.

Demografi Karyawan

Hingga akhir tahun 2024, jumlah karyawan Perseroan baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap tercatat sebanyak 79 orang, meningkat 113% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat berjumlah 70 orang. Berikut ini adalah gambaran lebih rinci mengenai demografi karyawan Perseroan berdasarkan beberapa kriteria utama:

Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin

HR Composition based on Gender

Jenis Kelamin Gender	2024		2023	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Laki-laki Male	49	62 %	39	56 %
Perempuan Female	30	38 %	31	44 %
Jumlah Total	79	100 %	70	100 %

Commitment To Equality For All Employees

The Company guarantees that the recruitment process for all employees at all levels is carried out transparently and fairly based on the required qualifications. The principle of gender equality is also firmly and clearly applied, starting from the recruitment process to working treatment, including on promotion and provision of employees' rights. There is no discrimination in each of the working environment. The Company gives no certain privileges based on gender, ethnicity, religion, and race, as well as other matters not relevant to the scope of HR requirements. In other words, each employee is provided with the same opportunity to work and develop career based on each respective competency. In maintaining consistency in employees' performance, the Company applies the employee performance assessment system through the Key Performance Indicator (KPI) assessed every year. The KPI measures and assessed the achievement and completion of the employee's tasks based on the predetermined indicators.

The KPI also assesses employees' behaviors in accordance with applicable values. Proper KPI will determine the decision of the management to improve the welfare of each employee and the career development in the Company. With such assessment system, the Company hopes that employees' work motivation will continue to increase, thus the competitive climate builds up soundly, and employees' creativity as well as innovation continue to flourish.

Job and grade promotion is based on performance assessment through tiered selection. Each employee has the right to obtain intensive training program in order to accelerate adaptation process with their respective work in the field, also as part of career development.

Framed with the spirit of integration, the Company places diversity that exists within the working environment as a resource to expand the horizon and view in establishing the right sustainability strategies so that the Company continuously keep the wheels of business turning.

Employee Demographics

Until the end of the year 2024, the number of employees of the Company, both with permanent and non-permanent status, totaled 79 persons, an increase by 113% if compared to the year 2023 with 70 persons. Following is a more detailed overview of the Company's employee demographics based on several main criteria:



Komposisi SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

HR Composition based on Level of Education

Jenjang Pendidikan Level of Education	2024		2023	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Profesor PhD	2	3 %	2	3 %
Gelar Doktor (S3) Doctorate (S3)	-	-	1	1 %
Magister (S2) Master (S2)	9	11 %	9	13 %
Sarjana (S1) Bachelor (S1)	56	71 %	47	67 %
Diploma (D1 – D3) Diploma (D1-D3)	3	4 %	1	1 %
SMA atau Jenjang Sederajat High School or Equivalent Level	9	11%	10	14 %
Jumlah Total	79	100 %	70	100 %

Komposisi SDM berdasarkan Level Jabatan

HR Composition based on Level of Position

Level Jabatan Position Level	2024		2023	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	1	1 %	0	0 %
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	2	3 %	2	3 %
Direksi Board of Directors	2	3 %	2	3 %
Komite Committee	2	3 %	1	1 %
Kepala Divisi Division Head	8	10 %	5	7 %
Kepala Bagian Section Head	11	14 %	6	9 %
Staf Staff	39	49 %	40	57 %
Pelaksana Executor	14	18 %	14	20 %
Jumlah Total	79	100 %	70	100 %

Komposisi SDM berdasarkan Usia

HR Composition based on Age

Usia Age	2024		2023	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
21 – 30 tahun 21–30 years	23	29 %	26	37 %
31 – 40 tahun 31-40 years	35	44 %	28	40 %
41 – 50 tahun 41-50 years	12	15 %	10	14 %
>50 tahun >50 years	9	11 %	6	9 %
Jumlah Total	79	100 %	70	100 %

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM

Mencari dan mempertahankan talenta-talenta terbaik selalu menjadi prioritas utama Perseroan. Di tengah kompetisi pencarian talenta yang semakin ketat, Perseroan terus berupaya mendapatkan talenta dengan kualitas terbaik melalui berbagai keunggulan yang Perseroan tawarkan sebagai perusahaan.

Perseroan juga berkomitmen untuk terus mengembangkan sumber daya manusia (SDM), terutama melalui inisiatif pelatihan dan pendidikan yang banyak berfokus kepada digitalisasi dan peningkatan kompetensi untuk bersaing di masa depan (*future-fit*). Selain itu, Perseroan juga terus memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan karyawan, baik secara fisik maupun mental.

Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah menyelenggarakan sejumlah program pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM, termasuk di dalamnya program pengembangan profesi lanjutan/ *Continuous Professional Education* (CPE) yang merupakan program lanjutan yang wajib diikuti oleh pemegang sertifikasi manajemen risiko untuk meningkatkan kompetensinya.

Employee Training and Competency Development

Searching and maintaining the best talents are always the Company's main priorities. Amidst the increasingly tight talent search competition, the Company continues to strive to find talents with the best qualities through various memthods of excellence offered by the Company as an entity.

The Company is also committed to always develop its human resources (HR), especially through training and educational initiatives that often focus on digitalization and competency improvement to compete for future-fit. In addition, the Company also continuously pays attention to the welfare and health of the employees, both physically as well as mentally.

Throughout the year 2024, the Company held a number of HR training and competency development programs, including Continuous Professional Education (CPE) as an advanced program mandatory for holders of risk management certification to improve their competency.



Adapun data sertifikasi kompetensi yang dimiliki karyawan Perseroan selama tahun 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Data on competency certification held by Company employees during the 2024 is presented in the table below:

No	Jenis Sertifikasi Kompetensi/Profesi Type of Competency/Professional Certification	Jumlah Karyawan Pemegang Sertifikasi Number of Employee with Certification
1.	Sertifikasi Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi (ATKRT)/ CRGP (Certified in Risk Governance Professional)	3 orang 3 employees
2.	Sertifikasi Ahli Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (AMROT)/ CRMP (Certified Risk Management Professional)	4 orang 4 employees
3.	Sertifikasi Analis Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (ANAMROT)/ CRMO (Certified Risk Management Officer)	10 orang 10 employees
4.	Sertifikasi Penjaminan Sub Bidang Pengelolaan – Kompetensi Direktur Bisnis Certification of Assurance Sub-Sector Management – Business Director Competency	2 orang 2 employees
5.	Sertifikasi Penjaminan Skema Direktur Investasi Certification of Investment Director Scheme Guarantee	2 orang 2 employees
6.	Sertifikasi Penjaminan Skema Staf Analis Klaim & Subrogasi Certification of Claims & Subrogation for Analyst Scheme Underwriting Staff	2 orang 2 employees
7.	Sertifikasi LSP Penjaminan Skema Staf Analis Penjaminan LSP Certification Assurance Scheme for Assurance Analyst Staff	8 orang 8 employees
8.	Sertifikasi Penjaminan Sub Bidang Tenaga Ahli Penjaminan – Kompetensi Tenaga Ahli Certification of Guarantee Sub-Field of Guarantee Experts – Guarantee Expert Competency	1 orang 1 employee
9.	Sertifikasi Penjaminan Sub Bidang Analis Penjaminan – Kompetensi Staf Analis Penjaminan Certification of Assurance Sub-Field of Assurance Analyst – Competency of Assurance Analyst Staff	7 orang 7 employees
10.	Sertifikasi Penjaminan Sub Bidang Pengawasan – Kompetensi Komisaris Certification of Assurance Sub-Sector of Supervision – Commissioners Competency	1 orang 1 employee
11.	Sertifikasi Pengawas Syariah Sharia Supervisory Certification	1 orang 1 employee
12.	Sertifikasi <i>Chartered Accountant</i> (CA) Chartered Accountant (CA) Certification	1 orang 1 employee
13.	Sertifikasi Profesi Akuntan – <i>Certified Public Accountant</i> (CPA) Certification of Accountant Profession – Certified Public Accountant (CPA)	1 orang 1 employee
14.	Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Certification of Government Procurement of Goods/Services	1 orang 1 employee
15.	Sertifikasi Layanan Pelanggan Customer Service Certification	2 orang 2 employees
16.	Sertifikasi Digital Marketing Digital Marketing Certification	2 orang 2 employees
17.	Sertifikasi Manajemen Sumber Daya Manusia Level Manajer Certification of Human Resources Management for Supervisor Level	1 orang 1 employee
18.	Sertifikasi Manajemen Sumber Daya Manusia Level <i>Supervisor</i> Certification of Human Resources Management for Supervisor Level	1 orang 1 employee
19.	Sertifikasi Manajemen Sumber Daya Manusia Level Staf Certification of Human Resources Management for Staff Level	1 orang 1 employee
20.	Sertifikasi Asesmen/Uji Kompetensi (<i>Workplace assessment</i>) Certification of Assessment/Competency Test (Workplace Assessment)	1 orang 1 employee
21.	Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Certification of Occupational Safety and Health (OHS) Expertise	1 orang 1 employee

Informasi Tentang Struktur Modal dan Pemegang Saham

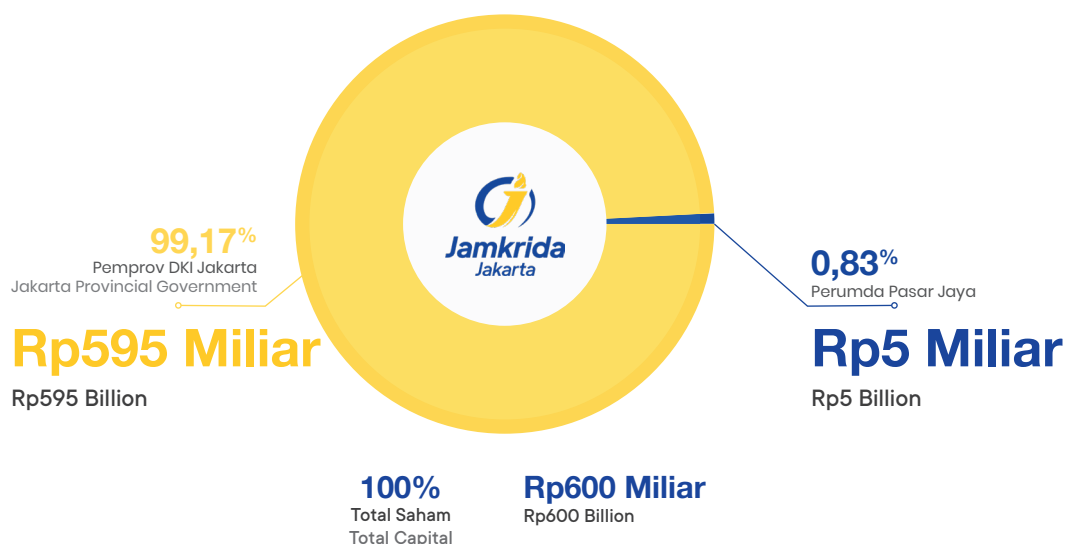
Information About Capital and Shareholders

Struktur Modal

Modal Dasar Perseroan per 17 Maret 2024 mengalami perubahan dari Rp400 miliar (empat ratus miliar rupiah) menjadi Rp1,6 triliun (satu triliun enam ratus miliar rupiah). Sementara itu, Modal Disetor sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp600 miliar (enam ratus miliar rupiah) yang terdiri dari 600.000 (enam ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per lembar. Dari modal yang disetor tersebut, Pemprov DKI Jakarta bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali dengan kepemilikan 99,17% dan 0,83% sisanya milik Perumda Pasar Jaya sebagai Pemegang Saham Non-Pengendali.

Capital Structure

The Company's Authorized Capital as of 17 March 2024 changed from Rp400 billion (four hundred billion rupiah) to Rp1.6 trillion (one trillion six hundred billion rupiah). Meanwhile, the Paid-Up Capital up to 31 December 2024 was noted at Rp600 billion (six hundred billion rupiah) consisting of 600,000 (six hundred thousand) shares with a nominal alue of Rp1,000,000 (one million rupiah) per share. Of the paid-up capital, the DKI Jakarta Provincial Government acts as the Controlling Shareholder with 99.17% ownership and the remaining 0.83% belongs to Perumda Pasar Jaya as the Non-Controlling Shareholder.



Komposisi Pemegang Saham

Hingga akhir tahun 2024, komposisi pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan. Berikut ini adalah komposisi pemegang saham Perseroan per 1 Januari 2024 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Composition Of Shareholders

Until the end of the year 2024, the composition of the Company's shareholders remained the same. Following are details of the composition of the Company's shareholders as of 1 January 2024 and 31 December 2025:

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares (Share)	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rupiah) Amount of Capital Issued and Full Paid-Up	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership
Pemprov DKI Jakarta	595.000	595.000.000.000	99,17%
Perumda Pasar Jaya	5.000	5.000.000.000	0,83%
Jumlah Total	600.000	600.000.000.000	100%



Kepemilikan Saham Langsung ataupun Tidak Langsung oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang 2024, tidak ada satu pun anggota Dewan Komisaris dan keluarga ataupun Direksi Perseroan dan keluarga yang tercatat sebagai pemegang saham Perseroan baik langsung ataupun tidak langsung.

Direct or Indirect Share Ownership by The Board of Commissioners and The Board of Directors

Throughout 2024, neither the Company's Board of Commissioners and family nor its Board of Directors and family registered as shareholders, either directly or indirectly.

Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Bersama

Subsidiaries, Associated Companies, Joint Venture Companies

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, atau keterlibatan dalam perusahaan ventura bersama.

Throughout the year 2024, the Company has no subsidiary entities, associated entities, or involvement in joint venture companies.

Kronologi Pencatatan Saham dan Efek Lainnya

Chronology of Listing of Shares and Other Securities

Sejak awal pendirian hingga akhir tahun 2024, Perseroan tidak pernah memperdagangkan sahamnya atau menerbitkan efek-efek lainnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau di Bursa Efek mana pun. Dengan demikian pembahasan tentang Kronologi Pencatatan Saham dan Efek Lainnya menjadi tidak relevan untuk disampaikan pada Laporan Tahunan 2024.

Since the beginning of its establishment until the end of the year 2024, the Company has never traded its shares or issued other securities on the Indonesia Stock Exchange (BEI) or any other Stock Exchange. Thus, discussion on the Chronology of Listing of Shares and Other Securities becomes irrelevant to be presented in this Annual Report of 2024.

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan

Company Supporting Institutions and Professions

Kantor Akuntan Publik

Public Accounting Firm

Nama Kantor Akuntan Publik Name of Public Accountant Firm	KAP Heliantono dan Rekan KAP Heliantono and Partner
Jaringan/Aliansi Network/Alliance	Parker Russell International
Nama Auditor Name of Auditor	Rahmat Sukendar, S.E., Ak., CPA., CFI., CBV
Alamat Address	Aminta Plaza, 7th Floor #704 Jl. TB Simatupang Kav.10 Jakarta Selatan, 12310
Jasa yang Diberikan Services Provided	Jasa Audit: Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024. Audit Services: Audit of the Financial Statement of Fiscal Year 2024 Jasa Non-Audit: KAP hanya memberikan jasa audit dan tidak memberikan jasa non-audit lainnya kepada Perseroan. Non-Audit Services: KAP only provide audit services and does not provide other nonAudit services to the Company.
Biaya Fee	Rp215.000.000,00
Periode Penugasan Period of Assignment	Tahun Buku 2024 Fiscal Year 2024

Notaris

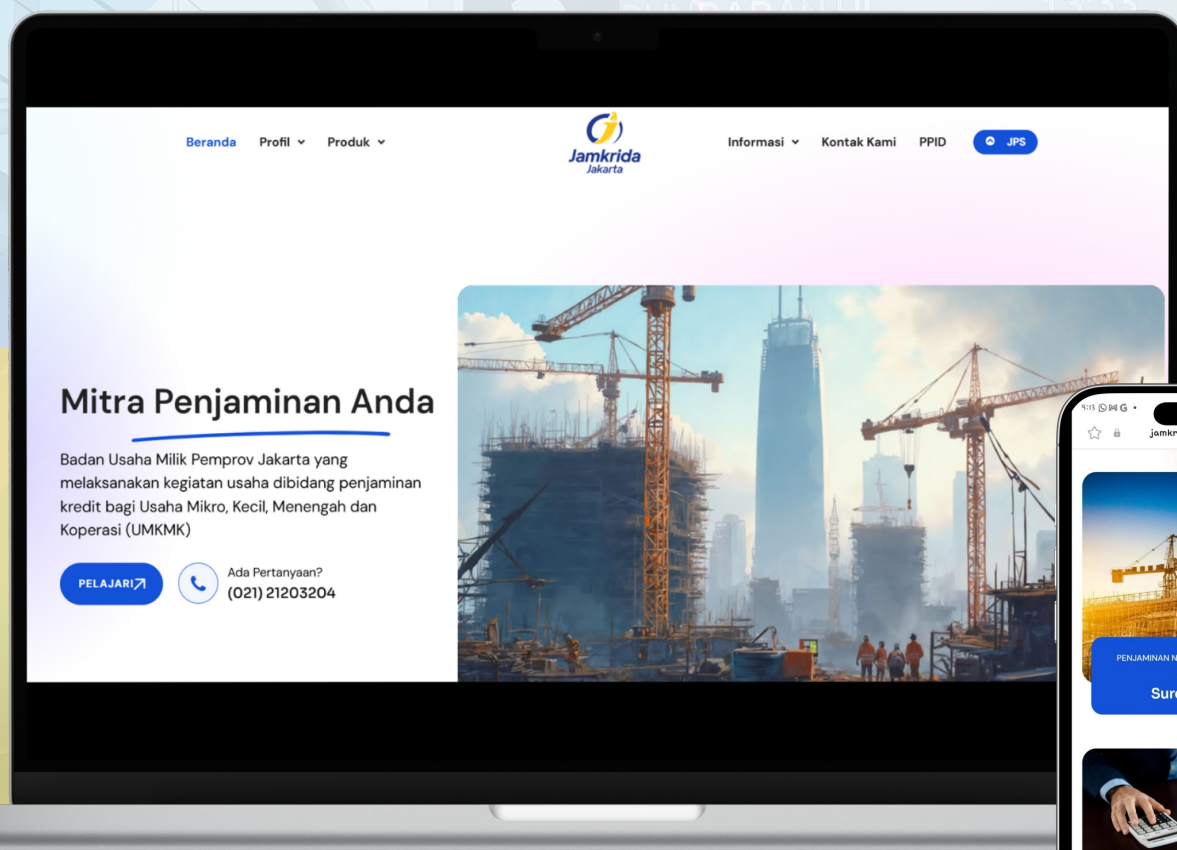
Notary

Nama Notaris Name of Notary	Ashoya Ratam, SH, MKn
Alamat Address	Jalan Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180
Jasa yang Diberikan Services Provided	Menyiapkan dan membuat akta yang terkait dengan Perseroan Prepare and produce deeds related to the Company
Periode Penugasan Period of Assignment	Tahun Buku 2024 Fiscal Year 2024



Pembaharuan Website

Website Update



Tampilan Website Baru
New website appearance

Informatif & Terupdate
Informative & Updated

Aksesibilitas Web
Web Accessibility

Integrasi Jamkrida Portal Sisten (JPS)
Jamkrida System Portal Integration

04

Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Analysis &
Discussion



**Tinjauan Ekonomi, Perkembangan UMKM,
dan Industri Penjaminan**

Review of the Economic, MSMEs Development,
and Guarantee Industry

88

Tinjauan Bisnis

Business Review

91

Tinjauan Operasional

Operational Review

92

Tinjauan Keuangan

Financial Review

98

Tinjauan Ekonomi, Perkembangan UMKM, dan Industri Penjaminan

Review of the Economic, MSMEs Development, and Guarantee Industry



Sepanjang tahun 2024, dunia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam seperti konflik geopolitik dan dagang negara besar yang masih terasa dampaknya hingga saat ini. Kendati demikian, perekonomian Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan sebesar 5,03%, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi laju pertumbuhan paling lambat dalam tiga tahun terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan investasi, belanja kampanye politik, dan penyelesaian proyek infrastruktur oleh pemerintah yang sedang menjabat.

Pada triwulan IV 2024, Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,02% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,36%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7,63%.

Throughout the year 2024, the world faced such various complex and diverse challenges as geopolitical and trade conflicts between major countries, of which the impact is still felt today. Nevertheless, Indonesia's economy remained capable of recording a growth of 5.03%, although it slightly slowed down compared to the previous year and became the slowest growth rate in the past three years. This growth was driven by the increase in investment, political campaign spending, and completion of infrastructure projects by the serving government.

In the fourth quarter of 2024, the Indonesia Central Bureau of Statistics recorded the Gross Domestic Product (PDB) grew by 5.02% compared to the same period of the previous year. From production perspective, Other Service Business Field experienced the highest growth of 11.36%. Meanwhile, from expenditure perspective, the Export of Goods and Services Component noted the highest growth of 7.63%.



Tren pemulihan ekonomi Indonesia yang konsisten berada di jalur pertumbuhan positif ditopang oleh konsumsi dan daya beli masyarakat yang terus menunjukkan perbaikan, serta juga didukung oleh geliat bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mulai bangkit sejalan dengan berakhirnya pandemi Covid-19. Bagi Indonesia, peran sektor UMKM sangatlah besar karena telah menjadi tulang punggung perekonomian negara yang memberikan kontribusi signifikan hingga lebih dari 60% terhadap PDB negara.

Sepanjang tahun 2024, UMKM di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jumlah UMKM mencapai lebih dari 65 juta unit, tersebar di berbagai sektor seperti kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknologi digital.

The consistent trend in Indonesia's economic recovery occurred outside of the positive growth path endorsed by the public's consumption and purchasing power that continued to improve, as well as supported by the business dynamics of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which started to revive in line with the end of the Covid-19 pandemic. For Indonesia, the role of the MSME sector is quite immensed as it has become the backbone of the country's economy that significantly contributed up to more than 60% of the nation's GDP.

Throughout the year 2024, MSME in Indonesia significantly expanded. The number of MSMEs reached more than 65 million units, the largest being in such sectors as culinary fashion, handicraft, to digital technology.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan 30 juta UMKM mengadopsi teknologi digital pada tahun 2024. Hingga pertengahan tahun, sekitar 27 juta UMKM telah terhubung secara digital. Program seperti "Level Up 2024" yang dicanangkan oleh Kominfo diluncurkan dengan tujuan untuk mendorong digitalisasi bisnis UMKM, membantu mereka memanfaatkan *platform e-commerce*, media sosial, dan sistem pembayaran digital.

Sejalan dengan terus meningkatnya aktivitas UMKM, industri penjaminan di Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan dengan diluncurkannya Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peta jalan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing industri penjaminan serta menjadi panduan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Dengan adanya peta jalan ini, diharapkan industri penjaminan dapat berperan lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam memfasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM. Kolaborasi antara OJK, lembaga penjaminan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci sukses implementasi peta jalan ini.

The Government, through the Ministry of Communication and Information (Kominfo) targeted at 30 million MSMEs to adopt digital technology in 2024. By midyear, around 27 million MSMEs were connected digitally. Such program as Level Up 2024" launched by Kominfo with the intent to encourage MSME's business digitalization, assisted them to utilizing e-commerce platform, social media, and digital payment system.

In line with the increasing activities of MSMEs, the guarantee industry in Indonesia also escalated significantly with the launching of the Roadmap for the Development and Strengthening of the Indonesian Guarantee Industry 2024-2028 by the Financial Services Authority (OJK). This roadmap aims at increasing growth and competitiveness of the guarantee industry, and at serving as the strategic guide for all stakeholders in Indonesia. With this roadmap, it is hoped that the guarantee industry can play a more optimal role in supporting national economic growth, specifically in facilitating the payment access for MSMEs. Collaboration with OJK, guarantee institutions, and other stakeholders becomes the success key for the implementation of this roadmap.



Tinjauan Bisnis

Business Review

Kinerja bisnis penjaminan Jamkrida Jakarta sepanjang tahun 2024 sudah sangat baik, sebagaimana tercermin dari pencapaian berikut ini:

1. Realisasi penjaminan kredit adalah sebesar Rp 30,83 triliun atau 114% dari target penjaminan kredit tahun 2024. Realisasi dari target 2024 untuk penjaminan bank sebesar 105%, nonbank sebesar 128%, dan Unit Usaha Syariah sebesar 88%;
2. Penerimaan IJP/IJK secara kas sampai 31 Desember 2024 adalah Rp339,78 miliar atau 95% dari target tahun 2024 sebesar Rp 357,71 miliar. Realisasi dari target 2024 untuk penjaminan bank sebesar 82%, nonbank sebesar 103%, dan Unit Usaha Syariah sebesar 91%;
3. Jumlah UMKMK yang dijamin sampai akhir tahun 2024 sebanyak 5.114.149 UMKMK atau sebesar 105% dari target tahun 2024, sementara jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 6.198.703 orang atau sebesar 120% dari target tahun 2024.

Performance of Jamkrida Jakarta's guarantee business during the year 2024 was already noted as very good, as reflected in the achievements described below:

1. Realization of credit guarantees was at Rp30.83 trillion or 114% of the 2024 credit guarantee target. Realization of the 2024 target for bank guarantees was 105%, non-banks was 128%, and Sharia Business Units was 88%;
2. Cash receipts of IJP/IJK until 31 December 2024 totaled Rp339.78 billion or 95% of the 2024 target of Rp357.71 billion. Realization of the 2024 target for bank guarantees was 82%, non-banks was 103%, and Sharia Business Unit was 91%;
3. The number of guaranteed MSMECOs until the end of 2024 was 5,114,149 MSMECOs or 105% of the 2024 target, while workforce absorption reached 6,198,703 workers or 120% of the 2024 target.



Tinjauan Operasional

Operational Review

Realisasi penjaminan per 31 Desember 2024 jika dibandingkan dengan target RKA 2024 adalah sebagai berikut:

Penjaminan

Perbandingan Penjaminan RKA 2024 dan Realisasi tahun 2024

Dalam jutaan rupiah
In million rupiah

No	Sumber Penjaminan Source of Guarantee	RKA 2024 2024 BP	Realisasi Realization	%
1	Kredit Mikro dan Kecil Micro Credit	16.279.266	18.669.838	115%
2	Kafalah Mikro dan Kecil Kafalah for Micro and Small	5.669.768	4.544.784	80%
3	Kredit Multiguna Multipurpose Credit	1.876.432	2.337.555	125%
4	Kredit Usaha Business Credit	1.329.783	1.507.606	113%
5	Kredit Konstruksi Construction Project Credit	613.439	931.706	152%
6	Kredit Pemilikan Rumah Home Ownership Credit	387.837	621.273	160%
7	Kafalah Multiguna Multipurpose Kafalah	300.583	538.080	179%
8	Kontra Bank Garansi Contra Bank Guarantee	291.167	400.831	138%
9	Kafalah Konstruksi Kafalah for Construction	120.002	149.376	124%
10	Kafalah Usaha Kafalah for Business	86.261	10.400	12%
11	Anjak Piutang Factoring	9.242	12.378	134%
12	<i>Surety Bond</i>	7.192	31.230	434%
13	<i>Surety Bond</i> Syariah Sharia Surety Bond	822	-	0%
14	<i>Custom Bond</i>	-	711.786	0%
15	Kredit Usaha Rakyat People's Business Credit	-	203.485	0%
16	KUR Syariah Sharia People's Business Credit	-	96.093	0%
17	Kredit Pemilikan Rumah Syariah Sharia Home Ownership Credit	-	59.465	0%
18	Kontra Bank Garansi Syariah Sharia Contra Bank Guarantee	-	8.022	0%
Jumlah Total		26.971.794	30.833.906	114%

Realization of guarantees as of 31 December 2024, compared to the 2024 Business Plan (BP) target is as follows:

Guarantee

Comparison of Guarantees in 2024 Business Plan (BP) and 2024 Realization



Imbalan Jasa Penjaminan/Kafalah

Imbal Jasa Penjaminan (IJP/IJK Kas)

Berikut ini adalah perbandingan IJP/IJK Kas antara RKA 2024 dan realisasi tahun 2024:

Dalam jutaan rupiah

In million rupiah

No	Sumber Penjaminan Source of Guarantee	RKA 2024 2024 BP	Realisasi Realization	%
1	Kredit Mikro dan Kecil Micro Credit	216.824	190.162	88%
2	Kafalah Mikro dan Kecil Kafalah for Micro and Small	62.233	49.700	80%
3	Kredit Multiguna Multipurpose Credit	45.724	44.074	96%
4	Kredit Usaha Business Credit	10.909	16.742	153%
5	Kafalah Multiguna Multipurpose Kafalah	3.694	13.030	353%
6	Kredit Usaha Rakyat People's Business Credit	8.915	6.832	77%
7	Kredit Konstruksi Construction Project Credit	-	6.231	0%
8	Kontra Bank Garansi Contra Bank Guarantee	4.652	4.114	88%
9	KUR Syariah Sharia People's Business Credit	-	3.272	0%
10	Kredit Pemilikan Rumah Home Ownership Credit	1.949	2.485	127%
11	Custom Bond	-	1.286	0%
12	Kafalah Konstruksi Kafalah for Construction	-	755	0%
13	Surety Bond	89	369	415%
14	Kafalah Usaha Kafalah for Business	667	257	38%
15	Kredit Pemilikan Rumah Syariah Sharia Home Ownership Credit	1.994	238	12%
16	Kontra Bank Garansi Syariah Sharia Contra Bank Guarantee	-	165	0%
17	Anjak Piutang Factoring	38	75	195%
18	Surety Bond Syariah Sharia Surety Bond	25	-	0%
Jumlah Total		357.710	339.786	95%

Guarantee/Kafalah Fees

Guarantee Fee (IJP/IJK Cash)

Below is comparison of Cash Guarantee/Kafalah between 2024 Business Plan (BP) and 2024 Realization:

Jumlah UMKMK dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2024, jumlah serapan UMKMK dan tenaga kerja dari penjaminan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Jumlah UMKMK dan Tenaga Kerja RKA 2024 dan Realisasi tahun 2024

No	Jenis Terjamin Type of Guarantee	RKA 2024 2024 BP	Realisasi Realization	%
1	Jumlah UMKMK Number of MSECOSs			
	Produktif Productive	4.871.465	5.101.090	105%
	Non-Produktif Non-Productive	19.134	13.059	68%
	Jumlah Total	4.890.599	5.114.149	105%
2	Jumlah Tenaga Kerja Number of Workforce			
	Produktif Productive	5.157.508	6.185.644	120%
	Non-Produktif Non-Productive	19.134	13.059	68%
	Jumlah Total	5.176.642	6.198.703	120%

Number of MSMECOs and Workforce

In 2024, the number MSMECOs and workforce absorption from guarantees as of 31 December 2024 are shown in the table below:

Comparison in the Number of MSMECOs and Workforce Absorption of 2024 Business Plan (BP) and 2024 Realization

Investasi

Berikut ini adalah perbandingan jumlah dan hasil investasi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Nilai Investasi dan Hasil Investasi RKA 2024 dan Realisasi tahun 2024

Dalam jutaan rupiah
In million rupiah

No	Investasi dan Hasil Investasi Investment Value and Yield	RKA 2024 2024 BP	Realisasi Realization	%
1	Nilai Investasi Investment Value	984.648	1.006.488	102%
2	Hasil Investasi Investment Yield	35.761	49.251	138%

Investment

Following is comparison in the number and results of investments between 2024 BP and 2024 Realization as of 31 December 2024:

Comparison in the Total Value and Yield of Investment between 2024 BP and 2024 Realization

Jumlah investasi sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.006 miliar, terealisasi 102% dari jumlah target tahun 2024. Sementara itu, hasil investasi sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp 49 miliar atau 138% dari target tahun 2024.

Investment value until the end of the year 2024 totaled Rp1,006 billion, realized by 102% of the 2024 target. Meanwhile, investment yield as of the end of the year 2024 reached Rp49 billion or 138% of the the 2024 target.



Sumber Daya Manusia

Penambahan Jumlah SDM

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi Anggaran Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2024, yaitu sebagai berikut:

Perbandingan Jumlah SDM RKA 2024 dan Realisasi tahun 2024

No	Jabatan Position	RKA 2024 2024 BP	Realisasi Realization	%
1	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	3	1	33%
	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	2	2	100%
	Direksi Board of Directors	3	2	67%
	Jumlah Pengurus Number of Administrators	8	5	63%
2	Komite Audit Audit Committee	3	2	67%
	Jumlah Komite Audit Total in Audit Committee	3	2	67%
3	Karyawan Employees			
	Kepala Divisi Division Heads	7	8	114%
	Kepala Bagian Section Heads	8	11	137%
	Staf dan Pelaksana Staff and Executors	61	53	87%
	Jumlah Karyawan Number of Employees	76	72	95%
	Jumlah Pengurus, Komite Audit, dan Karyawan Nmber of Administrators, Audit Committee, and Employees	87	79	91%

Pada tahun 2024, jumlah karyawan Perseroan tercatat sebanyak 79 orang dari yang dianggarkan sebanyak 87 orang atau terealisasi 91% dari target 2024.

Human Resources

HR Recruitment

Following is comparison between target and realization of Human Resources (HR) Budget as of 31 December 2024:

Comparison of HR Recruitment in 2024 BP and 2024 Realization

In 2024, the number of Company employees totalled 79 personnels or 91% of the budgeted 2024 target of 87 employees.

Beban Sumber Daya Manusia

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi beban Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2024, yaitu sebagai berikut:

Dalam jutaan rupiah
In million rupiah

No	Beban Expenses	RKA 2024 2024 BP	Realisasi Realization	%
1	Penghasilan Tetap Fixed Income	10.803	11.685	108%
2	Tunjangan-tunjangan Benefits	13.111	11.256	86%
3	Beban PPh 21 Income Tax Expenses	1.804	1.598	89%
Jumlah Total		25.718	24.539	95%

Human Resources Expenses

Below is comparison between target and realization in Human Resources expenses as of 31 December 2024:

Beban Operasional, Administrasi, dan Umum

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi Beban Operasional, Administrasi, dan Umum per 31 Desember 2024, yaitu sebagai berikut:

Dalam jutaan rupiah
In million rupiah

No	Beban Operasional Operational Expenses	RKA 2024 2024 BP	Realisasi Realization	%
1	Fee Base Bank	14.867	16.062	108%
2	Penjaminan Ulang & Penjaminan Bersama Re-Guarantee & Co-Guarantee	126.355	137.369	109%
3	Restitusi Restitution	2.292	1.276	56%
4	Klaim Claim	108.802	124.012	114%
5	Cadangan Klaim Claim reserve	24.602	32.624	133%
6	Beban Perjalanan Dinas dan Penagihan Business Travel and Billing Expenses	876	934	107%
7	Beban Pemasaran dan Promosi Marketing and Promotion Expenses	2.412	2.054	85%
8	Biaya Sewa Kendaraan/Kantor Vehicle/Office Rental Fees	4.376	1.853	42%
Jumlah Beban Operasional Total Operational Expenses		284.583	316.184	111%

Operational, Administrative and General Expenses

Following is comparison between target and realization in Operational, Administrative, and General Expenses as of 31 December 2024:



Dalam jutaan rupiah
In million rupiah

No	Beban Administrasi dan Umum Administrative and General Expenses	RKA 2024 2024 BP	Realisasi Realization	%
1	Beban Rapat dan Sosialisasi Business Meeting and Socialization Expenses	1.246	933	75%
2	Beban Alat Tulis Kantor Office Stationary Expenses	180	376	209%
3	Beban Penyusutan Depreciation expenses	600	803	134%
4	Beban Profesional Perizinan Professional/License Expenses	2.630	3.640	138%
5	Beban Umum Lainnya Other General Expenses	3.144	2.220	71%
Jumlah Beban Adminisitrasi dan Umum Total Adminstrative and General Expenses		7.800	7.972	102%
Jumlah Total		292.383	324.156	111%

Beban Riset, Pengembangan dan Teknologi Informasi

Research, Development and Information Technology Expenses

Dalam jutaan rupiah
In million rupiah

No	Beban Expenses	RKA 2024 2024 BP	Realisasi Realization	%
1	Beban sistem, teknologi, dan pengembangan usaha Business System, Technology and Development Expenses	1.260	698	55%

Realisasi beban riset, pengembangan, dan TI sampai dengan akhir tahun 2024 dibukukan sebesar Rp698 juta atau 55% dari anggaran 2024 sebesar Rp1.260 miliar.

Expense realization for research, technology and development as of the end of the year 2024 was noted at Rp698 million or 55% of the 2024 budget of Rp 1,260 billion.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

Diskusi dan analisa keuangan berikut ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan, dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Final discussion and analysis below is prepared based on the Financial Statements that ended on 31 December 2024. The Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Helianto and Partners, and obtained unqualified opinion in all material aspects, the Company's financial position as of 31 December 2024 as well as the financial performance and cash flow for the year that ended on the said date, is in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Posisi Keuangan

Aset

Posisi aset Perseroan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 1.150 triliun (tercapai 101% dari RKA 2024), meningkat 41% dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp 813 miliar. Peningkatan jumlah aset pada tahun ini dikontribusikan oleh naiknya nilai investasi lancar & aset penjaminan ulang.

Financial Position Statement

Asset

The Company's asset position as of 31 December 2024 was recorded at Rp1,150 trillion (101% of the 2024 BP), an increase by 41% compared to the previous year of Rp813 billion. Increase in the total asset this year was contributed by the increase in value of current assets and re-guaranteed assets.

Dalam jutaan rupiah
In million rupiah

Keterangan Description	RKA 2024 2024 BP	Realisasi Realization		Perubahan (2024-2023) Change (2024-2023)	
		2024	2023	Nominal Nominal	Persentase Percentage
Aset Lancar Current Assets					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	194.460	102.618	97.170	5.448	6%
Investasi Lancar Current Investments	349.475	214.382	95.559	118.823	124%
Piutang Hasil Investasi Interest Receivables	3.580	7.881	6.145	1.736	28%
Piutang Penjaminan Ulang Re-Guarantee Receivables	16.309	16.536	30.637	(14.101)	(46%)
Piutang Penjaminan Bersama Co-Guarantee Receivables	9.784	8.853	6.291	2.562	41%
Aset Penjaminan Ulang Re-Guaranteed Assets	27.544	81.650	25.775	55.875	217%
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Tax	0	127	176	(49)	(28%)
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Prepaid Expenses and Advances	15.718	3.368	3.280	88	3%
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	616.871	435.415	265.034	170.381	64%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets					
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	0	3.611	1.426	2.185	153%
Investasi Tidak Lancar Non-Current Investments	440.713	697.242	532.824	164.418	31%



Keterangan Description	RKA 2024 2024 BP	Realisasi Realization		Perubahan (2024-2023) Change (2024-2023)	
		2024	2023	Nominal Nominal	Persentase Percentage
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets					
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Jangka Panjang Prepaid Expenses and Long-Term Advances	25.619	13.004	12.614	390	3%
Aset Tetap – Bersih Current Assets – Net	47.658	669	425	244	57%
Aset Hak Guna – Bersih Right of Use Assets – Net	0	758	1.432	(674)	(47%)
Aset Tak Berwujud – Bersih Intangible Assets – Net	374	51	104	(53)	(51%)
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	514.364	715.335	548.825	166.510	30%
Jumlah Aset Total Assets	1.131.235	1.150.750	813.859	336.891	41%

Aset Lancar

Dari jumlah aset sebesar Rp 1.150 triliun pada akhir 2024, adapun nilai aset lancar Perseroan tercatat sebesar Rp 435 miliar (tercapai 71% dari RKA 2024), mengalami kenaikan sekitar 64% dari posisi yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena kenaikan signifikan nilai investasi lancar sebesar 124% dari tahun sebelumnya.

Aset Tidak Lancar

Sementara itu jumlah aset tidak lancar dibukukan sebesar Rp 715 miliar (tercapai 139% dari RKA 2024), naik 30% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 548 miliar. Kenaikan ini didorong oleh perubahan strategi investasi dari jangka pendek ke jangka panjang.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan per 31 Desember 2024 dibukukan sebesar Rp 512 miliar (tercapai 105% dari RKA 2024), meningkat 30% dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp 395 miliar. Peningkatan jumlah liabilitas pada tahun ini dikarenakan naiknya nilai utang penjaminan bersama sebesar 104% dari tahun sebelumnya.

Dalam jutaan rupiah
In million rupiah

Current Assets

Of the total assets of Rp1,150 trillion as of the end of the year 2024, the Company's current assets were logged at Rp435 billion (71% of the 2024 BP), an increase of around 64% from the same position in the previous year. This was due to the significant increase in current investments of 124% from the previous year.

Non-Current Assets

Meanwhile the non-current assets was recorded at Rp715 billion (139% of the 2024 BP), 30% increase from the previous year of Rp548 billion. This increase was driven by the change in investment strategy from short-term to long-term.

Liabilities

The Company's total liabilities as of 31 December 2024 was noted at Rp512 billion (105% of 2024 RKA), a 30% increment compared to Rp395 billion in the previous year. This increase in liabilities in 2024 was caused by the increase in the value of co-guarantee payables of 104% from the previous year.

Keterangan Description	RKA 2024 2024 BP	Realisasi Realization		Perubahan (2024-2023) Change (2024-2023)	
		2024	2023	Nominal Nominal	Persentase Percentage
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities					
Utang Pajak Tax Payables	167	8.131	6.164	1.967	32%
Utang Penjaminan Ulang Re-Guarantee Payables	35.576	23.114	20.241	2.873	14%
Utang Penjaminan Bersama Co-Guarantee Payables	32.902	15.835	7.764	8.071	104%

Keterangan Description	RKA 2024 2024 BP	Realisasi Realization		Perubahan (2024-2023) Change (2024-2023)	
		2024	2023	Nominal Nominal	Persentase Percentage
Utang Sewa Pembiayaan Lease Payables	0	568	648	(80)	(12%)
Beban Akrua Accrued Expenses	15.692	22.997	15.028	7.969	53%
Cadangan Klaim Claim Reserves	105.963	189.085	100.586	88.499	88%
Pendapatan Ditangguhkan Deferred Income	0	32.036	32.921	(885)	(3%)
Liabilitas Lain-Lain Dalam Penyelesaian Other Liabilities in Progress	79.045	27.998	32.251	(4.253)	(13%)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Short-Term Liabilities	269.346	319.764	215.603	104.161	48%
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities					
Utang Sewa Pembiayaan Lease Payables	0	202	851	(649)	(76%)
Pendapatan Ditangguhkan Deferred Income	218.384	191.103	177.967	13.136	7%
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liabilities	1.468	1.588	1.070	518	48%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Long-Term Liabilities	219.852	192.893	179.887	13.006	7%

Liabilitas Jangka Pendek

Dari jumlah liabilitas yang tercatat di akhir 2024, porsi liabilitas jangka pendek Perseroan tercatat sebesar Rp 319 miliar (tercapai 119% dari RKA 2024), meningkat 48% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 215 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kebijakan Perusahaan menaikkan nilai Cadangan claim untuk mengantisipasi pengajuan claim yang mungkin terjadi ditahun mendatang.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang juga mencatatkan peningkatan dari Rp179 miliar di akhir Desember 2023 menjadi sebesar Rp 192 miliar (tercapai 88% dari RKA 2024), atau tumbuh 7%. Hal ini dipengaruhi oleh penambahan jumlah karyawan sehingga ada kenaikan pada pos liabilitas imbalan kerja.

Short-Term Liabilities

Of the total liabilities recorded as of the end of 2024, the Company's short-term liabilities' portion was logged at Rp319 billion (119% of the 2024 BP), an increase by 48% compared to Rp215 billion in the previous year. This increase was due to the Company's policy that increased the value of the claim reserves to anticipate claim requests that may occur in the coming year.

Long-Term Liabilities

Long-term liabilities noted an increase from Rp179 billion as of the end of December 2023 to Rp192 billion (88% of 2024 BP) or a 7% growth. This was affected by the additional number of employees that employee benefits liability escalated.



Dalam jutaan rupiah
In million rupiah

Keterangan Description	RKA 2024 2024 BP	Realisasi Realization		Perubahan (2024-2023) Change (2024-2023)	
		2024	2023	Nominal Nominal	Persentase Percentage
Ekuitas Equity					
Modal Saham Capital Stock	600.000	600.000	400.000	200.000	50%
Komponen Ekuitas Lainnya Other Equity Components	636	1.201	721	480	67%
Saldo Laba Retained Earnings					
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	16.109	10.923	18.111	(7.188)	(40%)
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	25.292	25.969	(462)	25.507	5.721%
Jumlah Ekuitas Total Equity	642.037	638.093	418.369	219.724	53%

Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 638 miliar (tercapai 99% dari RKA 2024), tumbuh 53% dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp 418 miliar. Perubahan pada ekuitas dipengaruhi oleh kenaikan / penambahan nilai modal saham.

Equity

The Company's total equity as of 31 December 2024 was at Rp638 billion (99% of 2024 BP), grew by 53% compared to Rp418 billion in the previous year. This change in equity was affected by the increase/additional value of capital stock.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statements of Profit-Loss and Other Comprehensive Income

Keterangan Description	RKA 2024 2024 BP	Realisasi Realization		Perubahan (2024-2023) Change (2024-2023)	
		2024	2023	Nominal Nominal	Persentase Percentage
Pendapatan Penjaminan Guarantee Revenues					
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah Guarantee Fees	288.865	324.906	289.993	34.913	12%
Pendapatan Penjaminan Lainnya Other Guarantee Revenus	25.802	24.112	26.903	(2.791)	(10%)
Jumlah Pendapatan Penjaminan Total Guarantee Revenues	314.667	349.018	316.896	32.122	10%
Beban Penjaminan Guarantee Expenses					
Beban Klaim Claim Expense	(108.802)	(124.012)	(100.951)	23.061	23%
Beban Penjaminan Ulang dan Bersama Re-Guarantee and Co-Guarantee Expense	(126.355)	(137.369)	(131.441)	5.928	5%
Beban Fee Based Income Fee-Based Income Expense	(14.867)	(16.062)	(14.540)	1.522	10%

Keterangan Description	RKA 2024 2024 BP	Realisasi Realization		Perubahan (2024-2023) Change (2024-2023)	
		2024	2023	Nominal Nominal	Persentase Percentage
Beban Restitusi Restitution Expense	(2.292)	(1.276)	(875)	401	46%
Kenaikan Estimasi Klaim Increase in Estimated Claims	(24.602)	(32.624)	(43.025)	(10.401)	(24%)
Jumlah Beban Penjaminan Total Guarantee Expenses	(276.918)	(311.343)	(290.832)	20.511	7%
Hasil Penjaminan Bersih Net Guarantee Profit	37.749	37.675	26.064	11.611	45%
Pendapatan Investasi Investment Income	35.761	49.250	34.035	15.215	45%
Beban Usaha Operating Expenses					
Beban Sumber Daya Manusia Personnel Expense	(25.718)	(24.540)	(18.765)	5.775	31%
Beban Operasional Operating Expense	(7.664)	(4.841)	(5.063)	(222)	(4%)
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(5.563)	(14.243)	(4.884)	9.359	192%
Beban Administrasi dan Umum Administrative and General Expense	(7.800)	(7.972)	(4.725)	3.247	69%
Beban Sistem, Teknologi, dan Pengembangan Usaha System, Technology, and Operating Development Expense	(1.260)	(698)	(832)	(134)	(16%)
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	(48.005)	(52.294)	(34.269)	18.025	53%
Beban Lain-Lain – Bersih Other Expenses – Net	(213)	(1.273)	(1.515)	(242)	(16%)
Laba Usaha Sebelum Pajak Operating Profit Before Tax	25.292	33.358	24.314	9.044	37%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense					
Pajak Kini Current Tax	0	(8.034)	(5.908)	2.126	36%
Pajak tangguhan Deferred Tax	0	2.079	1.054	1.025	97%
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Total Tax Benefit (Expense)	0	(5.955)	(4.854)	1.101	23%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	25.292	27.403	19.460	7.943	41%
Jumlah Laba Komprehensif Total Comprehensive Profit	25.292	28.127	19.535	8.592	44%



Pendapatan Penjaminan

Di tahun 2024, Perseroan berhasil memperoleh pendapatan penjaminan sebesar Rp 349 miliar (tercapai 111% dari RKA 2024), meningkat 10% dari tahun sebelumnya senilai Rp 316 miliar. Kenaikan tersebut ditopang oleh realisasi pendapatan IJP yang meningkat dibandingkan tahun lalu.

Pendapatan Investasi

Di tahun 2024, Perseroan berhasil memperoleh pendapatan investasi sebesar Rp 49 miliar (tercapai 138% dari RKA 2024), meningkat 45% dari tahun sebelumnya senilai Rp 34 miliar. Kenaikan tersebut karena Perusahaan merubah portofolio investasinya ke obligasi SBN dan SBSN.

Beban Penjaminan

Sejalan dengan peningkatan pendapatan penjaminan, Perseroan juga mencatatkan kenaikan beban penjaminan sekitar 7%, dari Rp290 miliar pada 2023 menjadi sebesar Rp311 miliar (tercapai 112% dari RKA 2024) di tahun 2024.

Laba Tahun Berjalan

Pada tahun 2024, Perseroan mencatatkan peningkatan laba bersih sekitar 41% sehingga dibukukan menjadi sebesar Rp27 miliar (tercapai 108% dari RKA 2024) dari senilai Rp19 miliar di tahun sebelumnya. Meningkatnya profitabilitas Perseroan sepanjang tahun ini dikontribusikan oleh peningkatan pendapatan & peningkatan margin laba kotor.

Laba Komprehensif

Selaras dengan kenaikan pada pos laba bersih maka laba komprehensif Perseroan untuk tahun 2024 juga mencatatkan peningkatan sehingga dibukukan menjadi sebesar Rp28 miliar (tercapai 111% dari RKA 2024), tumbuh 44% dari senilai Rp19 miliar pada 2023.

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang akan jatuh tempo dapat dilihat dari posisi rasio likuiditas dan rasio solvabilitasnya. Untuk mencegah terjadinya risiko gagal bayar, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan keuangan di level yang tinggi dan memastikan ketersediaan kas yang cukup menjelang periode jatuh tempo pembayaran utang.

Berikut ini adalah hasil perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Perseroan selama tahun 2024:

Likuiditas

Uraian Description	2024	2023
Rasio Kas Cash Ratio	32%	45%
Rasio Lancar Current Ratio	136%	123%

Guarantee Revenues

In 2024, the Company managed to obtain guarantee income of Rp349 billion (111% of the 2024 BP), increased by 10% from Rp316 billion in the previous year. This increase was supported by the actualized increase from last year's IJP income.

Investment Income

In 2024, the Company managed to acquire investment income of Rp49 billion (138% of 2024 BP target), a 45% increment from Rp34 billion in the previous year. This increment was due to the change in the Company's investment portfolio to SBN and SBSN bonds.

Guarantee Expenses

In line with the increase in guarantee income, the Company also recorded an increase in guarantee expenses of around 7%, from Rp290 billion in 2023 to Rp311 billion (112% of 2024 BP) in 2024.

Profit of the Year

In 2024, the Company recorded an increase of around 41% in net profit that a total of Rp27 billion (108% of the 2024 BP) was recorded compared to Rp19 billion in the previous year. This increase in the Company's profitability during the year was contributed by the increase in income and gross profit margin.

Comprehensive Profit

Inline with the increment in net profit, the Company's comprehensive profit for the year 2024 also recorded an increase of Rp28 billion (111% of 2024 BP), a growth by 44% from Rp19 billion in 2023.

Ability to Pay Debt

The Company's ability to meet short-term and long-term obligations that will mature is visible from the position of its liquidity ratio and solvency ratio. To prevent risk of default, the Company always strives to maintain a high level of financial health and ensure sufficient cash availability ahead of the debt payment maturity period.

Following is result of the Company's calculated liquidity ratio and solvency ratio during the year 2024:

Solvabilitas

Uraian Description	Solvency	
	2024	2023
Rasio Utang Terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	0,8	0,9
Rasio Utang Terhadap Aset Debt to Asset Ratio	0,4	0,5

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat likuiditas Perseroan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi, Perseroan memastikan bahwa posisi kas dan setara kas yang dimiliki saat ini cukup likuid untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo.

Rasio solvabilitas Perseroan juga secara umum menunjukkan bahwa kondisi finansial Perseroan cukup stabil untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal.

Investasi Barang Modal tahun 2024

Pada tahun 2024, Perseroan telah merealisasikan belanja modal untuk aset tetap berupa pembelian inventaris kantor dengan nilai sebesar Rp322 juta. Sumber dana yang dipakai untuk belanja modal tahun 2024 berasal dari kas internal dengan denominasi Rupiah.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Berdasarkan surat dari Konsultan Hukum HSH & Partners No. 019/HSH&P-LO/I/2025 pada tanggal 24 Januari 2025 yang ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan, pada surat tersebut menjelaskan bahwa adanya permohonan pembatalan putusan Arbitrase LAPS – SJK No.273/ARB-001/LAPSSJK.08/VI/2024 tanggal 2 Desember 2024 oleh PT JIEP. Informasi ini telah dicantumkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) No.41.

Prospek Usaha tahun 2025

Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh stabil di kisaran 5%. Bank Dunia, dalam laporan terbarunya, memperkirakan pertumbuhan sebesar 5,1% pada tahun tersebut. Pemerintah Indonesia, di bawah pemerintahan yang baru, menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dengan mengoptimalkan berbagai sektor potensial.

Based on results of calculation in the above table, it is visible that the Company's liquidity level dropped if compared to the previous year. However, the Company ensures that the cash and cash equivalent position is currently sufficiently liquid to pay off short-term obligations that will mature.

The Company's solvency ratio also generally shows the Company's financial condition in quite stable position to fulfill its long-term and short-term obligations.

Material Commitment for Investment in Capital Goods

Throughout the year 2024, the Company did not have material commitments for investment in Capital goods.

Capital Goods Investment in 2024

In the year 2024, the Company actualized its capital expenditure on fixed assets in the form of office inventory purchase worth Rp322 million. The source of funds used for capital expenditure in 2024 derived from internal cash in Rupiah currency.

Subsequent Material Information and Facts After the Date of the Accountant Report

The letter from the Legal Consultant HSH & Partners No. 019/HSH&P-LO/I/2025 dated 24 January 2025 addressed to the Company's President Director, explained that there is a request for cancellation of the LAPS-SJK Arbitration Decision No.273/ARB-001/LAPSSJK.08/VI/2024 dated 2 December 2024 by PT JIEP. This information is included in the Notes to Financial Statements (CALK) No. 41.

Business Prospects in 2025

In the year 2025, Indonesia's economy is projected to steadily grow within the range of 5%. The World Bank, in its recent report, estimated a growth of 5.1% for the year. The Government of Indonesia, under the new administration, is targeting the economic growth to reach 8% by optimizing several potential sectors.



Selanjutnya, sektor UMKM di Indonesia juga diproyeksikan memiliki prospek yang menjanjikan, didukung oleh berbagai inisiatif pemerintah dan tren bisnis yang berkembang. Pemerintah Indonesia berencana membentuk holding UMKM pada tahun 2025 dengan tujuan menghubungkan UMKM dengan pelaku industri yang lebih besar, sehingga meningkatkan kemitraan dan akses pasar bagi UMKM.

Dengan keyakinan terhadap prospek ekonomi nasional yang lebih baik kedepan dan juga melihat adanya dukungan besar dari Pemerintah dalam menjaga keberlangsungan usaha UMKM, maka Perseroan optimis dapat membukukan pertumbuhan volume penjaminan sekitar 111% di tahun 2025.

Untuk dapat mewujudkan target tersebut, Perseroan berencana untuk melanjutkan strategi ekspansi usaha dengan membangun sinergi solid bersama Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang saham, serta juga meningkatkan jalinan kerja sama kemitraan dengan bank-bank besar khususnya berpenetrasi di pasar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sambil tetap mempertahankan hubungan yang harmonis dengan mitra eksisting. Kolaborasi ini juga merupakan wujud upaya untuk menciptakan layanan penjaminan kredit yang lebih sehat dan saling menguntungkan.

Subsequently, the MSME sector in Indonesia is also projected to retain promising prospects, supported by various government initiatives and growing business trends. The Government of Indonesia plans to establish a MSME holding in 2025 with the objective to connect MSME with bigger industry players, so that this would increase partnership and market access for the MSMEs.

With the confidence in better national economic prospects in the future and seeing the increasing support of the Government in maintaining MSME's business continuity, the Company is optimistic that it will achieve growth in guarantee volume of around 111% in 2025.

To manifest this target, the Company plans to continue business expansion strategy by establishing solid synergy together with DKI Jakarta Provincial Government as the shareholder, and by increasing partnership with big banks specifically to penetrate di market of the State-Owned Banks Association (Himbara) while also maintaining harmonious relationships with existing partners. This collaboration is also a form of efforts to create a healthier and more mutually beneficial credit guarantee services.

Perbandingan Antara Realisasi dan Target tahun 2024 serta Proyeksi tahun 2025

Perbandingan antara realisasi dan target tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Dalam jutaan rupiah
In million rupiah

Uraian Description	2024		
	Target (Rp) Target (Rp)	Realisasi (Rp) Realization (Rp)	Pencapaian Achievement
Pendapatan Penjaminan Guarantee Revenues	314.667	349.017	111%
Laba tahun berjalan Profit for the Year	25.292	27.402	108%

Comparison Between 2024 Target and Realization and 2025 Projection

The comparison between the target and realization in the year 2024, is shown in the table below:

Proyeksi tahun 2025

Dengan mempertimbangkan hasil kinerja yang telah ditunjukkan untuk periode tahun buku 2024, Perseroan optimis dapat merealisasikan target-target pertumbuhan bisnis yang lebih besar di 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Dalam jutaan rupiah
In million rupiah

Uraian / Description	Target (Rp) Target (Rp)
Pendapatan Penjaminan Guarantee Revenues	397.789
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	31.289

2025 Projections

With consideration on the performance results demonstrated in the 2024 fiscal year period, the Company is optimistic in being able to realize even higher business growth targets in 2025 as portrayed in the following table:

Aspek Pemasaran

Pada tahun 2024, Perseroan telah menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan pangsa pasar dan kemitraan dengan perbankan maupun non perbankan.

Kebijakan Dividen

Kebijakan Pembagian Dividen

Landasan kebijakan pembagian dividen di Perseroan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas yang diubah dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dividen hanya akan dibagikan kepada pemegang saham apabila Perusahaan memiliki saldo laba yang positif.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Hingga 31 Desember 2024, Perseroan belum memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen.

Marketing Aspects

In the year 2024, the Company applied an effective marketing strategy to increase market share and partnership with banking as well as non-banking partners.

Dividend Policy

Dividend Distribution Policy

The basis of the dividend distribution policy in the Company always refers to Law No. 40 of year 2007 regarding Limited Liability Companies which was amended into Law No 11 of year 2020 on Job Creation, where dividends will only be distributed to shareholders if the Company earns a positive profit balance.

Shares Ownership Program by Employees and/or Management (ESOP/MSOP)

Until 31 December 2024, the Company has no shares ownership program for the employees and/or management.



Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Hingga tahun 2024, Perseroan tidak melakukan Penawaran Umum Perdana atau *Initial Public Offering* (IPO). Oleh karena itu, informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tidak relevan untuk disajikan.

Informasi Mengenai Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Alasan Dilakukannya Transaksi

Dalam menjalankan kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi usaha dan transaksi lainnya dengan pihak-pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Perusahaan baik karena kepemilikan langsung ataupun tidak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Seluruh transaksi yang dilakukan Perseroan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan dan telah disajikan sesuai standar PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Semua transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi merupakan transaksi yang bersifat rutin.

Daftar Pihak-Pihak Berelasi, Sifat Hubungan dengan Pihak-Pihak Berelasi, dan Saldo Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pada tahun 2024, Perseroan telah menyelesaikan sejumlah transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (revisi 2010) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

Berikut ini adalah daftar pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan sebagaimana sudah diungkapkan dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024:

- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan pemegang saham Perusahaan;
- PT Bank DKI adalah perusahaan yang berada di bawah pengendalian yang sama dengan Perusahaan.

Informasi lengkap mengenai rincian saldo transaksi sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) No. 36.

Pernyataan Direksi atas Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi tahun 2024

Direksi berpendapat bahwa seluruh transaksi keuangan yang dilakukan Perseroan dengan pihak-pihak berelasi sudah dilaksanakan pada nilai yang wajar (*arm's length*) sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan telah mematuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Realization of the Use of Public Offering Proceeds

Until the year 2024, the Company has not conducted Initial Public Offering (IPO). Consequently, information related to the realization of the Use of Public Offering Proceeds is irrelevant to be presented here.

Information on Transactions with Related Parties

Reasons for Transactions

In carrying out normal business activities, the Company conducts business transactions and other transactions with related parties affiliated with the Company either due to direct or indirect ownership, and/or under the control of the same party. Selling or buying prices between the related parties are determined based on requirements approved by both parties in agreement, of which may not be the same as other transactions conducted with unrelated parties.

Explanation on Fairness of Transactions

All transactions conducted by the Company with related parties are disclosed in the financial statements and presented in accordance with PSAK 7 standards (revised in 2014) on "Disclosure of Related Parties". All transactions conducted with related parties are transactions regarded as routine transactions.

List of Related Parties, Nature of Relationships with Related Parties, and Balance in Transactions with Related Parties

In 2024, the Company completed a number of transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (revised in 2010) on "Disclosure of Related Parties". Related parties are individuals or entities related to the reporting entity.

Following is list of related parties of the Company as disclosed in the Financial Statements for fiscal year which ended on 31 December 2024:

- The Provincial Government of DKI Jakarta as the Company's shareholder;
- PT Bank DKI, a company under the same control as the Company.

Complete information on the details of the transaction balances during the year 2024 is contained in the Notes to Financial Statements (CALK) No. 36.

Statement of the Board of Directors on Transactions with Related Parties in 2024

The Board of Directors is of the belief that all financial transactions conducted by the Company with related parties were conducted at arm's length value in accordance with GCG principles and have complied with financial accounting standards applicable in Indonesia.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Dewan Komisaris melalui Komite Audit menjalankan fungsi pengawasan atas transaksi dengan batas nilai tertentu untuk memastikan kewajaran dari transaksi tersebut dan menjamin tidak adanya transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan demi keuntungan pihak-pihak tertentu. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk pengendalian internal untuk menjamin terlaksananya aktivitas keuangan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta untuk memastikan bahwa semua transaksi tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

Kebijakan Perseroan Terkait Mekanisme Review atas Transaksi

Mekanisme *review* terhadap seluruh transaksi yang dijalankan Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi diterapkan sejak tahap awal dengan melibatkan organ-organ pengawas, seperti Komite Audit dan Dewan Komisaris.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan mengenai transaksi dengan pihak-pihak berelasi dipastikan telah memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Perubahan Kebijakan Akuntansi tahun 2024

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan sejumlah amandemen PSAK yang relevan dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan atas amandemen PSAK berikut tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

- PSAK 201 (amandemen) Penyajian Laporan keuangan: Penyajian Laporan Keuangan terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- PSAK 116 (amandemen) Sewa : mengatur pengukuran selanjutnya atas transaksi dan sewa balik.
- PSAK 207: Laporan Arus Kas dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: pengaturan pembiayaan pemasok.

The Role of the Board of Commissioners and the Audit Committee on Transactions with Related Parties

The Board of Commissioners through the Audit Committee carries out its supervisory function on monitoring transactions with a certain value limit to ensure the fairness of the transactions and to ensure that there are no transactions with the potential to cause a conflict of interest for the benefit of certain parties. This policy is implemented as a form of internal control to guarantee the execution of financial activities that holds high the principles of transparency and accountability, as well as to ensure that all of the transactions conducted were in accordance with generally applicable best practices and have complied with arm's length principle.

The Company's Policy Concerning Transaction Review Mechanism

The review mechanism on all transactions carried out by the Company with related parties is applied at the beginning by engaging supervisory organs, such as the Audit Committee and the Board of Commissioners.

Compliance to Related Regulations and Provisions

Compliance to regulations and provisions on transactions with related parties is confirmed to have complied with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, namely SAK 7 (revised in 2014) concerning "Related Party Disclosures".

Changes in Accounting Policy in 2024

In the current year, the Company has applied a number of relevant effective PSAK amendments for the accounting period that began on or following 1 January 2024. Implementation of these PSAK amendments did not result in changes to the Company's accounting policies and did not have material impact on the amounts reported in the current year or prior years.

- PSAK 201 (amendment) Presentation of Financial Statements: Presentation of financial Statements related to long-term liabilities with covenants;
- PSAK 116 (amendment) Leases: regulates subsequent measurement of transactions and leasebacks.
- PSAK 17: Cash Flow Statements and PSAK 107: Financial Instruments: supplier financing arrangements.



05

Tentang Tata Kelola Perusahaan

About Good Corporate
Governance



Tentang Tata Kelola Perusahaan About Good Corporate Governance	112
Mekanisme dan Struktur GCG GCG Structure and Mechanism	115
Penilaian Penerapan GCG Tahun 2024 The Assessment of the Implementation of GCG in 2024	117
Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Atas Penerapan GCG The Result of the Self-Assessment on the Implementation of GCG	118
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)	119
Dewan Komisaris Board of Commissioners	121
Direksi Board of Directors	127
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors	132
Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama Affiliate Relations of the Board of Commissioners, Board of Directors, Main Shareholders	133
Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors	134
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	136

Komite Audit Audit Committee	139
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	142
Satuan Pengawas Internal (SPI) Internal Supervisory Unit (SPI)	146
Auditor Eksternal External Auditor	150
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	152
Sistem Manajemen Risiko Risk Management System	155
Kepatuhan Compliance	161
Perkara Hukum Legal Cases	163
Sanksi Administratif Administrative Sanctions	164
Kode Etik Code of Conduct	164
Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Providing Long-Term Compensation	166
Kebijakan Transparansi Kepemilikan Saham Policy on Transparency of Share Ownership	166
Sistem Pelaporan Pelanggaran Violation Reporting System	166
Kebijakan Anti-Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Anti-Bribery Policy and Gratuity Control	171
Keterbukaan Informasi dan Akses Informasi Perusahaan Disclosure And Access To Company Information	174



Tentang Tata Kelola Perusahaan

About Good Corporate Governance

Komitmen Penerapan Tata Kelola Yang Baik

Jamkrida Jakarta memastikan bahwa pengelolaan bisnis sehari-hari senantiasa dilandaskan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/"GCG") serta berpedoman pada ketentuan POJK No. 3/POJK.05/2017 ("POJK 3/2017") tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin, serta mengacu pada regulasi maupun *best practice* lainnya. Penerapan GCG secara konsisten di setiap tingkatan organisasi diyakini berperan besar dalam membentuk organisasi yang solid demi tercapainya keberlangsungan usaha jangka panjang.

Berangkat dari kesadaran penuh akan pentingnya GCG, Perseroan memastikan kecukupan infrastruktur tata kelola dan mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen perusahaan agar mereka memiliki pemahaman yang kuat mengenai praktik bisnis korporasi sehat, sehingga, setiap insan Perseroan memiliki tanggung jawab

Commitment to Implementing Good Corporate Governance

Jamkrida Jakarta ensures that business management on the daily basis is always based on the principles of Good Corporate Governance (GCG) and on provisions of POJK No. 3/POJK.05/2017 ("POJK 3/2017") regarding Good Corporate Governance For Guarantee Institutions, as well as on other regulations and best practices. Consistent implementation of GCG at each level of the organization is believed to take on a big role in establishing a solid organization for achieving long-term business continuity.

Starting from the full awareness of the importance of GCG, the Company ensures the adequacy of governance infrastructure and encourages the active involvement of all elements of the company so that they have strong understanding on sound corporate business practices, that each Company personnel



dan kesadaran penuh untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses pengambilan keputusan operasional dan bisnis. Langkah konkret lain yang diambil oleh Perseroan adalah dengan menyusun sebuah Pedoman GCG yang menjadi landasan atau acuan pelaksanaan GCG di Perseroan. Pedoman GCG Jamkrida Jakarta ditetapkan dalam Peraturan Direksi No. 029/Perdir/XII/2022 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Penerapan GCG secara konsisten pada setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh unit-unit bisnis diharapkan dapat mewujudkan hadirnya lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan profesionalisme. Hal ini perlu dijaga untuk memastikan bahwa pertumbuhan usaha dan keberlanjutan bisnis Perseroan telah dilakukan secara benar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Perseroan telah melakukan banyak kegiatan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan Perseroan sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Prinsip-Prinsip GCG

Kerangka kerja GCG Perseroan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam POJK 3/2017 Pasal 2, serta berlaku universal, yaitu TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*). Kelima prinsip ini memegang peran yang penting bagi Perseroan dalam memenuhi harapan para Pemangku Kepentingan. Prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana yang diuraikan di bawah, menetapkan dasar dari kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan serta menjadi pedoman bagi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di Perseroan.

has full responsibility and awareness to always apply GCG principles in each process of making operational and business decisions. Other concrete steps undertaken by the Company is by establishing GCG Guidelines that serves as the basis or reference for GCG implementation in the Company. Jamkrida Jakarta's GCG Guidelines is stipulated in the Board of Directors Regulation No. 029/Perdir/XII/2022 regarding Good Corporate Governance Guidelines.

Consistent implementation of GCG in each business activity carried out by business units is expected to generate a working environment that holds high on the values of integrity and professionalism. This must be maintained to ensure that the Company's business growth and business sustainability are appropriately performed within the corridor of applicable laws. The Company has carried out many activities to continuously improve the quality of GCG implementation within the Company as a foundation for creating sustainable added value for the benefit of the shareholders, the wider community, and various other stakeholders in both short and long term.

GCG Principles

The Company's GCG framework is based on 5 (five) fundamental principles set forth in POJK 3/2017 Article 2, and universally applicable, namely known as TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*). These five principles hold important roles for the Company in meeting the expectations of stakeholders. These principles, as described below, establish the basis of Good Corporate Governance policies in the Company and becomes the guideline for the implementation of Good Corporate Governance in the Company.

Prinsip Tata Kelola Governance Principles	Penjelasan Berdasarkan POJK 3/2017 Pasal 2 Explanation Based on POJK 3/2017 Article 2	Penerapan di Perseroan Implementation in the Company
 Transparansi Transparency	Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Lembaga Penjamin, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang penjaminan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. Transparency in decision-making process and openness in disclosing and providing relevant information on Guarantee Institution that is easy to access by Stakeholders in accordance with laws and regulations on guarantee as well as the standards, principles and practices of sound business implementation.	Perseroan selalu menekankan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan transparansi yang konsisten dalam mengungkapkan informasi material yang relevan mengenai Perseroan, dengan mematuhi kebijakan pengungkapan informasi rahasia Perseroan. The Company always stresses on the principle of openness in decision-making process and ensures consistent transparency in disclosing material and relevant information on the Company, by complying with the policy on disclosure of Company's confidential information.

Prinsip Tata Kelola Governance Principles	Penjelasan Berdasarkan POJK 3/2017 Pasal 2 Explanation Based on POJK 3/2017 Article 2	Penerapan di Perseroan Implementation in the Company
 Akuntabilitas Accountability	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Lembaga Penjamin sehingga kinerja penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. Clarity of the function and implementation of accountability of Guarantee Institutions so that the performance of Guarantee Institutions' business can proceed in transparent, proper, effective and efficient manner.	Perseroan telah menetapkan pembagian peran, fungsi, dan pelaksanaan pertanggungjawaban secara jelas untuk seluruh Organ Perseroan. Langkah ini bertujuan agar pengelolaan kegiatan usaha sehari-hari dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan Perseroan. The Company has determined clear distribution of roles, functions and accountability implementation for all Company organs. This step aims to ensure that the management of daily business activities can run effectively and efficiently in achieving the Company's goals.
 Tanggung Jawab Responsibility	Kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjamin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. Suitability of Guarantee Institution's management with laws and regulations on guarantee and ethical value as well as standards, principles and practices of sound business implementation.	Perseroan memastikan kepatuhan dan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis sehari-hari dengan peraturan perundang-undangan, terutama yang berlaku bagi lembaga penjamin. The Company ensures compliance and suitability between implementation of operational and daily business activities with laws and regulations, especially those applicable to guarantee institutions.
 Independensi Independency	Kedaaan Lembaga Penjamin yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip. The conditions of Guarantee Institutions managed independently, professionally and free from Conflict of Interest and influence or pressure from any party that are not in accordance with laws and regulations on guarantee ethical value as well as standards and principles	Perseroan menegaskan komitmennya dalam memastikan pengelolaan kegiatan usahanya dilaksanakan secara profesional dan independen. Selain itu, Perseroan juga berkomitmen untuk mengelola dan mencegah potensi benturan kepentingan, dengan menjaga independensinya dari pengaruh atau tekanan pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. The Company affirms its commitment to ensuring that the management of its business activities is carried out professionally and independently. In addition, the Company is also committed to manage and prevent potential conflict of interest by maintaining independency of influences or pressures from any party that are not in compliance with laws and regulations and principles of sound corporation.
 Keadilan Fairness	Kesetaraan dan keseimbangan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. Equality and balance in fulfilling the rights of Stakeholders that arise based on agreements, regulatory provisions on guarantee, and ethical value as well as standards, principles, and practices of sound business operation.	Perseroan memastikan pemenuhan hak-hak seluruh pemangku kepentingan dengan memberikan perlakuan yang adil dan setara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan. The Company ensures the fulfillment of rights of all stakeholders by providing fair and equal treatment, in accordance with applicable laws and regulations. This reflects the Company's commitment to maintain justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders.



Mekanisme dan Struktur GCG

GCG Structure and Mechanism

Mekanisme GCG yang berjalan di Perseroan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang memadai sehingga dapat dihasilkan GCG *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan, salah satunya tercermin dari keberhasilan Perseroan dalam mencatatkan laba bersih di tahun 2024, meningkat sebesar 41% dari laba bersih tahun lalu. Pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan manajemen dan organ-organ pendukung serta seluruh karyawan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan benar dan bertanggung jawab sesuai proses mekanisme GCG.

Mekanisme GCG perlu didukung oleh:

1. **Struktur Tata Kelola**
Struktur tata kelola yang kuat memberikan dasar formal dengan menetapkan peran dan tanggung jawab.
2. **Governance Soft Structure**
Governance soft structure membangun budaya perusahaan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG secara tidak formal.

Dengan sinergi kuat antara struktur tata kelola dan *governance soft structure*, Perseroan dapat menjalankan mekanisme penerapan GCG secara komprehensif dan optimal, sesuai dengan tujuan Perseroan dan harapan semua pemangku kepentingan.

Struktur Tata Kelola

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), mekanisme GCG Perseroan didukung oleh struktur GCG yang terdiri dari 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Ketiga organ utama tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing demi tercapainya target dan kepentingan Perseroan.

Selain memiliki organ-organ utama di atas, Perseroan juga memiliki organ-organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

1. Organ pendukung Dewan Komisaris, yang terdiri dari:
 - a. Komite Audit;
2. Organ pendukung Direksi, yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Perusahaan;
 - b. Unit Audit Internal;
 - c. Manajemen Risiko & Kepatuhan;
 - d. Tim GCG.

GCG mechanism that runs in the Company is supported by the adequacy of the Company's governance structure and infrastructure so that generated GCG outcomes are in accordance with stakeholders' expectations, one of which is reflected in the Company's success in recording an increase in 2024 net profit of 41% from last year's net profit. This achievement is proof of success of the management and supporting organs as well as all employees in properly and responsibly carrying out business activities in accordance with GCG mechanism process.

GCG mechanism requires the support of the following:

1. **Governance Structure**
A strong governance structure provides a formal foundation by determining roles and responsibilities.
2. **Governance Soft Structure**
Governance soft structure builds corporate culture that informally supports the implementation of GCG principles.

With strong synergy between governance structure and governance soft structure, the Company can run GCG implementation mechanism comprehensively and optimally, in line with the Company's objectives and expectancies of all stakeholders.

Governance Structure

Based on Law No. 40 of year 2007 regarding Limited Liability Company (UU PT), the Company's GCG mechanism is supported by GCG structure that consists of 3 (three) main organs, namely General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors.) These three main organs have their respective duties and responsibilities in accomplishing Company's targets and interests.

Aside from the above main organs, the Company also retains supporting organs below the Board of Commissioners and the Board of Directors, including the following:

1. Supporting organ to the Board of Commissioners:
 - a. Audit Committee;
2. Supporting organs to the Board of Directors, consist of the following:
 - a. Corporate Secretary;
 - b. Internal Audit Unit;
 - c. Risk Management & Compliance;
 - d. GCG Team.

Governance Soft Structure

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi GCG secara berkelanjutan, Perseroan telah menyusun dan menerapkan berbagai kebijakan internal baik dari sisi bisnis maupun operasional dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG. Hingga akhir 2024, *Governance Soft Structure* yang telah dimiliki oleh Perseroan, antara lain:

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Kebijakan Umum tentang Tata Kelola Perusahaan;
3. Standar Operasional;
4. Prosedur Pedoman Perilaku yang mencakup regulasi mengenai *Code of Conduct* (Pedoman Perilaku).

Governance soft structure yang telah ditetapkan oleh Perseroan membentuk dasar yang kokoh dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di setiap aspek aktivitasnya. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas tata kelola perusahaan secara menyeluruh.

Governance Soft Structure

In the effort to improve the quality and scope of GCG implementation on continuous basis, the Company prepared and applied various internal policies from both business and operational perspectives based on GCG principles. Until the end of 2024, *Governance Soft Structure* retained by the Company, among others, are as follows:

1. Company Articles of Association;
2. General Policy on Corporate Governance;
3. Operational Standards;
4. Code of Conduct Procedures that encompasses regulations on the Code of Conduct.

Governance soft structure set by the Company forms a firm basis in the implementation of GCG principles in each aspect of the activities. These steps reflect the Company's commitment to ensure overall sustainability and effectiveness of the company's governance.



Penilaian Penerapan GCG Tahun 2024

The Assessment of the Implementation of GCG in 2024

Pada tahun 2024, Perseroan telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan menggunakan metode kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) sebagaimana diatur dalam SEOJK No.54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin. Penilaian terhadap penerapan GCG perlu dilakukan guna mengevaluasi dan menganalisis kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG (*selfassessment* GCG) tahun 2024 menunjukkan pencapaian nilai sebesar 94,60 dengan predikat SANGAT BAIK. Hasil penilaian tersebut sedikit menurun jika dibandingkan dengan pada tahun 2023, dimana Perseroan berhasil mencapai nilai sebesar 91,44 dengan predikat SANGAT BAIK.

Peningkatan predikat dari tahun sebelumnya menjadi bahan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi GCG. Melalui evaluasi ini, Perseroan dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan peningkatan (*area of improvement*). Selanjutnya, Perseroan dapat merencanakan tindakan perbaikan yang lebih spesifik dan terarah di masa mendatang, guna memperkuat penerapan tata kelola perusahaan secara menyeluruh.

In the year 2024, the Company conducted self-assessment on Corporate Governance implementation by using the self-assessment working paper method as stipulated in SEOJK No.54/SEOJK.05/2017 on Good Corporate Governance Implementation Report of Guarantee Institutions. This assessment on GCG implementation is required to be implemented in order to evaluate and analyze policies and procedures setforth by the Company.

Results of the self-assessment on GCG implementation in 2024 show the achieved score of 94.60 with rating as VERY GOOD. This assessment result slightly declined from the previously in 2023, where the Company succesfully achieved the score of 91.44 and with rating as VERY GOOD.

Higher rating from the previous year is material for evaluation on the effectiveness of GCG implementation. Through this evaluation, the Company can identify areas of improvement. Subsequently, the Company can plan ahead on more specific and directed actions for improvement in order to strengthen the overall implementation of corporate governance.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Atas Penerapan GCG

The Result of the Self-Assessment on the Implementation of GCG



94,60 TAHUN 2024
2024

Predikat
SANGAT BAIK
VERY GOOD

91,44 TAHUN 2023
2023

Predikat
SANGAT BAIK
VERY GOOD



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)



Kebijakan RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ utama yang memegang kekuasaan tertinggi di Perseroan dan memiliki segala wewenang yang tidak dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Pada pelaksanaannya, RUPS berfungsi sebagai wadah bagi para pemegang saham untuk memutuskan berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan modal yang ditanam di perusahaan dan kepengurusan perusahaan.

RUPS diselenggarakan setiap tahun dengan penuh transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses pengambilan keputusan di RUPS, pemegang saham diharapkan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara seimbang, khususnya pada kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemegang saham minoritas.

Sesuai dengan ketentuan UUPT, mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila mufakat tidak tercapai, maka metode pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara (*voting*). Selain itu, pengambilan keputusan dalam RUPS juga harus dilakukan secara wajar dan transparan serta dengan memperhatikan kepentingan Perseroan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib didokumentasikan melalui risalah RUPS yang minimal mencakup informasi mengenai waktu pelaksanaan, agenda pembahasan, daftar peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan yang dihasilkan.

Kebijakan RUPS Perseroan telah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin. Melalui implementasi kebijakan tersebut, diharapkan pelaksanaan RUPS Perseroan dapat menghasilkan keputusan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2024

Perseroan telah menggelar RUPS Tahunan 2024 yang berlangsung pada tanggal 22 Maret 2024 dan dihadiri oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan. Selama berlangsungnya

GMS Policy

General Meeting of Shareholders (GMS) is the main organ that holds the highest power in the Company and retains all authorities that cannot be delegated to the Board of Commissioners or the Board of Directors within the limits specified in the Law and/or the Company's Articles of Association. In practice, GMS functions as the forum for the shareholders to decide on various strategic policies related to capital invested in the company and on the management of the company.

GMS is held every year with full transparency and accountability, in accordance with applicable provisions. In GMS decision-making process, the shareholders are expected to take into account the interests of all parties in a balanced manner, specifically on the interests of the guaranteed, guarantee recipients, and minority shareholders.

In line with UUPT provisions, decision-making mechanism in GMS is carried out through deliberation to reach consensus, however, if consensus is not reached, then the decision-making method in the meeting is carried out based on the majority vote through voting. Apart from that, decision-making in GMS must also be conducted in fair and transparent manner as well as with taking into account of the Company's interests for short-term, middle-term and long-term.

Every GMS must be documented through the GMS minutes of meeting which at least include information on time of event, agenda of discussion, list of participants, opinions that arised during the GMS, and resolutions generated.

The Company's GMS policy is in accordance with provisions stipulated in Article 5 of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 3/POJK.05/2017 on Good Corporate Governance for Guarantee Institutions. Through the implementation of this policy, it is hoped that the implementation of the Company's GMS can produce decisions that are in line with GCG principles.

GMS Implementation in 2024

The Company held its 2024 Annual GMS on 22 March 2024 and attended by the Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. During the 2024 Annual

RUPS Tahunan 2024, seluruh pembahasan agenda rapat dan keputusan yang dihasilkan telah terekam secara tertulis dalam Risalah Rapat. Dokumen ini kemudian resmi ditetapkan melalui Akta Keputusan RUPS yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Perseroan menunjuk Notaris tersebut, untuk bertindak sebagai pihak independen dalam penyelenggaraan RUPS.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2024, terdapat 8 (delapan) mata acara, yaitu:

1. Persetujuan Laporan tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023,
3. Penetapan penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2024 dan Tantiem anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023;
4. Penetapan pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2024 sampai 2028;
5. Penetapan honorarium dan penghasilan lainnya Dewan Pengawas Syariah Perseroan Tahun 2024;
6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
7. Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan;
8. Perubahan Anggaran Dasar terkait masa jabatan Dewan Pengawas Syariah menjadi 4 (empat) tahun. Keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dalam RUPS tahunan 2024 telah diimplementasikan sepenuhnya selama tahun 2024.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2024

Perseroan telah menggelar RUPS Luar Biasa 2024 yang berlangsung pada tanggal 17 Desember 2024 dan dihadiri oleh Pemegang Saham, serta Direksi Perseroan. Selama berlangsungnya RUPS Luar Biasa 2024, seluruh pembahasan agenda rapat dan keputusan yang dihasilkan telah terekam secara tertulis dalam Risalah Rapat. Dokumen ini kemudian resmi ditetapkan melalui Akta Keputusan RUPS Luar Biasa yang dibuat oleh Notaris Vera Elisabeth, S.H., M.Kn. Perseroan menunjuk Notaris tersebut, untuk bertindak sebagai pihak independen dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa 2024, terdapat 1 (satu) mata acara, yaitu: Pengesahan dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Tahun 2025 PT Jamkrida Jakarta (Perseroda). Setelah dilakukan pembahasan mengenai mata acara tersebut, Pemegang Saham kemudian mengambil keputusan, sebagai berikut: Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun 2025 PT Jamkrida Jakarta (Perseroda). Keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa 2024 akan diimplementasikan sepenuhnya di tahun 2025.

Realisasi Keputusan RUPS 2023

Semua keputusan yang dihasilkan dalam RUPS Tahunan 2024 yang membahas kinerja Perseroan pada tahun buku 2023 telah sepenuhnya dijalankan pada tahun 2023.

GMS, all meeting agenda discussions and decisions made were recorded in writing in the Minutes of Meeting. This document is then officially determined through the Deed of GMS Resolution made before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. The Company appointed the Notary to act as the independent party in the execution of the GMS.

In the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (GMS), there were 8 (eight) agenda, namely as follows:

1. Approval of the Annual Report including the Report of the Supervisory Duty of the Board of Commissioners and the Ratification of the Financial Statements of Fiscal Year 2023;
2. Decision on the use of Net Profit of Fiscal Year 2023;
3. Decision on the remuneration of members of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners for the Year 2024 and Tantiem of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of Fiscal Year 2023;
4. Decision on the re-appointment of the Company's Sharia Supervisory Board for the Period of 2024 to 2028;
5. Decision on the honorarium and other income of the Sharia Supervisory Board of Year 2024;
6. Appointment of the Public Accounting Firm to conduct Financial Statements Audit of Fiscal Year 2024;
7. Change in the Company Organizational Structure;
8. Changes to the Articles of Association regarding the term of office of the Sharia Supervisory Board to 4 (four) years. The decision taken by the shareholders in the 2024 Annual GMS has been fully implemented during the year 2024.

Implementation of 2024 Extraordinary GMS

The Company held the 2024 Extraordinary GMS on 17 December 2024 and attended by the Shareholders, and the Company's Board of Directors. During the 2024 Extraordinary GMS, all meeting agenda discussions and decisions resulted were recorded in writing in the Minutes of Meeting. This document is then officially established in the Deed of the Extraordinary GMS Resolution made before Notary Vera Elisabeth, S.H., M.Kn. The Company appointed the Notary to act as the independent party in the execution of the Extraordinary GMS.

In the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS), there was 1 (one) agenda, namely: The Ratification and Decision of the Work Plan and Budget (RKAP) of Year 2025 of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda). Following discussion on the said agenda, the Shareholders then made the decisions as follows: Approved and ratified the Work Plan and Budget (RKAP) of year 2025 of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda). Decisions undertaken by the shareholders during the Extraordinary GMS 2024 will be fully implemented in the year 2025.

Realization of 2023 GMS Resolutions

All resolutions of the 2024 Annual GMS with discussions on the Company's performance in fiscal year 2023 have been fully carried out in 2023.



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan Perseroan dan memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip GCG.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris wajib memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai. Seluruh anggotanya tidak boleh mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS. Perseroan menegaskan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah melalui uji kompetensi dan integritas (*fit and proper test*). Hal ini memperkuat komitmen Perseroan dalam penerapan prinsip GCG, khususnya dalam menjaga integritas dan independensi Dewan Komisaris, pada saat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris sebagai Organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan sampai dengan pemberhentian sementara. Secara lebih terperinci, implementasi tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain:

1. Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan hukum serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
2. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, dan melaksanakan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
3. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
4. Menyetujui dan mengesahkan RJPP dan RKAP;
5. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
6. Memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu, terukur dan lengkap;
7. Membentuk organ-organ di bawah Dewan Komisaris yang diperlukan/dipersyaratkan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan;

The Board of Commissioners is a Company Organ tasked to conduct general supervision and/or specifically on the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association, as well as to provide advice to the Board of Directors related to the management of the Company and ensure that the Company carries out GCG principles.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners must possess adequate integrity, competency, and reputation. All members must not take and/or receive personal gain from the company other than the remuneration and other facilities set forth by the GMS. The Company affirms that all members of the Board of Commissioners have passed the competency and integrity test (*fit and proper test*). This strengthens the Company's commitment to implementing GCG principles, specifically in maintaining integrity and independency of the Board of Commissioners when performing the supervisory function in the Company.

Duties and Responsibilities of The Board of Commissioners

As regulated in the Articles of Association, the Board of Commissioners as Company Organ is tasked and responsible collectively to conduct supervision and provide advice to the Board of Directors as well as ensure that the Company implements Good Corporate Governance. The supervisory function and providing advice by the Board of Commissioners encompass acts of prevention, improvement up to temporary suspension. In more detail, the implementation of duties, authorities and responsibilities of the Board of Commissioners, among others, are as follows:

1. Comply with the Company's Articles of Association and legal regulation as well as Good Corporate Governance principles;
2. Conduct supervision of policies on the management of the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors including supervision of the implementation of RJPP, RKAP, provisions of the Articles of Association and GMS Resolutions, and carry out other supervision as long as it does not conflict with applicable legal regulations, for the interests of the Company's purpose and objectives;
3. Provide advice to the Board of Directors in managing the Company;
4. Approve and ratify RJPP and RKAP;
5. Carry out Company management actions in certain circumstances in accordance with the provisions stipulated in the Company's Articles of Association;
6. Obtain access to Company information in a timely, measurable and complete manner;
7. Form organs under the Board of Commissioners needed/required to assist the Board of Commissioners in performing its duties;
8. Employ experts for certain matters and within a certain period of time at the Company's expense;

9. Secara aktif meminta keterangan secara lisan maupun tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan yang terjadi dan/atau berdasarkan hasil evaluasi komite audit/organ-organ Dewan Komisaris berkenaan dengan perkembangan kegiatan/pengurusan Perusahaan yang dianggap penting dan strategis dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan;
10. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dan tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng;
11. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut;
 - d. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
 - e. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
 - f. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
 - g. Memberikan persetujuan dalam hal Dewan Pengawas Syariah (DPS) memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris;
 - h. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kinerja audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
9. Actively request information verbally or in writing from the Board of Directors regarding a problem that occurs and/or based on the results of the audit committee/Board of Commissioners' organs evaluation concerning the development of the Company's activities/management considered as important and strategic and can affect the Company's performance.
10. Each member of the Board of Commissioners shall be personally liable for the Company's losses if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his/her duties and such liability shall apply collectively;
11. Members of the Board of Commissioners shall not be held liable for losses if they can prove as in the following:
 - a. Carried out supervision in good faith and with caution for the benefit of the Company and in accordance with the purpose and objectives of the Company;
 - b. No personal interest, either directly or indirectly, in the management actions of the Board of Directors that result in losses;
 - c. Provide advice to the Board of Directors to prevent the occurrence or continuation of such losses;
 - d. Supervise the Board of Directors in maintaining a balance of interests of all parties.
 - e. Prepare a report on the activities of the Board of Commissioners which is part of the report on the implementation of Good Corporate Governance;
 - f. Monitor the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance;
 - g. Provide approval in the event that the Sharia Supervisory Board (DPS) requires assistance from committee members whose organizational structure is under the Board of Commissioners;
 - h. Ensure that the Board of Directors has followed-up on audit findings and recommendations from the internal audit performance unit, external auditors, results of supervision by the Financial Services Authority and/or the results of supervision by other authorities.

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin, pasal 18, telah mengatur bahwa Perseroan wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan adalah empat tahun dan dapat diperpanjang untuk satu periode jabatan berikutnya, berdasarkan keputusan pemegang saham, yang ditetapkan melalui RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir jika yang bersangkutan mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Composition and Term of Office of The Board of Commissioners

The Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.05/2017 on Good Corporate Governance For Guarantee Institution, article 1, stipulated that the Company is obligated to have at least 2 (two) members of the Board of Commissioners.

The term of office of the Board of Commissioners of the Company is four years and may be extended for one following term of office, based on the decision of the shareholders, established through the GMS. The term of office of members of the Board of Commissioners ends if the concerned resign, no longer meets the requirements, dies, or is dismissed based on a GMS decision.



Komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners of the Company as of 31 December 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Dasar Hukum Pemberhentian Legal Basis of Dismissal	Masa Jabatan Term of Office
Andrianto Wahyu Adi	Komisaris Utama President Commissioner	- Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 871 Tahun 2023 dan 527/072 tanggal 15 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Perseroan - Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" Nomor 37 tanggal 15 Maret 2024 - Decision of the Shareholders No. 871 Tahun 2023 and 527/072 dated 15 December 2023 on the Dismissal and Appointment of the Company's Commissioners - Deed of Decision Statement Outside of the General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Regional Company) or abbreviated as "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" No. 37 dated 15 March 2024	-	15 Desember 2023 – 15 Desember 2027 15 December 2023 – 15 December 2027

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini telah memenuhi ketentuan *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemprov DKI Jakarta, serta memahami ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan prinsip-prinsip GCG.

All members of the Board of Commissioners of the Company currently in office have met the provisions of the fit and proper test from the Financial Services Authority (OJK) and the Provincial Government of DKI Jakarta, and have understood the provisions of Limited Liability Company and GCG principles.

Pedoman Kerja (Piagam) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Kerja (Piagam) Dewan Komisaris.

Work Guidelines of The Board of Commissioners

The Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities with reference to the rules that have been set out in the Board of Commissioners' Work Guidelines (Charter).

Komisaris Independen

Komisaris Independen Perseroan merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pihak independen yang tidak memiliki afiliasi dan benturan kepentingan dengan pemegang saham. Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Terjamin, Penerima Jaminan, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Independent Commissioner

The Company's Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners from independent parties with no affiliation and conflict of interest with the shareholders. Independent Commissioners have the essential duties of supervisory function to voice the interests of the Guaranteed, Recipient of Guarantee, and other Stakeholders.

Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi persyaratan, yang sesuai dengan pasal 25 Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2017, sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Perseroan;
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan satu tingkat di bawah Direksi pada Perseroan atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dalam kurun waktu enam bulan terakhir;

The Company's Independent Commissioners have met the requirements in accordance with article 25 of OJK Regulation No. 3/POJK.05/2017 as follows:

1. No affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of DPS, or shareholders of the Company;
2. Never been a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of DPS, or taken the position one level below the Board of Directors in the Company or other business entities affiliated with the Company within the last six month period;

- Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan/atau Penjaminan Ulang Syariah, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat tetap mengikuti prinsip musyawarah mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik Perbedaan pendapat (*Dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima Salinan risalah rapat Dewan Komisaris.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi

Kebijakan Rapat

Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk mengundang Direksi untuk hadir dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Agenda rapat yang dibahas bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi antara lain mengenai kemajuan kinerja Perseroan, permasalahan yang sedang dihadapi, situasi ekonomi dan politik yang akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung ke Perseroan, perkembangan tentang industri dimana Perseroan beroperasi, dan memberikan arahan serta persetujuan kepada Direksi.

Frekuensi Rapat, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat Gabungan Tahun 2024

Selama tahun 2024, telah diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi. Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat tersebut masing-masing mencapai 100%. Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi membahas agenda-agenda sebagai berikut:

- Understand the laws and regulations on Guarantee, Sharia Guarantee, Re-Guarantee, and/or Sharia Re-Guarantee, as well as other relevant laws and regulations;
- Have good knowledge on the Company's financial condition.

Meetings of The Board of Commissioners

Meeting Policy

Decision-making mechanism in the meetings remains with following the principle of deliberation to reach consensus. If consensus is not reached, then decisions will be taken based on majority vote.

Results of the meetings of the Board of Commissioners must be contained in the minutes of meeting of the Board of Commissioners and that dissenting opinions that occur in the process of decision-making must be properly and clearly documented along with the reasons behind the dissenting opinions. Members of the Company's Board of Commissioners, present or not at the Board of Commissioners meetings, have the right to obtain Copies of the minutes of meetings of the Board of Commissioners.

Joint Meetings of The Board of Commissioners and The Board of Directors

Meeting Policy

The Board of Commissioners has the authority to invite the Board of Directors to attend the Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The meeting agenda to be discussed between the Board of Commissioners and the Board of Directors, among others, are on developments in the Company's performance, problems/issues being faced, economic and political situations that may impact the Company directly or indirectly, developments in the industry where the Company operates, and providing directives as well as approvals to the Board of Directors.

Meeting Frequency, Level of Attendance, and Joint Meeting Agenda in 2024

During the year 2024, 12 (twelve) Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors were held. The level of attendance of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the meetings reached 100% each. The agenda discussed in the meetings are as follows:

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	25 Maret 2024 25 March 2024	Rapat Evaluasi Kinerja Februari 2024 Meeting on February 2024 Performance Assessment
2	19 April 2024 19 April 2024	Rapat Evaluasi Kinerja Maret 2024 Meeting on March 2024 Performance Assessment
3	21 Mei 2024 21 May 2024	Rapat Evaluasi Kinerja April 2024 Meeting on April 2024 Performance Assessment



No	Tanggal Rapat Dae of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda
4	20 Juni 2024 20 June 2024	Rapat Evaluasi Kinerja Mei 2024 Meeting on May 2024 Performance Assessment
5	18 Juli 2024 18 July 2024	Rapat Evaluasi Kinerja Juni 2024 Meeting on June 2024 Performance Assessment
6	16 Agustus 2024 16 August 2024	Rapat Evaluasi Kinerja Juli 2024 Meeting on July 2024 Performance Assessment
7	19 September 2024 19 September 2024	Rapat Evaluasi Kinerja Agustus 2024 Meeting on August 2024 Performance Assessment
8	17 Oktober 2024 17 October 2024	Rapat Evaluasi Kinerja September 2024 Meeting on Septembmer 2024 Performance Assessment
9	25 Oktober 2024 25 October 2024	Pembahasan Internal RKA 2025 Internal discussion on 2025 RKA
10	28 Oktober 2024 28 October 2024	Pembahasan Internal RKA 2025 Internal discussion on 2025 RKA
11	15 November 2024 15 November 2024	Rapat Evaluasi Kinerja Oktober 2024 Meeting on October 2024 October Performance Assessment
12	17 Desember 2024 17 December 2024	Rapat Evaluasi Kinerja November 2024 Meeting on November 2024 Performance Assessment

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Tahun 2024

Dalam rangka memastikan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sejalan dengan perkembangan bisnis terkini, Perseroan meyakini peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris perlu dilakukan secara berkelanjutan. Perseroan memiliki kebijakan untuk peningkatan kapabilitas anggota Dewan Komisaris. Salah satu kegiatan untuk peningkatan kapabilitas tersebut adalah dengan mengikutsertakan Dewan Komisaris dalam program pengembangan yang bertujuan antara lain untuk memberikan informasi terkini mengenai bisnis dan kebijakan-kebijakan Perseroan. Kegiatan lain adalah berbagi pengetahuan sesuai kapabilitasnya terkait materi-materi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pengawasannya.

Program Orientasi/Pengenalan Bagi Dewan Komisaris Baru Tahun 2024

Perseroan memiliki program orientasi/pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru yang bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan dan budaya kerja Perseroan serta mensosialisasikan hal-hal lainnya yang dianggap penting untuk diketahui oleh anggota Komisaris baru agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan baik demi tercapainya kepentingan Perseroan.

Pada tahun 2024, Perseroan memiliki anggota Komisaris baru sehingga menyelenggarakan program orientasi yang dimaksud pada tanggal 17 Januari 2024.

Competency Development Program of The Board of Commissioners In 2024

In the context of ensuring that duties and responsibilities of members of the Board of Commissioners are carried out effectively and efficiently as well as in line with the latest business development, the Company believes that competency improvement of members of the Board of Commissioners need to be continually conducted. The Company has policies to improve the capabilities of members of the Board of Commissioners, one of which is through activities to enhance these capabilities by involving the Board of Commissioners in development programs that aim, among others, to provide latest information on business and policies of the Company. Other activities include sharing knowledge according to their respective capabilities related to materials that may support the implementation of their supervisory duties.

Orientation/Introduction Program For The New Board Of Commissioners In 2024

The Company has an orentation/introduction program for members of the Board of Commissioners that aims at introducing the Company's environment and working culture as well as the socialization of other matters considered important to know by members of the new Board of Commissioners so that implementation of their duties and responsibilities can run appropriately to achieve the Company's interests.

In 2024, the Company retained new members of the Board of Commissioners that implementation of the said orientation program was held on 17 January 2024.

Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris didukung oleh beberapa komite di bawah dewan Komisaris. Pada tahun 2024, Dewan Komisaris menilai kinerja komite-komite tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini:

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Komite Audit Tahun 2024

Dewan Komisaris memberikan apresiasi positif terhadap kinerja Komite Audit sepanjang tahun 2024. Kinerja Komite Audit dinilai berdasarkan capaian kinerja, kompetensi dan kehadiran dalam rapat. Dari penilaian tersebut, Komite Audit menunjukkan komitmen tinggi terhadap standar etika dan profesionalisme dalam memantau perencanaan dan pelaksanaan audit, pengendalian internal, serta kelengkapan proses laporan keuangan. Dewan Komisaris mengakui bahwa pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal berjalan efektif. Rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit dinilai sebagai kontribusi berharga untuk mendukung Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

Assessment Of The Board Of Commissioners On The Performance Of The Board Of Commissioners' Supporting Committees

Implementation of duties of the Board of Commissioners is supported by several committees under the Board of Commissioners. In 2024, the Board of Commissioners assessed the performance of these committees as described below:

Assessment of the Board of Commissioners on the Performance of the Audit Committee in 2024

The Board of Commissioners extends its positive appreciation for the performance of the Audit Committee throughout the year 2024. The performance of the Audit Committee was assessed based on its performance achievements, competency, and attendance in meetings. From the assessment, the Audit Committee showed high commitment on ethical standards and professionalism in monitoring audit planning and implementation, internal control, as well as the completeness of the financial reporting process. The Board of Commissioners admits that monitoring on the follow-ups of internal and external audit results were effective. Recommendations provided by the Audit Committee were regarded as valuable contribution to support the Board of Commissioners in decision-making and formulating policies.



Direksi

Board of Directors

Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan Perseroan demi tercapainya kepentingan dan tujuan Perseroan, serta berperan sebagai wakil Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan pengabdian secara penuh terhadap tugas dan kewajibannya baik secara kolektif maupun individual dengan penuh integritas dan kehati-hatian, serta selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sebagai organ utama, Direksi bertugas secara kolektif menjalankan segala tindakan pengurusan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, serta untuk kepentingan Perseroan. Direksi berkewajiban mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam segala hal dan kejadian dengan pembatasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Sesuai dengan pasal 12 Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2017, Direksi Perseroan memiliki kewajiban untuk:

1. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya;
3. Mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;
5. Memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Terjamin dan/atau Penerima Jaminan;
6. Memastikan agar informasi mengenai Lembaga Penjamin diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS secara tepat waktu dan lengkap;
7. Membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite, karyawan Lembaga Penjamin, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada di bawah Direksi.

The Board of Directors is a Company Organ holding the full responsibility for the management and administration of the Company in order to accomplish the interests and objectives of the Company, as well as to take the role as the Company's representative in taking legal actions both inside and outside of the court in accordance with UUPT and the Articles of Association. In carrying out its duties, the Board of Directors is obligated to devote full energy, mind and dedication, both collegially and individually, with full integrity and prudence, as well as to obey all applicable laws and regulations at all times.

Duties and Responsibilities of The Board of Directors

As a main organ, the Board of Directors is tasked collectively to carry out all actions on the management of the Company in line with the purpose and objectives of the Company and for the interests of the Company. The Board of Directors is obligated to represent the Company, both inside and outside of the court, in all matters and incidents with limitation as stipulated in the laws and regulations, the Articles of Association and/or Resolutions of the GMS.

In accordance with article 12 of OJK Regulation No. 3/POJK.05/2017, the Board of Directors of the Company have the obligations on the following:

1. Assures effective, accurate, and quick decision-making as well as act independently, not having interests that may disrupt its capability to carry out duties independently and critically;
2. Complies with laws and regulations, article of association, and other internal regulations from Guarantee Institutions in performing their duties;
3. Manages Guarantee Institution in accordance with its authority and responsibility;
4. Accountable for the implementation of its duties to the GMS;
5. Ensures that Guarantee Institution takes into account the interests of all parties, specifically the interests of the Guaranteed and/or Recipient of Guarantee;
6. Ensures that information on Guarantee Institution is provided to the Board of the Commissioners and DPS on timely manner and complete;
7. Assists with fulfilling the needs of DPS in using committee members, employees of Guarantee Institution, and professional experts available of which its organizational structure is under the Board of Directors.

Di samping itu, anggota Direksi juga memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tabel berikut ini menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi:

In addition, members of the Board of Directors also has the duties and responsibilities according to their respective fields. The table below explains the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Agus Supriadi	Direktur Utama President Director	Mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan pokok-pokok Rencana Kerja Jangka Panjang (RJP) Tahun Berjalan, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan, melakukan tindakan-tindakan yang perlu diputuskan secara langsung dalam rangka pencapaian target RKAP Tahunan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR), mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan pelaksanaan tugas Anggota Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan Perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Coordination on formulating and determining the main points of the Current Year's Long-Term Work Plan (RJP), the Annual Company Work Plan and Budget (RKAP), taking actions that need to be decided directly in order to achieve the Annual RKAP target, Partnership and Community Development Program (PKBL) or Corporate Social Responsibility (CSR), directing, coordinating, supervising, controlling the implementation of the duties of the Board of Directors based on the provisions of laws and regulations and applicable provisions in order to achieve the Company's objectives both short and long term.
Jimmi Setya Budi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJP) Tahun Berjalan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan, melakukan tindakan-tindakan yang perlu diputuskan secara langsung dalam rangka pencapaian target RKAP tahun berjalan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko yang meliputi: Keuangan, IT, SDM dan Umum, Klaim, Subrogasi, Manajemen Risiko dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Formulate, determine and implement policies set out in the Company's Long-Term Work Plan (RJP) for the Current Year, the Company's Annual Work Plan and Budget (RKAP), take actions that need to be decided directly in order to achieve the current year's RKAP target, direct, coordinate, supervise, control the implementation of tasks in the field of the Directorate of Finance and Risk Management which include: Finance, IT, HR and General Affairs, Claims, Subrogation, Risk Management in order to achieve the Company's goals both short and long term.

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi

Mengacu pada Pasal 8 Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2017, Perseroan diwajibkan memiliki minimal dua orang anggota Direksi. Sekurang-kurangnya, setengah dari total anggota Direksi Perseroan harus memiliki latar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko yang sesuai dengan bidang usaha Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Direksi Perseroan adalah lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu periode jabatan berikutnya, berdasarkan keputusan pemegang saham, yang ditetapkan melalui RUPS. Masa jabatan anggota Direksi akan berakhir jika yang bersangkutan mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Composition and Term of Office of The Board of Directors

Referring to Article 8 of OJK Regulation No. 3/POJK.05/2017, the Company is required to have two members of the the Board of Directors. At least half of the total members of the Board of Directors of the Company must have the knowledge background and experience in risk management in line with the Company's line of business.

According to the Company's Articles of Association, the term of office of the Board of Directors is five years and can be extended for one following term of office, as stipulated through the GMS. The term of office of members of the Board of Directors ends if the concerned resign, no longer meet the requirements, dies, or dismissed based on GMS resolution.

Komposisi dan Profil Direksi Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The composition and Profile of the Board of Directors as of 31 December 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Agus Supriadi	Direktur Utama President Director	Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No. 18 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam SH., M.kn. Deed of Decision Statement of Shareholders Outside of the General Meeting of Shareholders (Circular) No. 18 dated 21 March 2023	2023 -2026
Jimmi Setya Budi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Direktur Operasional Director of Operations	Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Nomor 18 tanggal 21 Maret 2023 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam SH., M.kn. Deed of Decision Statement Outside of the General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta No. 18 dated 21 March 2023 made before Notary Ashoya Ratam S.H., M.Kn.	2023 -2028

Pedoman Kerja (Piagam) Direksi

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Kerja (Piagam) Direksi.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Salah satu wujud pelaksanaan tugas Direksi ditunjukkan melalui pelaksanaan rapat internal yang bersifat rutin dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Direksi. Rapat Direksi berfungsi sebagai forum formal untuk merencanakan dan memantau eksekusi strategi dan kebijakan Perseroan.

Pelaksanaan tugas Direksi dapat tercermin melalui penyelenggaraan rapat. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 17 Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2017, Direksi Perseroan wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat juga dapat diadakan setiap saat sesuai kebutuhan yang dianggap perlu oleh Direksi.

Frekuensi Rapat, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat Direksi Tahun 2024

Selama tahun 2024, telah diselenggarakan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali Rapat Direksi. Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut masing-masing mencapai 100%. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, anggota Direksi Perseroan wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.

Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai

Work Guidelines (Charter) of The Board of Directors

The Board of Directors carries out its duties and responsibilities with reference to the guidelines on provisions set forth in the Work Guideline (Charter) of the Board of Directors.

Meetings of The Board of Directors

Meeting Policy

One of the forms of the implementation of duties of the Board of Directors is shown through the implementation of routine internal meetings that are held at any time when deemed necessary by the Board of Directors. Meetings of the Board of Directors function as formal forums to plan and monitor the execution of strategies and policies of the Company.

Implementation of duties of the Board of Directors can be reflected through the meetings. In accordance with provisions stipulated in article 17 of OJK Regulation No. 3/POJK.05/2017, the Board of Directors of the Company is required to hold meetings of the Board of Directors on regular basis, at least 1 (one) time in 1 (one) month. Meetings may also be held at any given moment as needed and deemed necessary by the Board of Directors.

Meeting Frequency, Level of Attendance, and Meeting Agenda of the Board of Directors/ Meetings in 2024

During the year 2024, 23 (twenty three) meetings of the Board of Directors were held. The level of attendance of members of the Board of Directors in those meetings each reached 100%. In accordance with applicable provisions, members of the Board of Directors of the Company are required to attend meetings of the Board of Directors at minimum 50% of the total Board of Directors' meetings in 1 (one) year period.

Results of the meetings of the Board of Directors must be contained in the minutes of meetings of the Board of Directors and properly documented. Dissenting opinions that arise in decision-making of the Board's meetings are required to be clearly stated

alasan perbedaan pendapat tersebut. Anggota Direksi Perseroan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2017, Pasal 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

in the minutes of meetings of the Board of Directors altogether with the reasons behind those dissenting opinions. Members of the Board of Directors who attended the meeting have the right to obtain copies of the minutes of meetings. This is in line with the provision stipulated in OJK Regulation No. 3/POJK.05/2017, Article 17 paragraph (3), paragraph (4), and paragraph (5).

Rapat Direksi membahas agenda-agenda sebagai berikut:

Meetings of the Board of Directors discussed the agenda as listed below:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	4 Januari 2024 4 January 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
2	15 Januari 2024 15 January 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
3	2 Februari 2024 2 February 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
4	16 Februari 2024 16 February 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
5	4 Maret 2024 4 March 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
6	21 Maret 2024 21 March 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
7	1 April 2024 1 April 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
8	30 April 2024 30 April 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
9	17 Mei 2024 17 May 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
10	31 Mei 2024 31 May 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
11	28 Juni 2024 28 June 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
12	15 Juli 2024 15 July 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
13	31 Juli 2024 31 July 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
14	15 Agustus 2024 15 August 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
15	30 Agustus 2024 30 August 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
16	19 September 2024 19 September 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
17	2 Oktober 2024 2 October 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
18	15 Oktober 2024 15 October 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
19	30 Oktober 2024 30 October 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
20	13 November 2024 13 November 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads



No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
21	29 November 2024 29 November 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
22	18 Desember 2024 18 December 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads
23	30 Desember 2024 30 December 2024	Rapat mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly meeting of the Board of Directors and Division Heads

Pelatihan dan/atau Pengembangan Direksi Tahun 2024

Dalam rangka memastikan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sejalan dengan perkembangan bisnis terkini, Perseroan meyakini peningkatan kompetensi anggota Direksi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Perseroan memiliki kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas anggota Direksi. Salah satu kegiatan peningkatan kapabilitas tersebut adalah dengan mengikutsertakan Direksi dalam program pengembangan yang bertujuan antara lain untuk memberikan informasi mengenai kondisi terkini mengenai bisnis secara lokal dan global dalam rangka mengantisipasi tantangan masa depan untuk keberlangsungan Perseroan.

Pada tahun 2024, anggota Direksi telah mengikuti program pelatihan (termasuk melalui webinar) antara lain sebagai berikut:

Training and/or Development of The Board of Directors in 2024

In the context of ensuring the duties and responsibilities of members of the Board of Directors are carried out effectively and efficiently as well as in line with the latest business developments, the Company believes that improvement in the competency of members of the Board of Directors must be implemented on continual basis. The Company retains policies to improve the capabilities of members of the Board of Directors. One of the activities on competency improvement is by involving the Board of Directors in development programs that aim, among others, to provide information on the latest conditions of both local and global businesses to anticipate future challenges for the Company's sustainability.

In 2024, members of the Board of Directors took part in training programs (including webinars) such as the following:

Nama Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Tanggal Penyelenggaraan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
Jimmi Setya Budi	Direktur Operasional / Director of Operations	Sertifikasi LSP Penjaminan Skema Direktur Investasi / LSP Certification Guarantee Investment Director Scheme	22 Januari 2024 / 22 January 2024	LSP Penjaminan / LSP Guarantee

Penilaian Direksi Terhadap Kinerja Komite Pendukung Direksi

Selama tahun 2024, Direksi belum membentuk Komite Perseroan di bawah Direksi, dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi masih dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, didukung oleh beberapa Divisi, sebagai organ pendukung di bawah Direksi.

Board of Directors Assessment on The Performance of Committees Supporting The Board of Directors

During the year 2024, the Board of Directors has not established Company Committees under the Board of Directors, with the consideration that the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors was still able to proceed in accordance with the provisions, supported by several supporting divisions under the Board of Directors.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Prosedur Penilaian dan Pihak Penilai

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara berkala setiap tahun. Penilaian kinerja ini bertujuan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh pemegang saham melalui analisa Laporan Pencapaian Kinerja yang disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada para pemegang saham.

Penilaian Kinerja Direksi dilakukan oleh pemegang saham melalui analisa Laporan Pencapaian Kinerja yang disampaikan oleh masing-masing Direksi kepada para pemegang saham melalui Dewan Komisaris.

Indikator Penilaian

Indikator Penilaian Kinerja Dewan Komisaris ditetapkan RUPS setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Sementara Indikator Penilaian Kinerja masing-masing Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris setiap tahun berdasarkan usulan dari Direksi yang bersangkutan.

Assessment Procedures and The Assessor

Performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is conducted periodically every year. This assessment is intended to evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors in performing their duties and responsibilities. The procedures of conducting the performance of the Board of Directors is carried out in accordance with applicable provisions.

Performance assessment of the Board of Commissioners is conducted by the shareholders through analysis of the Performance Achievement Report submitted by the Board of Commissioners to the shareholders.

Performance assessment of the Board of Directors is conducted by the shareholders through analysis of the Performance Achievement Report submitted by each member of the Board of Directors to the shareholders through the Board of Commissioners.

Assessment Indicators

Performance Assessment Indicators of the Board of Commissioners are set at the GMS every year based on recommendations from the concerned Board of Commissioners.

Meanwhile, Performance Assessment Indicators of each member of the Board of Directors are set by the Board of Commissioners every year based on recommendations from the concerned Board of Directors.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama

Affiliate Relations of the Board Commissioners, the Board of Directors and the Majority Shareholders

Pengungkapan mengenai hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali sebagai salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya;
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Informasi terkait hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi diungkapkan sebagai berikut:

Disclosure on affiliation among members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and the Controlling Shareholder, as one of the criteria used to measure the independency of the Board of Commissioners and the Board of Directors is visible from the table below, which covers the following:

1. Affiliate relationship between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors;
2. Affiliate relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
3. Affiliate relationship between members of the Board of Directors and the Major and/or Controlling Shareholders;
4. Affiliate relationship between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners;
5. Affiliate relationship between members of the Board of Commissioners and the Major and/or Controlling Shareholders.

Information related to the affiliate relations of the Board of Commissioners and the Board of Directors are conveyed in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi Financial and Family Relationship of the Board of Commissioners and the Board of Directors											
		Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Andrianto Wahyu Adi	Komisaris Utama President Commissioner		√		√		√		√		√		√
Agus Supriadi	Direktur Utama President Director		√		√		√		√		√		√
Jimmi Setya Budi	Direktur Operasional Director of Operations		√		√		√		√		√		√

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Kebijakan dan Prosedur Nominasi

Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Kebijakan Nominasi merupakan panduan strategis yang mengatur langkah-langkah terstruktur untuk pelaksanaan prosedur nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Ketentuan yang diatur mencakup kriteria kandidat, peninjauan kualifikasi, evaluasi, pengusulan daftar kandidat, pemberian rekomendasi, dan proses pengangkatan.

Prosedur nominasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari serangkaian langkah yang diatur dalam kebijakan untuk mengusulkan dan menunjuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Prosedur ini digunakan untuk memastikan terpilihnya kandidat yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Prosedur nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dimulai dengan seleksi kandidat yang mempertimbangkan kualifikasi, pengalaman, dan integritas. Kemudian, Komite Nominasi dan Remunerasi mengevaluasi calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Hasil evaluasi disampaikan kepada pemegang saham, dan kandidat terpilih diangkat sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kebijakan dan Prosedur Remunerasi

Remunerasi merupakan imbalan atau balas jasa yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai pengakuan atas kedudukan dan perannya dalam Perseroan, sejalan dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab yang diemban berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada dasarnya mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 79 tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas, dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah. Prosedur remunerasi ditetapkan untuk meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sejalan dengan *best practice* dalam industri sejenis. Penetapan remunerasi mempertimbangkan faktor skala usaha, kompleksitas bisnis, tingkat inflasi, kondisi keuangan perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dimulai dengan menyusun struktur remunerasi, diikuti oleh penyusunan kebijakan terkait remunerasi, dan selanjutnya, menetapkan besaran remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Nomination Policy and Procedure

Nomination is the proposal/ recommendation of a person to be appointed for a position as member of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Nomination Policy is the strategic guideline that regulates the structured steps to implement the nomination procedure of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. The stipulated provisions encompass the candidate criteria, qualification review, evaluation, propose list of candidates, recommendations, and appointment process.

The nomination procedure of the Board of Commissioners and the Board of Directors consists of a series of steps stipulated in the policy to recommend and appoint members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. This procedure is used to ensure that qualifications conform with the set criteria. The nomination procedure of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company begins with the candidate selection that takes into account of the qualification, experience, and integrity. Then the Nomination and Remuneration Committee evaluates the candidate members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Results of the evaluation are submitted to the shareholders, and candidates selected are appointed in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).

Remuneration Policy and Procedure

Remuneration is reward or compensation given to members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as acknowledgement for their position and roles within the Company, in line with the duties, authorities, obligations, and responsibilities they hold based on provisions set.

The policy on remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company basically refers to the Governor of DKI Jakarta Regulation No. 79 of year 2019 on the Guideline to Determine the Remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of Commissioners of the Regional-Owned Enterprises. The remuneration procedure is established to improve the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, in line with best practice in similar industries. Determining remuneration takes into account the business scale factor, the Company's financial condition, and other relevant factors, consistent with applicable laws and regulations. The remuneration procedure of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company begins with preparing remuneration structure, followed by formulating the policy related to remuneration, and subsequently determine the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.



Struktur Remunerasi dan Besaran Remunerasi Tahun 2024

Mengacu pada aturan yang berlaku, struktur remunerasi Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari:

1. Honorarium;
2. Tunjangan:
 - a. Tunjangan hari raya;
 - b. Tunjangan jabatan; dan/atau
 - c. Tunjangan asuransi purna jabatan.
3. Fasilitas:
 - a. Kesehatan;
 - b. Bantuan hukum; dan/atau
 - c. Keanggotaan perkumpulan profesi.
4. Tantiem/Insentif Kerja.

Sedangkan struktur remunerasi Direksi terdiri dari:

1. Gaji;
2. Tunjangan
 - a. Tunjangan hari raya;
 - b. Tunjangan jabatan;
 - c. Tunjangan asuransi purna jabatan;
 - d. Tunjangan cuti tahunan; dan/atau
 - e. Tunjangan cuti besar.
3. Fasilitas:
 - a. Kesehatan;
 - b. Bantuan hukum;
 - c. Keanggotaan perkumpulan profesi;
 - d. Kendaraan; dan/atau
 - e. *Club membership (corporate member)*.
4. Tantiem/Insentif Kerja.

Struktur tersebut mengadopsi aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 79 tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.

Pada tahun 2024 seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menerima remunerasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2023, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menerima seluruh komponen remunerasi, dengan total nilai sebesar Rp4.523.330.106,-.

Remuneration Structure And Amount Of Remuneration In 2024

Referring to applicable provisions, the remuneration structure of the Board of Commissioners of the Company consists of the following:

1. Honorarium
2. Allowances:
 - a. Holiday Allowance
 - b. Positional allowance; and/or
 - c. Post-employment insurance allowance.
3. Facilities:
 - a. Health;
 - b. Legal assistance; and/or
 - c. Membership of professional associations.
4. Tantiem/Work Incentives

While the remuneration structure of the Board of Directors is as follows:

1. Salary;
2. Allowances:
 - a. Holiday allowance
 - b. Positional allowance;
 - c. Post-employment insurance allowance
 - d. Long leave allowance
3. Facilities:
 - a. Health;
 - b. Legal assistance;
 - c. Membership of professional associations;
 - d. Vehicles; and/or
 - e. Club membership (corporate member)
4. Tantiem/Work Incentives

These structures adopt the provisions set forth in the Governor of DKI Jakarta Regulation No. 79 of year 2019 on the Guideline for Determining Remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Board of Commissioners of Regional-Owned Enterprises.

In 2024, all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company received remuneration in accordance with the applicable policy. In line with the resolutions of the Annual GMS of year 2023, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company received all of remuneration components, with a total amount of Rp4,523,330,106,-.

Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian dari struktur organisasi Perseroan dengan tanggung jawab utama yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah, dengan tujuan agar selaras dengan Prinsip Syariah.

Sebagai perusahaan penjaminan yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), Perseroan diwajibkan untuk membentuk DPS. DPS ini terdiri dari minimal satu orang ahli syariah atau lebih yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan pengangkatannya harus tertuang dalam akta notaris. Ketentuan terkait DPS tersebut, sejalan dengan mandate Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Penjaminan, dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 3/POJK.05/2017 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional, dan sebagai wakil Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Sesuai dengan regulasi yang berlaku, Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugas pengawasan, memberikan nasihat, dan memberikan saran terkait:

- Kegiatan Penjaminan Syariah;
- Akad Penjaminan Syariah yang dipasarkan oleh Unit Usaha Syariah (UUS);
- Praktik pemasaran Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah (UUS).

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS atas rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu.

The Sharia Supervisory Board (DPS) is part of the Company's organizational structure with the main responsibility to conduct supervision of the implementation of Sharia Guarantee activities and Sharia Re-Guarantee, with the aim to remain in line with Sharia Principles.

As a guarantee company with the Sharia Business Unit (UUS), the Company is required to form DPS. This DPS consists of at least 1 sharia expert or more, appointed through the General Meeting of Shareholders (GMS), with the recommendation of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, and the appointment must be contained in a notarial deed. The provisions related to this DPS, in line with the mandate of Law No. 1 of year 2016 on Guarantee, and stipulated further by the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.05/2017 on Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.

Duties and Responsibilities of The Sharia Supervisory Board

The Sharia Supervisory Board has the duties and authority to provide advices and recommendations to the Board of Directors, supervise the sharia aspect of operational activities, and as representative of the Company to the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.

In accordance with applicable regulations, the Sharia Supervisory Board conducts its supervisory duties, provide advices and recommendations related to the following:

- Activities of Sharia Guarantee;
- Sharia Guarantee Contract marketed by the Sharia Business Unit (UUS);
- Marketing practice of Sharia Guarantee conducted by the Sharia Business Unit (UUS).

Composition and Term of Office of The Sharia Supervisory Board

The Sharia Supervisory Board is appointed by the shareholders through the GMS upon recommendation from the National Sharia Council, Indonesia Ulema Council. The term of office of members of the Sharia Supervisory Board is determined for 4 years and may be re-appointed for one term period, without reducing the rights of the GMS to dismiss members of the Sharia Supervisory Board at any time.

Komposisi Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Sharia Supervisory Board as of 31 December 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Masykuri Abdullah	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" Nomor 61 tanggal 22 Maret 2024 Deed of Decision Statement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Regional Company) or abbreviated as "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" No. 61 dated 22 March 2024.	2024-2028
Euis Amalia	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" Nomor 61 tanggal 22 Maret 2024 Deed of Decision Statement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Regional Company) or abbreviated as "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" No. 61 dated 22 March 2024.	2024-2028

Profil Dewan Pengawas Syariah

Informasi terkait komposisi dan profil Dewan Pengawas Syariah, yang antara lain membahas tentang nama, identitas diri, gelar pendidikan, riwayat karier, dasar hukum pengangkatan, dan masa jabatan telah diuraikan dengan rinci pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Perubahan Komposisi Manajemen, dan Subbab Profil Dewan Pengawas Syariah.

Profil Of The Sharia Supervisory Board

Information related to the composition and profile of the Sharia Supervisory Board, which among others discusses the name, personal identity, educational title, career history, legal basis of appointment, and term of office are described in detail in the Chapter on Company Profile, Sub-Chapter on Changes in Management Composition, and Sub-Chapter on Profile of the Sharia Supervisory Board.

Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana termaktib dalam Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin, anggota DPS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
- Mampu bertindak untuk kepentingan Perseroan dan/ atau Pemangku Kepentingan lainnya;
- Mendahulukan kepentingan Perseroan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi;
- Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perseroan dan/ atau Pemangku Kepentingan lainnya;
- Mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perseroan.

Dengan memenuhi kriteria ini, anggota DPS diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan integritas, kejujuran, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga Penjamin yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, Dewan Pengawas Syariah juga wajib memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Proses *fit and proper test* dilakukan untuk mengevaluasi kualifikasi, integritas, dan kemampuan individu sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan standar yang diatur dalam peraturan tersebut.

Criteria Of Members Of The Sharia Supervisory Board

As stipulated in Article 36 of the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.05/2017 regarding Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, members of DPS must fulfill the following criteria:

- Able to act in good faith, honest and professional;
- Able to act in the interests of the Company and/or other Stakeholders;
- Prioritize the interests of the Company and/or other Stakeholders over personal interests;
- Able to make decisions based on independent and objective assessments for the interests of the Company and/or other Stakeholders;
- Able to avoid misuse of authority to obtain inappropriate personal benefits or cause losses to the Company.

By fulfilling these criteria, DPS members are expected to be able to carry out their duties with integrity, honesty, and full responsibility in accordance with the principles of Good Corporate Governance for Guarantee Institutions as stipulated by the Financial Services Authority. In line with this, the Sharia Supervisory Board is also required to fulfill the requirements on the fit and proper test implemented by the Financial Services Authority. The fit and proper test process is conducted to evaluate the qualification, integrity, and capability of the individual as member of the Sharia Supervisory Board in accordance with the standards stipulated in the concerned regulation. This is intended to ensure that

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota DPS memiliki kapabilitas yang memadai dalam melaksanakan tugasnya dengan independen dan objektif, sesuai dengan prinsip-prinsip peraturan yang berlaku.

Mekanisme Pengawasan Dan Pemberian Nasihat

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, sehubungan dengan upaya memastikan kegiatan usaha telah sesuai dengan Prinsip Syariah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh DPS dalam melaksanakan tugas tersebut mencakup:

1. Memastikan Kesesuaian Kegiatan Operasional DPS memastikan dan mengawasi setiap aspek kegiatan operasional UUS Perseroan, menilai kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh proses operasional sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.
2. Menilai Aspek Syariah Pada Pedoman Operasional dan Produk DPS melakukan penilaian terhadap aspek Syariah yang terkait dengan pedoman operasional dan produk yang dimiliki oleh Perseroan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh pedoman dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
3. Mengkaji Produk dan Jasa Baru DPS terlibat dalam pengkajian terhadap produk dan jasa baru yang belum memiliki fatwa. Jika diperlukan, DPS dapat mengajukan permintaan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap produk dan jasa baru yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Pelaksanaan tugas DPS tersebut selaras dengan Pasal 15, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan. Melalui serangkaian langkah ini, DPS berperan aktif dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan Unit Usaha Syariah Perseroan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, sehingga memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada pemangku kepentingan.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat DPS secara berkala paling sedikit empat kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik. Anggota DPS yang hadir maupun yang tidak hadir dalam Rapat DPS berhak menerima salinan Risalah Rapat DPS.

Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat DPS wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat DPS disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.

Selama tahun 2024, telah diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali Rapat DPS, dengan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut masing-masing mencapai 100%.

members of DPS have adequate capabilities to carry out their duties independently and objectively, in line with applicable regulatory principles.

Supervision And Advisory Mechanism

The Sharia Supervisory Board (DPS) retains the responsibility to conduct supervision and provide advices to the Board of Directors, in connection with efforts to ensure business activities are in conformity with the Sharia Principles. Steps conducted by DPS in carrying out such duties include the following:

1. Ensuring the Conformity of Operational Activities
DPS ensures and supervises every aspect of the Company's UUS operational activities, evaluate the conformity with the principles applied by the National Sharia Council of Indonesian Ulama Council. This is required to make sure that all operational processes conform with applicable sharia provisions.
2. Assessing the Sharia Aspects in Operational and Product Guidelines
DPS assesses Sharia aspects related to operational and product guidelines retained by the Company. The purpose of this step is to ensure that all guidelines and products offered are in accordance with sharia principles.
3. Reviewing New Products and Services
DPS is involved in reviewing new products and services that do not have fatwa yet. If necessary, DPS can submit a request for a fatwa to the National Sharia Council of the Indonesia Ulama Council. This step is taken to ensure that every new product and service offered is in accordance with sharia principles.

Performance of these DPS duties are aligned with Article 15 of the Financial Services Authority No. 5/POJK.05/2014 on Business Licensing and Establishment of Guarantee Institutions. Through series of these steps, DPS takes active role in ensuring that all activities of the Company's Sharia Business Unit are in accordance with Sharia principles thereby providing confidence and trust to the stakeholders.

Meetings Of The Sharia Supervisory Board

The Sharia Supervisory Board is required to hold DPS meetings periodically at least four times within a year, as stipulated in applicable provisions. Results of the DPS meetings are required to be properly documented in DPS minutes of meetings. Members of DPS, attended or not, have the right to obtain copies of DPS Minutes of Meetings.

Dissenting opinions that occur in the decisions of the DPS meetings are also required to be clearly noted in the DPS Minutes of Meetings along with the reasons behind the dissenting opinions.

During the year 2024, 12 (twelve) DPS meetings were held with level of attendance of the members each at 100%.



Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite ini bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai tata pelaksanaan proses bisnis Perusahaan secara keseluruhan khususnya yang terkait dengan sistem serta pelaksanaan pengendalian internal dan auditor eksternal.

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan Sistem Pengendalian Manajemen serta pelaksanaannya;
4. Melakukan monitoring proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktik pada semua tingkatan di Perseroan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian Perseroan dengan baik;
5. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan;
6. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
7. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham;
8. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite Audit harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Komposisi Dan Masa Jabatan Komite Audit

Komite Audit Perseroan terdiri dari satu orang ketua komite, merangkap anggota komite, yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, serta satu anggota komite, yang juga menjabat sebagai Komisaris dan satu anggota komite lainnya yang berasal dari pihak independen di luar Perseroan.

Ketua dan anggota Komite Audit diangkat untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan regulasi, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Ketua dan anggota Komite Audit yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Perseroan, masa

The Audit Ccommittee is a committee formed by and reports to he Board of Commissioners. This committee is tasked with providing advices and recommendations to he Board of Commissioners on the overall implementation of the Company's business processes, especially those related to the system and implementation of internal control and external auditors.

Duties And Responsibilities Of The Audit Committee

The duties and responsibilities of the Audit Committee of the Company, are as follows:

1. Assist the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control and implementation of duties of the internal and external auditors by monitoring and evaluating the planning and implementation of the audits in the context of assessing the adequacy of internal control including the financial reporting process;
2. Evaluate the implementation of the activities and audit results carried out by the Internal Monitoring Unit as well as the External Auditor;
3. Provide recommendations on the refinement of the Management Control System and its implementation;
4. Continuous monitoring of the improvement process of the policies, procedures and practices at all levels of the Company in order to ensure the proper management and control of the Comopany;
5. Ensure the availability of satisfactory evaluation procedures on all information disclosed by the Company;
6. Provide professional independent opinions to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board o Directors to the Board of Commissioners;
7. Provide recommendations on the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to the Board of Commissioners to be delivered to the Shareholders;
8. Identify matters that required the attention of the Board of Commissioners as well as other duties of the Board of Commissioners.

The implementation of duties assigned to the Audit Committee by the Board of Commissioners must be accounted for and reported to the Board of Commissioners.

Composition And Term Of Office Of The Audit Committee

The Company's Audit Committee consists of one committee Chairman, concurrently as member of the committee who also take the position as the Company's Independent Commissioner, as well as one committee member who concurrently take the position as Commissioners and one member of other committees from independent parties outside of the Company.

The Chairman and members of the Audit Committee are appointed for a term of office in accordance with regulatory provisions, and can be re-appointed only for one following term period. The Chairman and members of the Audit Committee concurrently

jabatannya tidak boleh lebih lama dari masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Komposisi Komite Audit per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

in positions as Independent Commissioners, the term of office cannot be longer than the term of office as member of the Board of Commissioners, as stipulated in the Articles of Association.

The composition of the Audit Committee as of 31 December 2024 is as follows:

Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions in the Company
Andrianto Wahyu Adi	Ketua Chairman	Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner
Henry Hendaryadi	Anggota Member	Tidak ada (Pihak Independen) None (Independent Party)

Profil Komite Audit

Profil Ketua dan Anggota Komite Audit yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, telah diuraikan dengan rinci pada Bab Profil Perusahaan, Subbab Profil Dewan Komisaris.

Profile Of The Audit Committee

Profile of the Chairman and Members of the Audit Committee who also take the position as members of the Company's Board of Commissioners, is described in detail in the Chapter on Company Profile, Sub-chapter on Profile of the Board of Commissioners.

Henry Hendaryadi Anggota Member	
Warga Negara Nationality	Indonesia Indonesian
Usia Age	57 tahun 57 years
Gelar Pendidikan Educational Title	- Magister SDM dari STIE Yapan Surabaya (2013) - Sarjana Hukum dari Universitas Negeri Jember (1990) - Master's degree (Magister) in Human Resources from STIE Yapan Surabaya (2013) - Bachelor's degree (Sarjana) in Law from Universitas Negeri Jember (1990)
Sertifikasi Kompetensi Certification of Competency	LSP BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko) LSP BSMR (Risk Management Certification Body)
Riwayat Karier Career History	- Pimpinan Rekan/<i>Managing Partner</i> KAP Djoko, Sidik & Indra, member of ANTEA di Alliance of Independent Firms (2015 – sekarang). - Pimpinan Rekan/<i>Managing Partner</i> di KAP Djoko, Sidik & Indra. (2010 – 2014). - Partner di beberapa Kantor Akuntan Publik (1997 – 2010). - Konsultan di PT Muij Asta Consult (1992 – 1996), a.l. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Corporate Action. - Ajun Akuntan/Akuntan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI (1985 – 1992). - Asesor di LSP BSMR (2024 – sekarang) - Senior Executive Vice President di PT Askrindo Syariah (2022 – 2024) - Kepala Divisi Klaim di PT Asuransi Kredit Indonesia (2019 – 2022) - Kepala Divisi Hukum dan Subrogasi di PT Asuransi Kredit Indonesia (2016 – 2019) - Komisaris di PT Askrindo Mitra Utama (2016 – 2019) <i>Division Head</i> Hukum & Pemulihan Aset di Asuransi Kredit Indonesia (2012 – 2016) <i>Senior Legal Officer</i> di PT Bank Mandiri (1998 – 2012) <i>Credit Operation</i> di PT BAPINDO (1990 – 1998) - Assessor at LSP BSMR (2024 – present) - Senior Executive Vice President at PT Askrindo Syariah (2022 – 2024) - Head of Claim Division at PT Asuransi Kredit Indonesia (2019 – 2022) - Head of Legal and Subrogation at PT Asuransi Kredit Indonesia (2016 – 2019) - Commissioner at PT Askrindo Mitra Utama (2016 – 2019) - Head of Legal & Asset Recovery Division at Indonesia Credit Insurance (2012 – 2016) - Senior Legal Officer at PT Bank Mandiri (1998 – 2012) - Credit Operation at PT BAPINDO (1990 – 1998)



Independensi Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah para professional yang senantiasa bekerja dengan penuh integritas dan profesional serta terbebas dari segala bentuk tindakan atau pengaruh yang dapat memengaruhi objektivitasnya dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh manajemen dan Direksi.

Pedoman Kerja (Piagam) Kerja Komite Audit

Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Kerja (Piagam) Komite.

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah seluruh anggota Komite Audit. Pengambilan keputusan rapat Komite Audit diambil diselenggarakan dengan prinsip musyawarah mufakat. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai melalui musyawarah, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam tahap pengambilan keputusan, jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), maka perbedaan pendapat tersebut harus dicatat dalam risalah rapat, termasuk alasan dari masing-masing pendapat yang berbeda.

Seluruh hasil rapat Komite Audit wajib dicatat dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara lengkap. Risalah rapat tersebut harus secara resmi disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris. Selama tahun 2024, telah diselenggarakan Rapat Komite Audit, dengan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut masing-masing mencapai 100%.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2024

Pelaksanaan tugas Komite Audit tahun 2024 telah dilakukan sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam Pedoman Kerja (Piagam) Komite. Secara aktif, Komite Audit memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit, kecukupan pengendalian internal, serta kelengkapan proses laporan keuangan. Selain itu, Komite Audit turut mengawasi tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal. Sebagai hasil dari pengawasan tersebut, Komite Audit juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait berbagai aspek yang telah dievaluasi.

Audit Independency

All members of the Audit Committee are professionals who always work with full integrity and professionalism as well as free from all forms of actions or influence that may influence the objectivity in carrying out the monitoring function of the management of the Company conducted by the management and the Board of Directors.

Work Guideline (Charter) Of The Audit Committee

The Audit Committee carries out its duties and responsibilities by referring to the rules set out in the Committee's Work Guidelines (Charter)

Meetings Of The Audit Committee

The Audit Committee hold its meetings periodically at least once within three months. The Audit Committee meetings can only be held if attended by more than half of the total members of the Audit Committee. Decision-making in Audit Committee meetings are performed with the principle of deliberation to consensus. If consensus is not reached through deliberation, decisions are then taken based on majority votes. In this stage of decision-making, if dissenting opinions occur, then dissenting opinions must be recorded in the minutes of the meetings, including the reasons behind the dissenting opinions.

All results of the Audit Committee meetings are required to be recorded in the minutes of the meetings and documented in full. The minutes of these meetings must be officially submitted in writing to the Board of Commissioners. During the year 2024, the Audit Committee Meetings were held with the 100% level of attendance of the members.

Implementation Of Duties Of The Audit Committee In 2024

Implementation of duties of the Audit Committee in the year 2024 was carried out in accordance with the responsibilities set forth in the Work Guidelines (Charter) of the Committee. The Audit Committee was active in monitoring and evaluating the audit planning and implementation, the adequacy of internal control, as well as the completion of the financial report process. In addition, the Audit Committee also supervised the further actions of the internal and external audit results. From the results of this supervision, the Audit Committee also provided a number of recommendations to the Board of Commissioners related to various aspects that have been assessed.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan organ pendukung Perseroan yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan merupakan satuan fungsi struktural yang memiliki tugas utama dalam melaksanakan strategi komunikasi Perusahaan dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar-organ Perseroan, serta menjalin hubungan yang baik antara Perseroan dengan pihak eksternal seperti pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

Fungsi Sekretaris Perusahaan di Perseroan dilaksanakan oleh satuan fungsi struktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan. Melalui mekanisme internal Perseroan, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. Perseroan telah menetapkan kriteria sebagai berikut bagi Sekretaris Perusahaan:

1. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan;
2. Sekretaris Perusahaan diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
3. Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi akademis dan profesional yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik;
4. Sekretaris Perusahaan setidaknya memiliki pengetahuan di bidang komunikasi, hukum, keuangan, dan/atau tata kelola perusahaan;
5. Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku;
6. Sekretaris Perusahaan wajib memberi informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris bila diminta oleh Dewan Komisaris.

Divisi Sekretaris Perusahaan Jamkrida Jakarta, terbagi menjadi tiga unit utama, yaitu:

- 1. Sekretaris Direksi**
Mempersiapkan dan membantu kebutuhan serta agenda/kegiatan Direksi setiap hari.
- 2. Sekretaris Perusahaan**
Membidangi hubungan kelembagaan dan eksternal, komunikasi internal, *corporate events*, CSR, GCG, dan sosial media.
- 3. Administrasi Umum**
Membidangi kearsipan, administrasi persuratan, dokumen, dan berkas Perseroan lainnya.

The Corporate Secretary is the Company's supporting organ led by Head of the Corporate Secretary Division and is a structural function unit tasked with the main duty on the implementation of the Company's communication strategy and the implementation of Good Corporate Governance.

The Corporate Secretary has the important role in facilitating communication among Company organs, as well as maintaining good relationship between the Company and external parties such as the shareholders, regulator and other stakeholders.

The function of the Corporate Secretary in the Company is carried out by the structural function unit led by the Head of the Corporate Secretary of the Company. Through the Company's internal mechanism, Head of the Corporate Secretary Division is appointed and dismissed by the President Director. The Company has established the following criteria for the Corporate Secretary:

1. The Head of the Corporate Secretary Division is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanisms;
2. The Corporate Secretary is appointed and directly responsible to the President Director;
3. The Corporate Secretary must have adequate academic and professional qualifications in order to properly carry out the duties and responsibilities;
4. The Corporate Secretary must at least have knowledge in the fields of communication, law, finance, and/or corporate governance;
5. The Corporate Secretary must ensure that the Company complies with applicable regulations on disclosure requirements;
6. The Corporate Secretary is required to provide information concerning its duties to the Board of Directors periodically and to the Board of Commissioners if requested by the Board of Commissioners.

The Corporate Secretary Division of Jamkrida Jakarta is divided into three main units, namely as follows:

- 1. Secretary to the Board of Directors**
Prepares and assists the needs as well as the daily agenda/activities of the Board of Directors.
- 2. Corporate Secretary**
In charge of institutional and external relations, internal communication, corporate events, CSR, GCG and social media.
- 3. General Administration**
In charge of archiving, correspondence administration, documents, and other Company files.



Profil Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Regina Kristiningsih, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 001/Kepdir/II/2022 tentang Mutasi Pejabat PT Jamkrida Jakarta.

Profil lengkap beliau telah diuraikan dengan rinci pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Profil Kepala Divisi.

Kewajiban Tugas Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki kewajiban untuk membantu Direksi dalam berbagai hal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Menyiapkan kebijakan dan pelaksanaan program kerja bidang hubungan masyarakat;
2. Menyelenggarakan hubungan antar lembaga;
3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan rapat lainnya yang menjadi forum bagi Manajemen Perseroan dengan pemegang saham dan instansi terkait lainnya;
4. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan keprotokolan Direksi, termasuk kegiatan/acara Perseroan;
5. Mempersiapkan dokumen Perikatan dan Kerja Sama Perseroan;
6. Melaksanakan penyusunan peraturan dan dokumentasi hukum;
7. Melakukan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum (litigasi atau non-litigasi);
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi termasuk tugas dan tanggung jawab yang telah diatur secara rinci dalam tata laksana kerja Sekretaris Perusahaan.

Tugas-tugas lain yang diemban oleh Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Penegakan terhadap kepatuhan;
2. Implementasi GCG di Perseroan;
3. Tanggung jawab sosial Perseroan terhadap *stakeholder*;
4. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau pihak regulator terkait lainnya;
5. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

Profile Of The Head Of The Corporate Secretary Division

The Corporate Secretary Division Head is currently held by Regina Kristiningsih, appointed based on the Board of Directors Decree No. 001/Kepdir/II/2022 on Official Mutation in PT Jamkrida Jakarta.

The complete profile is presented in detail in the Chapter on Company Profile, Sub-chapter on Profile of Division Heads in this Annual Report.

Responsibilities And Duties Of The Corporate Secretary

The Corporate Secretary retains the obligation to assist the Board of Directors in several matters, including but not limited to the following:

1. Prepare policies and implement work programs in public relations;
2. Organize inter-institutional relations;
3. Organize General Meetings of Shareholders and other meetings that serve as forums for the Company's Management with shareholders and other related agencies;
4. Carry out secretarial and protocol duties of the Board of Directors, including Company activities/events;
5. Prepare Company Agreement and Cooperation documents;
6. Carry out the preparation of regulations and legal documentation;
7. Conduct advocacy and resolution of legal problems (litigation or non-litigation);
8. Carry out other duties assigned by the Board of Directors including duties and responsibilities that have been regulated in detail in the Corporate Secretary's work procedures.

Other duties carried out by the Corporate Secretary include the following:

1. Enforcement of compliance;
2. GCG implementation in the Company;
3. Corporate Social Responsibility to stakeholders;
4. Submission of reports to the Financial Services Authority (OJK) and/or other related regulators.
5. Organize and documentation of meetings of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan secara aktif terlibat dalam program pengembangan kompetensi melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, seminar, dan *training*, antara lain sebagai berikut:

Competency Development Program Of Corporate Secretary In 2024

Throughout the year 2024, the Corporate Secretary was actively involved in the competency development programs through activities, such as training, seminars and training, among others including the following:

Nama Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Tanggal Penyelenggara Date of Program	Penyelenggara Organizer
Mila Arlinawati	Plt. Kepala Bagian Kerjasama Usaha dan Kehumasan Section Head (ad interim) of Business Cooperation and Public Relations	Webinar Seri XLVI Peran BUMD Aneka Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Mewujudkan Pengelolaan BUMD Dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Sekaligus Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah Webinar Series XLVI The Role of Various BUMD Enterprises in Improving the Regional Economy and Realizing BUMD Management with Good Corporate Governance Principles as well as Coordination Meetings of Regional-Owned Enterprises	28 Februari 2024 28 February 2024	Ditjen Bina Keuangan Daerah Directorate General of Regional Financial Development
		Pelatihan Analisa Kredit, Proses dan Kelayakan Pemberian Kredit Perbankan Credit Analysis Training, Banking Credit Granting Process and Feasibility	2 November 2024	PT Bintang Sinergy Mulia
		Webinar Building a Smart Waste Management System in Jakarta	7 November 2024	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Human Resources Development Agency of DKI Jakarta

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2024

Selama tahun 2024, Sekretaris Perusahaan berhasil menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan aktif mengadakan sejumlah kegiatan yang berfokus pada keterbukaan informasi serta membangun hubungan dengan pemegang saham, investor, regulator, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan pada tahun 2024 antara lain:

1. *Town Hall Meeting* 2024;
2. Kunjungan kerja dari Instansi atau Lembaga dan Perusahaan Penjaminan di daerah-daerah;
3. Menyelenggarakan RUPS Tahunan;
4. Menyelenggarakan RUPS LB;
5. *Employee gathering*;
6. Melakukan kegiatan CSR: Menyediakan Paket 1000 untuk buka puasa di Masjid Istiqlal;
7. Melakukan kegiatan CSR: Memberikan Snack Takjil di Masjid Al-Badr;

Implementation Of Duties Of The Corporate Secretary In 2024

During the year 2024, the Corporate Secretary managed to carry out its duties in line with its responsibilities. In the implementation of the function and duties, the Corporate Secretary actively held a number of activities that focused on disclosure of information as well as build relationship with shareholders, investors, regulator, and other related parties.

Several activities held by the Corporate Secretary in 2024, among others, include the following:

1. *Town Hall Meeting* 2024;
2. Working Visit from regional agencies or institutions and guarantee companies;
3. Organized the Annual GMS;
4. Organized the Extraordinary GMS;
5. *Employee gathering*;
6. CSR activity: Provision of 1000 Packages for breaking fast at Istiqlal Mosque;
7. CSR activity: Provision of Takjil Snacks for breaking fast at Al-Badr;



8. Melakukan kegiatan CSR: Santunan ke Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa;
9. Melakukan kegiatan CSR: Santunan ke Pondok Yatim dan Dhuafa di Kecamatan Jatibaru;
10. Melakukan kegiatan CSR: Bantuan sosial bencana kebakaran didekat Stasiun Manggarai;
11. Melakukan kegiatan CSR: Peresmian Masjid Jami Ar Raudhah;
12. Melakukan kegiatan CSR: Bantuan paket sembako dalam acara Jum'at Berkah untuk memperingati HUT DW;
13. Melakukan kegiatan CSR: Santunan Anak Yatim
14. Melakukan kegiatan CSR: Pemberian bantuan modal usaha untuk disabilitas;
15. Kearsipan.

8. CSR activity: Donation to tunas Bangsa Toddler Social Home;
9. CSR activity: Donation Orphanage and Dhuafa in Jatibaru District;
10. CSR activity: Social assistance for the fire disaster near Manggarai Station;
11. CSR activity: Inauguration of Jami Ar Raudhah Mosque;
12. CSR activity: Basic food package assistance at the Blessed Friday event to commemorate the anniversary of DW;
13. CSR activity: Donation to Orphanage;
14. CSR activity: Proisiono f business capital assistance for the disabled;
15. Archiving

Satuan Pengawas Internal (SPI)

Internal Supervisory Unit (SPI)

Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah unit kerja di Perseroan yang bekerja secara independen dan dibentuk oleh Direksi untuk menjalankan fungsi internal audit atau pengawasan internal di lingkungan Perseroan. Seluruh anggota SPI berperan dalam proses audit internal terutama dalam memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif kepada unit-unit kerja lainnya. Kegiatan audit internal bertujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola Perusahaan.

Komposisi Divisi SPI

Divisi SPI Perseroan terdiri dari satu orang auditor internal, yang memegang jabatan sebagai Kepala Divisi, dan satu orang staf Divisi SPI. Kepala Divisi dan staf Divisi SPI memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi. Keduanya juga memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.

Komposisi Divisi SPI per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Posisi di Komite Position in the Division	Jabatan Lain di Perseroan Concurrent Position in the Company
Wirendra Satwika Bimantara	Plt. Kepala SPI Division (ad interim)	Tidak merangkap jabatan No concurrent position
M Aqsa Gunapraja	Staf SPI Staff of SPI	Tidak merangkap jabatan No concurrent position

Profil Divisi SPI

Divisi SPI saat ini dipimpin oleh Wirendra Satwika Bimantara, yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Divisi, berdasarkan Keputusan Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta 033/Kepdir-SDM/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024.

Selain menjabat sebagai Plt. Kepala Divisi SPI: Profil lengkap beliau telah diuraikan dengan rinci pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Profil Kepala Divisi.

Informasi berikut ini menjelaskan tentang profil staf Divisi SPI.

M Aqsa Gunapraja Staf SPI SPI Staff	
Warga Negara Nationality	Indonesia Indonesian
Usia Age	34 tahun 34 years
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Perjanjian Ikatan Kerja Nomor 027/PIK/JAMKRIDA/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 Employment Contract No. 027/PIK/JAMKRIDA/VIII/202 dated 1 August 2024

The Internal Supervisory Unit (SPI) is a work unit in the Company, works independently and formed by the board of Directors to carry out the internal audit or internal supervisory function within the Company. All members of SPI play their role in the internal audit process, especially in providing independent and objective assurance and consultation to other work units. The internal audit activities are aimed at improving value and operations of the Company through systematic approach by means of evaluation and increasing the effectiveness of risk management, internal control, and governance processes in the Company.

Composition Of SPI Division

The Company's SPI Division consists of one internal auditor as Division Head, and one staff of SPI Division. The Head and staff of SPI Division both have high integrity and professionalism and the knowledge and experience in technical audit and well understanding of the laws and regulations.

The composition of SPI Division as of 31 December is as follows:

Profile Of SPI Division

The SPI Division is currently led by Wirendra Satwika Bimantara, appointed as the Tasks Executor (ad interim) Head of Division, based on the Board of Directors Decision of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta No. 033/Kepdir-SDM/VIII/2024 dated 1 August 2024.

The complete profile of SPI Division Head (ad interim) is presented in detail in the Chapter on Company Profile, Sub-Chapter on Profile of Division Heads.

The following information explains the profile of the SPI Division staff.

Gelar Pendidikan Educational Title	• Sarjana Komputer dari Universitas Mercu Buana Jakarta (2018) • Diploma 3 dari Politeknik LP3I Jakarta (2012) • Bachelor's degree (Sarjana) in Computer Science from Universitas Mercy Buana Jakarta (2018)
Riwayat Karier Areer History	• Staf Perijinan dan Pengawasan di OJK (2022-2023) • Staf Audit dan Pengawasan di PT Bursa Berjangka Jakarta (2016-2022) • Staf <i>Dealing</i> dan <i>Monitoring</i> di PT MRG Mega Berjangka (2013-2016) • Staff for Licensing and Supervision at OJK (2022-2023) • Staff for Audit and Supervision at PT Bursa Berjangka Jakarta (2016-2022) • Staff for Dealing and Monitoring at PT MRG Mega Berjangka (2013-2016)

Kualifikasi Atau Sertifikasi Profesi Audit Internal

Kualifikasi atau sertifikasi profesi sangat penting dalam bidang Audit Internal guna mendukung kompetensi dan keahlian. Dengan sertifikasi ini, auditor internal diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dan meningkatkan keyakinan pemangku kepentingan terhadap kualitas pengawasan internal dalam Perseroan. Informasi lebih rinci tentang sertifikasi yang dimiliki SDM di Perseroan, telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Sumber Daya Manusia.

Qualification or Certification of Internal Audit Profession

The qualification or certification of profession are very important in the Internal Audit field in order to support the competency and expertise. With this certification, the internal auditor is hoped to be able to contribute more significantly and improve the confidence of stakeholders on the quality of internal audit in the Company. More detailed information on the certification retained by the human resources in the Company is described in the Chapter on Company Profile, Sub-Chapter on Human Resources in this Annual Report.

Kedudukan SPI Dalam Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi Perseroan kedudukan Divisi SPI, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. SPI bertugas membantu Direktur Utama dan berkoordinasi dengan Komite Audit dalam menjalankan fungsi *assurance* dan *advisory* bagi Perseroan;
2. SPI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawas Internal;
3. SPI berkedudukan dan bertanggung jawab langsung di bawah Direktur Utama;
4. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris;
5. Kepala SPI bekerja secara independent dan objektif, serta ditempatkan sedemikian rupa sehingga mampu melakukan tugas pengawasan internal sesuai amanat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Position of SPI Within The Organizational Structure

In the organizational structure of the Company, the position of the SPI Division is explained below:

1. SPI is tasked with assisting the President Director and coordinating with the Audit Committee in carrying out assurance and advisory functions for the Company;
2. SPI is led by a Head of the Internal Audit Unit;
3. SPI is positioned and responsible directly under the President Director;
4. Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners;
5. Head of SPI works independently and objectively, and is placed in such a way that he is able to carry out internal supervision duties in accordance with the mandate in applicable laws and regulations.

Pihak Yang Mengangkat/Memberhentikan Kepala SPI

Kepala Divisi SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Party That Appoints/Dismissed The Head Of SPI

The Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Tugas Dan Tanggung Jawab Divisi SPI

Divisi SPI mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan Perseroan;

Duties and Responsibilities Of SPI Division

The SPI Division assumes the duties and responsibilities as follows:

1. Prepare and implement the Annual Supervisory Work Program (PKPT);
2. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with the Company's policies;

- Melakukan pemeriksaan (audit) dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya, baik yang tertuang dalam rencana tahunan, maupun yang menjadi perhatian Direksi dan Komite Audit;
- Memberi saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan berdasarkan penugasan khusus dari Direktur Utama atau sebagai pengembangan pemeriksaan sebelumnya;
- Dalam melaksanakan audit internal yang efektif, Divisi SPI dan Kepatuhan wajib memastikan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian internal serta kualitas kinerja Perseroan demi menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Perseroan.

- Conduct audits and assessments of efficiency and effectiveness in the fields of finance, marketing, information technology and other activities, both stated in the annual plan and those of concern to the Board of Directors and Audit Committee;
- Provide suggestions for improvement and objective information on activities audited at all levels of the management.
- Prepare an Audit Result Report and submit to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee;
- Monitor, analyze, and report on the implementation of follow-up improvements as suggested;
- Collaborate with the Audit Committee to prepare a program to evaluate the quality of internal audit activities conducted;
- Conduct special examinations if necessary based on special assignments from the President Director or as a development of previous examinations;
- In carrying out effective internal audits, the SPI Division must ensure examination and assessment of the adequacy and effectiveness of the internal control structure and the quality of the Company's performance in order to maintain and secure the Company's business activities.

Program Pengembangan Kompetensi Divisi SPI Tahun 2024

Perseroan memfasilitasi Divisi SPI untuk mengikuti program pengembangan kompetensi, guna mendukung pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

Selama tahun 2024, Divisi SPI telah mengikuti sejumlah kegiatan pengembangan kompetensi, seperti pelatihan, seminar, *workshop*, maupun *short course*, sebagai berikut:

Competency Development Program Of SPI Division In 2024

The Company facilitates the SPI Division with the opportunity to take on competency development programs, in order to support the implementation of its function and duties.

In 2024, the SPI Division has joined a number of competency development activities, such as training, seminars, workshops or short courses, as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Tanggal Penyelenggara Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
Wirendra Satwika B	Plt. Kepala SPI SPI Head (ad interim)	Pelatihan Analisa Kredit, Proses dan Kelayakan Pemberian Kredit Perbankan Credit Analysis Training, Banking Credit Granting Process and Feasibility	2 November 2024 2 November 2024	PT Bintang Sinergy Mulia
		Strengthening Financial Integrity: Advanced Strategies and Innovations in anti fraud	21 November 2024 2 November 2024	OJK Institute
M Aqsa Gunapraja	Staf SPI SPI Staff	Diskusi Panel GRC <i>Series 2024 Defending Organization Objective: Strategies Against Fraud</i> Panel Discussion of GRC Series 2024 on Defending Organization Objective: Strategies Against Fraud	22 Agustus 2024 22 August 2024	PT MRT Jakarta (Perseroda)
		IT Auditing for Internal Auditor: Theory and Practice	5 Oktober 2024 5 October 2024	Accounting Academy
		Pelatihan Analisa Kredit, Proses dan Kelayakan Pemberian Kredit Perbankan Credit Analysis Training, Banking Credit Granting Process and Feasibility	2 November 2024 2 November 2024	PT Bintang Sinergy Mulia
		Strengthening Financial Integrity: Advanced Strategies and Innovations in anti fraud	21 November 2024 2 November 2024	OJK Institute



Pelaksanaan Tugas Divisi SPI Tahun 2024

Divisi SPI dan Kepatuhan telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Divisi SPI telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup tanggung jawabnya, yaitu:

1. Pemeriksaan Internal (Divisi Penjaminan Bank, Divisi Penjaminan Non Bank, Divisi Unit Usaha Syariah, Sekretaris Perusahaan, Divisi Keuangan dan IT, Divisi SDM dan Umum);
2. Pendampingan audit eksternal dan *monitoring* tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (ISO 37001:2016 SMAP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KAP Heliantono & Rekan).

Implementation Of Duties Of SPI Division In 2024

The SPI Division carried out its duties in accordance with the responsibility as determined. In 2024, the SPI Division conducted various activities included within its determined responsibility, namely as follows:

1. Internal Audit (Bank Guarantee Division, Non-Bank Guarantee Division, Sharia Business Unit Division, Corporate Secretary, Finance and IT Division, HR and General Affairs Division);
2. External audit assistance and monitoring of follow-up of Direct Audit Result Report (ISO 37001:2016 SMAP, Financial Services Authority (OJK), Financial and Development supervisory Agency (BPKP), KAP Heliantono & Partner)

Auditor Eksternal

External Auditor

Selain menjalankan fungsi audit internal dalam proses bisnis sehari-hari, Perseroan juga melibatkan pihak independen untuk membantu pengawasan terhadap aspek keuangan melalui pelaksanaan Audit Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Akuntan Publik adalah pihak eksternal yang memiliki kompetensi memadai untuk memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perseroan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Dalam rangka menjaga independensi dan objektivitas hasil auditnya, maka Auditor Eksternal harus memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) sub (c) UUPT dan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Mekanisme Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Mekanisme penunjukkan KAP mempertimbangkan aspek legalitas, kompetensi, dan independensi akuntan publik, sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Dalam kerangka mekanisme ini, Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukkan Kantor Akuntan Publik. Selanjutnya, Dewan Komisaris mengusulkan kandidat Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk, kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

RUPS Tahunan 2024 telah menghasilkan keputusan terkait akuntan publik, yang menyatakan bahwa pemegang saham melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melaksanakan tugas audit atas Laporan Keuangan tahun buku 2024.

Menindaklanjuti hasil keputusan RUPS tersebut, Dewan Komisaris menunjuk KAP Heliantono & Rekan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penunjukkan KAP ini ditetapkan dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: 3175/JJ/PNG.00.01/KE/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal Tanggapan Penetapan KAP beserta rekomendasi Komite Audit.

Aside from carrying out its internal audit function in the daily business process, the Company also involves an independent party to assist with the audit on the financial aspect through the implementation of the Financial Statement Audit conducted by the Public Accounting Firm (KAP). The Public Accountant is the external party with adequate competency to provide opinion related to the conformity in presenting the Company's financial report on the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia.

In the effort maintaining independency and objectivity in audit results, the External Auditor must fulfill the provisions in Article 68 paragraph (1) sub (c) UUPT and POJK No. 13/POJK.03/2017 regarding the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm (KAP) Services in Financial Services Activities.

Appointment Mechanism Of Public Accounting Firm (KAP)

The mechanism of appointing the KAP takes into account the aspects of legality, competency, and independency of the public accountant, in accordance with regulations applicable in Indonesia. In this mechanism framework, the Audit Committee provides recommendations to the Board of Commissioners related to the appointment of the Public Accounting Firm. Subsequently, the Board of Commissioners recommends the Public Accounting Firm candidate to be appointed, to the shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).

The 2024 Annual GMS has resulted in decisions related to the public accountant, stating that the shareholders delegate the authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm (KAP) to carry out the duties on the 2024 Financial Statements.

Following up on this GMS decision, the Board of Commissioners appointed KAP Heliantono & Partner to conduct the audit of the Company's Financial Statements which ended on 31 December 2024. This KAP appointment is confirmed in the Board of Commissioners Letter No. 3175/JJ/PNG.00.01/KE/2024 dated 16 October 2024 regarding Response to Determining KAP with recommendations from the Audit Committee.

Kantor Akuntan Publik
Public Accounting Firm Address

Heliantono & Rekan
Heliantono & Rekan

Alamat
Address

Aminta Plaza, 7th Floor #704
Jl. TB Simatupang
Kav. 10 Jakarta Selatan 12310



Jasa Lain Yang Diberikan Pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, KAP Helianto & Rekan tidak memberikan jasa profesional lainnya kepada Perseroan, selain jasa audit atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Other Services Provided In 2024

In 2024, KAP Helianto & Partner did not provide other professional services to the Company, other than audit services on the Financial Statements for Fiscal Year which ended on 31 December 2024.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal sebagai suatu proses yang melekat pada setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dengan melibatkan seluruh fungsi organisasi mulai dari tingkatan tertinggi hingga terendah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Perseroan melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, antara lain sebagai berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
2. Keandalan pelaporan keuangan dan kinerja;
3. Pengamanan aset perusahaan; dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Secara umum, kerangka pengendalian internal yang dijalankan Perseroan bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan, meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan dan menjamin efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, kelayakan pengendalian operasional maupun finansial, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Perseroan mengimplementasikan sistem pengendalian internal pada seluruh aspek operasional dan keuangan. Selain juga terus berupaya untuk merealisasikan komitmen atas ketepatan waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dengan mengoptimalkan peran digitalisasi dalam pertemuan rutin seluruh pihak yang berkepentingan. Upaya ini menjadi bagian integral untuk mendukung penerapan GCG dalam setiap aspek kegiatan bisnis Perseroan secara konsisten.

Pengendalian Keuangan Dan Operasional

Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada lingkup Perseroan mencakup 2 (dua) aspek, yaitu pengendalian keuangan dan pengendalian operasional. Implementasi pengendalian di bidang akuntansi dan keuangan diwujudkan dengan merancang sistem keuangan yang terintegrasi menggunakan *software* keuangan khusus yang terakreditasi untuk meminimalisir terjadinya *human error* sehingga pencatatan pembukuan menjadi lebih akurat dan *real time*. Selain itu, Perseroan juga telah menerapkan kebijakan dan prosedur pemeriksaan data keuangan secara berjenjang yang dilakukan oleh masing-masing petugas dengan kewenangan berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak penyalahgunaan wewenang yang berujung pada *fraud* keuangan.

Dalam hal pelaporan keuangan, Perseroan juga selalu *update* dengan standar kebijakan akuntansi terbaru khususnya yang berlaku bagi sektor keuangan agar dapat dihasilkan pelaporan keuangan yang andal.

Perseroan juga memastikan terselenggaranya aktivitas operasional yang efektif dengan mengevaluasi laporan kinerja operasional dari masing-masing unit kerja. Dengan begitu, Direksi dapat mengetahui ada atau tidaknya indikasi terjadinya kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan, atau penyimpangan lainnya. Dengan begitu, Direksi dan jajaran manajemen dapat

The Company applies the internal control system as a process that is inherent in every action and activity carried out continually by involving all organizational functions starting from the highest to the lowest level of the organization to give adequate confidence on achieving the Company's objectives through the implementation effective and efficient activities, among others are as follows:

1. Effectiveness and efficiency of achieving the objectives of implemented programs and activities;
2. Reliability of financial and performance reporting;
3. Security of company assets; and
4. Compliance with applicable laws and regulations.

In general, the internal control framework implemented by the Company aims to support the achievement of the Company's objectives, increase value for stakeholders and ensure operational effectiveness and efficiency, reliability of financial reporting feasibility of operational and financial controls, and ensure compliance with applicable laws and regulations.

The Company implements internal control system on all operational and financial aspects. In addition to efforts to realize the commitment on the timeliness of completing this year's financial report audit to be better than the previous year, by optimizing the role of digitalization in routine meetings of all interested parties. This effort becomes an integral part in supporting consistent GCG implementation in each aspect of the Company's business activities.

Financial And Operational Control

The implementation of the Internal control System within the Company encompasses 2 (two) aspects, namely financial control and operational control. Implementation of control in accounting and finance is exhibited in designing financial system that is integrated with special financial software to minimize the occurrence of human error that bookkeeping recording is more accurate and in real time. In addition, the Company has also applied the policies and procedures on financial data check in stages carried out by each officer with different authority. This is intended to prevent the occurrence of misused authority that ends up with financial fraud.

In the context of financial reporting, the Company is also updated with the latest accounting policy standards applicable in the financial sector so as to result in reliable financial reporting.

The Company also ensures the implementation of effective operational activities by evaluating operational performance reports from each work unit. By that, the Board of Directors can be informed of the presence, or not, of any indication of control discrepancies, financial reporting errors, or other irregularities. Thus, the Board of Directors and its management team can



segera mengambil langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan agar proses pencapaian target dan tujuan Perseroan tidak terganggu.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka menjaga kualitas kepatuhan, Perseroan memastikan seluruh karyawan senantiasa menunjung tinggi praktik terbaik GCG dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar senantiasa berjalan efisien serta selaras terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu untuk menghindari adanya celah yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada, Perseroan berperan aktif sebagai anggota di beberapa asosiasi industri yang relevan dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan menghadiri sejumlah undangan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pihak regulator.

Dengan diterapkannya sistem pengendalian internal yang menyeluruh pada seluruh lini bisnis dan tingkatan organisasi, maka seluruh aset Perseroan terjaga dengan baik dari berbagai usaha penyalahgunaan dan laporan keuangan yang dipublikasikan kepada publik pun tersaji secara akurat, cepat, dan dapat diandalkan.

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Tahun 2024

Pelaksanaan evaluasi oleh unit terpisah atau independen selain dilakukan oleh unit kerja internal Perseroan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direksi juga dapat dilakukan KAP. Selama tahun 2024, evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan dinilai sudah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas pemantauan dan pencegahan risiko yang muncul sebagai akibat dari aktivitas bisnis Perseroan oleh unit-unit kerja terkait, manajemen risiko, dan Satuan Pengawasan Internal. Selain itu, Satuan Pengawasan Internal juga tidak menemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan yang mengarah pada tindakan kecurangan baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun operasional Perseroan.

Pernyataan Dewan Komisaris Dan Direksi Atas Kecukupan Pengendalian Internal Tahun 2024

Dewan Komisaris dan Direksi berpendapat bahwa secara keseluruhan Perseroan sudah memiliki lingkungan pengendalian yang kokoh sebagai landasan untuk menjalankan sistem pengendalian internal yang efektif. Seluruh elemen Perseroan telah menunjukkan komitmen dan kesadaran tinggi untuk selalu menerapkan sistem pengendalian internal yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

immediately take steps to mitigate risks required so that the process of achieving the Company's targets and objectives is not disrupted.

Compliance With Laws And Regulations

In the effort to maintain compliance quality, the Company ensures that all employees always uphold GCG best practices in carrying out their duties and responsibilities so that it always proceeds efficiently and in line with applicable laws and regulations. In the meantime, in order to avoid any loopholes that can result in non-compliance with existing regulations, the Company plays an active role as a member of several industry associations relevant to the business activities carried out and attends a number of invitations to socialize regulations and legislation organized by the regulator.

With the implementation of a comprehensive internal control system on the entire lines of business and levels of the organization, thus, all Company assets are properly safeguarded from various attempts of misappropriation and financial reports published to the public accurately, quickly and reliably.

Review Of The Effectiveness Of Internal Control System In 2024

The implementation of evaluations by separate or independent units, in addition to being carried out by the Company's internal work units appointed and determined by the Board of Directors, can also conducted by the KAP. In 2024, evaluation on the adequacy and effectiveness of the Company's internal control system is considered as sufficient. This is visible from monitoring and preventing activities of risks that arise as a result from the Company's business activities by related work units, risk management, and Internal Audit Unit. In addition, the Internal Audit Unit also did not find any violation or deviation that may lead to acts of fraud both in financial and operational management of the Company.

Statement Of The Board Of Commissioners And The Board Of Directors On The Adequacy Of Internal Control In 2024

The Board of Commissioners and the Board of Directors are in the opinion that overall the Company has retained a solid control environment as the basis to carry out an effective internal control system. All elements of the Company have shown high commitment and awareness to always apply an internal control system that is relevant with their respective duties and responsibilities.



Perseroan melakukan penilaian yang menyeluruh selama 2024, Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit menyatakan bahwa sistem pengendalian internal Perseroan telah berjalan efektif, memadai, dan mampu mengendalikan keuangan dan operasional Perseroan untuk mendukung tercapainya tujuan bisnis tanpa mengorbankan kinerja keuangan, kepatuhan dan/atau reputasi. Disamping itu, Perseroan juga telah menyediakan *tools* untuk mengantisipasi dan mengelola risiko dengan mempertimbangkan perubahan strategi bisnis, faktor eksternal dan ketentuan regulator.

The Company performed comprehensive assessments during 2024, the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Audit Committee stated that the Company's internal control system has been running effectively, adequately, and capable of controlling the Company's finances and operations to support the achievement of business goals without sacrificing financial performance, compliance and/or reputation. Moreover, the Company has also provided the tools to anticipate and manage risks with considerations of business strategies, external factors and regulatory provisions.



Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, manajemen risiko memiliki peran penting dalam mengantisipasi kemungkinan Perseroan mengalami tekanan keuangan dan perlindungan terhadap kerugian serius. Setiap unit di Perseroan harus melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pelaporan atas risiko-risiko yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya tujuan Perseroan. Oleh karena itu, bagi Perseroan pelaksanaan manajemen risiko semakin menjadi tuntutan, dimana keberhasilannya menjadi salah satu kunci kesuksesan dan pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.

Perseroan menghadapi beberapa jenis risiko yang melekat. Berbagai risiko tersebut ditangani melalui upaya pencegahan risiko, mitigasi risiko, ataupun pengalihan risiko.

Pokok-Pokok Kebijakan Manajemen Risiko Di Perseroan

Prinsip dasar kebijakan Sistem Manajemen Risiko yang menjadi landasan dalam implementasi Sistem Manajemen Risiko Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Perseroan berkaitan dengan risiko yang dihadapi;
2. Manajemen Risiko berkontribusi terhadap pencapaian tujuan secara nyata dan peningkatan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, kepercayaan pemangku kepentingan, perlindungan lingkungan, kinerja keuangan, kualitas produk, efisiensi operasi, tata kelola, dan reputasi Perseroan;
3. Manajemen Risiko merupakan bagian integral dalam proses penyelenggaraan Perseroan yang artinya melekat dalam semua praktik dan proses bisnis Perseroan sehingga Manajemen Risiko merupakan aktivitas yang tidak berdiri sendiri dari aktivitas-aktivitas utama dan proses dalam Perseroan;
4. Manajemen Risiko membantu dalam mengambil keputusan dengan informasi yang cukup. Manajemen risiko juga membantu memprioritaskan aksi dan membedakan berbagai pilihan alternatif aksi. Pada akhirnya manajemen risiko dapat membantu dalam pengambilan keputusan apakah suatu risiko dapat diterima atau apakah suatu penanganan risiko telah memadai dan efektif;
5. Manajemen Risiko menangani aspek-aspek ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan bagaimana cara menangannya;
6. Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan suatu pendekatan sistematis, terstruktur, dan tepat waktu sehingga memiliki kontribusi terhadap efisiensi dan hasil yang konsisten, dapat dibandingkan serta andal;
7. Manajemen Risiko berdasarkan informasi yang tersedia secara selektif, artinya masukan untuk proses pengelolaan risiko didasarkan pada sumber informasi seperti pengalaman, umpan balik, pengamatan, prakiraan dan pertimbangan pakar. Meskipun demikian, pengambilan keputusan harus berdasarkan informasi yang memadai dan mempertimbangkan segala keterbatasan data atau model yang digunakan atau kemungkinan perbedaan pendapat antar pakar;

In carrying out its business activities, risk management has an important role in anticipating the possibility of the Company experiencing financial pressures and protection against serious losses. Each of the Company's unit must identify, measure, monitor and report on risks that may potentially cause the incapability of the Company to achieve its objectives. For this reason, for the Company to implement risk management becomes more demanded, where its success becomes one of the keys to the success and achievement of the Company's Vision and Mission.

The Company faces several types of risks that are inherent. These various risks are handled through efforts of preventing risks, risks mitigation, or risk transfer.

Fundamentals Of Risk Management Policy In The Company

The basic principles in the Risk Management System that serve as the ground rule in the implementation of the Company's Risk Management System are as follows:

1. Risk Management is a coordinated activity to direct and control the Company in connection with risks it faces;
2. Risk Management contributes to the achievement of real objectives and increased compliance with laws and regulations, stakeholder trust, environmental protection, financial performance, product quality, operational efficiency, governance, and the Company's reputation;
3. Risk Management is an integral part of the Company's implementation process, which means it is embedded in all of the Company's business practices and processes so that Risk Management is an activity that does not stand alone from the main activities and processes in the Company;
4. Risk Management helps in making decisions with sufficient information. Risk Management also helps prioritize actions and distinguish between various alternative choices of action. Ultimately, risk management can help in making decisions whether a risk is acceptable or whether a risk treatment is adequate and effective;
5. Risk Management addresses aspects of uncertainty in decision-making and how to handle them;
6. The implementation of risk management is carried out with a systematic, structured and timely approach so that it contributes to efficiency and consistent, comparable and reliable results;
7. Risk Management is based on selectively available information, meaning that input for the risk management process is based on information sources such as experience, feedback, observations, forecasts and expert judgement. However, decision-making must be based on adequate information and take into account any limitations of the data or models used or possible differences of opinion between experts;

8. Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta diselaraskan dengan konteks internal dan eksternal Perseroan;
9. Manajemen Risiko memperhitungkan faktor manusia dan budaya, artinya manajemen risiko mengakui kapabilitas, persepsi, dan tujuan pihak-pihak eksternal dan internal yang dapat mendukung ataupun justru menghambat pencapaian tujuan Perseroan;
10. Manajemen Risiko bersifat transparan, artinya pelibatan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan secara tepat dan cepat dalam Perseroan di semua tingkatan diperlukan untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko tetap relevan dan mengikuti perkembangan. Pelibatan ini juga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk cukup terwakili dan diperhitungkan sudut pandanganya dalam menentukan kriteria risiko;
11. Manajemen Risiko bersifat dinamis, interaktif, dan responsive terhadap perubahan karena dengan adanya perubahan ilmu pengetahuan, serta diterapkannya pemantauan dan peninjauan, risiko-risiko baru dapat bermunculan sedangkan risiko-risiko yang ada bisa berubah atau hilang. Oleh karena itu Perseroan harus memastikan bahwa manajemen risiko terus menerus merasakan dan menanggapi perubahan;
12. Manajemen Risiko memfasilitasi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan Perseroan artinya Perseroan mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk memperbaiki tingkat kematangan Manajemen Risiko bersama aspek-aspek lain dalam Perseroan.

Identifikasi Jenis Resiko Dan Upaya Mitigasi

Untuk mendukung akuntabilitas Direksi, manajemen risiko diperlukan dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kinerja Perseroan. Penerapannya melibatkan seluruh komponen organisasi, di segala aspek kegiatan bisnis Perseroan, seperti pada kegiatan yang risikonya berasal dari 8 (delapan) kategori risiko perusahaan sebagai berikut:

Identification Of Types Of Risk And Mitigation Efforts

To support the accountability of the Board of Directors, risk management is required in decision-making process and develops the Company's performance. Its implementation involves all components of the organization, in all aspects of the Company's business activities, such as on activities with risks coming from 8 (eight) of company's risk categories as described below:

No	Jenis Risiko Type of Risk	Mitigas Risiko Risk Mitigation
1	Risiko Operasional Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.	Upaya mitigasi yang dilakukan Perseroan, antara lain: a. Implementasi Sistem Pengendalian <i>Internal</i> yang efektif; b. Pemanfaatan teknologi informasi yang andal; c. Pemantauan dan evaluasi berkala guna mendeteksi dan mengatasi potensi risiko operasional.
	Operational Risk Operational risk is the risk that emerges as a result from the inadequacy and/or the disfunctioning of the internal processes, human error, system failure, and/or from external events that affect the Company's operations.	Mitigation efforts undertaken by the Comopany include the following: a. Implementation of an effective Internal Control System; b. Utilization of reliable information technology; c. Periodic monitoring and evaluation to detect and overcome potential operational risks.



No	Jenis Risiko Type of Risk	Mitigas Risiko Risk Mitigation
2	Risiko Penjaminan Risiko penjaminan adalah risiko yang timbul akibat kegagalan dalam memenuhi kewajiban finansial kepada penerima jaminan, dan/atau risiko akibat kegagalan mitra penjaminan bersama (<i>co-guarantee</i>) atau penjaminan ulang (<i>re-guarantee</i>) dalam memenuhi kewajibannya. Guarantee Risk Guarantee risk is the risk that arises due to failure to fulfill financial obligations to the guarantee recipient, and/or the risk due to failure of the co-guarantee or re-guarantee partner to fulfill its obligations.	Upaya mitigasi yang dilakukan Perseroan, antara lain: - Evaluasi terhadap kemampuan finansial penerima jaminan sebelum memberikan jaminan; - Pemantauan rutin terhadap kinerja mitra penjaminan bersama (<i>co-guarantee</i>) dan penjaminan ulang (<i>re-guarantee</i>) untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban finansial; - Diversifikasi portofolio penjaminan guna mengurangi konsentrasi risiko pada satu entitas atau sektor; - Penyusunan perjanjian penjaminan yang jelas dan terperinci untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang mungkin timbul; - Penilaian risiko secara berkala untuk menyesuaikan strategi mitigasi sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan finansial. Mitigation efforts implemented by the Company include the following: - Evaluation of the financial capacity of the guarantee recipient before providing the guarantee; - Routine monitoring of the performance of co-guarantee and re-guarantee partners to ensure compliance with financial obligations; - Diversification of the guarantee portfolio to reduce the concentration of risk in one entity or sector; - Preparation of a clear and detailed guarantee agreement to anticipate potential risks that may emerge; - Periodic risk assessment to adjust mitigation strategies in accordance with changes in the business and financial environment.
3	Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat tidak memenuhi atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Compliance Risk Compliance risk is risk that arises due to not fulfilling or not implementing the provisions of laws and regulations.	Upaya mitigasi yang dilakukan Perseroan, antara lain: - Penerapan sistem monitoring yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi secara rutin kepada seluruh pemangku kepentingan terkait agar memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku; - Keterlibatan aktif dalam dialog dengan otoritas pengawas dan pemangku kepentingan eksternal untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perubahan regulasi; - Audit internal secara teratur untuk mengevaluasi dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; - Penerapan mekanisme pengendalian internal yang efisien untuk mencegah pelanggaran dan mengidentifikasi potensi risiko kepatuhan. Mitigation efforts implemented by the Company include the following: - Implementation of an effective monitoring system to ensure compliance with applicable laws and regulations; - Implementation of routine training and socialization to all relevant stakeholders to understand and comply with applicable regulations; - Active involvement in dialogues with supervisory authorities and external stakeholders to gain in-dept understanding of the regulatory changes; - Regular internal audits to evaluate and ensure compliance with provisions of laws and regulations; - Implementation of efficient internal control mechanisms to prevent violations and identify potential compliance risks.
4	Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai. Liquidity Risk Liquidity risk is risk that emerges due to the Company's inability to fulfill its obligations in cash upon maturity.	Upaya mitigasi yang dilakukan Perseroan, antara lain: - Penyusunan manajemen kas dan likuiditas yang cermat untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai; - Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap profil likuiditas, termasuk pemetaan sumber dan penggunaan dana; - Diversifikasi portofolio investasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketersediaan sumber dana; - Penetapan batasan dan kebijakan yang jelas terkait dengan tingkat risiko likuiditas yang dapat diterima. Mitigation efforts undertaken by the Company include the following: - Prepare careful cash and liquidity management to ensure adequate funds are available; - Regular monitoring and evaluation of the liquidity profile, including mapping sources and uses of funds; - Diversify the investment portfolio to increase flexibility and availability of sources of funds; - Establish clear limits and policies related to acceptable levels of liquidity risk.

No	Jenis Risiko Type of Risk	Mitigas Risiko Risk Mitigation
5	Risiko Hukum Risiko hukum adalah risiko yang muncul akibat tuntutan hukum dari pihak lain dan/atau kelemahan aspek yuridis yang dapat menyebabkan kerugian Perseroan.	Upaya mitigasi yang dilakukan Perseroan, antara lain: - Pengelolaan risiko hukum, diantaranya melalui kajian regulasi (<i>legislative review</i>) dan tinjauan hukum (<i>legal review</i>) yang bertujuan agar Perseroan dapat mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko hukum yang dapat mempengaruhi Perseroan. Dengan demikian, Perseroan dapat membuat dan/atau menyelaraskan kebijakan internalnya sesuai dengan hasil dari identifikasi dan analisis tersebut. - Melakukan Audit Hukum, baik melalui In-house Counsel maupun Advokat eksternal, yang sudah tersertifikasi <i>Certified Legal Auditor</i> (CLA) secara berkala. - Melakukan Uji Petik Kepatuhan untuk menilai kepatuhan Perseroan terhadap peraturan, standar, atau kebijakan yang berlaku. - Menerapkan <i>self-assessment</i> sesuai POJK dan/atau audit eksternal terkait dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai ISO 37001:2016. - Melakukan kerja sama dengan lembaga Aparat Penegak Hukum (APH), Advokat Eksternal dan/atau lembaga lainnya yang berkompeten dalam bidang hukum privat/publik, khususnya korporasi dan keperdataan/pidana, untuk penguatan kapasitas, pelatihan, sharing knowledge, penanganan masalah hukum, etc. - Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi secara berkala kepada staf Legal & Kepatuhan mengenai aspek-aspek hukum yang relevan dengan kegiatan bisnis maupun operasional Perseroan. Mitigation efforts undertaken by the Company, among others, include the following: - Legal risk management, including through regulatory review (legislative review) and legal review that aim to enable the Company to identify and analyze potential legal risks that may affect the Company. Thus, the Company can create and/or align its internal policies in accordance with the results of the identification and analysis. - Conducting Legal Audits either through In-house Counsel or external Advocates, who have been certified as Certified Legal Auditors (CLA) on regular basis. - Conducting compliance Spot checks to assess the Company's compliance with applicable regulations, standards, or policies. - Implementing self-assessment in accordance with POJK and/or external audits related to the Anti-Bribery Management System in accordance with ISO 37001:2016. - Cooperating with Law Enforcement Agencies (APH), External Advocates and/or other competent institutions in the field of private/public law, especially corporate and civil/criminal, to strengthen capacity, training, knowledge sharing, handling legal issues, etc. - Organizing periodic training and certification for Legal & Compliance staff regarding legal aspects relevant to the Company's business and operational activities.
6	Risiko Pasar Risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat menurunnya nilai suatu investasi karena kondisi pasar, seperti suku bunga dan mata uang.	Upaya mitigasi yang dilakukan Perseroan, antara lain: - Diversifikasi portofolio investasi untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis aset atau instrument keuangan; - Melakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) pada investasi guna melindungi nilai dari fluktuasi suku bunga dan mata uang; - Pemantauan secara rutin terhadap perubahan kondisi pasar dan evaluasi dampaknya terhadap portofolio investasi; - Penetapan batasan risiko pasar yang dapat diterima dan implementasi strategi investasi yang sejalan dengan profil risiko; - Keterlibatan dalam analisis pasar dan kajian risiko secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan investasi. Mitigation efforts implemented by the Company among others are as follows: - Diversification of investment portfolio to reduce dependency on one type of asset or financial instrument; - Hedging investments to protect alue from interest rate ad currency fluctuations; - Regular monitoring of changes in market conditions and evaluation of their impact on the investment portfolio; - Determining acceptable market risk limits and implementation of investment strategies in line with the risk profile; - Involvement in comprehensive market analysis and risk assessment before making investment decisions.



No	Jenis Risiko Type of Risk	Mitigas Risiko Risk Mitigation
7	Risiko Strategis Risiko strategis adalah risiko yang timbul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Strategic Risk Strategic risk is risk that emerges due to inaccuracy in decision-making and/or implementation of a decision, as well as failure to anticipate changes in the business environment.	Upaya mitigasi yang dilakukan Perseroan, antara lain: - Penerapan proses pengambilan keputusan yang terstruktur dan analisis risiko yang mendalam; - Pemantauan secara aktif terhadap tren dan perkembangan di lingkungan bisnis; - Penyusunan rencana kontinuitas bisnis untuk menghadapi perubahan yang tidak terduga; - Menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan wawasan dan masukan eksternal; - Evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. Mitigation efforts applied by the Company, among others, are as follows: - Implement a structured decision-making process and in-depth risk analysis; - Actively monitor trends and developments in the business environment; - Prepare business continuity plan to deal with unexpected changes; - Establish communication with stakeholders to gain external insights and input; - Periodic evaluation and adjustment of strategies in accordance with changes in the business environment.
8	Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang berasal dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Reputation Risk Reputation risk is risk that arises due to the decline in the level of trust of stakeholders that comes from negative perception towards the Company	Upaya mitigasi yang dilakukan Perseroan, antara lain: - Penerapan praktik tata kelola perusahaan GCG yang ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas; - Kontribusi yang berkelanjutan dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>) yang bertujuan untuk memperkuat citra positif Perseroan; <i>Monitoring</i> media dan jejaring sosial secara rutin untuk mendeteksi dan merespons potensi isu reputasi; - Peningkatan komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan untuk mengatasi dan menjelaskan situasi yang mungkin mempengaruhi reputasi; - Penerapan kebijakan internal yang mendukung integritas dan etika dalam semua aspek operasional. Mitigation efforts undertaken by the Company, among others, are as follows: - Implementation of strict GCG practices to ensure transparency and accountability; - Continuous contribution to corporate social responsibility (CSR) activities aimed at strengthening the Company's positive image; - Regular monitoring of media and social networks to detect and respond to potential reputation issues; - Enhancement of effective communication with stakeholders to address and explain situations that may affect reputation; - Implementation of internal policies that support integrity and ethics in all aspects of operations.

No	Jenis Risiko Type of Risk	Mitigas Risiko Risk Mitigation
9	Risiko Tingkat Suku Bunga Risiko suku bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko nilai suku bunga wajar adalah risiko dimana nilai dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Perusahaan menghadapi dampak dari fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku baik atas risiko nilai wajar maupun arus kas. Marjin suku bunga bisa meningkat sebagai hasil dari perubahan tersebut namun juga dapat mengurangi kerugian ketika terdapat pergerakan yang tidak diharapkan. Direksi menetapkan batas atas tingkat ketidaksesuaian dari suku bunga <i>repricing</i> dan <i>value at risk</i> yang bisa dilakukan, yang dimonitor secara harian oleh Divisi yang membidangi investasi. Interest Rate Risk Cash flow interest rate risk is risk that the future cash flows of a financial instrument fluctuate due to changes in market interest rates. Fair value interest rate risk is risk that the value of a financial instrument fluctuates due to changes in market interest rates. The Company faces the impact of the fluctuations in prevailing market interest rates on both fair value and cash flow risks. Interest rate margins may increase as a result of such changes, however, they may also reduce losses when there are unexpected movements. The Board of Directors sets an upper limit on the level of mismatch between the repricing interest rate and value at risk that can be carried out, which is monitored daily by the Division in charge of investment.	Upaya mitigasi yang dilakukan Perseroan, antara lain: - Melakukan <i>screening</i>, <i>filtering</i>, dan <i>interview</i> untuk memvalidasi investasi yang akan masuk ke dalam platform; - Perseroan melakukan diversifikasi portofolio yang ada dengan menambahkan sekuritas yang nilainya tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi suku bunga (misalnya ekuitas). Jika investor memiliki portofolio "hanya obligasi", ia dapat mendiversifikasi portofolionya dengan memasukkan campuran obligasi jangka pendek dan jangka panjang; - Perseroan dalam mengelola investasi di Reksadana melihat "<i>market timing</i>", yaitu sebuah strategi untuk menentukan kapan sebaiknya menjual dan membeli Reksadana untuk <i>taking profit</i>; - Perseroan dalam mengelola investasi di Obligasi melihat "<i>market timing</i>", yaitu sebuah strategi untuk menentukan kapan sebaiknya menjual dan membeli Obligasi untuk <i>taking profit</i>; - Jika melakukan investasi Deposito, Perseroan memilih bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mitigation efforts carried out by the Company include the following: - Conduct screening, filtering, and interview to validate investments that will enter the platform; - The Company diversifies the existing portfolio by adding securities whose value is not too susceptible to interest rate fluctuations (i.e. equity). An investor with a "bond only" portfolio can diversify the portfolio by including a mix of short-term and long-term bonds; - The Company in managing investments in Mutual Funds looks at "market timing", which is a strategy to determine when it is best to sell and buy Mutual Funds to take profit; - The Company in managing investments in Bonds looks at "market timing", which is a strategy to determine when it is best to sell and buy Bonds to take profit; - If making a Deposit investment, the company chooses a bank that is guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS).
10	Risiko Fraud Risiko <i>Fraud</i> adalah Merupakan risiko akibat dari tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi mitra atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan perusahaan dan/atau menggunakan sarana perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan, mitra atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku <i>Fraud</i> memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Fraud Risk Fraud risk is risk resulting from acts of deviation or omission that are deliberately carried out to deceive, cheat or manipulate partners or other parties, which occur in the company's environment and/or using company facilities so that the company, partners or other parties suffer losses and/or the perpetrator of the fraud obtains financial benefits either directly or indirectly.	Strategi Anti Fraud yang dilakukan Perseroan, antara lain: - Pencegahan, Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya Fraud, yang paling sedikit mencakup : 1. Kesadaran <i>Anti Fraud</i> (<i>Anti Fraud Awareness</i>), 2. Identifikasi Kerawanan, 3. Kebijakan Mengenai Karyawan (<i>Know Your Employee</i>) - Deteksi, Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian <i>Fraud</i>, yang paling kurang mencakup : 1. Kebijakan dan Mekanisme <i>Whistleblowing</i>, 2. Pemeriksaan dadakan (<i>Surprise Audit</i>), 3. Sistem pengawasan (<i>Surveillance System</i>). - Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi - Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut The Company's Anti-Fraud Strategy includes the following: - Prevention - The prevention pillar contains devices aimed at reducing the potential for fraud, which at least include: 1) Anti-Fraud Awareness, 2) Vulnerability Identification, 3) Know Your Employee Policy. - Detection - The detection pillar contains devices aimed at identifying and finding fraud incidents, which at least include: 1) Whistleblowing Policy and Mechanism, 2) Surprise Audit, 3) Surveillance System. - Investigation, Reporting and Sanctions - Monitoring, Evaluation and Follow-up.



Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Tahun 2024

Dari waktu ke waktu, Perseroan terus berusaha meningkatkan efektivitas sistem manajemen risiko pada setiap kegiatan rutin yang dijalankan perusahaan, di antaranya dengan melakukan pengawasan dan perbaikan yang berkelanjutan agar aktivitas pengelolaan risiko dapat berjalan lebih efektif dan efisien dengan menggunakan desentralisasi.

Perseroan dapat memastikan bahwa Sistem Manajemen Risiko berjalan dengan baik di tahun 2024 hingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja Perseroan dan menjaga keberlangsungan operasional di tengah dinamika bisnis dan lingkungan eksternal. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko menjadi suatu langkah penting dalam memastikan bahwa Perseroan dapat merespons dan mengelola risiko dengan optimal guna mencapai keberhasilan jangka panjang.

Pernyataan Dewan Komisaris Dan Direksi Atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko Tahun 2024

Selama periode pelaporan, Direksi maupun Dewan Komisaris dan Direksi meyakini bahwa sistem manajemen risiko Perseroan yang diterapkan saat ini sudah cukup efektif dalam mereduksi risiko-risiko usaha, operasional dan keuangan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Begitu juga dengan potensi risiko-risiko baru yang mungkin akan timbul dan berdampak signifikan di masa mendatang.

Kepatuhan Compliance

Perseroan berkomitmen bahwa kepatuhan terhadap peraturan baik Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan lain, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam organisasi Perseroan. Karena itu, setiap kegagalan pelaksanaan kepatuhan dapat menyebabkan risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko lainnya. Hal itu mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut.

Upaya yang harus dilakukan oleh Divisi Kepatuhan adalah bersifat *ex-ante* yang sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha Perseroan yang diperkirakan akan terjadi. Untuk menerapkan fungsi kepatuhan maka perseroan telah membentuk Divisi Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional. Fungsi kepatuhan terdiri dari serangkaian strategi yang digunakan Perseroan dalam memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur,

Review Of The Effectiveness Of Risk Management System In 2024

From time to time, the Company continuously strives to increase the effectiveness of the risk management system on each routine activity carried out by the company, among others, by conducting constant supervision and repairs so that risk management activities can effectively and efficiently run by means of decentralization.

The Company is assured that the Risk Management System running properly in the year 2024 that it was able to provide positive contribution towards the Company's performance achievements and maintain operational continuity amidst business and external environment dynamics. Reviews on the effectiveness of the risk management system became an important step in ensuring that the Company can respond and manage risks optimally in order to reach long-term success.

Statement Of The Board Of Commissioners And The Board Of Directors On The Adequacy Of The Risk Management System In 2024

During the reporting period, the Board of Commissioners and the Board of Directors believe that the Company's Risk Management System currently applied is quite effective in reducing business, operational and financial risks that were previously identified. Likewise with the potential new risks that may arise and have significant impact in the future.

The Company is committed that compliance with regulations of the Financial Services Authority as well as with other laws and regulations is an obligation for the Board of Commissioners, the Board of Directors and all employees within the Company's organization to carry out. For that reason, failure in implementing compliance can affect compliance risk, reputation risk and other risks. This further causes greater challenge and risk exposure to face, thus, various efforts are necessary to mitigate these risks.

The Compliance Division must carry out *ex-ante* efforts highly necessary to reduce or minimize potential risks expected to occur to the Company's business activities. To implement its compliance function, the Company formed the Compliance Division that is independent from the operational work units. The compliance function consists of a series of strategies used by the Company to ensure that policies, provisions, systems and procedures, as well as

serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Profil Kepala Divisi Kepatuhan

Kepala Divisi Kepatuhan saat ini dijabat oleh Muhammad Irwan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 019/Kepdir-SDM/VII/2024 Penetapan Pejabat Atas Perubahan Struktur Organisasi Tahun 2024.

Profil lengkap beliau telah diuraikan dengan rinci pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Profil Kepala Divisi.

Independensi Divisi Kepatuhan

Tidak terdapat hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga Divisi Kepatuhan dengan Anggota Dewan Komisaris, dengan Dewan Pengawas Syariah dan antar anggota Direksi serta dengan Pemegang Saham Pengendali, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Divisi Kepatuhan mampu bertindak secara independen.

Kewajiban Tugas Kepatuhan

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Perseroan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Perseroan;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Tahun 2024

Sepanjang tahun buku 2024, Divisi Kepatuhan telah melaksanakan tugas dengan uraian sebagai berikut:

1. Compliance Testing

Melakukan analisa, evaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian, serta pengujian kepatuhan terhadap kebijakan

business activities carried out by the Company are in accordance with OJK provisions and applicable laws and regulations.

Profile of The Head of Compliance Division

Muhammad Irwan is currently the Head of the Compliance Division, appointed based on Decree No. 019/Kepdir-SDM/VII/2024 regarding the Appointment of Officials to the Changes in the Organizational Structure in 2024.

His complete profile is available in detail in the Chapter on Company Profile, Sub-Chapter on Division Heads.

Independency of The Compliance Division

There are no financial relationship, management relationship, share ownership and family relationships between the Compliance Division and members of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board as well as among members of the Board of Directors and the Controlling Shareholders, so that in carrying out its duties and responsibilities the Compliance Division is able to act independently.

Compliance Duty Obligation

1. Take actions that support the establishment of a compliance culture in all of the Company's business activities at every level of the organization;
2. Identifying, measuring, monitoring, and controlling compliance risks by referring to the provisions of the Financial Services Authority which regulates the implementation of risk management for the Company and the provisions of the Financial Services Authority which regulates the implementation of risk management for the Company;
3. Assess and evaluate the effectiveness, adequacy and suitability of all Company's policies, provisions, systems as well as procedures to the provisions of laws and regulations;
4. Conduct reviews and/or recommends updates and improvements to all the Company's policies, provisions, systems and procedures so that they comply with the provisions of the Financial Services Authority and statutory regulations;
5. Make efforts to ensure that all the Company's policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and the provisions of statutory regulations;
6. Perform other duties related to compliance functions.

Implementation of Compliance Duties in 2024

Throughout year 2024, the Compliance Division conducted the following duties as described below:

1. Compliance Testing

Conducting analysis, evaluation of effectiveness, adequacy, and suitability, as well as testing compliance with the policies



dan keputusan Direksi, serta memberikan reviu, opini dan tanggapan kepatuhan terhadap kebijakan yang berjalan dan akad yang akan dipergunakan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan prinsip GCG yang berlaku.

2. Compliance Monitoring

- Melaksanakan pengkinian sistem reminder kewajiban laporan kepada pihak ketiga dan PIC laporan kepada pihak ketiga
- Unit Kerja Kepatuhan memastikan pemenuhan seluruh komitmen Perseroan atas hasil temuan SPI, OJK, BPKP, Auditor Eksternal dan pihak regulator lainnya.

3. Good Corporate Governance (GCG)

- Melakukan pemenuhan terhadap ketentuan/kebijakan dan prosedur yang wajib dimiliki Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pemenuhan *Governance Structure* dan GCG *policy* sesuai dengan ketentuan yang berlaku

and decisions of the Board of Directors, as well as providing reviews, opinions and responses to compliance with ongoing policies and contracts to be used to ensure compliance with applicable GCG provisions and principles.

2. Compliance Monitoring

- Implement the update of the reporting obligation reminder system to third parties and PIC reports to third parties
- Compliance Work Unit ensures the fulfillment of all the Company's commitments based on the findings of SPI, OJK, BPKP, External Auditors and other regulators

3. Good Corporate Governance (GCG)

- Fulfillment of all provisions/policies and procedures that are mandatory for the Company in accordance with applicable regulations.
- Fulfillment of the Governance Structure and GCG policy in accordance with applicable regulations.

Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Tahun 2024

Selama tahun 2024, Kepatuhan berhasil menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan aktif mengadakan sejumlah kegiatan yang berfokus pada keterbukaan informasi serta membangun hubungan dengan pemegang saham, investor, regulator, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Implementation of Duties of Compliance in 2024

During the year 2024, Compliance managed to carry out its duties in accordance with its responsibilities. In the implementation of its function and duties, the Corporate Secretary conducted a number of activities that focused on disclosure of information as well as on maintaining relations with the shareholders, investors, regulators, and other related parties.

Perkara Hukum

Legal Cases

Litigasi Dan Perkara Hukum Tahun 2024

Selama tahun 2024, tidak terdapat litigasi dan nonlitigasi hukum, baik perdata maupun pidana, yang dihadapi oleh Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Selain itu, tidak terdapat perkara hukum, baik perdata maupun pidana, yang dihadapi oleh anggota Komisaris maupun Direksi.

Litigation And Legal Cases In 2024

During the year 2024, there were no litigation and non-litigation, either civil and criminal, faced by the Company that could be detrimental to the Company.

In addition, there were no legal cases, either civil or criminal, faced by members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Sanksi Administratif

Administrative Sanctions

Selama tahun 2024, baik Perseroan maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak dikenakan sanksi administratif dalam segala aspek. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen tinggi Perseroan terhadap implementasi prinsip GCG dalam manajemen operasionalnya.

During the year 2024, both the Company as well as members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, did not receive administrative sanctions in all aspects. This is an accomplishment that reflects the Company's high commitment on the implementation of GCG principles in its operational management.

Kode Etik

Code of Conduct

Komitmen Pelaksanaan Kode Etik

Komitmen Perseroan dalam menghadirkan lingkungan kerja yang beretika tinggi dituangkan dalam dokumen formal berupa Pedoman Perilaku atau Kode Etik (*Code of Conduct*) yang telah disahkan melalui Peraturan Direksi Nomor 007/Perdir/IX/2018 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Jamkrida Jakarta. Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2017 pasal 56, yang mengamanatkan kepada Lembaga Penjamin untuk membuat pedoman tentang perilaku etis.

Pedoman Perilaku atau Kode Etik berfungsi sebagai standar dan norma yang memengaruhi, membentuk, dan mengatur kesesuaian tingkah laku segenap karyawan agar tercipta budaya saling menghormati dan saling menghargai antar-karyawan sehingga dapat tercipta suasana kerja yang nyaman dan aman bagi semua karyawan.

Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok-pokok kode etik yang ditetapkan dalam Pedoman Perilaku PT Jamkrida Jakarta, yaitu:

1. Etika Bisnis Perseroan.
2. Etika Kerja Karyawan.

Tujuan Kode Etik

Perseroan menyusun Pedoman Perilaku atau Kode Etik (*Code of Conduct*) bertujuan untuk:

1. Sebagai panduan yang harus dipatuhi bagi seluruh elemen Perusahaan dalam berperilaku, melakukan interaksi sehari-hari, dan menjadi landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan;
2. Turut aktif dalam menjalankan standar etika bisnis yang sejalan dengan prinsip GCG, khususnya di bidang penjaminan guna menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif, sehingga mendorong terciptanya budaya perusahaan dan meningkatkan nilai Perseroan;

Commitment To The Implementation Of The Code Of Conduct

The Company's commitment in establishing a working environment with high ethics is contained in the formal document in the form of the Code of Conduct, ratified through the Board of Director Regulation No. 007/Perdir/IX/2018 on the Operating Standards and Procedures of the Code of Conduct of PT Jammkrida Jakarta. Tis is inline with OJK Regulation No. 3/POJK.05/2017 article 56 which mandated Guarantee Institution to establish guidelines on ethical conduct.

The Code of Conduct functions as standards and norms that affect, form and regulate the conformity of conducts of the employees so that they create a culture of mutual respect and appreciation between employees so that a comfortable and safe working atmosphere can be created for all employees.

Principles Of The Code Of Conduct

The main principles of the code of conduct established within the Code of Conduct of PT Jamkrida Jakarta are as follows:

1. Company Business Ethics
2. Employee Work Ethics

Purpose Of The Code Of Conduct

The Company established the Code of Conduct with the following purposes:

1. As guidelines that must be adhered to by all elements of the Company in behavior, daily interactions, and as basis of the mindset in decision-making process;
2. Active involvement in carrying out business ethical standards in line with GCG principles, specifically in the field of guarantee in order to create and maintain a positive working environment that encourages the formation of a corporate culture and the improvement of Company value;



3. Menjalin hubungan yang harmonis, sinergi, dan saling menguntungkan antara konsumen, mitra kerja, karyawan, dan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan PT Jamkrida Jakarta, berlandaskan prinsip korporasi yang sehat dan beretika.

Kode Etik Berlaku Untuk Seluruh Level Organisasi

Seluruh insan Jamkrida berkomitmen mengimplementasikan Etika Bisnis dan Etika Kerja yang tertuang dalam Pedoman Perilaku atau Kode Etik (*Code of Conduct*) secara konsisten. Pedoman ini bersifat mengikat bagi seluruh karyawan tanpa terkecuali, mulai dari jajaran Dewan Komisaris, Direksi, hingga staff, juga pemegang saham serta seluruh *stakeholder* yang melakukan transaksi bisnis dengan PT Jamkrida Jakarta.

Sosialisasi Kode Etik Dan Upaya Penegakan

Perseroan melakukan sosialisasi Pedoman Perilaku atau Kode Etik (*Code of Conduct*) kepada seluruh karyawan secara kontinu di berbagai kesempatan baik secara formal maupun informal. Selain itu, Pedoman Perilaku atau Kode Etik (*Code of Conduct*) juga diperkenalkan kepada seluruh tingkatan karyawan dan secara jelas dinyatakan secara tertulis dalam kontrak kerja yang harus dipahami, ditandatangani, dan diimplementasikan oleh seluruh karyawan.

3. Maintain relationships of harmony, synergy, and mutually-benefitting between consumers, partners, employees and other parties of interest (*stakeholders*) with PT Jamkrida Jakarta, based on sound and ethical corporate principles.

Code Of Conduct Applies To All Levels Of The Organization

All personnels of Jamkrida are committed to consistently implementing Business Ethics and Work Ethics as contained in the Code of Conduct. This guideline is binding all employees with no exception, starting from the Board of Comissioners, the Board of Directors, to staffs and also the shareholders as well as *stakeholders* who conduct business transactions with PT Jamkrida Jakarta.

Socialization Of The Code Of Conduct And Efforts Of Enforcement

The Company continually performs socialization of the Code of Conduct to all employees in various opportunities both formally and informally. In addition, the Code of Conduct is also introduced to all levels of the employees and clearly stated in writing in the work contracts that must be understood, signed and implemented by all employees.

Pemberian Kompensasi Jangka Panjang

Providing Long-Term Compensation

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan tidak memiliki dan menerapkan kebijakan mengenai pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan, seperti program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Ownership Program* – ESOP) dan program kepemilikan saham oleh manajemen (*Management Stock Ownership Program* – MSOP).

Until the end of the year 2024, the Company did not have nor implemented the policy on providing long-term compensation based on performance to the management and/or employees, such as the Employee Stock Ownership Program (ESOP) and the Management Stock Ownership Program (MESOP).

Kebijakan Transparansi Kepemilikan Saham

Policy on Transparency of Share Ownership

Perseroan mewajibkan seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk mengungkapkan kepemilikan saham pada Perseroan dan/atau pada badan usaha lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, yang persentase kepemilikannya mencapai 5% atau lebih. Kebijakan ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2017/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.

The Company requires all members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and DPS to disclose share ownership in the Company and/or other business entities residing inside and outside of the country, of which the ownership percentage is up to 5% or more. This policy refers to the provisions in Article 43 of OJK Regulation No. 3/POJK.05/2017/2017 regarding Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.

Selama tahun 2024, tidak terdapat anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, yang memiliki saham Perseroan ataupun badan usaha lainnya. Informasi tentang kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi juga telah diungkapkan pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Informasi Tentang Struktur Modal dan Pemegang Saham.

During the year 2024, there were no members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and DPS with ownership of shares of the Company or other business entities. Information on the share ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors is also disclosed in the Chapter on Company Profile, Sub-Chapter on Information Regarding Capital Structure and Shareholders.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Violation Reporting System

Di tengah tantangan perkembangan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, Perseroan dituntut untuk dapat menjalankan kegiatan usaha yang sehat, kondusif, jujur, dan transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak hanya berfokus pada pencapaian kinerja finansial semata, melainkan juga menyadari pentingnya menjaga citra dan reputasi Perseroan agar kepercayaan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya tetap terjaga.

Amidst the challenges of the increasingly dynamic and competitive business development, the Company is demanded to carry out business activities that sound, conducive, honest and transparent in accordance with applicable regulations in Indonesia. For this reason, in carrying out business activities, the Company not only focus on merely achieving financial performance targets, but also realizing the importance of maintaining the image and reputation of the Company so that the trust of the shareholders and other stakeholders remain safeguarded.

Semangat dan keseriusan Perseroan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan bersih dari praktik *bad governance* dilakukan dengan membangun, menerapkan, dan mengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/"WBS") beserta kebijakannya. Melalui keberadaan WBS, Perseroan mendorong seluruh insan Jamkrida agar lebih berani dan memiliki kesadaran lebih tinggi untuk melaporkan segala bentuk dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok tertentu di lingkungan Perseroan.

The Company's enthusiasm and seriousness in realizing a healthy and clean work environment free from bad governance practices is carried out by building, implementing, and managing a Violation Reporting System (Whistleblowing System (WBS) and its policy. Through the WBS, the Company encourages all all Jamkrida personnels to be more audacious and have higher awareness to report all forms of deviation or violation that occur, both conducted by individuals or certain group within the Company.



Dengan adanya sistem WBS ini, pelapor (*whistleblower*) dapat merasa aman saat menyampaikan laporan pengaduan terkait informasi yang dimilikinya. Kontribusi dari *whistleblower* dalam melaporkan pelanggaran menjadi bagian penting dalam menjaga integritas Perseroan.

Jenis-jenis pengaduan yang dapat dilaporkan melalui WBS, antara lain tindakan *fraud* (kecurangan, penipuan atau penggelapan), kelalaian, kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal, pelanggaran peraturan dan Kode Etik serta perbuatan yang membahayakan keselamatan kerja atau membahayakan keamanan Perseroan serta merugikan Perseroan.

Pihak Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran

Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perseroan adalah Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), dengan komposisi sebagai berikut:

With this WBS, the whistleblower can feel safe at time of reporting the complaint related to the information the whistleblower has on hand. The contribution of the whistleblower in reporting an incident of violation becomes an important part in maintaining the Company's integrity.

Types of reporting that may be submitted through the WBS, among others, are acts of fraud (fraud, deception and embezzlement), negligence, violence against employees or management, extortion, drug use, harassment, criminal acts, violations of regulations and the Code of Conduct and acts that endanger work safety or endanger the security of the Company and are detrimental to the Company.

Management Party Of The Whistleblowing System

The party responsible for managing the Violation Reporting System in the Company s the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP), with the composition as follows:

Komposisi Tim FKAP PT Jamkrida Jakarta Composition of the FKAP Team of PT Jamkrida Jakarta	
Dewan Pengarah Streeing Board	Komisaris Utama PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) President Commissioner of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)
Manajemen Puncak Top Management	Direktur Utama PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) President Director of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) Direktur PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) Director of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)
Koordinator FKAP FKAP Coordinator	Kepala Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan (Perseroda) Head of the Risk Management & Compliance Division (Perseroda)
Sekretaris FKAP FKAP Secretary	Kepala Bagian Kepatuhan & Legal PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) Head of Compliance & Legal Section of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)
Anggota FKAP FKAP Members	Staf SPI dan Kepatuhan PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) Staff of SPI of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)) Staf SDM dan Umum PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) Staff of HR and General Affairs of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) Staf Kepatuhan dan Legal PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) Staf Keuangan & IT PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) Staf Sekretaris Perusahaan PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) Staff of Compliance and Legal of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) Staff of Finance & IT of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) Staff of Compliance and Legal of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)

Perlindungan Bagi Pelapor

Perseroan memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor yang telah melakukan upaya pelaporan atas segala bentuk tindakan pelanggaran. Pemberian perlindungan tersebut berupa:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor;
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan;
3. Jaminan atas perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman, ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor; serta

Protection Of Whistleblower

The Company provides protection guarantee for those who have efforts to report any form of violation. The protection provided is in the form as describe below:

1. Guarantee of confidentiality of the reporter's identity;
2. Guarantee of confidentiality of the content of the report submitted;
3. Guarantee of protection against possible threats intimidation, punishment, or other unpleasant actions from the reported party; and

4. Bagi pelapor internal, Perseroan memberikan jaminan perlindungan terkait tidak dikenai:
 - a. Pemecatan;
 - b. Penurunan jabatan atau pangkat;
 - c. Pelecehan atau diskriminasi dalam bentuk apapun; dan
 - d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

Media Penyampaian Laporan Pelanggaran

Seluruh pihak yang memiliki informasi terkait adanya tindakan dugaan pelanggaran, dapat melaporkannya melalui beberapa media berikut ini:

1. Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran dengan mengisi formulir elektronik (*e-Form*) yang tersedia di situs web resmi Perseroan. Formulir tersebut dapat diakses langsung melalui tautan (*link*) berikut:



2. Pelapor juga dapat menyampaikan laporan pelanggaran melalui surat elektronik (*e-mail*) dengan menuliskan subjek "WBS" yang ditujukan kepada Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dengan *e-mail address* sebagai berikut:



4. For internal reporters, the Company provides a guarantee of protection related to not being subject to the following:
 - a. Dismissal;
 - b. Demotion of position or rank;
 - c. Harassment or discrimination in any form, and
 - d. Detrimental notes in their personal data files (*Personal file record*).

Media For Submission Of Violation Reports

All parties with related information on the presence of suspected violation, may report through the following media:

1. The reporter may submit a report of violation by filling out an electronic form (*e-Form*) available on the Company's official website. The form can be accessed directly through the following link:



2. The reporter may also submit a report on violation through electronic mail (*e-mail*) by writing the subject as "WBS" address to Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) with *e-mail address* as follows:





3. Jika laporan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, maka pelapor dapat menyampaikan surat tersebut dalam amplop tertutup dengan memberi kode WBS pada bagian kanan atas amplop. Surat dapat ditujukan kepada Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dengan alamat sebagai berikut:

3. If the violation report is submitted in the form of a letter, the report may submit the letter in a sealed envelope by providing the WBS code on the upper right side of the envelope. The letter shall be addressed to the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) with the following address



Prosedur Penanganan Laporan Pelanggaran

Laporan pelanggaran yang telah masuk melalui beberapa media penyampaian laporan akan diterima oleh Tim WBS. Selanjutnya, laporan tersebut akan diverifikasi dan dikategorikan berdasarkan substansi pelanggaran dan pihak terlapornya. Setelah itu, laporan akan diproses sesuai dengan prosedur penanganan berikut ini:

1. Jika terlapor merupakan anggota Direksi, pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya akan dilakukan oleh Dewan Komisaris;
2. Jika terlapor merupakan anggota Dewan Komisaris maupun anggota Komite pendukung Dewan Komisaris, pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya akan dilakukan oleh Direksi, dengan mempertimbangkan keterlibatan Pemegang Saham jika diperlukan;
3. Setiap pelapor berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaporannya. Oleh karena itu, dalam laporannya, pelapor diharapkan memberikan informasi mengenai identitas dirinya dan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan perkembangan pelaporannya;
4. Komunikasi antara Perseroan dengan Pelapor akan dilakukan melalui Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang bertanggung jawab terhadap mekanisme dan prosedur WBS. Dalam komunikasi ini, Pelapor juga akan memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, termasuk apakah kasus tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak.

Procedures For Handling Violation Reports

Violation reports submitted through several reporting media will be received by the WBS Team. Moreover, the report will be verified and categorized based on the substance of the violation and the reported party. Subsequently, the report will be processed according to the following handling procedures:

1. If the reported party is a member of the Board of Directors, the management of the complaint and its follow-up will be carried out by the Board of Commissioners;
2. If the reported party is a member of the Board of Commissioners or a member of the Committee supporting the Board of Commissioners, the management of the complaint and its follow-up will be carried out by the Board of Directors, taking into account the involvement of Shareholders if necessary;
3. Every report has the right to obtain information on the development of the reporting. For this reason, in the report, the report is expected to provide information regarding his/her identity and the communication that can be used to convey the progress of his/her report;
4. Communication between the Company and the Reporter will be carried out through the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) which is responsible for the WBS mechanism and procedures. In this communication, the Reporter will also obtain information regarding the handling of the case he/she reported, including whether the case can be followed-up or not.

Mekanisme Pencatatan Pelaporan Pelanggaran

Pencatatan laporan pelanggaran dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Direksi. Mekanisme pencatatan pelaporan pelanggaran, adalah sebagai berikut:

1. Laporan pelanggaran yang diterima oleh Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dalam bentuk *e-Form*, *e-mail*, surat, atau media komunikasi lainnya dicatat sesuai dengan sistem administrasi yang berlaku;
2. Laporan pelanggaran yang disampaikan secara lisan/verbal oleh Pelapor harus diterima dan dicatat oleh Tim WBS beserta lampiran bukti-bukti terjadinya pelanggaran;
3. Laporan pelanggaran yang telah dicatat kemudian ditelaah untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut penanganan selanjutnya. Seluruh penelaahan laporan pelanggaran ini dilakukan oleh Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).

Proses penelaahan yang dilakukan oleh Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan inti permasalahan;
2. Meneliti kelengkapan bukti-bukti pendukung;
3. Melengkapi data/informasi yang diperlukan;
4. Melakukan analisis berdasarkan peraturan perundangundangan yang terkait;
5. Menetapkan hasil penelaahan dan penanganan selanjutnya.

Kategori Pelaporan

Setelah Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) melakukan pencatatan dan penelaahan laporan pelanggaran yang diterima, langkah selanjutnya adalah melakukan kategorisasi substansi laporan dan informasi identitas pelapor untuk menentukan langkah tindak lanjut berikutnya. Kebijakan internal Perseroan membuat kategori pelaporan WBS sebagai berikut:

1. Pelaporan pelanggaran dari Karyawan dan Pemangku Kepentingan dengan identitas Pelapor jelas dan substansi/materi laporan logis dan memadai harus segera dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasinya;
2. Pelaporan pelanggaran dari Karyawan dan Pemangku Kepentingan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun substansi/materi laporan logis dan memadai harus segera dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasinya;
3. Pelaporan pelanggaran dari Karyawan dan Pemangku Kepentingan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi laporan tidak memadai perlu dilakukan klarifikasi dan konfirmasi sebelum dilakukan pemeriksaan;
4. Pelaporan pelanggaran dari Karyawan dan Pemangku Kepentingan tetapi permasalahannya yang sama, sedang, atau telah dilakukan pemeriksaan, dijadikan tambahan informasi bagi proses pembuktian.

Mechanism Of Documenting The Violation Report

The documentation of the violation report is carried out by the officer appointed by the Board of Directors. Mechanism of documenting the violation reporting, is as follows:

1. Violation report received by the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) in the form of e-Form, e-mail, letter, or other communication media are recorded in accordance with applicable administrative system;
2. Violation report submitted verbally by the Reporter must be received and recorded by the WBS Team along with attachments of proofs of the violation;
3. Violation report recorded is then reviewed to identify the problem and formulate follow-up steps for further handling. All reviews of the violation report is conducted by the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP).

The review process conducted by the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) is as follows:

1. Formulate the core problem;
2. Examine the completeness of the supporting proofs/evidence;
3. Complete the required data/information;
4. Conduct analysis based on related laws and regulations;
5. Determine the results of the review and subsequent handling.

Categories Of Reporting

Upon completion of documenting and review of the received violation report by the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP), the following step is to conduct categorization of the substance of the report and information on the reporter's identity in order to determine the follow-up steps to take. The Company's internal policy determine the WBS reporting category as follows:

1. Violation reporting from Employees and Stakeholders with clear Reporter's identity and logical and adequate report substance/material must be immediately examined to prove the truth of the information;
2. Violation reporting from Employees and Stakeholders with unclear Reporter's identity, but logical and adequate report substance/material must be immediately examined to prove the truth of the information;
3. Violation reporting from Employees and Stakeholders with clear Reporter's identity, but inadequate report substance/material needs to be clarified and confirmed before proceeding with further examination;
4. Violation reporting from Employees and Stakeholders but it is on the same problem, in the process of, or has been examined, is used as additional information for the proof process.



Jumlah Laporan Pelanggaran Tahun 2024

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan melalui Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) tidak menerima laporan pengaduan yang masuk melalui semua media penyampaian laporan pelanggaran.

Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran

Pada tahun 2024, Perseroan tidak menerima laporan pelanggaran. Oleh karena itu, Perseroan tidak perlu melakukan tindak lanjut apa pun.

Number Of Violation (Whistleblowing) Reports In 2024

Until the end of the year 2024, the Company, through the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) did not receive any report of violation submitted through all of the violation reporting media.

Follow-Up On Violation Report

In 2024, the Company did not receive any report violation. For this reason, there is no need for the Company to conduct any follow-up.

Kebijakan Anti-Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Anti-Bribery Policy and Gratuity Control

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang harus diatasi bersama-sama. Oleh karena itu, Perseroan dengan tegas menunjukkan komitmennya untuk mendukung sepenuhnya upaya Pemerintah Indonesia dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sebagai sebuah BUMD yang menjunjung tinggi integritas, Perseroan menegaskan pentingnya kebijakan anti-korupsi dan pengendalian gratifikasi sebagai langkah fundamental dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Perseroan berupaya untuk terus menjalankan kegiatan usaha dengan caracara yang sah, etis, jujur, serta sejalan dengan etika bisnis. Pedoman Perilaku atau Kode Etik (*Code of Conduct*) menjadi landasan bagi organisasi untuk membentuk budaya kerja yang positif, selaras dengan prinsip-prinsip GCG dan norma-norma yang berlaku.

Langkah ini mencerminkan integritas Perseroan dalam menerapkan kebijakan anti-korupsi. Perseroan juga menghargai setiap kontribusi pihak yang turut serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindakan korupsi, sesuai dengan kebijakan Perseroan. Dengan penerapan kebijakan anti-korupsi, Perseroan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bermoral, transparan, dan terbebas dari praktik korupsi.

Penerapan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Perseroan patuh pada kebijakan pengendalian gratifikasi yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 1 tahun 2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi. Dalam peraturan tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Corruption is an extraordinary crime that must be confronted and defeated together. For this reason, the Company firmly discloses its commitment to fully support all efforts of the Government of Indonesia in eradicating Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). As a BUMD that holds high integrity, the Company affirms of the importance of the anti-corruption policy and gratuity control as a fundamental step in implementing GCG principles. The Company strives to continue to carry out business activities in a manner that is legal, ethical, honest, and in line with business ethics. The Code of Conduct becomes the foundation for the organization to form a positive work culture, in line with GCG principles and applicable norms.

This step reflects the Company's integrity in implementing anti-corruption policy. The Company also respects each contribution of participating parties that support efforts of prevention, eradication, or disclosure of corruptive acts, in accordance with the Company's policy. With the implementation of the anti-corruption policy, the Company takes active role in creating a moral and transparent business environment, free from practices of corruption.

Implementation Of Gratuity Control

The Company complies with the policy on gratuity control as mandated by Governor of DKI Jakarta Regulation No. 1 of year 2020 regarding Gratuity Control System. In this regulation, gratuity is defined as a gift in the broad sense including money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, accommodation facilities, tourist trips, free medical treatment and other facilities, whether received domestically or overseas, which are carried out using electronic means or without electronic means.

Penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi menjadi komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam mendukung kebijakan anti-korupsi dan peningkatan Implementasi GCG. Komitmen Perseroan dalam penerapan kebijakan Pengendalian Gratifikasi diwujudkan melalui implementasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) dalam sistem manajemen operasional Perseroan. Implementasi SMAP di Perseroan merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menjadi langkah konkret untuk menjamin integritas dan transparansi dalam seluruh aspek kegiatan bisnis, sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sebagai upaya untuk membentuk budaya kerja berintegritas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong implementasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah kerja sama antara KPK dan Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi dan memonitor implementasi SMAP di 14 BUMD DKI Jakarta, termasuk di antaranya adalah PT Jamkrida Jakarta.

Perseroan berharap bahwa dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) dalam seluruh kegiatan usahanya, dapat membangun reputasi dan kredibilitas sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berintegritas, adil, dan memiliki daya saing tinggi. Secara lebih luas, melalui implementasi SMAP di semua BUMD Pemprov DKI Jakarta, diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat korupsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.

Implementasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP)

Pada tahun 2023, Perseroan telah menerima Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP). ISO 37001 adalah standar Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) yang dikembangkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi yang diterbitkan pada tahun 2016. Tujuan pengembangan standar ini adalah untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan program anti-penyuapan yang mencegah, mendeteksi, dan menangani risiko penyuapan di Perseroan.

Standar ISO 37001:2016 merupakan sistem manajemen anti suap yang dirancang untuk membantu menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan kepatuhan program anti suap dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Standar ini membantu Perseroan mengendalikan praktik penyuapan dengan menyediakan sejumlah langkah penting, di antaranya penetapan kebijakan anti penyuapan.

Sejumlah manfaat penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Suap, antara lain:

1. Memperkuat sistem manajemen operasional;
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
3. Meningkatkan reputasi Perseroan;
4. Meningkatkan kredibilitas organisasi;
5. Menciptakan organisasi yang bertanggung jawab.

The implementation of gratuity control policy becomes the Company's commitment and strategic step in supporting anti-corruption policy and improvement of GCG Implementation. The Company's commitment in implementing the Anti-Bribery System (SMAP) in the Company's operational management system. Implementation of SMAP in the Company is an obligation that must be complied with by all stakeholders, as well as being a concrete step to ensure integrity and transparency in all aspects of business activities, in line with applicable regulatory provisions.

As an effort to establish a work culture of integrity, the Corruption Eradication Commission (KPK) encourages the implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) in Regional-Owned Enterprises (BUMD) of DKI Jakarta Province. One of the concrete steps undertaken is the cooperation between KPK and BUMD Development Agency (BP BUMD) of DKI Jakarta Province to evaluate and monitor the implementation of SMAP in 14 BUMDs in DKI Jakarta, including PT Jamkrida Jakarta.

The Company hopes that the implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) in all of its business activities, can establish the reputation and credibility as a BUMD with integrity, fairness, and high competitiveness. In broader term, through the implementation of SMAP in all BUMDs of DKI Jakarta, it is hoped that it can contribute to reducing the level of corruption in Indonesia, especially in DKI Jakarta.

Implementation Of Anti-Bribery Management System (SMAP)

In the year 2023 the Company obtained the ISO 37001:2016 ISO Certification of the Anti-Bribery Management System (SMAP). The ISO 37001 is a SMAP standard developed by the international organization for the standardization published in 2016. The purpose for this standard development is to establish, implement, maintain, and improve anti-bribery program in preventing, detecting, and handling bribery risks in the Company.

The ISO 37001:2016 is an anti-bribery management system designed to help establish, implement, maintain and improve compliance with anti-bribery program by utilizing the risk-based approach. This standard helps the Company to control acts of bribery by providing a number of important steps, among which is the establishment of anti-bribery policy.

Several benefits of implementing the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, among others are as follows:

1. Strengthen the operational management system;
2. Improve compliance with regulations;
3. Improve Company's reputation;
4. Improve the organization's credibility;
5. Create a responsible organization.



Melalui implementasi SMAP, Perseroan menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang terhadap segala bentuk praktik penyuapan yang dapat merugikan Perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya. Praktik bisnis yang beretika dan bersih di Perseroan dilaksanakan atas dasar kebijakan anti-penyuapan dengan cara:

1. Menerapkan Prinsip *Zero Tolerance* terhadap segala bentuk penyuapan di dalam segala aspek kegiatan bisnis Perseroan, termasuk juga dalam hubungan bisnis dengan rekan bisnis;
2. Selalu mematuhi ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku, serta melakukan evaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaannya;
3. Menyusun, menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang dapat mencapai Sasaran Anti Penyuapan;
4. Mendorong setiap insan Perseroan berpartisipasi dalam menyampaikan dengan itikad baik dan berlandaskan keyakinan yang wajar terhadap penyuapan dan/atau potensi penyuapan serta menjamin tidak ada pembalasan terhadap insan Perseroan melakukan hal tersebut;
5. Melakukan perbaikan dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk menjamin bahwa kebijakan masih relevan dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Perseroan;
6. Membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berjalan efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan;
7. Memastikan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran atas kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai ketentuan Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sosialisasi Anti-Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2024

Perseroan secara aktif melaksanakan sosialisasi Anti-Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh insan Perseroan dengan tujuan utama membangun lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi dan gratifikasi. Dalam kegiatan ini, seluruh insan Perseroan mendapatkan pembekalan mengenai kebijakan anti-korupsi dan upaya pemberantasannya. Selain itu, juga diberikan pemahaman mendalam terkait pengendalian gratifikasi dan cara menghindarinya. Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan individu, tetapi juga untuk memupuk budaya organisasi yang transparan, integritas, dan berkomitmen untuk mencegah segala bentuk perilaku yang merugikan Perseroan. Dengan melibatkan seluruh lapisan organisasi, Perseroan berharap sosialisasi ini dapat menghasilkan kesadaran kolektif yang kuat terhadap pentingnya menjaga integritas, menjauhi tindakan korupsi, dan melaksanakan upaya pengendalian gratifikasi dalam setiap aspek kegiatan bisnis.

Through the imlementation of SMAP, the Company affirms its commitment to not provide space for any form of bribery practices that could harm the Company and other related parties. Ethical and clean business practices in the Company are carried out based on the anti-bribery policy by means of the following:

1. Implement the Zero tolerance Principle agains all forms of bribery in all aspects of the Company's business activities, including business relations with busine partners;
2. Always comply with applicable anti-bribery provisions and/or laws and regulations, and conduct comliance assessment of their implementation;
3. Prepare, implement and fulfill the requirements of the Anti-Bribery Management System (SMAP) that can achieve the Anti-Bribery Targets;
4. Encourage every personnel of the Company to participate in conveying in good faith and based on reasonable belief regarding bribery and/or potential bribery and ensure that there is no retaliation against employees of the Company who do so;
5. Conduct continuous mprovement and assessment of the Anti-Bribery Management System (SMAP) to ensure that the policy is still relevant and in accordance with the objectives set by the Company;
6. Form the Anti-Bribery Complilance Function (FKAP) that holds the responsibility and authority to ensure the implementation of SMAP runs effectively to achieve the set targets;
7. Ensure that sanctions are imposed on a violation of the SMAP policy in accordance with the Company's provisions and/or applicable laws and regulations.

Socialization On Anti-Corruption And Gratuity Control In 2024

The Company actively conducts socialization of Anti-Corruption and Gratuity Control to all employees of the Company with the main objective to establish a working environment that is free of corruption and gratuity practices. In this activity, all Company personnels receive training on anti-corruption policies and efforts to eradicate them. In addition, in-depth understanding related to gratuity control and means to avoid them was also extended. This socialization is not only intended for the purpose to increae individual knowledge, but also to foster an organizational culture that is transparent, has integrity, and is committed to preventing all forms of behavior that detrimental to the Company. By engaging all levels of the organization, the Company hopes that this socialization can generate a collective strong awareness on the importance of maintaining integrity, avoid acts of corruption, and conduct efforts to control gratuity in every aspect of business activities.

Keterbukaan Informasi dan Akses Informasi Perusahaan

Disclosure And Access To Company Information

Perseroan mematuhi amanat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sebagai wujud dari kewajiban tersebut, Perseroan secara berkala mempublikasikan informasi terkait aktivitas dan kinerja keuangan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk transparansi yang diarahkan kepada masyarakat, memastikan bahwa informasi yang relevan dengan kegiatan Perseroan senantiasa dapat diakses dan dipahami oleh publik dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Perseroan untuk memenuhi standar transparansi yang ditetapkan oleh undang-undang, membangun kepercayaan masyarakat, dan menjaga prinsip keterbukaan informasi yang diamanatkan oleh regulasi yang berlaku.

Media Penyampaian Informasi

Sebagai upaya untuk menciptakan keterbukaan informasi yang menyeluruh, mendukung komunikasi yang efektif, dan membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan, Perseroan memanfaatkan berbagai media komunikasi, antara lain situs web, surat elektronik korporat, intranet, sosial media, dan media cetak sebagai saluran untuk menyampaikan informasi.

Situs Web

Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, dan investor, untuk mengakses informasi terkait Perseroan, diantaranya informasi mengenai kinerja keuangan Perseroan selama lima tahun terakhir, siaran pers, tanggung jawab sosial perusahaan, laporan tahunan, laporan keuangan, dan produk/jasa yang diberikan melalui situs Perseroan.

Situs web Perseroan dikelola oleh Tim Pengelola Situs Web Perseroan, yang memiliki tanggung jawab utama menjaga dan memastikan bahwa situs web Perseroan tetap memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi kepada pihak eksternal. Salah satu tugas yang sangat penting bagi tim ini adalah melakukan pembaruan konten secara berkala, sehingga informasi yang disajikan tetap relevan dan akurat. Untuk menjalankan fungsi-fungsinya ini, Tim Pengelola Situs web Perseroan beroperasi di bawah pengawasan langsung Sekretaris Perusahaan.

Seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses situs web resmi Perseroan pada tautan berikut ini:

Situs web resmi tersebut menyajikan berbagai informasi umum tentang Perseroan, yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Beranda
2. Produk:
 - a. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
 - b. Penjaminan Multiguna
 - c. Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa
 - d. Penjaminan Kredit Usaha
 - e. Penjaminan Kredit Mikro dan Kecil
 - f. Penjaminan Kredit Pemilikan Rumah

The Company complies with the mandate and provisions stipulated in Law of the Republic of Indonesia No 14 of year 2008 regarding the Disclosure of Public Information. As a form of this obligation, the Company regularly publish information related to financial activities and performance. This step is carried out as a form of transparency directed to the public, ensuring that information relevant to the Company's activities can always be accessed and understood by the public and other stakeholders. This effort is in line with the Company's commitment to meet transparency standards as set forth by the laws, establishing the trust of the public, and maintain the principle of information disclosure as mandated by applicable regulations.

Information Disclosure Media

As an effort to create a comprehensive information disclosure, support effective communication, and build strong relationships with stakeholders, the Company utilizes various media of communication, among others the website, corporate electronic mail, intranet, social media, and print media as channels to disclose information.

Website

The Company always provide convenience for stakeholders, the public, and investors, to access information related to the Company, among which information on the Company's financial performance in the last five years, press releases, corporate social responsibility, annual reports, financial statements and products/services provided through the Company website.

The Company website is managed by the Company Website Management Team, tasked with the main responsibility to maintain and ensure that the Company website remains in compliance with the provisions on disclosure of information to external parties. One of the most important duties of this team is to update the content regularly, so that information presented remain relevant and accurate. To perform these functions, the Company's Website Management Team operates under the direct supervision of the Corporate Secretary.

All stakeholders may access the Company's official website on the following link:

This official website presents various general information on the Company, divided into several sections, namely as follows:

1. Home
2. Products:
 - a. People's Business Credit Guarantee
 - b. Multipurpose Guarantee
 - c. Construction Credit Guarantee and Procurement of Goods/Services
 - d. Business Credit Guarantee
 - e. Micro and Small Credit Guarantee
 - f. Home Ownership Credit Guarantee



- g. *Surety Bond*
- h. *Custom Bond*
- i. Kontra Bank Garansi
- j. Anjak Piutang
- 3. Informasi:
 - a. Berita
 - b. Laporan Keuangan
 - c. Legalitas Perusahaan
 - d. Pemegang Saham
 - e. *Whistle Blowing System*
 - f. Karir
- 4. Kontak kami
- 5. PPID
- 6. Sosial Media:
 - a. LinkedIn
 - b. Instagram
 - c. X/Twitter
 - d. Facebook
- 7. Hubungi Kami:
 Alamat: Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lt. 14,
 Jl. Abdul Muis No. 66 Petojo Selatan. 10160
 Phone: (021) 21203204
 Email: mail@jamkrida-jakarta.co.id

Surat Elektronik

Perseroan mempermudah komunikasi antar-karyawan melalui jaringan intranet dengan memanfaatkan media surat elektronik korporat. Melalui langkah ini, antar-unit kerja di Perseroan dapat melakukan korespondensi suratmenyurat dengan lebih efisien, sekaligus bergerak menuju penggunaan kertas yang lebih minimal, mendukung konsep *paperless*. Inisiatif ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam meningkatkan efisiensi komunikasi internal sambil mengurangi dampak lingkungan melalui penggunaan teknologi modern.

- g. *Surety Bond*
- h. *Custom Bond*
- i. Counter Bank Guarantee
- j. Factoring
- 3. Information:
 - a. News
 - b. Financial Report
 - c. Company Legality
 - d. Shareholders
 - e. *Whistle Blowing System*
 - f. Career
- 4. Contact Us
- 5. PPID
- 6. Social Media :
 - a. Linked
 - b. Instagram
 - c. X/Twitter
 - d. Facebook
- 7. Contact Us
 Address : Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lt. 14,
 Jl. Abdul Muis No. 66 Petojo Selatan. 10160
 Phone: (021) 21203204
 Email: mail@jamkrida-jakarta.co.id

Electronic Mail

The Company provides convenience for inter-employee communication through the intranet network by utilizing the corporate electronic mail media. Through this step, inter-work units in the Company can be performed through more efficient correspondence, at the same time moving towards minimal use of paper, support the paperless concept. This initiative reflects the Company's commitment in improving efficiency in internal communication while reducing environmental impact through modern technology.

Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, media sosial juga berperan penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan akses informasi Perseroan. Melalui platform ini, Perseroan dapat secara langsung menyampaikan informasi terkini, berinteraksi dengan pemangku kepentingan, memperluas jangkauan investor, menciptakan pendekatan pemasaran yang lebih personal dan mempublikasikan pencapaian terbaru yang diraihinya.

Di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi sebagai sumber informasi bagi Perseroan. Media sosial dapat digunakan sebagai media yang memudahkan Perseroan untuk memperoleh informasi terkait isu-isu terkini dan mendapatkan gambaran atas reputasi Perseroan di kalangan masyarakat luas.

Hingga akhir 2024, Perseroan telah memiliki beberapa akun media sosial resmi, sebagai berikut:



Facebook
Jamkrida Jakarta



X
@JamkridaJakarta



Instagram
@jamkridajakarta



LinkedIn
Jamkrida Jakarta

Dengan kesadaran akan pentingnya keterbukaan dan akses informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, Perseroan berkomitmen untuk memastikan ketersediaan informasi yang senantiasa dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini menjadi bukti nyata dari upaya Perseroan untuk memenuhi kepatuhan terhadap regulasi melalui keterbukaan informasi, dengan harapan dapat mendukung peningkatan praktik-praktik GCG di PT Jamkrida Jakarta.

Social Media

Development in information technology continues to grow along with time, social media also plays an important role in increasing information disclosure and access to Company information. Through this platform, the Company can directly disclose up-to-date information, interact with stakeholders, expand investors' reach, create marketing approach that is more personal and publish new achievements obtained.

On the other hand, the social media can also become the source of information for the Company. Social media can be used by the Company as the media to easily access information of the latest or trending issues and can give an overview of the Company's reputation among the wider community.

Until the end of the year 2024, the Company has retained the following official social media accounts:

With the awareness of the importance of disclosure and access to information for the public at large and stakeholders, the Company is committed to ensure the availability of information is always easily accessible by all stakeholders. This step is real proof from the Company's effort to comply with regulations through the disclosure of information, with the hope that this supports the improvement of GCG practices at PT Jamkrida Jakarta.



06

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social
Responsibility



Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Policy	180
Komitmen Terhadap Pelaksanaan Program CSR Commitment To CSR Program Implementation	180
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup Corporate Social Responsibility Towards the Environment	181
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety and Health (OHS)	182
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Corporate Social Responsibility Towards Social and Community Development	185
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Mitra Kerja Corporate Social Responsibility Towards Partners	188
Kemitraan Partnership	189
Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2024 Liability Statement of the 2024 Annual Report	191

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility Policy

Perseroan mempraktikkan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan pengembangan yang bertanggung jawab sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan dan dibuat berlandaskan pada keseimbangan antara aspek-aspek *triple bottom line* (People, Planet, profit).

Perseroan juga berkomitmen untuk mempromosikan kesadaran lingkungan di dalam dan di luar organisasi Perseroan. Upaya Perseroan untuk menciptakan kesadaran lingkungan bagi pihak eksternal diimplementasikan melalui berbagai kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dilakukan Perseroan di sepanjang tahun 2024. Hal tersebut menjadi bentuk komitmen Perseroan untuk menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. Inisiatif strategis yang dilakukan Perseroan ini juga selaras dengan upaya Perseroan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sekaligus ditujukan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Pemerintah Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa setiap perusahaan sebagai subjek hukum memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, baik di dalam maupun di luar lingkup perusahaan.

The Company practices sustainable development through a responsible development approach in line with the Company's vision, mission, and values, established based on a balance among the triple bottom line aspects (People, Planet, Profit).

The Company is also committed to promoting awareness of the environment, inside and outside of the Company's organization. The Company's effort to create this environmental awareness for the external parties is implemented through various Corporate Social Responsibility (CSR) activities carried out by the Company throughout the year 2024. This became the Company's form of commitment to generate sustainable added value for the stakeholders. The strategic initiatives conducted by the Company are also in line with the Company's effort to apply sustainability principles and are altogether directed at supporting the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia.

This corresponds with the mandate from the Government of the Republic of Indonesia, contained in Law No. 40 of the year 2007 regarding Limited Liability Companies, and Government Regulation No. 47 of the year 2012 concerning the Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies, which state that each company, as a subject of the law, has the obligation to carry out social and environmental responsibility, both inside and outside of the company's scope.

Komitmen Terhadap Pelaksanaan Program CSR

Commitment To CSR Program Implementation

Perseroan memahami bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari pencapaian finansial, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat dan lingkungan. Bagi Perseroan, keberlanjutan bisnis adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari komitmen untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dengan tekad dan komitmen yang kuat, Perseroan memastikan bahwa setiap inisiatif dalam program CSR dilaksanakan dengan integritas, transparansi, dan berfokus pada menciptakan dampak positif yang nyata. Komitmen ini tercermin melalui alokasi sumber daya, waktu, dan energi yang berkelanjutan untuk mendukung berbagai inisiatif CSR, mulai dari program pendidikan hingga upaya pelestarian lingkungan.

Berlandaskan pada konsep *triple bottom line*, Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR setiap tahun dengan tujuan untuk mencapai keharmonisan dan keselarasan antara kepentingan bisnis dan memberikan manfaat berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan.

The Company understands that business success is not only measured by its financial achievement but also by the positive impact it has on the community and the environment. For the Company, business sustainability is inseparable from the commitment to contribute positively to the community and the preservation of the environment.

With strong motivation and commitment, the Company ensures that each initiative within the CSR program is carried out with integrity, transparency, and focus on creating a real positive impact. This commitment is reflected through the continuous allocation of resources, time, and energy to support various CSR initiatives, starting from educational programs to environmental preservation efforts.

With the underlying concept of the triple bottom line, the Company consistently conducts CSR activities every year with the objective to accomplish harmony and balance between business interests and providing continuous benefits to stakeholders.



Melalui program CSR ini, Perseroan berkomitmen untuk berkontribusi secara nyata dalam mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Kegiatan CSR tidak hanya dianggap sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai inisiatif sukarela untuk menciptakan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Komitmen Perseroan terhadap CSR diyakini dapat membangun reputasi dan citra positif Perseroan, memberikan dampak positif yang nyata terhadap masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan bisnisnya, Perseroan menjelma menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, menciptakan hubungan positif dengan pemangku kepentingan, dan memberikan nilai tambah dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan lingkungan.

Through such CSR programs, the Company is committed to making real contributions to support the creation of continuous development. CSR activities are not only compulsory but also voluntary initiatives to generate significant positive impact for the surrounding community and environment.

The Company's commitment to CSR is believed to be able to build the Company's positive reputation and image, providing a real positive impact on the community. By integrating the principles of sustainability into business activities, the Company becomes an agent of change that contributes to continuous development, creates positive relationships with stakeholders, and contributes added value to the various aspects of social and environmental life.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup

Corporate Social Responsibility Towards the Environment

Perseroan meyakini bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu faktor utama yang berperan besar dalam menunjang keberlangsungan usaha Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan harus memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Kebijakan dan tata kelola lingkungan mengacu pada berbagai standar praktik terbaik berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan senantiasa menerapkan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang berlaku, serta menerapkan praktik lingkungan terbaik. Pada operasional bisnisnya dihindari praktik usaha yang mencemari lingkungan, dan mengganggu keberadaan masyarakat dikarenakan lingkungan sekitarnya tercemar. Pengelolaan dampak lingkungan hidup dilakukan terpadu, mulai dari pencegahan, penanganan, pengendalian, pemenuhan, hingga pelestarian. Perseroan meyakini dari proses bisnis yang seimbang dengan prinsip berkelanjutan akan menjadikan Perseroan dapat mencapai pertumbuhan dengan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik di masa mendatang.

Lebih lanjut, Perseroan juga senantiasa meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat sekitar. Melalui keterlibatannya dalam edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan, menunjukkan bahwa Perseroan memiliki kontribusi dalam menciptakan budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan.

The Company believes that the environment is one of the main factors that plays a big role in supporting the continuity of the Company's business. For this reason, the Company must ensure that its business activities do not negatively impact the environment. Policies and management of the environment refer to various best standard practices based on applicable laws and regulations.

The Company continuously applies compliance to applicable environmental standards as well as best environmental practices. In business operations, business practices that pollute the environment are avoided as they disrupt community life as the environment is polluted. The management of environmental impact is carried out integrated, starting from prevention, management, control, fulfillment, to preservation. The Company believes that a continuous balanced business process can make the company accomplish growth with better quality of the environment in the future.

Furthermore, the Company also improves the awareness of the environment among employees, business partners, and the surrounding community. Through engagement in education and campaigns on environmental awareness, this shows that the Company contributes to creating a culture of sustainable environmental care.

Kegiatan CSR Lingkungan Hidup tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tetap konsisten dalam melaksanakan sejumlah inisiatif untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, di antaranya adalah:

1. Pemakaian Material Ramah Lingkungan

Perseroan terus berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dengan memaksimalkan penggunaan material ramah lingkungan. Langkah-langkah ini melibatkan praktik seperti optimalisasi digitalisasi dokumen dan pemanfaatan kertas bekas untuk mencetak dokumen internal.

2. Penghematan Energi

Upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup terus dilakukan dengan menerapkan kebijakan penghematan energi. Perseroan aktif mengurangi penggunaan air dan plastik, memasang lampu LED, menggunakan perangkat elektronik berteknologi *inverter*, serta menerapkan kebijakan mematikan perangkat elektronik atau lampu yang tidak digunakan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi konsumsi energi dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih berkelanjutan.

Environmental CSR Activities in 2024

Throughout the year 2024, the Company remained consistent in conducting a number of initiatives to maintain the preservation of the environment, including the following:

1. Use of Environmentally Friendly Materials

The Company continues to be committed to reducing environmental impact by maximizing the use of environmentally friendly materials. These steps involve such practices as the optimization of document digitalization and the utilization of waste paper to print internal documents.

2. Energy Savings

Continuous efforts to maintain environmental preservation by applying energy-saving policies. The Company actively reduces the use of water and plastic, the placement of LED lights, the use of electronic equipment with inverter technology, and the application of the policy to turn off electronic equipment or lighting not in use. Such steps are expected to generate a positive impact in reducing energy consumption and creating a more sustainable working environment.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety and Health (OHS)

Praktik Ketenagakerjaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di bidang ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja (K3) mencerminkan komitmen Perseroan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan inklusif. Perseroan senantiasa mengutamakan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan karyawan melalui penerapan praktik ketenagakerjaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup.

Perseroan juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan dengan menerapkan kebijakan dan program yang mendukung produktivitas serta kepuasan kerja. Selain itu, Perseroan berkomitmen untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan seluruh karyawan, berlandaskan prinsip etika, kepatuhan hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak karyawan. Dengan pendekatan ini, Perseroan berupaya memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan karyawan secara berkelanjutan.

Perseroan menilai bahwa kelancaran kegiatan operasional bisnis dan tingkat profitabilitas yang tinggi hanya dapat terwujud apabila tercipta lingkungan kerja yang sehat dan saling bersinergi. Oleh karena itu, Perseroan selalu menerapkan praktik ketenagakerjaan

Employment Practices

Corporate Social Responsibility in the fields of employment and occupational health and safety (OHS) reflects the Company's commitment to creating a safe, healthy, and inclusive working environment. The Company always prioritizes the welfare, health, and safety of the employees through the implementation of employment practices with an orientation on improving life quality.

The Company also emphasizes on the importance of balance between work and personal life of employees by applying policies and programs that support productivity as well as work satisfaction. In addition, the Company is committed to creating harmonious industrial relations with all employees, based on the principles of ethics, regulatory compliance, and respect for the rights of the employees. With this approach, the Company strives to make a real contribution to improving the life quality and welfare of employees on a continuous basis.

The Company assesses that the smooth operation of business activities and the high level of profitability are only achievable if a healthy and mutually synergizing working environment is established. For this reason, the Company always applies



yang memperhatikan aspek fisik, dan aspek psikologis karyawan. Dengan demikian Perseroan berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan kinerja dan kesejahteraan seluruh tenaga kerja.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perseroan menyadari bahwa aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3) memiliki peran krusial dalam mendukung produktivitas karyawan. K3 dipandang sebagai elemen strategis untuk memastikan kelangsungan bisnis, sehingga menjadi salah satu prioritas utama dalam setiap kegiatan operasional.

Penerapan praktik K3 yang efektif tidak hanya membangun budaya kerja yang peduli terhadap kesehatan dan keselamatan, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas, kepuasan karyawan, dan pertumbuhan berkelanjutan Perseroan.

Pada tahun 2024, Perseroan memperkuat komitmennya dengan memfasilitasi karyawan dalam berbagai program pelatihan dan sertifikasi, termasuk pembinaan serta pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kegiatan CSR Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tahun 2024

1. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Perseroan berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memberikan kesempatan kerja yang adil bagi semua karyawan. Perseroan membuka peluang pekerjaan tanpa memandang perbedaan gender, agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, atau kondisi fisik lainnya. Penerapan prinsip non-diskriminasi menjadi dasar utama dalam interaksi dengan karyawan, yang pada akhirnya dapat membentuk hubungan industrial yang harmonis di lingkungan Perseroan.

2. Sarana dan Keselamatan Kerja

Perseroan berkomitmen menjaga keselamatan kerja seluruh karyawan dengan menyediakan sarana keselamatan kerja standar. Fasilitas ini mencakup ruang P3K dan perlengkapannya, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), *hydrant*, *smoke detector*, *sprinkler*, alarm darurat, dan diagram jalur evakuasi. Langkah konkret ini bertujuan memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan siap menghadapi keadaan darurat, mendukung kesejahteraan dan keamanan karyawan.

3. Tingkat Perputaran (*Turnover*) Karyawan

Perseroan memahami bahwa perputaran karyawan (*turnover*) sering menjadi isu sentral dalam manajemen sumber daya manusia di berbagai industri. Untuk itu, Perseroan terus berupaya mengendalikan Tingkat *turnover* karyawan setiap tahunnya, menjaga agar kondisi tersebut tidak memberikan risiko pada aktivitas bisnis. Pada tahun 2024, Perseroan mencatat terdapat 4 karyawan yang berhenti bekerja, baik karena pensiun dini maupun mengundurkan diri. Tingkat *turnover* tersebut relatif sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan kestabilan dan konsistensi tenaga kerja dalam mendukung keberlanjutan Perseroan.

employment practices that pay attention to the physical and psychological aspects of the employees. This way, the Company hopes to be able to create a working environment that supports performance growth and welfare of the entire workforce.

Occupational Health and Safety

The Company realizes that the occupational health and safety (OHS) aspect plays a crucial role in supporting employees' productivity. OHS is regarded as a strategic element to ensure business continuity that it becomes one of the main priorities in each operational activity.

Implementation of effective OHS practices not only builds a work culture that cares for health and safety, but also brings about a significant positive impact on increasing productivity, employee satisfaction, and sustainable growth of the Company.

In 2024, the Company strengthened its commitment by facilitating employees with various training programs and certifications, including coaching and training to obtain certification as an Occupational Health and Safety (OHS) Expert.

CSR Activities on Employment, Occupational Health and Safety (OHS) in 2024

1. Equality in Gender and Work Opportunity

The Company is committed to manifesting gender equality and providing fairness in work opportunities for all employees. The Company opens employment opportunities without regard to differences in gender, religion, ethnicity, race, social status, skin color, or other physical conditions. Application of the non-discrimination principle becomes the main foundation in employee interaction, which eventually forms a harmonious industrial relationship within the Company.

2. Work Facilities and Safety

The Company is committed to maintaining the work safety of all employees by providing standard work safety facilities. Such facilities include a first aid room and equipment, a light fire extinguisher (APAR), a hydrant, a smoke detector, a sprinkler, an emergency alarm, and an evacuation route diagram. This concrete step aims to ensure that the work environment is safe and ready to handle emergencies, supporting employees' well-being and safety.

3. Employee Turnover Rate

The Company understands that employee turnover often becomes a central issue in human resources management in various industries. For this purpose, the Company continuously strives to control the level of employee turnover every year, and maintain it so that such a condition does not pose risks to business activities. In 2024, the Company recorded 4 employees who stopped working, due to either early retirement or resignation. This level of turnover is relatively very low. And this indicates stability and consistency in the Company's manpower in support of sustainability.

Tingkat Turnover Karyawan tahun 2023 dan 2024

Employee Turnover Rate in 2023 and 2024

Deskripsi Description	Jumlah Karyawan (Orang) Number of Employee (Person)	
	2024	2023
Pensiun dini dan mengundurkan diri Early retirement and resignation	4	3
Pensiun Retirement	-	-
Meninggal dunia Passed away	-	-

4. Program Pendidikan dan Pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya Perseroan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan dalam aspek-aspek tersebut. Melalui program ini, karyawan diberikan pengetahuan tentang kebijakan ketenagakerjaan, praktik K3 yang aman, serta tindakan pencegahan untuk meminimalkan risiko cedera dan penyakit terkait pekerjaan. Selain itu, program ini juga dapat mencakup pelatihan dalam penanganan situasi darurat, penggunaan peralatan keselamatan, dan menjaga kesehatan di lingkungan kerja.

5. Remunerasi Karyawan

Remunerasi karyawan mencakup kebijakan dan praktik terkait dengan kompensasi dan penghargaan sebagai imbal jasa atas kontribusi dan kinerja. Proses perencanaan dan pengelolaan remunerasi bertujuan memastikan kesesuaian dengan tujuan Perseroan, meningkatkan motivasi, menjaga daya tarik, serta retensi karyawan berkualitas. Dengan prosedur penetapan remunerasi yang baik, diharapkan dapat menciptakan iklim kerja sehat, dan mendukung tujuan strategis Perseroan.

Dalam praktiknya, prosedur penetapan remunerasi karyawan di Perseroan mencakup beberapa elemen, antara lain gaji pokok, tunjangan kesejahteraan, bonus kinerja, serta manfaat kesehatan dan pensiun. Perseroan secara rutin mengevaluasi dan menyesuaikan prosedur penetapan remunerasi agar tetap relevan, dengan mempertimbangkan kebijakan internal, kondisi industri sejenis, dan kondisi pasar tenaga kerja.

Perseroan menetapkan standar paket kompensasi untuk karyawan sesuai dengan kinerja dan kontribusi masing-masing. Penetapan remunerasi di Perseroan selalu mematuhi ketentuan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan finansial Perseroan.

4. Education and Training Program

Education and training programs related to Employment, Occupational Health, and Safety (OHS) are part of the Company's efforts to improve the understanding and capabilities of employees in these aspects. Through this program, employees are provided with knowledge of policies regarding employment, safe OHS practices, as well as preventive actions to minimize risks in accidents and illness related to work. In addition, this program also includes training in handling emergencies, using safety equipment, and maintaining good health within the working environment.

5. Employee Remuneration

Employee remuneration encompasses policies and practices related to compensation and rewards as compensation for service contribution and performance. Remuneration planning and management processes are intended to ensure conformity with the Company's objectives, improve motivation, maintain attractiveness, as well as retain quality employees. With proper establishment of remuneration procedure, it is hopeful that the Company can create a healthy working climate and support its strategic goals.

In practice, the procedure to determine employees' remuneration in the Company includes several elements, among others, basic salary, welfare allowance, as well as medical and pension allowances. The Company routinely evaluates and adjusts the procedure for determining remuneration so that it remains relevant, by taking into account internal policies, conditions of similar industries, and conditions of the workforce market.

The Company determines the standard of compensation packages for employees following the performance and contribution of each respective employee. Determining remuneration in the Company always complies with applicable laws and regulations, by paying attention to the financial capability of the Company.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility Towards Social and Community Development

Perseroan berkomitmen untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sosial. Program CSR difokuskan pada berbagai inisiatif, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta aspek lain yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas hidup dan perkembangan sosial di lingkungan sekitar Perseroan. Dengan pendekatan ini, CSR tidak hanya menjadi tanggung jawab etis, tetapi juga menjadi sarana bagi Perseroan untuk membangun hubungan yang positif dengan komunitas sekitarnya.

The Company is committed to taking an active role in improving the welfare of the community and contributing positively towards social development. The CSR programs are focused on various initiatives, such as the eradication of poverty, community economic empowerment, improvement of access to education and health, as well as other aspects that directly support life quality improvement and social development in the surrounding areas of the Company. With this approach, CSR is not only a responsibility of ethics but also a means for the Company to build positive relationships with the surrounding community.

Perseroan menyadari bahwa keterlibatan dan peran aktif masyarakat merupakan elemen penting dalam mendukung keberlanjutan bisnis di masa depan. Oleh karena itu, program-program yang dijalankan bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Perseroan dan masyarakat. Seluruh inisiatif ini dirancang untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan bersama secara holistik.

The Company realizes that the involvement and active role of the community are important elements in supporting business sustainability in times ahead. For this reason, the programs carried out are aimed at creating harmonious and mutually beneficial relationships between the Company and the community. All initiatives are designed to establish continuous collaboration and support holistic shared development.

Kegiatan Sosial Kemasyarakatan tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah menjalankan serangkaian kegiatan sosial sebagai bentuk komitmen terhadap tanggung jawab sosialnya. Kegiatan-kegiatan ini mencerminkan upaya Perseroan untuk berkontribusi positif dan memberikan dampak yang signifikan bagi Masyarakat sekitar.

Community Social Activities in 2024

During the year 2024, the Company conducted a series of social activities as a form of commitment towards its social responsibility. These activities reflect the Company's efforts to contribute positively and provide a significant impact on the surrounding community.

Berikut adalah beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Perseroan sepanjang tahun 2024:

Following is a list of activities implemented by the Company throughout the year 2024:

No	Acara Event/Activity	Nominal
1	Kegiatan Sembako Murah Pemprov DKI Jakarta 2024 melalui PT Food Station Tjipinang Jaya. Inexpensive Basic Food Supply Packages organized by the Provincial Government of DKI Jakarta in 2024 through PT Food Station Tjipinang Jaya.	35.000.000
2	Partisipasi snack takjil Masjid Al – Badr Providing snacks for breaking fast at Masjid Al-Badr	20.772.000
3	Santunan Pondok Yatim & Dhuafa Jatibaru dan Asuhan Muhammadiyah dalam rangka Acara Buka Puasa Berasama Karyawan PT Jamkrida Jakarta. Donations to the Jatibaru Orphanage and the Muhammadiyah Orphanage in the context of Breaking Fast Event with PT Jamkrida Jakarta Employees.	15.000.000
4	Partisipasi buka puasa bersama dan santunan anak yatim piatu dan fakir miskin di Jakarta Utara Joint Breaking Fast and Donations for orphans and underprivileged residents of North Jakarta	6.000.000
5	Zakat Perusahaan Melalui Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta Company Zakat Through Baznas (Bazis) of DKI Jakarta Province	25.000.000
6	Kolaborasi dengan BPBUMD 1.000 Paket buka puasa di Masjid Istiqal 1,000 breaking fast packages at Masjid Istiqlal in collaboration with BPBUMD	45.000.000
7	Partisipasi Pembangunan Masjid Ar-Raudhah Participation in the development of Masjid Ar-Raudhah	200.000.000
8	Partisipasi bantuan dana Masjid Riyadhus Sholihin Participation in providing financial assistance to Masjid Riyadhus Sholihin	2.000.000
9	Literasi Keuangan dengan UMKM DKI Jakarta Financial literacy with MSME of DKI Jakarta	7.000.000
10	Bantuan Kebakaran di Kelurahan Manggarai Donation for fire victims at Manggarai Sub-District	21.519.500

No	Acara Event/Activity	Nominal
11	Santunan Guru Ngaji Donations for Quran teachers	3.000.000
12	Santunan Anak Yatim dari Yayasan Masjid Al Ihsan Taman Kebon Sirih - Kampung Bali dalam acara "Bersyukur Bersama PT Jamkrida Jakarta" Donations to Orphanage from Al Ihsan Mosque Foundation of Taman Kebon Sirih – Kampung Bali during the event "Grateful Together with PT Jamkrida Jakarta".	5.000.000
13	Pemberian Bantuan Modal Kerja kepada penyandang disabilitas (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia dan Persatuan Tunanetra Indonesia). Provision of Working Capital Assistance to members with disabilities (Indonesian Association of people with Disabilities and Indonesian Association of the Blind).	10.000.000
Total		395.291.500



2 April 2024

2 April 2024

Menyediakan Paket 1000 untuk buka puasa di Masjid Istiqlal.
Providing a Package of 1000 for iftar at the Istiqlal Mosque.



3 April 2024

3 April 2024

Memberikan Snack Takjil di Masjid Al-Badr.
Providing snacks for breaking fast at Masjid Al-Badr.



4 April 2024

4 April 2024

Santunan ke Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa.
Donation to the Tunas Bangsa Toddler Care Social Home.



4 April 2024

4 April 2024

Santunan ke Pondok Yatim dan Dhuafa di Kecamatan Jatibaru.
Donation to Orphanages and Dhuafa in Jatibaru District.



27 Agustus 2024

27 August 2024

Bantuan sosial bencana kebakaran didekat Stasiun Manggarai.
Social assistance for fire disasters near Manggarai Station.



6 September 2024

6 September 2024

Peresmian Masjid Jami Ar Raudhah.
Inauguration of Jami Ar Raudhah Mosque.



6 Desember 2024

6 December 2024

Bantuan paket sembako dalam acara Jum'at Berkah untuk memperingati HUT DWP.
Food package assistance in the Friday Blessing event for commemorating the DWP Anniversary.



17 Desember 2024

17 December 2024

Santunan Anak Yatim - Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai 16.
Orphan Donation - Abdul Muis Technical Office Building, 16th Floor.



30 Desember 2024

30 December 2024

Bantuan Modal Kerja Untuk Penyandang Disabilitas.
Working Capital Assistance for Persons with Disabilities.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Mitra Kerja

Corporate Social Responsibility Towards Partners

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Perseroan mencakup serangkaian komitmen dan praktik yang bertujuan menciptakan hubungan yang adil, berkelanjutan, dan saling menguntungkan dengan mitra kerja. Dalam menjalankan CSR di bidang kemitraan, Perseroan senantiasa mengutamakan prinsip keadilan, etika, dan keberlanjutan, sekaligus memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

Aspek CSR ini meliputi pemenuhan hak-hak pekerja, pembinaan dan pengembangan kapasitas mitra kerja, serta kontribusi terhadap kesejahteraan komunitas lokal di sekitar mitra kerja. Dengan menerapkan CSR yang terintegrasi di bidang kemitraan, Perseroan memastikan prinsip keberlanjutan dan penciptaan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dapat diwujudkan secara optimal.

Perseroan meyakini bahwa peran serta para mitra kerja juga memiliki peran krusial dalam mencapai kinerja dan hasil usaha yang optimal. Sebagai bentuk komitmen, Perseroan berdedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mitra kerja, berupaya selalu memberikan dukungan, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan loyalitas yang berkelanjutan.

Kegiatan CSR terhadap Produk dan Pelanggan tahun 2024

1. Informasi Produk dan Kegiatan Perseroan

Untuk memperoleh informasi detail dan akurat mengenai produk dan jasa layanan Perseroan, serta memahami kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan, publik dapat mengakses akun media sosial resmi Perseroan di berbagai platform, yaitu:



Facebook
Jamkrida Jakarta



X
@JamkridaJakarta



Instagram
@jamkridajakarta



LinkedIn
Jamkrida Jakarta

2. Survei Kepuasan Pelanggan

Tahun 2024 menjadi momentum bagi Perseroan untuk merespons secara proaktif kebutuhan dan harapan pelanggan. Dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan jasa layanan yang ditawarkan, Perseroan telah melaksanakan survei kepuasan pelanggan. Survei ini bukan hanya sebagai alat evaluasi, melainkan sebagai langkah progresif dalam mendengarkan dan merespons secara langsung kepuasan serta masukan pelanggan. Hasil dari survei tersebut tidak hanya menjadi panduan untuk perbaikan mutu, tetapi juga mencerminkan komitmen Perseroan dalam membangun hubungan yang lebih erat dan berkelanjutan dengan pelanggan, sejalan dengan semangat terus berkembang dan menyempurnakan pengalaman mereka.

The Corporate Social Responsibility (CSR) of the Company encompasses a series of commitments and practices that aim to create a fair, continuous, and mutually beneficial relationship with partners. In carrying out its CSR in a partnership context, the Company always prioritizes the principles of fairness, ethics, and sustainability that all together provide a positive impact for all parties involved.

This aspect of CSR includes the fulfillment of the rights of workers, coaching, and the development of the capacity of partners. By implementing CSR integrated within partnerships, the Company ensures the principle of sustainability and the creation of added value for all stakeholders can be actualized optimally.

The Company believes that the participation of work partners also plays a crucial role in achieving optimal performance and business outcomes. As a form of commitment, the Company is dedicated to contributing the best services to partners and strives to always provide support, with the hope of enhancing the level of continuous trust and loyalty.

CSR Activities for Products and Customers in 2024

1. Information on Company Products and Activities

To obtain detailed and accurate information on the products and services of the Company, as well as to be informed of activities carried out by the Company, the public can access the Company's official social media in various platforms, namely as follows:

2. Customer Satisfaction Survey

The year 2024 became a momentum for the Company to respond proactively to the needs and hopes of the customers. In the context of increasing the quality of products and services offered, the Company conducted a customer satisfaction survey. This survey not only serves as an evaluation tool but also as a progressive step in listening and responding directly to the satisfaction and feedback of customers. The results of the survey not only serve as guidelines for improvement but also reflect the Company's commitment to building closer and continuing relationships with customers, in line with the spirit to continue developing and perfecting their experiences.



3. Sarana atau Media Pengaduan

Perseroan menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan yang transparan dan responsif dengan menyediakan sarana atau media pengaduan bagi konsumen dan masyarakat. Hal ini merupakan bentuk upaya Perseroan untuk mendengarkan dan merespons dengan cepat segala pertanyaan, permintaan informasi, atau keluhan terkait produk dan jasa layanan. Melalui kanal pengaduan formal ini, Perseroan memberikan jaminan bahwa setiap masukan memiliki jalur yang terbuka, memberikan konsumen dan Masyarakat kepercayaan bahwa perspektif dan kebutuhannya dihargai dan dipedulikan.

3. Means or Media for Complaints

The Company portrays its commitment to transparent and responsive services by providing the means or media for complaints to consumers and the public. This is a form of the Company's efforts to listen and quickly respond to all questions, requests for information, or complaints related to products and services. Through this formal channel for complaints, the Company provides a guarantee that every feedback has an open path, giving consumers and the public the trust that their perspectives and needs are respected and cared for.

Kemitraan

Partnership

Dalam konteks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Perseroan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai mitra kerja. Kemitraan ini tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, melainkan juga mencakup kontribusi terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Mitra kerja Perseroan terlibat dalam beragam kegiatan CSR, termasuk program pengembangan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai CSR ke dalam kemitraan bisnisnya, Perseroan tidak hanya membangun hubungan yang kuat dengan mitra kerja, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan komunitas di sekitarnya.

In the context of Corporate Social Responsibility (CSR), the Company maintains strategic partnerships with various partners. This partnership not only focuses on the business aspect but also includes contributions to the sustainability and welfare of society. The Company's partners are involved in various CSR activities, including social, educational, and welfare development programs. By integrating CSR values into business partnerships, the Company not only builds strong relationships with partners but also generates a positive impact on the surrounding environment and community.

Berikut adalah daftar mitra kerja Jamkrida Jakarta dari berbagai bidang kegiatan Perseroan:

Following is the list of partners of Jamkrida Jakarta from various fields of the Company's activity:

Mitra Kerja Jamkrida Jakarta Partner of Jamkrida Jakarta	
Bank Umum Commercial Bank	• Bank DKI • Bank Rakyat Indonesia • Bank Mandiri • Bank Raya Indonesia • Bank Syariah Indonesia
Lembaga Keuangan Lain Other Financial Institutions	• LPDB KUMKM • PT Permodalan Nasional Madani (PNM) • Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
Multifinance Multifinance	• PT Mandiri Tunas Finance • PT Radana Bhaskara Finance • PT MNC Finance • PT Bahana Artha Ventura Finance
Koperasi Cooperatives	• Koperasi Himpunan Karyawan Pariwisata Trisakti (HIKAPTRI) • Koperasi Pertamina Retail • Koperasi Simpan Pinjam Maju Wijaya • Koperasi Pegawai Pos Indonesia Jakarta Pusat • Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nusantara • Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia

Mitra Kerja Jamkrida Jakarta
Partner of Jamkrida Jakarta

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta Regional Owned Enterprises (BUMD) of DKI Jakarta Province	• PD PAL Jaya • PD PAM Jaya • Perumda Pembangunan Sarana Jaya • PT Taman Impian Jaya Ancol • PT Jakarta Tourisindo • PT Jakarta Propertindo • PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta Regional Work Units (SKPD) of DKI Jakarta Province	• Dinas Kesehatan • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Badan Pengelola Aset Daerah • Dinas Koperasi dan KUMKM • Badan Pajak dan Restribusi Daerah DKI Jakarta • Badan Pengembangan SDM • Dinas Penanaman Modal dan PTSP • Dinas Sosial • Dinas Perhubungan • Panti Sosial seluruh DKI Jakarta • Dinas Kehutanan • Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta • Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional • Unit Pengelola Kawasan Margasatwa Ragunan • Pusat Pelatihan Kerja Pemerintah DKI Jakarta • Dinas Bina Marga • Dinas Lingkungan Hidup
Penjaminan Bersama Co-Guarantee	• Jamkrida Jawa Barat • PT Sinarmas Penjaminan Kredit • PT Jamkrindo • PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (JPAS) • PT Jamkrindo Syariah
Penjaminan Ulang Re-Guarantee	• PT Jakarta Raya Reinsurance Broker • Best One Asia Reinsurance Brokers • PT Esa Bina Sejati (FLRe)
Broker	• PT Mitra Proteksi Madani • PT Bringin Sejahtera Makmur Pialang Asuransi
Investasi dan Keuangan Investment and Finance	• Sinarmas Asset Management • Sucorinvest Asset Management • Mandiri Sekuritas • BNI Sekuritas • PNM Investment Management • BNI Asset Management • PT BRI Management • PT Insight Investments • PT Mandiri Taspen
Kesehatan dan Lainnya Health and Others	• Asuransi Mandiri Inhealth • BRI Life • BNI Multifinance • PT Surya Sudesco (Tunas Rent)
Instansi Pemerintah Government Agencies	• Bea & Cukai Tanjung Priok • Bea & Cukai Bekasi • Bea & Cukai Cikarang • Bea & Cukai Purwakarta • Bea & Cukai Bogor • Bea & Cukai Bandung • Bea & Cukai Tasikmalaya • Bea & Cukai Garut • Bea & Cukai Cirebon • Bea & Cukai Tegal • Bea & Cukai Surakarta • Bea & Cukai Yogyakarta • Bea & Cukai Semarang



Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2024

Liability Statement of the 2024 Annual Report

Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi dalam laporan tahunan PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta tahun 2024 ini telah dimuat secara lengkap dan kami akan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perseroan ini.

The Board of Directors declare that all information in the 2024 annual report of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta is presented in its entirety and we are taking responsibility for the accuracy of the contents of this Company's annual report.

Jakarta, 24 Februari 2025
Jakarta, February 24, 2025

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Agus Supriadi
Direktur Utama
President Director

Jimmi Setya Budi
Direktur Operasional
Operational Director

07

Laporan Keuangan

Financial
Statements



PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)

**Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
Dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen**

***Financial Statements
As of December 31, 2024
And For the Year
Then Ended
With Independent Auditors' Report***

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Daftar Isi/ Table of Contents

Halaman/ Page

Surat Pernyataan Direksi

Directors' Statement Letter

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Laporan Posisi Keuangan	1 - 2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya.....	3 - 4	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas.....	5	<i>Statement of Changes In Equity</i>
Laporan Arus Kas.....	6	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan.....	7 – 66	<i>Notes to the Financial Statements</i>

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama :	Agus Supriadi	Name :	
Alamat Kantor :	Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lt. 14, Jl Abdul Muis No. 66, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta.	Office Address :	
Jabatan :	Direktur Utama	Position :	
Nama :	Jimmi Setya Budi	Name :	
Alamat Kantor :	Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lt. 14, Jl Abdul Muis No. 66, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta.	Office Address :	
Jabatan :	Direktur Operasional	Position :	

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|---|--|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Jamkrida Jakarta (Perseroda); | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda); |
| 2. Laporan keuangan PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The financial statements of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) have been prepared and presented in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information in the financial statements of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) have been disclosed in a complete and truthful manner; |
| b. Laporan keuangan PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The financial statements of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact; |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Jamkrida Jakarta (Perseroda). | 4. We are responsible for PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/ For and on behalf of the Board of Directors:

(Agus Supriadi)
(Direktur Utama/ President Director)

(Jimmi Setya Budi)
(Direktur Operasional/ Director of Operation)

30 Januari 2025 / January 30, 2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Laporan No. 00037/2.0459/AU.1/09/1493-1/1/I/2025

Report No. 00037/2.0459/AU.1/09/1493-1/1/I/2025

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris,
dan Direksi
PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)**

**The Shareholders, Board of Commissioners
and Directors'
PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) ("the Company"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements (continued)

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentation, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

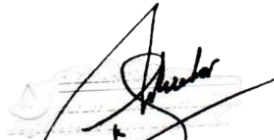
Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

**Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountant
Heliantono & Rekan**



Rahmat Sukendar, SE., Ak., CA., CPA., CFI., CBV.

Izin Akuntan Publik No. AP. 1493/ Public Accountant License Number. AP. 1493

30 Januari 2025 / January 30, 2025



00037

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

ASET	Catatan/ Notes	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan setara kas	4	102.617.678.526	97.169.719.740	Cash and cash equivalents
Investasi				Investments
Deposito	5a	129.610.000.000	55.750.000.000	Time deposits
Reksa dana	5b	84.772.474.689	39.709.342.123	Mutual funds
Simpanan berjangka	5c	-	100.000.000	Time savings
Piutang hasil investasi	7	7.881.299.768	6.144.699.914	Interest receivables
Piutang penjaminan ulang	8	16.535.585.509	30.637.277.502	Re-guarantee receivables
Piutang penjaminan bersama	9	8.852.506.112	6.291.542.677	Co-guarantee receivables
Aset penjaminan ulang	10	81.650.075.422	25.775.097.322	Re-guaranteed assets
Biaya dibayar di muka dan				Prepaid expenses
uang muka	11	3.368.362.458	3.280.270.338	and advances
Pajak dibayar di muka	15a	127.468.660	176.358.463	Prepaid tax
Jumlah Aset Lancar		435.415.451.144	265.034.308.079	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non Current Assets
Investasi				Investments
Reksa dana	5b	-	10.102.200.000	Mutual funds
Obligasi dimiliki hingga jatuh tempo	5d	614.241.634.349	459.722.169.829	Held to maturity bonds
Deposito yang				Restricted
dibatasi penggunaannya	6	83.000.000.000	63.000.000.000	deposit
Biaya dibayar di muka dan				Prepaid expenses
uang muka	11	13.004.086.392	12.614.288.912	and advances
Aset tetap - bersih	12	668.800.529	424.515.525	Fixed assets - net
Aset hak guna - bersih	13	758.346.447	1.432.031.139	Right of use assets - net
Aset takberwujud - bersih	14	51.799.997	103.600.001	Intangible assets - net
Aset pajak tangguhan	15d	3.610.790.089	1.426.355.014	Deferred tax assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		715.335.457.803	548.825.160.420	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		1.150.750.908.947	813.859.468.499	TOTAL ASSETS

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>				<u>LIABILITIES AND EQUITY</u>
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang pajak	15b	8.130.855.394	6.164.035.815	Taxes payable
Utang penjaminan ulang	16	23.114.494.279	20.241.394.628	Re-guarantee payables
Utang penjaminan bersama	17	15.834.669.668	7.763.910.566	Co - guarantee payables
Utang sewa pembiayaan	18	567.487.213	647.690.950	Lease payables
Beban akrual	19	22.997.382.492	15.027.581.780	Accrued expenses
Cadangan klaim	20	189.084.673.472	100.585.743.014	Claim reserve
Pendapatan ditangguhkan	21	32.036.004.188	32.921.421.872	Deferred income
Liabilitas lain-lain dalam penyelesaian	23	27.998.204.965	32.251.244.390	Other liabilities in progress
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		319.763.771.671	215.603.023.015	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non Current Liabilities
Utang sewa pembiayaan	18	201.804.528	850.622.257	Lease payables
Pendapatan ditangguhkan	21	191.103.505.015	177.966.606.529	Deferred income
Liabilitas imbalan kerja	22	1.588.139.000	1.069.755.000	Employee benefits liability
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		192.893.448.543	179.886.983.786	Total Non Current Liabilities
Jumlah Liabilitas		512.657.220.214	395.490.006.801	Total Liabilities
Ekuitas				Equity
Modal saham - modal dasar				Share capital - authorized
1.600.000 lembar, ditempatkan dan disetor penuh pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 600.000 dan 400.000 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham	25	600.000.000.000	400.000.000.000	1,600,000 shares, issued and fully paid up on December 31, 2024 and 2023 amounting to 600,000 and 400,000 shares, respectively, with a nominal value of Rp1,000,000 per share
Komponen ekuitas lainnya		1.201.441.481	721.156.676	Other equity component
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		10.923.031.275	18.110.779.814	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		25.969.215.977	(462.474.792)	Unappropriated
Jumlah Ekuitas		638.093.688.733	418.369.461.698	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.150.750.908.947	813.859.468.499	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2024	2023	
PENDAPATAN PENJAMINAN				GUARANTEE REVENUES
Imbal jasa penjaminan/kafalah	27	324.906.147.011	289.992.597.009	Guarantee fees
Pendapatan penjaminan lainnya	28	24.111.759.453	26.902.907.370	Other guarantee revenues
Jumlah Pendapatan Penjaminan		349.017.906.464	316.895.504.379	Total Guarantee Revenues
BEBAN PENJAMINAN				GUARANTEE EXPENSES
Beban klaim	29	(124.012.468.535)	(100.950.599.838)	Claim expense
Beban penjaminan				Re-guarantee and
ulang dan bersama	30	(137.368.622.553)	(131.441.258.718)	co-guarantee expense
Beban <i>fee based income</i>	31	(16.062.227.887)	(14.539.830.048)	Fee based income expense
Beban restitusi		(1.275.848.615)	(874.949.961)	Restitution expense
Kenaikan estimasi klaim		(32.623.952.459)	(43.025.131.593)	Increase in estimated claims
Jumlah Beban Penjaminan		(311.343.120.049)	(290.831.770.158)	Total Guarantee Expenses
LABA BERSIH PENJAMINAN		37.674.786.415	26.063.734.221	NET GUARANTEE PROFIT
PENDAPATAN INVESTASI	32	49.250.566.295	34.034.561.171	INVESTMENT INCOME
Beban Usaha				Operating expense
Beban sumber daya manusia	33	(24.539.463.325)	(18.764.802.181)	Personnel expense
Beban operasional	34	(4.840.852.469)	(5.062.652.812)	Operating expense
Beban cadangan kerugian				Allowance for
penurunan nilai		(14.243.217.593)	(4.884.327.523)	impairment losses
Beban administrasi				Administrative and
dan umum	35	(7.972.447.774)	(4.725.057.223)	general expenses
Beban sistem, teknologi,				System, technology, and operating
dan pengembangan usaha		(698.324.059)	(832.200.785)	development expense
Jumlah Beban Usaha		(52.294.305.220)	(34.269.040.524)	Total Operating Expenses
Beban lain-lain, bersih	36	(1.273.428.580)	(1.515.233.288)	Others expenses, net
LABA USAHA SEBELUM				OPERATING PROFIT BEFORE
PAJAK PENGHASILAN		33.357.618.910	24.314.021.580	INCOME TAX
Beban Pajak Penghasilan				Income Tax Expense
Pajak kini	15c	(8.033.809.740)	(5.907.572.660)	Current tax
Pajak tangguhan		2.078.780.736	1.053.688.626	Deferred tax
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(5.955.029.004)	(4.853.884.034)	TOTAL INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN		27.402.589.906	19.460.137.546	PROFIT FOR THE YEAR

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2024	2023	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		(480.247.000)	(492.819.000)	Remeasurement of defined benefit liability
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi		105.654.340	211.232.983	Tax relating to item that will not be reclassified
Sub Jumlah		(374.592.660)	(281.586.017)	Sub Total
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified to profit or loss:
Keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual		1.098.628.898	356.639.337	Unrealized gain on increase in fair value of investment available for sale
Sub Jumlah		1.098.628.898	356.639.337	Sub Total
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain, bersih		724.036.238	75.053.320	Other Comprehensive Income (Expense), net
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		28.126.626.144	19.535.190.866	TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE YEAR

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Paid-up Capital Stock	Saldo Laba/ Retained Earnings		Komponen Ekuitas		Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
			Telah Ditetukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditetukan Penggunaannya/ Unappropriated	Lainnya/ Other Equity Component			
Saldo 1 Januari 2023		400.000.000.000	17.841.719.986	(19.285.878.902)	364.517.339		398.920.358.423	Balance January 1, 2022
Laba tahun berjalan		-	-	19.460.137.546	-		19.460.137.546	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain:								Other comprehensive income:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	(281.586.017)	-		(281.586.017)	Remeasurement of defined benefit liability-net
Reklasifikasi cadangan umum		-	269.059.828	(269.059.828)	-		-	General reserve reclassification
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif		-	-	(86.087.591)	356.639.337		270.551.746	Financial assets at fair value through comprehensive income
Saldo 31 Desember 2023		400.000.000.000	18.110.779.814	(462.474.792)	721.156.676		418.369.461.698	Balance December 31, 2023
Laba tahun berjalan		-	-	27.402.589.906	-		27.402.589.906	Profit for the year
Tambahan modal saham	25	200.000.000.000	-	-	-		200.000.000.000	Additional share capital
Pembagian dividen	26	-	-	(7.784.055.016)	-		(7.784.055.016)	Dividend distribution
Penutupan kerugian tahun 2022	26	-	(18.110.779.814)	18.110.779.814	-		-	2022 loss closure
Pembentukan cadangan umum	26	-	4.865.034.386	(4.865.034.386)	-		-	Formation of general reserves
Pembentukan cadangan tujuan	26	-	6.057.996.889	(6.057.996.889)	-		-	Establishment of a reserve of objectives
Penghasilan komprehensif lain								Other comprehensive income
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-	(374.592.660)	-		(374.592.660)	Remeasurement of defined benefit liability-net
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif		-	-	-	480.284.805		480.284.805	Financial assets at fair value through comprehensive income
Saldo 31 Desember 2024		600.000.000.000	10.923.031.275	25.969.215.977	1.201.441.481		638.093.688.733	Balance December 31, 2024

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See Companying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the Financial Statement

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	348.112.529.220	366.193.312.640	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada karyawan	(16.361.300.580)	(12.386.399.966)	Payment to employees
Pembayaran pajak penghasilan	(9.566.309.900)	(2.961.500.815)	Payment of income tax
Pembayaran beban operasional lainnya	(59.748.143.613)	(91.592.750.831)	Payment of other operating expense
Pembayaran beban klaim	(212.697.181.819)	(178.224.794.120)	Payment of claim expense
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	49.739.593.308	81.027.866.908	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI			INVESTING ACTIVITIES
Pencairan (penempatan) deposito berjangka	(93.542.292.678)	(24.544.259.553)	Termination (placement) of time deposits
Penempatan obligasi	(147.636.771.788)	(100.209.918.752)	Placement in bonds
Pencairan (penempatan) reksa dana	(43.304.277.589)	13.454.824.724	Termination (placement) in mutual funds
Penerimaan dari hasil investasi	49.225.198.973	32.279.030.579	Receipt from return of investment
Perolehan aset tetap	(322.034.424)	(101.990.000)	Acquisition of fixed assets
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(235.580.177.506)	(79.122.313.002)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan tambahan modal saham	200.000.000.000	-	Proceeds from additional share capital
Pembayaran dividen	(7.784.055.016)	-	Dividend payment
Pembayaran sewa pembiayaan	(927.402.000)	(1.064.253.047)	Payments for finance lease
Kas Bersih Diperoleh (digunakan untuk) untuk Aktivitas Pendanaan	191.288.542.984	(1.064.253.047)	Net Cash Provided (used in) Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	5.447.958.786	841.300.859	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	97.169.719.740	96.328.418.881	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	102.617.678.526	97.169.719.740	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

**PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. U M U M

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Jamkrida Jakarta atau Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroda) ("Perusahaan") didirikan dengan nama PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta yang disingkat dengan PT Jamkrida Jakarta berdasarkan Akta No. 9 dari Notaris Yualita Widyadhari S.H., MKn., pada tanggal 10 November 2014 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya No. AHU-34446.40.10.2014 tanggal 13 November 2014.

Pada tanggal 22 Maret 2024, berdasarkan Akta No. 62 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn, telah terjadi perubahan modal disetor yang semula sebesar Rp400.000.000.000 menjadi Rp600.000.000.000. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0073131.AH.01.11 tahun 2024, yang diterbitkan pada tanggal 6 April 2024.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-58/NB.223/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 yang menetapkan Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan kepada PT Jamkrida Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha meliputi usaha dalam bidang jasa penjaminan kredit. Setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan dapat melaksanakan usaha pemberian jasa penjaminan dalam bentuk perseroan, melakukan kegiatan usaha lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundangan-undangan untuk menjaga likuiditas Perusahaan sesuai dengan rasio yang ditetapkan.

Perusahaan berdomisili di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Provinsi DKI Jakarta, Lantai 14, Jalan Abdul Muis No. 66, Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Jamkrida Jakarta or Jakarta Regional Credit Guarantee (Perseroda) (the "Company") was established under the name PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta abbreviated as PT Jamkrida Jakarta based on Deed No. 9 from Notary Yualita Widyadhari S.H., MKn., on November 10, 2014 and has received approval from the Minister of Justice and Human Rights with its decree No. AHU-34446.40.10.2014 dated November 13, 2014.

On March 22, 2024, based on Deed No. 62 drawn up by Notary Ashoya Ratam, SH, M.Kn, there was a change in paid-up capital from Rp400,000,000,000 to Rp600,000,000,000. The amendment deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0073131.AH.01.11 of 2024, issued on April 6, 2024.

Based on the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP58/NB.223/2019 dated August 30, 2019, the Granting of License for the Establishment of Syariah Business Unit Guarantee Company to PT Jamkrida Jakarta.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of business activities covers business in the field of credit guarantee services. After obtaining permission from the Minister of Finance and/or the Financial Services Authority, the Company can carry out the business of providing guarantee services in the form of a company, carrying out other business activities permitted by laws and regulations to maintain the Company's liquidity in accordance with the established ratio.

The Company is domiciled in Jakarta Dinas Teknis Abdul Muis Building 14th Floor, Jalan Abdul Muis No. 66, Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. U M U M (lanjutan)

b. Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan

Berdasarkan Akta No. 37 tanggal 15 Maret 2024 mengenai Pengangkatan Komisaris Perusahaan, yang merujuk pada memo sirkuler Keputusan Para Pemegang Saham No. 871 tanggal 15 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024
<u>Komisaris</u>	
Komisaris Utama	Andrianto Wahyu Adi
<u>Dewan Direksi</u>	
Direktur Utama	Agus Supriadi
Direktur	Jimmi Setya Budi

*) Pada tanggal 31 Desember 2023 pengangkatan Komisaris Utama masih dalam proses penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Persetujuan pengangkatan sebagai Komisaris Utama dari OJK diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-111/PD.02/2024 pada tanggal 08 Maret 2024 dan telah diaktakan pada tanggal 15 Maret 2024 berdasarkan Akta No. 37 dengan Notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn di Jakarta Selatan.

Berdasarkan Akta No. 60 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Perusahaan melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait masa jabatan Dewan Pengawas Syariah yang kini menjadi 4 tahun.

Selain itu, berdasarkan Akta No. 61 tanggal 22 Maret 2024 dari Notaris yang sama, Ashoya Ratam, SH, M.Kn, yang dibuat di Jakarta, dilakukan Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Syariah Perusahaan. Susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Board of Directors, Board of Sharia Supervisory and Employees

Based on Deed No. 37 dated March 15, 2024 regarding the Appointment of Commissioners of the Company, which refers to the circular memo of Shareholders' Resolution No. 871 dated December 15, 2023 regarding the Dismissal and Appointment of Commissioners of the Company, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as at December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	2023	
		<u>Commissioner</u>
Andrianto Wahyu Adi *)		President Commissioner
		<u>Board of Directors:</u>
Agus Supriadi		President Director
Jimmi Setya Budi		Director

*) On December 31, 2023, the appointment of the President Commissioner is still in the process of assessing Capability and Compliance (*fit and proper test*) by the Financial Services Authority.

Approval for appointment as President Commissioner from OJK was obtained based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. Kep 111/PD.02/2024 on March 08, 2024 and this has been notarized on March 15, 2024 based on Deed No. 37 with Notary Ashoya Ratam, SH, M.Kn in South Jakarta.

Based on Deed No. 60 dated March 22, 2024 made by Notary Ashoya Ratam, SH, M.Kn, the Company amended its Articles of Association regarding the term of office of the Sharia Supervisory Board which is now 4 years.

In addition, based on Deed No. 61 dated March 22, 2024 of the same Notary, Ashoya Ratam, SH, M.Kn, made in Jakarta, the Company's Sharia Supervisory Board was reappointed. The composition of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. U M U M (lanjutan)

b. Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan (lanjutan)

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua	:	Masykuri Abdillah	:
Anggota	:	Euis Amalia	:

Perusahaan memiliki susunan Komite investasi sebagai berikut:

Penanggung Jawab	Agus Supriadi
Penanggung Jawab	Jimmi Setya Budi
Penyusun Materi	Subhan Sahlan
Komite Investasi	
Anggota	M Irwan Ramdhan

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebanyak 72 dan 56 karyawan (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Board of Directors, Board of Sharia Supervisory and Employees (continued)

Sharia Supervisory Board:

	:	Chairman
	:	Member

The Company has the following investment Committee composition:

Person responsible
Person responsible
Preparer of Investment Committee Materials
Member

The Company's number of employees as of December 31, 2024 and 2023 was 72 and 56 employees (unaudited).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of Preparation and Measurements of the Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards "SAK", which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI).

The measurement basis used is the historical cost basis, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows is prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing, and financing activities.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Company.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan sejumlah amandemen PSAK yang relevan dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan atas amandemen PSAK berikut tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

- i. PSAK 201 (amandemen) Penyajian Laporan keuangan: Penyajian Laporan Keuangan terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- ii. PSAK 116 (amandemen) Sewa : mengatur pengukuran selanjutnya atas transaksi dan sewa balik.
- iii. PSAK 207: Laporan Arus Kas dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: pengaturan pembiayaan pemasok.

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Perusahaan apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 224 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (Entitas Pelapor).

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

b. Changes to the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of the Statement of Financial Accounting Standards ("ISAK")

In the current year, the Company has applied a number of amendments to PSAK that are relevant and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2024. The adoption of these amendments to PSAK does not result in changes to the Company's accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior years.

- i. PSAK 201 (amendment) Presentation of Financial Statements: Non-current Liabilities with Covenants;
- ii. PSAK 116 (amendment) Lease : Arrange the subsequent measurement of transactions and leaseback.
- iii. PSAK 207: Cash Flow Statement and PSAK 107: Financial Instruments: supplier financing arrangements.

c. Transaction with Related Parties

A person or entity is considered a related party of the Company if it meets the definition of a related party in PSAK No. 224 "Related Party Disclosures".

Related parties are people or entities related to the Company (Reporting Entity).

1. A person or immediate family member has a relationship with the reporting entity if that person:
 - a. Have control or joint control over the reporting entity;
 - b. Has significant influence over the reporting entity; or
 - c. Key management personnel of the reporting entity or the parent of the reporting entity.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, dan berikutnya terkait dengan entitas lain);
- b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a;
- g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
- h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan (Catatan 36).

d. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

c. Transaction with Related Parties (continued)

2. An entity is related to a reporting entity if one of the following conditions is met:

- a. The entity and the reporting entity are members of the same business group (meaning the parent entity, and subsequently related to another entity);
- b. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a business group, of which the other entity is a member);
- c. The two entities are joint ventures of the same third party;
- d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of a third entity;
- e. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
- f. The entity is controlled or jointly controlled by the person identified in letter a;
- g. The person identified in (1)(a) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or a parent of the entity);
- h. The entity, or a member of a group to which the entity is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All significant transactions with related parties are disclosed in the financial statements (Note 36).

d. Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and in banks. Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash with original maturities of 3 (three) months or less from the date of placements, and which are not used as collateral and are not restricted.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Perusahaan memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan pada biaya perolehan di amortisasi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lainnya tidak diungkapkan.

Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan; dan
- Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

e. Financial Instruments

The Company has applied PSAK No. 109, Financial Instruments: Recognition and Measurement, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

The Company has financial instruments in the financial asset category at amortized acquisition costs and financial liabilities at amortized acquisition costs. Therefore, accounting policies related to financial instruments in the category of financial assets measured at fair value through other comprehensive income and financial assets measured at fair value through profit and loss and financial liabilities measured at fair value through profit and loss or through other comprehensive income are not disclosed.

Financial Assets

The Company classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 109, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- The Company's business model for managing the financial assets; and*
- The contractual cash flow characteristics of the financial statements.*

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and*
- The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.*

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024, kategori ini meliputi kas dan setara kas, investasi, piutang hasil investasi, piutang penjaminan ulang, piutang penjaminan bersama, aset penjaminan ulang, deposito yang dibatasi penggunaannya yang dimiliki oleh Perusahaan.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets on amortized acquisition costs

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized acquisition costs are measured at the amount recognized at the time of initial recognition minus principal payments, plus or minus cumulative amortization using the effective interest rate metric calculated from the difference between the initial value and its maturity value and subtracted from the impairment loss reserve.

As of December 31, 2024, this category includes cash and cash equivalents, investments, investment proceeds receivables, re-guaranteed receivables, co-guaranteed receivables, re-collateralized assets, and restricted deposits owned by the Company.

Financial Liabilities and Equity Instrument

There are no significant changes in classification and measurement of financial liabilities. Financial liabilities within the scope of PSAK No. 109 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit and loss (FVTPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities at amortized cost are measured at the amount recognized at initial recognition less principal payments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method, which is calculated from the difference between the initial value and the maturity value.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Kategori ini meliputi utang penjaminan ulang, utang penjaminan bersama, beban akrual, cadangan klaim, liabilitas lain-lain dalam penyelesaian yang dimiliki oleh Perusahaan.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial liabilities at amortized cost (continued)

This category includes reguarantee payables, joint underwriting payables, accrued expenses, reserves for claims, and other liabilities in progress owned by the Company.

Delete Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reclassification of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are mutually exclusive and their net value is presented in the statement of financial position if, and only if, the Company currently has the legal force to make a mutual write-off of such recognized amount and intends to settle it on a net basis or to realize the asset and settle its liabilities simultaneously.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Company assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

To make that assessment, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas

1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kedaluwarsa.

f. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- The right to receive cash flows from the asset has expired;
- The Company retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "passthrough" arrangement; or
- The Company has transferred its right to receive cash flows from financial assets and (i) has transferred substantially all risks and benefits to the financial assets, or (ii) has not substantially transferred or does not have all the risks and benefits of the financial assets, but has transferred control of such financial assets..

2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled or has expired.

f. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability or;
- in the principal market for the asset or liability or;
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Company must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

f. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Ketika Perusahaan menggunakan teknik penilaian, maka Perusahaan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Perusahaan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

g. Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus, kecuali untuk biaya dibayar di muka *fee based* yang diamortisir secara sistematis sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

f. Fair Value Measurement (continued)

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

When the Company uses valuation techniques, it maximizes the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- *Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

g. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial or contract periods using the straight-line method, except for prepaid expenses of fee based which are amortized on a systematic basis according to the pattern of recognition of guarantee fee.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

h. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Aset Tetap	Tahun/ Year	Fixed Assets
Renovasi dan partisi	3 tahun/year	Renovation and partitioning
Kendaraan	3 tahun/year	Vehicle
Inventaris	3 tahun/year	Inventory

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

i. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai.

Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

h. Fixed Assets

Property and equipment are carried at cost, excluding day-to-day servicing, less accumulated depreciation and any impairment in value.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

Expenses incurred after fixed assets are used, such as repair and maintenance expenses, are charged to profit and loss at the time of occurrence. If these expenses cause an increase in future economic benefits from the use of fixed assets that may exceed their normal performance, they are capitalized in addition to the cost of acquiring fixed assets.

i. Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired.

If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

The Company assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

i. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

j. Pengakuan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 115 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

i. Impairment of Non-Financial Assets

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and impairment losses are recognized in profit or loss. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated.

A previously recognized impairment loss for an asset is reversed in profit or loss to the extent that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

j. Recognition Guarantee Revenue

The Company has applied PSAK No. 115, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1. *Identify contracts with a customer;*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

j. Pengakuan Pendapatan Imbal Jasa
Penjaminan (lanjutan)

3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin;
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Imbal jasa penjaminan ditentukan berdasarkan hasil dari identifikasi hak dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.

Dalam perspektif bisnis penjaminan, hak dan kewajiban dimaksud merupakan risiko yang akan dan telah dialihkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam kontrak. Kontrak dimaksud memiliki jangka waktu pelaksanaan, maka dari itu kewajiban pelaksanaan entitas diukur berdasarkan risiko yang akan dan telah dilepas sepanjang kontrak berlaku.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

j. Recognition Guarantee Revenue
(continued)

3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin;
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

Implementation obligations can be fulfilled in 2 ways, namely:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

The amount of the guarantee fee is determined based on the results of the identification of performance rights and obligations in the contract.

In the underwriting business perspective, these rights and obligations are risks that will and have been transferred as stated in the contract. The contract in question has a performance period, therefore the entity's obligation to perform is measured based on the risks that will be disposed of as long as the contract is valid.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

j. Pengakuan Pendapatan Imbal Jasa Peminjaman (lanjutan)

Pendapatan imbal jasa penjaminan diakui sejak bulan sertifikat penjaminan diterbitkan dan diamortisasi berdasarkan metode jumlah angka tahun sepanjang jangka waktu penjaminan.

Biaya atas perolehan kontrak diakui sebagai biaya inkremental. Biaya tersebut secara eksplisit dibebankan kepada pelanggan, yang diamortisir secara sistematis sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan.

Imbal jasa penjaminan atas resiko yang dialihkan ke penjamin ulang diakui sebagai beban premi penjaminan ulang yang diakui sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Komisi diterima dari penjamin ulang diakui sebagai pendapatan komisi pada saat resiko dialihkan. Penerimaan dari pelanggan atas resiko yang belum terealisasi diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

k. Beban Klaim

Estimasi atas klaim yang terjadi baik sudah dilaporkan maupun belum dilaporkan diakui sebagai cadangan klaim. Pengukuran cadangan klaim mengacu pada konsep perhitungan penurunan nilai dalam PSAK 109 instrumen keuangan yang dihitung dengan melakukan estimasi variabel makro yang berkorelasi dengan probabilitas klaim dan didasari total saldo penjaminan bruto. Estimasi klaim atas risiko yang dialihkan ke penjaminan ulang diakui sebagai aset penjaminan ulang dan diukur dengan pola pembentukan cadangan klaim yang didasari dari selisih antara total saldo penjaminan bruto dan total saldo penjaminan neto.

Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

Hak subrogasi atas klaim diakui sebagai pendapatan subrogasi pada saat hak subrogasi dapat direalisasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

j. Guarantee Fee Revenue Recognition (continued)

Guarantee fee is recognized based upon the issuance of guarantee certificate and amortized based on sum of the year digits method over the term of the guarantee.

The cost of obtaining the contract are recognized as incremental cost. The cost are explicitly charged to the customer, which are systematically amortized according to the pattern of recognition of the guarantee fee.

Guarantee fee for the risk transferred to the reguaranteed is recognized as re-guarantee premium expense in accordance with the pattern of guarantee fee recognition. Commission received from the re- guaranteed is recognized as commission income when the risk is transferred. Receipt from costumers for unrealized risk are recognized as deferred income.

k. Claim Expense

The estimated of claim incurred and reported and claim incurred but not yet reported are recognized as claim reserved. Measurement of claim reserved refers to the concept of impairment calculating as in PSAK 109: Financial Instrument that is calculated by estimating macro variables that are correlated with the probability of claims and based on the total gross balance of the guarantor. Estimated claims for risk transferred to reinsurance are recognized as re-guarantor assets and are measured using the pattern of reserves for claims based on the difference between the total gross guarantee balance and the total net guarantee balance.

Changes in the amount of debt claims arising from the result of a further review process and the difference between the amount of debt claim and claims paid are recognized in the profit or loss at the year of change.

Subrogation risk on claims are recognized as subrogation income when subrogation rights can be realized.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

I. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan memiliki program imbalan pasti dan iuran pasti.

Kewajiban imbalan pasca kerja merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi dengan nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang pada tanggal laporan posisi keuangan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan kewajiban imbalan pensiun yang bersangkutan.

Perusahaan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU Cipta Kerja (UUCK) No. 11/2020 yang merupakan kewajiban imbalan kerja. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UUCK No. 11/2020 lebih besar dari program pensiun yang ada, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari kewajiban imbalan pensiun.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

I. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the statement of financial position and as an expense in profit or loss.

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-Employment Benefits

The Company has defined benefit and defined contribution pension plans.

The post-employment benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the statements of financial position date less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuary using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the yield at the statements of financial position date of long-term government bonds denominated in Rupiah in which the benefits will be paid and that have terms to maturity similar to the related pension benefit obligation.

The Company are required to provide a minimum pension benefit as stipulated in the Job Creation Law No. 11/2020 which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Job Creation Law No. 11/2020 are higher than those based on the existing pension plan, the difference is recorded as part of the pension benefits obligation.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

I. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Perusahaan juga mencatat kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang "PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja".

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan dalam saldo laba.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Keuntungan atau kerugian dari kurtailmen dan penyelesaian program manfaat pasti diakui ketika kurtailmen dan penyelesaian tersebut terjadi.

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti uang pisah, uang penghargaan, uang kompensasi dan masa persiapan pensiun.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun atau memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini dicadangkan sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metode akuntansi yang sama dengan metode yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Imbalan jangka panjang lain seperti cuti berimbalan jangka panjang dan penghargaan masa kerja berdasarkan peraturan Perusahaan dan dihitung dengan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

m. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

I. Employee Benefits (continued)

Post-Employment Benefits (continued)

The Company also recognizes its liabilities in accordance with Republic of Indonesia Government Regulation No. 35 of 2021 dated February 2, 2021 on "PKWT, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment".

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised through other comprehensive income and reported in retained earnings.

Past service costs arising from amendment or curtailment programs are recognised as expense in profit or loss when incurred.

Gains or losses on curtailment and settlement of a defined benefit plan are recognised when the curtailment and settlement occur.

The Company provides other post-employment benefits such as severance pay, service pay, compensation pay and retirement preparation leave.

Other long-term employee benefits

The entitlement to these benefits is usually based on the employee remaining in service up to retirement age or the completion of a qualifying service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to that used for the defined benefit pension plan.

Other long-term benefits such as long-term paid leave and long service awards are granted based on the Company's regulations and calculated using the projected unit credit and discounted to present value.

m. Income Tax

Current Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

m. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, dan pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

n. Hasil Investasi

Hasil investasi dari deposito berjangka, obligasi dan reksa dana diakui atas dasar proporsi waktu sesuai dengan jumlah pokok dan suku bunga yang berlaku.

o. Beban Usaha

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

m. Income Tax (continued)

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences period. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities, and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

n. Income From Investment

Interest income from investment in time deposits, bonds and mutual funds is recognized on a time proportion basis, based on principal outstanding and prevailing interest rates.

o. Operating Expenses

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

q. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Perusahaan yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Perusahaan.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Events after the Reporting Period

Events that occurred after the reporting period that provided additional information regarding the Company's financial position as of the date of the financial position statement (adjustment events), if any, have been reflected in the financial statements. Events that occur after a reporting period that do not require adjustment (non-adjustment events), if the amount is material, have been disclosed in the financial statements.

q. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Perusahaan mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Perusahaan mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

a. Classification of Financial Assets and Liabilities

The company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by assessing whether these assets and liabilities meet the criteria set out in PSAK No. 109. Financial assets and financial liabilities are recorded in accordance with the Company's accounting policies as disclosed in Note 2.

b. Allowance for Impairment Losses of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Company shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Company shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forward-looking, that is available without undue cost or effort.

The Company shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Company shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

c. Komitmen Sewa Operasi-Perusahaan Sebagai Penyewa

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa. Perusahaan menentukan bahwa sewa tersebut memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK No. 116, Sewa.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan diungkapkan pada Catatan 24.

3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

c. Operating Lease Commitments-Company as Lessee

The company has signed a number of lease agreements. The Company has determined that those leases meet the criteria for recognition and measurement of right-to-use assets and lease liabilities in accordance with PSAK No. 116, Leases.

d. Income Tax

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Company based its estimates and assumptions on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. Interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets are set out in Note 24.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap tersebut.

c. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

d. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 22 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang.

3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The useful life of each of the item of the Company's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of property and equipment would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

c. Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

d. Long-Term Employee Benefits

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 22 and include, among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company's assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

d. Imbalan Kerja Jangka Panjang (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

e. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

f. Cadangan Klaim dan Aset Penjaminan Ulang

Cadangan klaim dan aset penjamin ulang diukur dengan mengacu pada penurunan nilai yang diatur dalam PSAK 109, dan estimasi yang dibentuk dengan mempertimbangkan pertumbuhan klaim yang telah terjadi, nilai seluruh penjaminan, faktor makro ekonomi yang relevan dan terkorelasi, serta profitabilitas tertimbang atas skenario-skenario ekonomi yang mungkin terjadi.

3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

d. Long-Term Employee Benefits (continued)

While it is believed that the Company's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

e. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets and are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets and liabilities that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

f. Claim Reserves and Re-Guarantee Assets

Claim reserved and re-guaranteed assets are measured by referring to the impairment set forth in PSAK 109, and estimated established by considering the occurred claim development, total sum of guaranteed, relevant and correlated macroeconomic factors, and weighted profitability under economic scenarios that might happen.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>
Kas	46.172.949	75.811.717
Bank		
Pihak Berelasi (Catatan 36)		
PT Bank DKI	1.564.717.738	3.299.264.956
Pihak Ketiga		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	34.636.606	873.527.242
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.717.758	5.638.977
PT BPR Bahana Ekonomi	9.265.817	9.164.162
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	6.697.331	2.268.446
PT BPRS Buana Mitra Perwira	4.912.964	326.754.148
Kospin Jasa	3.027.417	393.189.071
PT Bank KB Bukopin Tbk	2.384.801	2.731.013
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.376.124	16.238.172
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.973.868	-
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.925.000	-
PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia	1.826.833	1.829.549
PT BPRS Harta Insan Karimah	1.522.970	286.196.139
PT BPR Bahtera Masyarakat	-	585.798
Jumlah Bank	1.644.985.227	5.217.387.673
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(58.978.361)	(58.978.361)
Jumlah	1.586.006.866	5.158.409.312
Deposito Berjangka		
Pihak Berelasi (Catatan 36)		
PT Bank DKI	67.000.000.000	80.050.000.000
Pihak Ketiga		
PT Bank Mandiri Taspen	12.700.000.000	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.000.000.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.000.000.000	11.000.000.000
PT BPRS Harta Insan Karimah	1.000.000.000	1.000.000.000
Jumlah Deposito Berjangka	94.700.000.000	92.050.000.000
Kas dalam proses	6.400.000.000	-
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(114.501.289)	(114.501.289)
Jumlah	102.617.678.526	97.169.719.740

Deposito berjangka merupakan penempatan dana untuk investasi Perusahaan dengan jangka waktu kurang dari tiga (3) bulan dengan suku bunga deposito tahun 2024 dan 2023 masing-masing berkisar 3,50%- 5,00% dan 2,5% - 5,75%.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash on hand
Cash in Banks
Related Parties (Note 36)
PT Bank DKI
Third Parties
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT BPR Bahana Ekonomi
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT BPRS Buana Mitra Perwira
Kospin Jasa
PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank MNC Internasional Tbk
PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia
PT BPRS Harta Insan Karimah
PT BPR Bahtera Masyarakat
Total Cash in Banks
Less:
Allowance for impairment losses
Total
Time Deposit
Related Parties (Note 36)
PT Bank DKI
Third Parties
PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT BPRS Harta Insan Karimah
Total Time Deposit
Cash in transit
Less:
Allowance for impairment losses
Total

Time deposits represent placements of funds for the Company's investments with maturities of less than three (3) months with interest rates for deposits in 2024 and 2023 ranging from 3.50% - 5.00% and 2.5% - 5.75%, respectively.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dalam proses merupakan penjualan reksa dana insight money senilai Rp5.400.000.000 dan pelepasan deposito Bank MNC International senilai Rp1.000.000.000 pada tanggal 30 Desember 2024 yang belum settle.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash in process represents the sale of insight money mutual funds worth Rp5,400,000,000 and the release of Bank MNC International deposits worth Rp1,000,000,000 on December 30, 2024 that have not yet settled.

5. INVESTASI

5. INVESTMENTS

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi	743.851.634.349	515.572.169.829	Financial assets measured amortization cost
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	84.772.474.689	49.811.542.123	Financial assets measured at fair value through Other comprehensive income
Jumlah	828.624.109.038	565.383.711.952	Total

i. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi

i. Financial assets measured at amortized acquisition cost

Deposito berjangka	129.610.000.000	55.750.000.000	Time deposit
Simpanan berjangka	-	100.000.000	Time saving
Obligasi	614.241.634.349	459.722.169.829	Bonds
Jumlah	743.851.634.349	515.572.169.829	Total

ii. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

ii. Financial assets measured at fair value through other comprehensive income

Reksa dana - bersih	84.772.474.689	49.811.542.123	Mutual funds - net
---------------------	----------------	----------------	--------------------

Berdasarkan jenis investasi

Type of investment

a. Deposito Berjangka

a. Time Deposit

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	
Pihak Berelasi (Catatan 36)			Related Parties (Note 36)
PT Bank DKI	86.000.000.000	55.750.000.000	PT Bank DKI
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	26.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	17.000.000.000	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT BPRS Buana Mitra Perwira	325.000.000	-	PT BPRS Buana Mitra Perwira
PT BPRS Harta Insan Karimah	285.000.000	-	PT BPRS Harta Insan Karimah
Sub Jumlah	43.610.000.000	-	Sub total
Jumlah	129.610.000.000	55.750.000.000	Total
Suku bunga per tahun	3,75%-8,19%	3,38% - 3,75%	Interest rate per annum

Deposito berjangka merupakan penempatan dana untuk investasi Perusahaan dengan jangka waktu 6 sampai dengan 12 bulan.

Time deposit is a placement of funds for the Company's investment with a period of 6 to 12 months.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. INVESTASI (lanjutan)

b. Reksa dana

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Aset lancar:		
Reksa dana Syariah PNM		
Pembiayaan Mikro BUMN Seri XII	15.097.650.000	-
Reksa Dana Ventura Capital	14.224.140.000	14.220.778.950
Reksa dana Insight Money		
Pasar Uang	13.396.556.434	-
Reksa dana Insight Money		
Pasar Uang Syariah	11.427.969.763	-
Reksa dana Danamas		
Rupiah Plus	6.631.034.981	10.589.324.774
Reksa dana BNI AM Utama	5.148.810.232	-
Reksa Dana BRI		
Gebyar Indonesia II	5.067.498.368	-
Reksa Dana Ventura Capital II	5.014.000.000	-
Reksa dana Danamas Stabil	4.510.709.512	3.009.962.532
Reksa dana Sucorinvest		
Pasar Uang	4.417.844.104	9.192.456.054
Reksa dana PNM		
Pembiayaan Mikro BUMN Seri XI	-	2.010.620.000
Reksa dana Sucorinvest		
Pasar Uang Syariah	-	699.181.815
Sub Jumlah	84.936.213.394	39.722.324.125
 Dikurangi:		
Cadangan kerugian		
penurunan nilai	(163.738.705)	(12.982.002)
Sub Jumlah	84.772.474.689	39.709.342.123
 Aset Tidak Lancar:		
Reksa dana Syariah PNM		
Pembiayaan Mikro BUMN Seri IX	-	10.102.200.000
Sub Jumlah	-	10.102.200.000
 Jumlah Reksa Dana - Bersih	84.772.474.689	49.811.542.123

c. Simpanan Berjangka

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, simpanan berjangka masing-masing sebesar nihil dan Rp100.000.000.

5. INVESTMENTS (continued)

b. Mutual Funds

Current assets:
Sharia Mutual Fund of PNM
Pembiayaan Mikro BUMN Seri XII
Mutual Fund of Venture Capital
Mutual Fund of Insight Money
Money Market
Mutual Fund of Insight Money
Sharia Money Market
Mutual Fund of Danamas
Rupiah Plus
Mutual Fund of BNI AM Utama
Mutual Fund of BRI
Gebyar Indonesia II
Mutual Fund of Venture Capital II
Mutual Fund of Danamas Stabil
Mutual Fund of Sucorinvest
Money Market
Mutual Fund of PNM
Pembiayaan Mikro BUMN Seri XI
Mutual Fund of Sucorinvest
Sharia Money Market
Sub Total
 Less:
Allowance for
impairment losses
Sub Total
 Non-Current Assets:
Sharia Mutual Fund of PNM
Pembiayaan Mikro BUMN Seri IX
Sub Total
 Total Mutual Fund - Net

c. Time Savings

As of December 31, 2024 and 2023, time deposits amounted to nil and Rp100,000,000, respectively.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. INVESTASI (lanjutan)

d. Obligasi

	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga per Tahun/ Interest Rate per Annum	31 Desember 2024/ Nilai Nominal/ Nominal Value	December 31, 2024 Nilai Amortisasi/ Amortized Value
Surat Berharga Negara Seri FR0076	15 Mei/ May 15, 2048	7,38%	72.400.000.000	75.347.043.332
Surat Berharga Negara Seri FR0075	15 Mei/ May 15, 2038	7,50%	66.000.000.000	65.483.571.854
Surat Berharga Negara Seri FR0089	15 Agustus/ August 15, 2051	6,88%	59.424.000.000	59.450.569.082
Surat Berharga Negara Seri FR0083	15 April/ April 15, 2040	7,50%	46.000.000.000	46.636.935.486
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS038	15 Desember/ December 15, 2049	6,88%	40.692.000.000	40.207.019.866
Surat Berharga Negara Seri FR0092	15 Juni/ June 15, 2042	7,13%	36.500.000.000	36.714.568.080
Surat Berharga Negara Seri FR0097	15 Juni/ June 15, 2043	7,13%	36.000.000.000	36.511.909.452
Surat Berharga Negara Seri FR0074	15 Agustus/ August 15, 2032	7,50%	32.500.000.000	32.900.372.204
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	15 Maret/ March 15, 2034	6,38%	30.000.000.000	29.279.315.643
Surat Berharga Negara Seri FR0100	15 Februari/ February 15, 2034	6,63%	25.000.000.000	24.992.478.842
Surat Berharga Negara Seri FR0078	15 Mei/ May 15, 2029	8,25%	20.000.000.000	21.024.662.481
Surat Berharga Negara Seri FR0082	15 September/ September 15, 2030	7,00%	18.000.000.000	17.989.481.920
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS033	15 Juni/ June 15, 2047	6,75%	18.000.000.000	17.507.766.043
Surat Berharga Negara Seri FR0065	15 Mei/ May 15, 2033	6,62%	16.705.000.000	16.807.594.542
Surat Berharga Negara Seri FR0088	15 Juni/ June 15, 2036	6,25%	14.000.000.000	13.953.414.103
Surat Berharga Negara Seri FR0072	15 Mei/ May 15, 2036	8,25%	11.000.000.000	11.785.232.736
Surat Berharga Negara Seri FR0102	15 Juli/ July 15, 2054	6,88%	11.000.000.000	10.934.581.812
Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR0006	15 Maret/ March 15, 2030	10,25%	10.500.000.000	12.040.301.646
Surat Berharga Negara Seri FR0101	15 Mei/ May 15, 2029	6,88%	10.000.000.000	9.930.803.138
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS005	15 April/ April 15, 2043	6,75%	7.000.000.000	6.879.129.119
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	15 Februari/ February 15, 2037	6,10%	6.500.000.000	6.369.032.279
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	15 November/ November 15, 2031	8,88%	5.000.000.000	5.072.774.899
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS037	15 Mei/ May 15, 2036	6,88%	5.000.000.000	4.880.363.823
Surat Berharga Negara Seri FR0098	15 Mei/ May 15, 2038	7,13%	5.000.000.000	4.990.476.805
Surat Berharga Negara Seri FR0087	15 Februari/ February 15, 2031	6,50%	3.000.000.000	2.949.865.471
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS028	15 Oktober/ October 15, 2046	7,75%	2.000.000.000	2.117.213.763
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS003	15 Januari/ January 15, 2027	6,00%	1.500.000.000	1.485.165.928
Jumlah/ Total			608.721.000.000	614.241.634.349

	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga per Tahun/ Interest Rate per Annum	31 Desember 2023/ Nilai Nominal/ Nominal Value	December 31, 2023 Nilai Amortisasi/ Amortized Value
Surat Berharga Negara Seri FR0075	15 Mei/ May 15, 2038	7,50%	66.000.000.000	65.444.945.568
Surat Berharga Negara Seri FR0089	15 Agustus/ August 15, 2051	6,88%	49.424.000.000	49.401.273.583
Surat Berharga Negara Seri FR0083	15 April/ April 15, 2040	7,50%	46.000.000.000	46.678.593.525
Surat Berharga Negara Seri FR0076	15 Mei/ May 15, 2048	7,38%	40.000.000.000	41.267.505.191
Surat Berharga Negara Seri FR0074	15 Agustus/ August 15, 2032	7,50%	32.500.000.000	32.952.894.149
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	15 Maret/ March 15, 2034	6,38%	30.000.000.000	29.201.003.707
Surat Berharga Negara Seri FR0092	15 Juni/ June 15, 2042	7,13%	27.500.000.000	27.471.433.126
Surat Berharga Negara Seri FR0100	15 Februari/ February 15, 2034	6,63%	25.000.000.000	24.991.654.698
Surat Berharga Negara Seri FR0097	15 Juni/ June 15, 2043	7,13%	18.000.000.000	17.937.659.948
Surat Berharga Negara Seri FR0065	15 Mei/ May 15, 2033	6,62%	16.705.000.000	16.819.852.154
Surat Berharga Negara Seri FR0072	15 Mei/ May 15, 2036	8,25%	11.000.000.000	11.854.284.918
Surat Berharga Negara Seri FR0078	15 Mei/ May 15, 2029	8,25%	10.000.000.000	10.715.687.790
Surat Berharga Negara Seri FR0082	15 September/ September 15, 2030	7,00%	18.000.000.000	17.987.638.858
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS033	15 Juni/ June 15, 2047	6,75%	18.000.000.000	17.485.844.935
Surat Berharga Negara Seri FR0088	15 Juni/ June 15, 2036	6,25%	14.000.000.000	13.949.347.697
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS005	15 April/ April 15, 2043	6,75%	7.000.000.000	6.872.519.700
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	15 Februari/ February 15, 2037	6,10%	6.500.000.000	6.358.231.732
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	15 November/ November 15, 2031	8,88%	5.000.000.000	5.083.361.920
Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR0006	15 Maret/ March 15, 2030	10,25%	5.000.000.000	5.836.587.719
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS037	15 Mei/ May 15, 2036	6,88%	5.000.000.000	4.869.675.817
Surat Berharga Negara Seri FR0087	15 Februari/ February 15, 2031	6,50%	3.000.000.000	2.941.681.614
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS028	15 Oktober/ October 15, 2046	7,75%	2.000.000.000	2.122.593.246
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS003	15 Januari/ January 15, 2027	6,00%	1.500.000.000	1.477.898.234
Jumlah/ Total			457.129.000.000	459.722.169.829

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. DEPOSITO YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>
Pihak Berelasi (Catatan 36)	
PT Bank DKI	43.000.000.000
Pihak Ketiga	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30.000.000.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	10.000.000.000
Jumlah	83.000.000.000

PT Bank DKI

- Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank DKI No. 034/Jamkrida/XII/2022 pada tanggal 22 Desember 2022 tentang penjaminan kredit multiguna, Perusahaan diwajibkan menempatkan deposito yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank DKI sebesar Rp10.000.000.000.
- Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 023/Jamkrida/VII/2022 pada tanggal 5 Juli 2022 tentang kafalah KUR iB, Perusahaan diwajibkan mempertahankan penempatan dana sebesar Rp3.000.000.000 pada penerima jaminan.
- Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 006/Jamkrida/VII/2020 pada tanggal 20 Juli 2020 tentang penjaminan (kafalah) pembiayaan multiguna dan multijasa, Perusahaan wajib menempatkan deposito yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank DKI sebesar Rp10.000.000.000.
- Berdasarkan perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank DKI No. 002/Jamkrida/II/2017 pada tanggal 20 Februari 2017 tentang penjaminan kredit mikro dan kecil, Perusahaan diwajibkan untuk menempatkan deposito yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank DKI sebesar Rp10.000.000.000.
- Berdasarkan perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank DKI No. 001/Jamkrida/II/2017 pada tanggal 20 Februari 2017 tentang Penjaminan kredit usaha, Perusahaan diwajibkan untuk menempatkan deposito yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank DKI sebesar Rp10.000.000.000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Sesuai dengan surat No. HBK.GI2/SPPK.069/2022 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 6 Desember 2022 perihal Surat Penawaran Pemberian Fasilitas *Commercial Line*. Perusahaan wajib menempatkan dana minimal sebesar 10% dari fasilitas *Commercial Line* dari sebesar Rp200.000.000.000 yang diatur sebagai syarat efektif Perjanjian Minimal sebesar Rp20.000.000.000 untuk Penerbitan Kontra Bank Garansi.

6. RESTRICTED DEPOSIT

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	Related Parties (Note 36)
	43.000.000.000	PT Bank DKI
		Third Parties
	20.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Jumlah	63.000.000.000	Total

PT Bank DKI

- Based on the Cooperation Agreement with PT Bank DKI No. 034/Jamkrida/XII/2022 dated December 22, 2022 concerning multipurpose credit guarantees, the Company is required to place a time-restricted deposit at PT Bank DKI of Rp10,000,000,000.
- In the Cooperation Agreement No. 023/Jamkrida/VII/2022 on July 5, 2022 concerning KUR iB kafalah, the Company is required to maintain the placement of funds of Rp3,000,000,000 to the guarantee recipient.
- Based on the Cooperation Agreement No. 006/Jamkrida/VII/2020 dated July 20, 2020 concerning the guarantee (kafalah) of multipurpose financing and mutijasa, the Company is required to place a deposit that is limited in use to PT Bank DKI worth Rp10,000,000,000.
- Based on the Cooperation Agreement with PT Bank DKI No. 002/Jamkrida/II/2017 dated February 20, 2017 concerning micro and small credit guarantees, the Company is required to place a time-restricted deposit at PT Bank DKI of Rp10,000,000,000.
- Based on the Cooperation agreement with PT Bank DKI No. 001 / Jamkrida / II / 2017 dated February 20, 2017 concerning Business Credit Guarantee, the Company is required to place a deposit that is limited in use to PT Bank DKI worth Rp10,000,000,000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

In accordance with letter No. HBK.GI2/SPPK.069/2022 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dated December 6, 2022 regarding the Offer Letter for the Provision of Commercial Line Facilities. The Company is required to place a minimum of 10% of the Commercial Line facility from Rp200,000,000,000 which is regulated as an effective condition of the Minimum Agreement of Rp20,000,000,000 for the Issuance of Counter Bank Guarantee.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. DEPOSITO YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Berdasarkan akta addendum I No. 22 tanggal 14 Juni 2024 tentang perjanjian pemberian fasilitas commercial line kontra bank garansi, Bank Mandiri (Persero) Tbk setuju memberikan fasilitas commercial line kontra bank garansi menjadi Rp300.000.000.000 sehingga deposito yang dibatasi penggunaannya menjadi sebesar Rp30.000.000.000.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 2822/JJ-1/KBP/01.06/PKS/2024 pada tanggal 18 September 2024 tentang Kontra Bank Garansi, Perusahaan diwajibkan untuk menempatkan deposito yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar Rp10.000.000.00 sampai dengan jangka waktu kerja sama berakhir.

6. RESTRICTED DEPOSIT (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

Based on the deed of addendum I No. 22 dated June 14, 2024 concerning the agreement to provide commercial line facilities against bank guarantees, Bank Mandiri (Persero) Tbk agreed to provide commercial line facilities against bank guarantees to Rp300,000,000,000 so that the deposits that are restricted from use are Rp30,000,000,000.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Based on the Cooperation Agreement No. 2822/JJ-1/KBP/01.06/PKS/2024 dated September 18, 2024 concerning Counter Bank Guarantees, the Company is required to place a restricted deposit in PT Bank Syariah Indonesia Tbk in the amount of Rp10,000,000.00 until the cooperation period ends.

7. PIUTANG HASIL INVESTASI

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Hasil investasi dari:		
Obligasi dimiliki hingga jatuh tempo	6.189.410.445	5.130.364.065
Sukuk	1.388.833.542	781.416.123
Deposito	303.055.781	232.919.726
Jumlah	7.881.299.768	6.144.699.914

7. INTEREST RECEIVABLES

Interest from:
Held to maturity bonds
Sukuk
Time deposits
Total

8. PIUTANG PENJAMINAN ULANG

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi	24.674.217.453	15.829.876.598
PT Best One Asia		
Reinsurance Brokers	7.747.875.393	18.092.917.281
PT Esa Bina Sejati	2.336.828.908	1.189.056.241
PT Asuransi Jiwa RelianceIndonesia	110.658.618	-
PT Asuransi Simas Jiwa	-	161.712.704
Sub Jumlah	34.869.580.372	35.273.562.824
Cadangan penurunan nilai	(18.333.994.863)	(4.636.285.322)
Piutang Penjaminan Ulang - Bersih	16.535.585.509	30.637.277.502

8. RE-GUARANTEE RECEIVABLES

PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi
PT Best One Asia
Reinsurance Brokers
PT Esa Bina Sejati
PT Asuransi Jiwa RelianceIndonesia
PT Asuransi Simas Jiwa
Sub Total

Allowance for impairment
Re-guarantee Receivable - Net

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai piutang penjaminan ulang pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

Management believes that the impairment reserves for re-guarantee e receivables as of December 31, 2024 and 2023 are sufficient to cover losses on impairment of such receivables.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PIUTANG PENJAMINAN BERSAMA

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>
PT Sinarmas Penjamin Kredit	5.331.858.545	5.462.159.876
PT Jamkrida Jawa Barat	3.976.979.465	890.963.350
Sub Jumlah	9.308.838.010	6.353.123.226
 Cadangan penurunan nilai	 (456.331.898)	 (61.580.549)
Piutang Penjaminan		
Bersama - Bersih	8.852.506.112	6.291.542.677

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai piutang penjaminan bersama pada tanggal 31 Desember 2024 cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

9. CO-GUARANTEE RECEIVABLES

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>
PT Sinarmas Penjamin Kredit	5.331.858.545	5.462.159.876
PT Jamkrida Jawa Barat	3.976.979.465	890.963.350
Sub Total	9.308.838.010	6.353.123.226
 Allowance for impairment	 (456.331.898)	 (61.580.549)
Co-guarantee		
Receivable - Net	8.852.506.112	6.291.542.677

Management believes that the impairment reserves for co-guarantee receivables as of December 31, 2024 are sufficient to cover losses on impairment of such receivables.

10. ASET PENJAMINAN ULANG

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset penjaminan ulang masing-masing sebesar Rp81.650.075.422 dan Rp25.775.097.322.

Aset penjamin ulang merupakan bagian penjamin ulang atas cadangan klaim yang diakui Perusahaan (Catatan 20).

10. RE-GUARANTEE ASSETS

As of December 31, 2024 and 2023 re-guarantee assets amounted to Rp81,650,075,422 and Rp25,775,097,322 respectively.

Re-guarantee assets are portion of re-guarantee on claim reserve that is recognized by the Company (Note 20).

11. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>
Jangka Pendek:		
Biaya Dibayar Di Muka:		
Fee based income	3.018.282.732	3.233.981.208
Asuransi	234.869.726	-
Sewa	66.600.000	-
Lain-lain	25.710.000	23.289.130
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	3.345.462.458	3.257.270.338
 Uang Muka:		
Operasional	22.900.000	23.000.000
Jumlah Uang Muka	22.900.000	23.000.000
 Jumlah	3.368.362.458	3.280.270.338
 Jangka Panjang:		
Biaya Dibayar Dimuka:		
Fee based income	13.004.086.392	12.614.288.912
Jumlah	13.004.086.392	12.614.288.912

Fee based income diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya sertifikat penjaminan.

11. PREPAID EXPENSE AND ADVANCES

Short-term:
Prepaid Expenses:
Fee based income
Insurance
Rent
Other
Total Prepaid Expenses
 Advances:
Operational
Total Advances
 Total
 Long-term:
Prepaid Expenses:
Fee based income
Total

Fee based income is recognized during the guarantee period and is allocated based on the month the guarantee certificate is issued.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP

12. FIXED ASSETS

31 Desember 2024/ December 31, 2024					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan:					Acquisition Cost:
Inventaris kantor	2.672.790.111	303.934.424	-	2.976.724.535	Office equipment
Renovasi kantor	659.567.754	-	-	659.567.754	Office renovation
Kendaraan	29.860.000	18.100.000	-	47.960.000	Vehicle
Jumlah	3.362.217.865	322.034.424	-	3.684.252.289	Total
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan:					Depreciation:
Inventaris kantor	2.308.739.640	77.296.920	-	2.386.036.560	Office equipment
Renovasi kantor	602.088.700	-	-	602.088.700	Office renovation
Kendaraan	26.874.000	452.500	-	27.326.500	Vehicle
Jumlah	2.937.702.340	77.749.420	-	3.015.451.760	Total
Nilai Buku	424.515.525			668.800.529	Book Value
31 Desember 2023/ December 31, 2023					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan:					Acquisition Cost:
Inventaris kantor	2.570.800.111	101.990.000	-	2.672.790.111	Office equipment
Renovasi kantor	659.567.754	-	-	659.567.754	Office renovation
Kendaraan	29.860.000	-	-	29.860.000	Vehicle
Jumlah	3.260.227.865	101.990.000	-	3.362.217.865	Total
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan:					Depreciation:
Inventaris kantor	2.235.797.251	72.942.389	-	2.308.739.640	Office equipment
Renovasi kantor	602.088.700	-	-	602.088.700	Office renovation
Kendaraan	26.874.000	-	-	26.874.000	Vehicle
Jumlah	2.864.759.951	72.942.389	-	2.937.702.340	Total
Nilai Buku	395.467.914			424.515.525	Book Value

Beban penyusutan pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp77.749.420 dan Rp72.942.389 (Catatan 35).

Depreciation expense of fixed assets in 2024 and 2023 amounted to Rp77,749,420 and Rp72,942,389, respectively (Note 35).

Pada tanggal 22 Juli 2024, Perusahaan mengasuransikan aset tetap berupa kendaraan bermotor dengan nomor polis 12.4N0.0002.31141 dan 12.4N0.0002.31153 senilai Rp20.000.000, yang diterbitkan oleh PT Asuransi Simas Insurtech, untuk dua unit kendaraan roda dua. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menuntup kemungkinan kerugian atas risiko kemudian hari.

On July 22, 2024, the Company insured fixed assets in the form of motor vehicles with policy numbers 12.4N0.0002.31141 and 12.4N0.0002.31153 worth Rp20,000,000, issued by PT Asuransi Simas Insurtech, for two units of two-wheeled vehicles. Management is of the opinion that the sum insured is sufficient to cover the possibility of loss on future risks.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET HAK GUNA

13. RIGHT OF USE ASSETS

31 Desember 2024/ December 31, 2024						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penyesuaian/ Adjustment	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan:						Acquisition Cost:
Aset hak guna	3.219.318.934	-	-	-	3.219.318.934	Right of use assets
Jumlah	3.219.318.934	-	-	-	3.219.318.934	Total
Akumulasi						Accumulated
Penyusutan:						Depreciation:
Aset hak guna	1.787.287.795	-	673.684.692	-	2.460.972.487	Right of use assets
Jumlah	1.787.287.795	-	673.684.692	-	2.460.972.487	Total
Nilai Buku	1.432.031.139				758.346.447	Book Value

31 Desember 2023/ December 31, 2023						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penyesuaian/ Adjustment	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan:						Acquisition Cost:
Aset hak guna	3.903.387.805	(570.658.334)	695.357.043	808.767.580	3.219.318.934	Right of use assets
Jumlah	3.903.387.805	(570.658.334)	695.357.043	808.767.580	3.219.318.934	Total
Akumulasi						Accumulated
Penyusutan:						Depreciation:
Aset hak guna	2.095.349.709	(249.716.047)	695.000.084	753.345.951	1.787.287.795	Right of use assets
Jumlah	2.095.349.709	(249.716.047)	695.000.084	753.345.951	1.787.287.795	Total
Nilai Buku	1.808.038.096				1.432.031.139	Book Value

Beban amortisasi pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp673.684.692 dan Rp695.000.084 (Catatan 35).

Amortization expense charged to operations in 2024 and 2023 amounted to Rp673,684,692 and Rp695,000,084, respectively (Note 35).

14. ASET TAKBERWUJUD

14. INTANGIBLE ASSETS

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Perangkat lunak dan situs web	1.760.550.000	1.760.550.000	Software and website
Dikurangi akumulasi amortisasi	(1.708.750.003)	(1.656.949.999)	Less accumulated amortization
Nilai Buku	51.799.997	103.600.001	Book Value

Beban amortisasi pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp51.800.004 dan Rp110.466.670 (Catatan 35).

Amortization expense in 2024 and 2023 amounted to Rp51,800,004 and Rp110,466,670 respectively (Note 35).

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Di Muka

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	
PPH Pasal 21	127.468.660	-	Income Tax Article 21
PPN Masukan	-	176.358.463	VAT-In
Jumlah	127.468.660	176.358.463	Total

b. Utang Pajak

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	
Pajak Penghasilan:			Income Taxes:
Pasal 4 ayat 2	286.500	-	Article 4 (2)
Pasal 21	-	208.439.133	Article 21
Pasal 23	96.759.154	48.024.022	Article 23
Pasal 25	6.826.890.078	-	Article 25
Pasal 29	1.206.919.662	5.907.572.660	Article 29
Jumlah	8.130.855.394	6.164.035.815	Total

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pajak kini	(8.033.809.740)	(5.907.572.660)	Current tax
Pajak tangguhan	2.078.780.736	1.053.688.626	Deferred tax
Beban Pajak			Income Tax
Penghasilan - Bersih	(5.955.029.004)	(4.853.884.034)	Expenses - Net

15. TAXES

a. Prepaid Tax

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	
PPH Pasal 21	127.468.660	-	Income Tax Article 21
PPN Masukan	-	176.358.463	VAT-In
Jumlah	127.468.660	176.358.463	Total

b. Taxes Payable

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	
Pajak Penghasilan:			Income Taxes:
Pasal 4 ayat 2	286.500	-	Article 4 (2)
Pasal 21	-	208.439.133	Article 21
Pasal 23	96.759.154	48.024.022	Article 23
Pasal 25	6.826.890.078	-	Article 25
Pasal 29	1.206.919.662	5.907.572.660	Article 29
Jumlah	8.130.855.394	6.164.035.815	Total

c. Income Tax Benefit (Expense)

Reconciliation between profit before income tax and the Company's estimated taxable income for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXES (continued)

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (lanjutan)			c. <i>Income Tax Benefit (Expense) (continued)</i>
	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	33.357.618.910	24.314.021.580	<i>Profit before income tax statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Perbedaan Temporer:			<i>Temporary Differences:</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	9.358.890.070	4.884.327.523	<i>Reserve allowance for receivables</i>
Liabilitas imbalan kerja	38.137.000	(434.209.000)	<i>Employee benefits liabilities</i>
Amortisasi	32.375.004	69.041.667	<i>Amortization</i>
Penyusutan	19.601.272	17.958.562	<i>Depreciation</i>
Sub Jumlah	9.449.003.346	4.537.118.752	<i>Sub Total</i>
Perbedaan Tetap:			<i>Permanent Differences:</i>
Cadangan klaim	32.623.952.459	43.025.131.593	<i>Claim reserve</i>
Akrual insentif, tantiem dan jasa produksi	6.752.504.036	4.783.528.544	<i>Accrual incentive, tantiem, and bonus</i>
Iklan dan promosi	2.053.715.718	1.623.429.533	<i>Advertising and promotion</i>
Administrasi dan umum	1.321.145.697	1.265.619.500	<i>Administrative and general</i>
Beban pajak	813.870.560	1.368.041.508	<i>Tax expense</i>
Administrasi bank	482.555.590	390.164.583	<i>Bank administration</i>
Perjalanan dinas	236.589.141	-	<i>Official trips</i>
Representasi	12.876.234	13.483.048	<i>Representation</i>
Sumber daya manusia	(1.312.950.208)	332.086.711	<i>Human resources</i>
Pendapatan yang telah dikenakan PPh final:			<i>Income already subjected to final tax:</i>
Pendapatan investasi	(49.250.566.295)	(34.034.561.171)	<i>Investment income</i>
Pendapatan jasa giro	(22.997.570)	(242.972.803)	<i>Bank interest income</i>
Sub Jumlah	(6.289.304.638)	18.523.951.046	<i>Sub Total</i>
Laba Fiskal Tahun Berjalan	36.517.317.618	47.375.091.378	<i>Fiscal Profit For the Year</i>
Kompensasi Rugi Fiskal	-	(20.522.487.635)	<i>Compensation Fiscal Loss</i>
Pembulatan (Penghasilan Kena Pajak)	36.517.317.000	26.852.603.000	<i>Rounding (Taxable Income)</i>
Beban Pajak Kini	8.033.809.740	5.907.572.660	<i>Current Tax Expense</i>
Dikurangi pajak dibayar di muka:			<i>Deduct taxes paid in advance:</i>
PPh Pasal 25	6.826.890.078	-	<i>Income Tax Article 25</i>
Pajak Penghasilan Kurang Bayar	1.206.919.662	5.907.572.660	<i>Under Payment of Income Tax</i>

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak tangguhan

31 Desember 2024/ December 31, 2024					
Dikreditkan (dibebankan) ke/ Credit (charge) to					
		(Dibebankan) Dikreditkan ke Laba Rugi/ (Charged) Credited to Profit or Loss	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Credited to Other Comprehensive Income	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
1 Januari 2024/ January 1, 2024					
Aset pajak tangguhan					Deffered tax assets
Aset tetap	45.744.972	4.312.280	-	50.057.252	Fixed assets
Amortisasi	70.711.667	7.122.501	-	77.834.168	Amortization
Libilitas imbalan kerja	235.346.320	8.390.140	105.654.340	349.390.800	Employee benefit liabilities
Piutang penjaminan	1.074.552.055	2.058.955.814	-	3.133.507.869	Guarantee receivable
Jumlah	1.426.355.014	2.078.780.735	105.654.340	3.610.790.089	Total

31 Desember 2023/ December 31, 2023					
Dikreditkan (dibebankan) ke/ Credit (charge) to					
		(Dibebankan) Dikreditkan ke Laba Rugi/ (Charged) Credited to Profit or Loss	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Credited to Other Comprehensive Income	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
1 Januari 2023/ January 1, 2023					
Aset pajak tangguhan					Deffered tax assets
Aset tetap	41.794.088	3.950.884	-	45.744.972	Fixed assets
Amortisasi	-	70.711.667	-	70.711.667	Amortization
Libilitas imbalan kerja	222.451.900	(95.525.980)	108.420.400	235.346.320	Employee benefit liabilities
Aset tersedia untuk dijual	(102.812.583)	-	102.812.583	-	Assets available for sale
Piutang penjaminan	-	1.074.552.055	-	1.074.552.055	Guarantee receivable
Jumlah	161.433.405	1.053.688.626	211.232.983	1.426.355.014	Total

16. UTANG PENJAMINAN ULANG

16. RE-GUARANTEE PAYABLES

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi	11.680.564.737	5.507.376.928	PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi
PT Best One Asia			PT Best One Asia
Reinsurance Brokers	7.269.367.256	13.247.855.629	Reinsurance Brokers
PT Esa Bina Sejati	4.164.562.286	1.400.611.890	PT Esa Bina Sejati
PT Asuransi Sinarmas	-	53.850.582	PT Asuransi Sinarmas
PT Asuransi Simas Jiwa	-	31.699.599	PT Asuransi Simas Jiwa
Jumlah	23.114.494.279	20.241.394.628	Total

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG PENJAMINAN BERSAMA

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>
PT Sinarmas Penjaminan Kredit	9.363.134.555	7.002.409.592
PT Jamkrida Jawa Barat	6.471.535.113	761.500.974
Jumlah	15.834.669.668	7.763.910.566

17. CO - GUARANTEE PAYABLES

PT Sinarmas Penjaminan Kredit
PT Jamkrida Jawa Barat
Total

18. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>
PT BNI Multifinance	449.595.878	990.529.977
PT Surya Sudeco	319.695.863	507.783.230
Jumlah	769.291.741	1.498.313.207
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	567.487.213	647.690.950
Bagian Jangka Panjang Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun	201.804.528	850.622.257

PT BNI Multifinance
PT Surya Sudeco
Total

*Less short -
term portion*
**Long-Term
portion**

Perjanjian Kerja Sama

a. PT BNI Multifinance

Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan kontrak sewa kendaraan dengan nomor perjanjian BNIMF/6.2/038(A)007/Jamkrida-III/2019 antara PT BNI Multifinance dengan Perusahaan yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2019, untuk 6 unit kendaraan bermotor dengan jangka waktu selama 48 bulan dan 4 unit kendaraan bermotor jangka waktu selama 60 bulan.

Pada tahun 2021, dilakukan addendum kontrak sewa kendaraan dengan nomor perjanjian BNIMF/6.2/038(A)(I)014/add/Jamkrida/XI/2021 yang dibuat pada tanggal 4 November 2021. Berdasarkan addendum tersebut Perusahaan melakukan penambahan sewa kendaraan sebanyak 6 unit kendaraan bermotor dengan Jangka waktu selama 48 bulan dan 5 unit kendaraan bermotor jangka waktu selama 60 bulan.

b. PT Surya Sudeco

Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan kontrak baru sewa kendaraan dengan nomor perjanjian No.695.1/JJ-3.1/PNG.00.03/PKS -/2023 antara PT Surya Sudeco dengan Perusahaan yang dibuat pada tanggal 16 juni 2023, untuk 4 unit kendaraan bermotor dengan jangka waktu 36 bulan.

Cooperation Agreement

a. PT BNI Multifinance

In 2019, the Company obtained vehicle lease contract with the agreement number BNIMF/6.2/038(A)007/ Jamkrida/III/2019 between PT BNI Multifinance and the Company made on March 14, 2019, for 6 units of motorized vehicles for a period of 48 months and 4 units of motor vehicles for a period of 60 months.

In 2021, an addendum to the vehicle lease contract was carried out with agreement number BNIMF/6.2/038(A)(I)014/add/Jamkrida/XI/2021, which was made on November 4, 2021. Based on the addendum, the Company leases additional 6 units of motor vehicles for a period of 48 months and 5 units of motor vehicles for a period of 60 months.

b. PT Surya Sudeco

In 2023, the Company entered into a new vehicle lease contract with agreement number No.695.1/JJ-3.1/PNG.00.03/PKS/2023 between PT Surya Sudeco and the Company made on June 16, 2023, for 4 units of motor vehicles with a period of 36 months.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. BEBAN AKRUAL

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>
Insentif, tantiem dan jasa produksi	10.519.427.486	7.344.815.985
Beban klaim	8.364.783.197	6.351.660.121
Jaminan kas	1.744.022.346	1.010.301.086
Biaya lainnya	2.369.149.463	320.804.588
Jumlah	22.997.382.492	15.027.581.780

Biaya insentif dan jasa produksi yang masih harus dibayar merupakan kewajiban Perusahaan berupa beban jasa produksi karyawan dan tantiem manajemen yang akan diselesaikan melalui keputusan Direksi dan RUPS.

Beban akrual atas klaim terdiri dari produk penjaminan mikro dan kecil, kafalah penjaminan mikro dan kecil, serta penjaminan usaha. Pencatatan beban akrual atas klaim dilakukan berdasarkan tanggal diterbitkannya persetujuan klaim.

19. ACCRUED EXPENSES

<i>Incentive, tantiem, and bonus</i>	
<i>Claim expense</i>	
<i>Cash collateral</i>	
<i>Others</i>	
Total	

Accrued incentive and bonus pertain to employee bonus expenses and management bonuses to be settled in accordance with the Director's decision and General Meeting of Shareholders (RUPS).

Accrued expenses on claims represent micro and small guarantee products, micro and small guarantee kafalah, and business guarantee. The recording of accrued expenses on claims is based on the date of issuance of claim approval.

20. CADANGAN KLAIM

Cadangan klaim pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing Rp189.084.673.472 dan Rp100.585.743.014.

Cadangan klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

Cadangan klaim dihitung sesuai dengan definisi kontrak jaminan, maka identifikasi akun terdampak pada liabilitas cadangan klaim, dengan mengukurnya menggunakan basis ECL sesuai dengan PSAK 109, dengan memperhatikan faktor-faktor makro sebagai variabel bebas yang berdampak pada variabel terikatnya.

20. CLAIM RESERVE

Claim reserves as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp189,084,673,472 and Rp100,585,743,014 respectively.

Claim reserves is the reserve of claim that might occur in the coming years from the guarantee that has not mature yet.

The reserve for claims is calculated in accordance with the definition of a guarantee contract, then the identification of the affected account on the claim reserve liability, by measuring it on the ECL basis in accordance with PSAK 109, taking into account macro factors as independent variables that have an impact on the dependent variable.

21. PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>
Pendapatan ditangguhkan	223.139.509.203	210.888.028.401
Dikurangi bagian jangka pendek	(32.036.004.188)	(32.921.421.872)
Bagian Jangka Panjang	191.103.505.015	177.966.606.529

Pendapatan ditangguhkan merupakan Imbal Jasa penjaminan yg sudah diterima dan sertifikat penjaminannya sudah diterbitkan, tetapi belum diakui sebagai imbalan jasa penjaminan karena pengakuannya mengikuti jangka waktu penjaminan kredit.

21. DEFERRED INCOME

<i>Deferred income</i>	
<i>Less short-time portion</i>	
Long-Term Portion	

Deferred income is a guarantee fee that has been received and the guarantee certificate has been issued, but has not been recognized as a guarantee service fee because the recognition follows the credit guarantee period.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang No.6/2023 pada tahun 2023 dan Undang-Undang No.11/2020 pada tahun 2022.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut masing-masing sebanyak 53 orang dan 45 orang pada tahun 2024 dan 2023.

Beban imbalan kerja jangka panjang yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 23, 2023</u>
Beban jasa kini	664.812.000	541.450.000
Beban bunga	40.597.000	34.746.000
Aktuaria	122.168.000	(104.139.000)
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	827.577.000	472.057.000
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:		
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:		
Perubahan asumsi keuangan	156.000	144.531.000
Penyesuaian pengalaman	168.773.000	115.729.000
Pengembalian aset rencana	311.318.000	232.560.000
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif lain	480.247.000	492.820.000
Jumlah	1.307.824.000	964.877.000

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 23, 2023</u>
Liabilitas imbalan kerja pada awal tahun	1.069.755.000	1.011.145.000
Beban imbalan kerja tahun berjalan	827.577.000	472.057.000
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:		
Kerugian (keuntungan) aktuarial	168.929.000	260.259.000
Pengembalian rencana aset	311.318.000	232.560.000
Pembayaran imbalan kerja	(103.428.000)	(254.721.000)
Pembayaran iuran periode berjalan	(686.012.000)	(651.545.000)
Liabilitas imbalan kerja akhir tahun	1.588.139.000	1.069.755.000

22. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

The amount of post-employment remuneration is calculated based on applicable regulations, namely Law No. 6/2023 in 2023 and Law No. 11/2020 in 2022.

The number of employees entitled to the post-employment compensation is 53 people and 45 people in 2024 and 2023, respectively.

Long-term employee benefit expense recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income follows:

Current service costs
Interest costs
Actuarial
Components of defined benefit costs recognized in profit or loss
Remeasurement on the defined benefit liability:
Actuarial losses (gain) arising from:
Changes in financial assumptions
Experiences adjustment
Return on plan assets
Components of defined benefit cost recognized in other comprehensive income
Total

Movements of long-term employee benefits liability are as follows:

Employee benefits liability at beginning of the year
Current year's employee benefit expense
Remeasurement on the defined benefit liability:
Actuarial losses (gain)
Return on plan assets
Payment of employee benefits
Payment of contributions for current period
Employee benefits liability at the end of the year

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan imbalan pasti pasca-kerja:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 23, 2023	
Tingkat diskonto	7,10%	6,68%	Discount rate
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	6,00%	6,00%	Future salary increases
Tabel mortalita	TMI IV (2019)	TMI IV (2019)	Mortality table
Tingkat cacat	10%	10%	Rate of disability
Usia Pensiun	56	56	Retirement age

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal, aktuaris independen, dalam Laporan No. 24068/JAKJ/DF/01/2025 tanggal 24 Januari 2025.

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

The latest actuarial calculations for long-term employee benefit liabilities were carried out by the Actuarial Consultant Firm Enny Diah Awal, an independent actuary, in Report No. 24068/JAKJ/DF/01/2025 dated January 24, 2025.

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024 and 2023 adalah sebagai berikut:

The sensitivities of the overall long-term employee benefits liability to changes in the weighted principal assumptions as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

2024				
Dampak terhadap kenaikan (penurunan) liabilitas imbalan kerja jangka panjang/ Impact of increase (decrease) on long-term employee benefits liability				
	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1,00%	1.234.764.000	1.180.100.000	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1,00%	1.180.071.000	1.235.249.000	Salary growth rate
2023				
Dampak terhadap kenaikan (penurunan) liabilitas imbalan kerja jangka panjang/ Impact of increase (decrease) on long-term employee benefits liability				
	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1,00%	1.643.073.000	2.223.060.000	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1,00%	2.222.897.000	1.638.645.000	Salary growth rate

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS LAIN-LAIN DALAM PENYELESAIAN

	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>
IJP dalam proses	21.851.118.652	29.548.761.421
Tampungan subrogasi	6.147.086.313	2.702.482.969
Jumlah	27.998.204.965	32.251.244.390

IJP dalam proses merupakan imbal jasa penjaminan yang telah diterima, namun belum diterbitkan sertifikat penjaminan karena berkas permohonan penerbitan sertifikat penjaminan belum lengkap atau terdapat kekurangan pembayaran imbal jasa penjaminan.

Tampungan subrogasi merupakan subrogasi yang telah diterima namun datanya belum dapat teridentifikasi.

Liabilitas lain-lain dalam penyelesaian merupakan uang masuk yang berumur kurang dari 1 tahun.

23. OTHER LIABILITIES IN PROGRESS

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	
	29.548.761.421	IJP in process
	2.702.482.969	Subrogation deposit
	32.251.244.390	Total

The IJP in the process is a guarantee fee that has been received, but has not been issued a guarantee certificate because the application file for the issuance of a guarantee certificate is incomplete or there is a lack of payment of guarantee fees.

Subrogation reservoir is a subrogation that has been received but the data has not been identified.

Other liabilities in progress represent received cash that are less than 1 years.

24. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset tertentu Perusahaan:

24. FAIR VALUE MEASUREMENT

The following table provides the fair value measurement of the Company's certain assets:

2024					
Pengukuran nilai wajar menggunakan:/ Fair value measurement using:					
		Harga kuotasian dalam pasar aktif (tahap 1)/ Quoted prices in active market (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (tahap 2)/ Significant observable input (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tahap 3)/ Significant unobservable input (level 3)	
Nilai Tercatat/ Carrying Value					
Aset yang dimiliki					Assets measurement
Pada nilai wajar:					At fair value:
Obligasi dimiliki					Hold to
hingga jatuh tempo	614.241.634.349	603.774.331.152	-	-	mature bonds
Reksa dana tersedia					Mutual funds
untuk dijual	84.772.474.689	84.772.474.689	-	-	available for sale
2023					
Pengukuran nilai wajar menggunakan:/ Fair value measurement using:					
		Harga kuotasian dalam pasar aktif (tahap 1)/ Quoted prices in active market (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (tahap 2)/ Significant observable input (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tahap 3)/ Significant unobservable input (level 3)	
Nilai Tercatat/ Carrying Value					
Aset yang dimiliki					Assets measurement
Pada nilai wajar:					at fair value:
Obligasi dimiliki					Hold to
hingga jatuh tempo	459.722.169.829	476.278.420.335	-	-	mature bonds
Reksa dana tersedia					Mutual funds
untuk dijual	49.811.542.123	49.811.542.123	-	-	available for sale

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Kuotasi harga pasar yang digunakan untuk aset keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan adalah harga penawaran (*bid price*) terkini. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar investasi pada unit reksa dana diukur berdasarkan kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

25. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta No. 62 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn., dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0073131.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 6 April 2024, Pemegang Saham menyetujui penerbitan sejumlah 200.000 lembar saham yang sepenuhnya diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Penyertaan Modal Daerah. Dengan demikian, modal disetor dan ditempatkan Perseroan yang semula sebesar Rp400.000.000.000 atau 400.000 lembar saham, menjadi sebesar Rp600.000.000.000 atau 600.000 lembar saham.

Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sepenuhnya pada tanggal 30 Januari 2024, sebesar 100% atau setara dengan 200.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp200.000.000.000. Realisasi atas penyertaan modal daerah telah dilakukan oleh Perusahaan sebagai penambahan investasi pada instrumen keuangan berupa reksadana, obligasi, dan deposito.

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 9 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn., modal dasar Perusahaan mengalami perubahan dari semula sebesar Rp400.000.000.000 menjadi Rp1.600.000.000.000. Perubahan ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-0033628.AH.01.02 Tahun 2023.

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

24. FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)

The fair value of a financial instrument traded in active market is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. The quoted market price used for financial assets held by the Company is the current bid price. The instruments are included in level 1. The fair value of investment in mutual funds is measured based on quoted market price published as of December 31, 2024 and 2023.

25. SHARE CAPITAL

Based on Deed No. 62 dated March 22, 2024 by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., and approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0073131.AH.01.11.TAHUN 2024 dated April 6, 2024, the Shareholders approved the issuance of 200,000 shares which were fully subscribed by the Provincial Government of DKI Jakarta as Regional Capital Participation. Thus, the Company's paid-up and issued capital, which was originally Rp400,000,000,000 or 400,000 shares, became Rp600,000,000,000 or 600,000 shares.

The authorized capital has been fully invested and paid up on January 30, 2024, amounting to 100% or equivalent to 200,000 shares with a total nominal value of Rp200,000,000,000. The realization of regional capital participation has been carried out by the Company as additional investment in financial instruments in the form of mutual funds, bonds, and deposits.

Based on Deed No. 14 dated June 9, 2023 made before Ashoya Ratam, SH, M.Kn., the authorized capital of the Company was amended from Rp400,000,000,000 to Rp1,600,000,000,000. This change has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Decree No. AHU-0033628.AH.01.02 of 2023.

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. MODAL SAHAM (lanjutan)

25. CAPITAL STOCK (continued)

31 Desember 2024/ December 31, 2024				
Pemegang Saham	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah Modal Disetor/ Total paid-up capital stock	Stockholder
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	595.000	99,17%	595.000.000.000	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Perumda Pasar Jaya	5.000	0,83%	5.000.000.000	Perumda Pasar Jaya
Jumlah	600.000	100%	600.000.000.000	Total

31 Desember 2023/ December 31, 2023				
Pemegang Saham	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah Modal Disetor/ Total paid-up capital stock	Stockholder
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	395.000	98,75%	395.000.000.000	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Perumda Pasar Jaya	5.000	1,25%	5.000.000.000	Perumda Pasar Jaya
Jumlah	400.000	100%	400.000.000.000	Total

Manajemen Permodalan

Capital Management

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

Sesuai dengan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, Perusahaan penjaminan dengan lingkup provinsi diwajibkan memiliki modal sendiri (ekuitas) minimum sebesar Rp50.000.000.000 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut.

In accordance with article 31 paragraph 3 of the Regulation of Financial Services Authority No. 2/POJK.05/2017 concerning Implementation of Guarantee Institution, a guarantee Company with a provincial scope shall be required to have a minimum equity of Rp50,000,000,000 during the period of 3 (three) years after obtaining a business license. As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the regulation.

26. DIVIDEN TUNAI

26. CASH DIVIDENDS

Berdasarkan Akta Notaris No. 59 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn., para Pemegang Saham menyetujui pembagian dividen saham sebesar 40% dari laba bersih, yaitu senilai Rp7.784.055.016. Dividen tersebut dibagikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp7.686.754.330 atau sebesar 98,75% pada tanggal 15 Mei 2024 dan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp97.300.686 atau sebesar 1,25% pada tanggal 17 Mei 2024.

Based on the Notary Deed No. 59 dated March 22, 2024 made before Ashoya Ratam, SH., M.Kn., the Shareholders approved the distribution of share dividends of 40% of net profit, which is worth Rp7,784,055,016. The dividends were distributed to the DKI Jakarta Provincial Government worth Rp 7,686,754,330 or 98.75% on May 15, 2024 and to Perumda Pasar Jaya worth Rp97,300,686 or 1.25% on May 17, 2024.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. DIVIDEN TUNAI (lanjutan)

Selain dari itu Pemegang Saham juga memutuskan untuk (i) menggunakan cadangan tahun 2023 untuk menutup kerugian tahun 2022 sebesar Rp18.863.831.067, dan (ii) membentuk cadangan umum dan cadangan tujuan masing-masing sebesar Rp4.865.034.386 dan Rp6.057.996.889.

26. CASH DIVIDENDS (continued)

In addition, the Shareholders also resolved to (i) utilize the 2023 reserve to cover the 2022 loss amounting to Rp18,863,831,067, and (ii) establish general reserve and purpose reserve amounting to Rp4,865,034,386 and Rp6,057,996,889, respectively.

27. IMBAL JASA PENJAMINAN / KAFALAH

27. GUARANTEE FEES

	2024	2023	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Penjaminan mikro dan kecil	185.511.222.172	152.273.163.080	Guarantee micro and small
Penjaminan multiguna	39.194.818.605	39.064.879.104	Guarantee multipurpose
Kredit usaha rakyat (KUR)	19.130.553.302	15.735.166.868	People's business credit
Penjaminan usaha	12.907.590.891	10.529.938.057	Guarantee business
Penjaminan konstruksi	5.666.912.572	4.112.430.698	Guarantee construction
Kontra bank garansi	4.241.538.527	982.154.783	Bank guarantee
Kredit pemilikan rumah (KPR)	1.961.613.554	1.394.090.127	House ownership credit
Customs bond	1.118.795.750	27.099.379	Customs bond
Surety bond	530.983.336	424.137.479	Surety Bond
Anjak piutang	74.509.676	126.825.388	Factoring
Imbal jasa penjaminan lainnya	83.696	-	Other guarantee fee
Sub Jumlah Konvensional	270.338.622.081	224.669.884.963	Sub Total Conventional
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Kafalah pembiayaan mikro dan kecil	45.009.574.656	58.776.206.338	Guarantee micro and small
Kafalah pembiayaan multiguna	4.094.520.590	2.555.941.228	Guarantee multipurpose
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	2.932.814.011	1.025.736.672	People's business credit.
Kafalah pembiayaan usaha	1.438.331.353	2.003.951.923	Guarantee business
Kafalah pembiayaan konstruksi	868.920.059	822.277.095	Guarantee construction
Kredit pemilikan rumah (KPR)	192.771.609	62.624.115	House ownership credit
Surety bond	30.592.652	75.974.675	Surety Bond
Sub Jumlah Syariah	54.567.524.930	65.322.712.046	Sub Total Sharia
Jumlah	324.906.147.011	289.992.597.009	Total

Pendapatan imbal jasa penjaminan adalah imbal jasa yang diterima oleh Perusahaan dari pelanggan dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya imbal jasa penjaminan dihitung dari tarif imbal jasa penjaminan, plafon kredit dan jangka waktu penjaminan.

Guarantee fee is the amount received by the Company from customers. The amount of guarantee fee is measured using guarantee fee rate, credit limit, and guarantee period.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PENDAPATAN PENJAMINAN LAINNYA

	2024	2023
<u>Konvensional</u>		
Pendapatan subrogasi	10.864.865.875	8.926.084.911
Pendapatan komisi	10.323.165.293	14.217.451.409
Sub Jumlah Konvensional	21.188.031.168	23.143.536.320
<u>Syariah</u>		
Pendapatan komisi	2.051.012.594	3.281.260.235
Pendapatan subrogasi	872.715.691	478.110.815
Sub Jumlah Syariah	2.923.728.285	3.759.371.050
Jumlah	24.111.759.453	26.902.907.370

28. OTHER GUARANTEE REVENUES

<u>Conventional</u>
Subrogation income
Commission income
Sub Total Conventional
<u>Sharia</u>
Commission income
Subrogation income
Sub Total Sharia
Total

29. BEBAN KLAIM

	2024	2023
<u>Konvensional</u>		
Penjaminan mikro dan kecil	78.544.623.259	67.273.229.562
Penjaminan multiguna	15.627.375.543	13.633.686.967
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	7.898.098.074	391.080.670
Penjaminan usaha	4.591.285.725	1.810.502.573
Penjaminan konstruksi	798.061.431	2.867.393.855
Kontra bank garansi	-	1.660.004.037
Kredit kepemilikan rumah (KPR)	183.555.479	489.234.433
Sub Jumlah Konvensional	107.642.999.511	88.125.132.097
<u>Syariah</u>		
Kafalah pembiayaan mikro dan kecil	16.078.222.830	11.800.679.341
Kafalah pembiayaan multiguna	291.246.194	1.024.788.400
Sub Jumlah Syariah	16.369.469.024	12.825.467.741
Jumlah	124.012.468.535	100.950.599.838

29. CLAIM EXPENSES

<u>Conventional</u>
Guarantee micro and small
Guarantee multipurpose
People's business credit (KUR)
Guarantee business
Guarantee construction
Bank guarantee
House ownership credit (KPR)
Sub Total Conventional
<u>Sharia</u>
Guarantee micro and small
Guarantee multipurpose
Sub Total Sharia
Total

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. BEBAN PENJAMINAN ULANG DAN BERSAMA

	2024	2023
<u>Konvensional</u>		
Penjaminan ulang	61.863.732.540	53.062.774.724
Penjaminan bersama	47.038.520.849	42.104.454.358
Sub Jumlah Konvensional	108.902.253.389	95.167.229.082
<u>Syariah</u>		
Penjaminan ulang	8.183.208.651	10.024.765.065
Penjaminan bersama	20.283.160.513	26.249.264.571
Sub Jumlah Syariah	28.466.369.164	36.274.029.636
Jumlah	137.368.622.553	131.441.258.718

30. RE-GUARANTEE AND CO-GUARANTEE EXPENSE

<u>Conventional</u>
Re-Guarantee
Co-Guarantee
Sub Total Conventional
<u>Sharia</u>
Re-Guarantee
Co-Guarantee
Sub Total Sharia
Total

31. BEBAN FEE BASED INCOME

	2024	2023
<u>Konvensional</u>		
Penjaminan mikro dan kecil	10.578.643.868	8.338.167.058
Penjaminan multiguna	2.445.773.961	2.922.519.403
Bank garansi	311.432.128	49.716.898
Penjaminan usaha	295.905.583	402.751.051
Penjaminan konstruksi	201.907.337	147.343.001
Customs bond	154.970.418	3.592.354
Surety bond	13.320.218	6.184.500
Anjak Piutang	3.003.534	9.612.670
Sub Jumlah Konvensional	14.004.957.047	11.879.886.935
<u>Syariah</u>		
Kafalah pembiayaan mikro dan kecil	1.804.332.262	2.457.057.326
Kafalah pembiayaan multiguna	172.792.562	107.929.716
Kafalah pembiayaan usaha	44.194.683	64.714.891
Kafalah pembiayaan konstruksi	35.820.339	30.241.180
Kafalah bank garansi	130.994	-
Sub Jumlah Syariah	2.057.270.840	2.659.943.113
Jumlah	16.062.227.887	14.539.830.048

31. FEE BASED INCOME EXPENSE

<u>Conventional</u>
Guarantee micro and small
Guarantee multipurpose
Guarantee bank
Guarantee business
Guarantee construction
Customs bond
Surety bond
Factoring
Sub Total Conventional
<u>Sharia</u>
Guarantee micro and small
Guarantee multipurpose
Guarantee business
Guarantee construction
Kafalah bank guarantee
Sub Total Sharia
Total

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. PENDAPATAN INVESTASI

	2024	2023
Obligasi dan sukuk	37.882.245.776	25.899.152.971
Deposito	8.717.967.790	5.253.686.624
Laba penjualan investasi	3.254.729.585	3.116.134.428
Amortisasi diskon (premium) obligasi	(604.376.856)	(234.412.852)
Jumlah	49.250.566.295	34.034.561.171

32. INVESTMENT INCOME

Bonds and sukuk
Time deposits
Profit on sell of investment
Amortization discount
(premium) on bond
Total

33. BEBAN SUMBER DAYA MANUSIA

	2024	2023
Gaji dan tunjangan	11.685.080.599	9.636.052.198
Insentif, tantiem dan jasa produksi	6.767.418.184	4.783.528.544
PPh pasal 21	1.598.312.034	924.900.653
Tunjangan hari raya	1.101.395.017	895.006.865
Asuransi kesehatan	938.335.208	565.835.041
Imbalan kerja (Catatan 22)	827.577.000	472.057.000
Tunjangan pensiun	734.897.397	728.198.317
Tunjangan cuti	660.519.483	596.756.600
Pendidikan dan pelatihan	145.498.403	162.466.963
Kompensasi	80.430.000	-
Jumlah	24.539.463.325	18.764.802.181

33. PERSONNEL EXPENSE

Salaries and benefits
Incentive, tantiem, and bonus
Income tax article 21
Special day allowance
Healthcare insurance
Employee benefit (Note 22)
Retirement allowance
Leave allowance
Education and training
Compensation
Total

34. BEBAN OPERASIONAL

	2024	2023
Iklan dan promosi	2.053.715.718	1.623.429.533
Sewa	1.852.732.924	2.302.271.026
Biaya penagihan	697.814.686	900.272.253
Perjalanan dinas	236.589.141	236.680.000
Jumlah	4.840.852.469	5.062.652.812

34. OPERATING EXPENSE

Advertising and promotion
Rent
Collection fee
Business travel
Total

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2024	2023	
Jasa profesional	3.640.230.265	832.052.610	Professional fee
Keperluan kantor	2.071.637.378	1.763.112.215	Office supplies
Amortisasi aset hak guna (Catatan 13)	673.684.692	695.000.084	Amortization of right of use assets (Note 13)
Komunikasi dan energi	449.032.502	306.398.947	Communication and energy
Alat tulis kantor	376.289.175	228.517.986	Office stationery
Transportasi	339.088.495	461.736.808	Transportation
Rapat kerja	144.450.555	95.462.519	Business meeting
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	77.749.420	72.942.389	Depreciation of fixed assets (Note 12)
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 14)	51.800.004	110.466.670	Amortization of intangible assets (Note 14)
Lain-lain (dibawah Rp100.000.000)	148.485.288	159.366.995	Others (below Rp100,000,000)
Jumlah	7.972.447.774	4.725.057.223	Total

35. ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES

36. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	2024	2023	
Jasa giro	233.408.242	109.585.926	Current account service
Beban pajak	(813.870.560)	(1.368.041.508)	Tax expense
Lain-lain	(692.966.262)	(256.777.706)	Others
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih	(1.273.428.580)	(1.515.233.288)	Total Other Expense - Net

36. OTHER INCOME (EXPENSES)

37. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dengan pihak berelasi

- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan pemegang saham Perusahaan.
- PT Bank DKI adalah perusahaan yang berada di bawah pengendalian yang sama dengan perusahaan.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

37. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of relationships with related parties

- Regional Government of DKI Jakarta is a stockholder of the Company.
- PT Bank DKI is a company which is under common control as the Company.

Transactions with Related Parties

	2024	2023	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets		
			2024	2023	
Aset kas dan setara kas	68.564.717.738	83.349.264.956	6,0%	10,2%	Assets cash and cash equivalent
Investasi deposito	86.000.000.000	55.750.000.000	7,5%	6,9%	Investment time deposit
Deposito yang dibatasi penggunaannya	33.000.000.000	43.000.000.000	2,9%	5,3%	Restricted deposit
Jumlah	187.564.717.738	182.099.264.956	16,3%	22,4%	Total

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. INFORMASI SEGMENT

38. SEGMENT INFORMATION

	31 Desember 2024/ December 31, 2024			
	Laporan Posisi Keuangan Segmen/ Segment Statement of Financial Position			
	Unit Usaha Syariah/ Sharia Business Unit	Unit Konvensional/ Conventional Unit	Gabungan/ Combined	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	1.962.699.236	100.654.979.290	102.617.678.526	Cash and cash equivalents
Investasi				Investments
Deposito	36.910.000.000	92.700.000.000	129.610.000.000	Time deposits
Reksa dana	11.427.969.763	73.344.504.926	84.772.474.689	Mutual funds
Piutang hasil investasi	1.483.471.739	6.397.828.029	7.881.299.768	Interest receivables
Piutang penjaminan ulang	4.286.776.856	12.248.808.653	16.535.585.509	Re-guarantee receivables
Piutang penjaminan bersama	5.836.731.361	3.015.774.751	8.852.506.112	Co-guarantee receivables
Aset penjaminan ulang	-	81.650.075.422	81.650.075.422	Re-guaranteed assets
Pajak dibayar dimuka	-	127.468.660	127.468.660	Prepaid tax
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	391.408.494	2.976.953.964	3.368.362.458	Prepaid expenses and advances
Piutang segmen	10.136.172.191	-	-	Segmen receivables
Jumlah Aset Lancar	72.435.229.640	373.116.393.695	435.415.451.144	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	-	3.610.790.089	3.610.790.089	Deferred tax assets
Investasi				Investments
Obligasi dimiliki hingga jatuh tempo	125.838.073.009	488.403.561.340	614.241.634.349	Held to maturity bonds
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	1.984.510.938	11.019.575.454	13.004.086.392	Prepaid expenses and advances
Deposito yang dibatasi penggunaannya	23.000.000.000	60.000.000.000	83.000.000.000	Restricted deposit
Aset tetap - bersih	971.065	667.829.464	668.800.529	Fixed assets - net
Aset lain-lain - bersih	-	51.799.997	51.799.997	Other assets - net
Aset hak guna - bersih	-	758.346.447	758.346.447	Right of use assets - net
Jumlah Aset Tidak Lancar	150.823.555.012	564.511.902.791	715.335.457.803	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET	223.258.784.652	937.628.296.486	1.150.750.908.947	TOTAL ASSETS

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

38. SEGMENT INFORMATION (continued)

31 Desember 2024/ December 31, 2024							
Laporan Posisi Keuangan Segmen/ Segment Statement of Financial Position							
	Unit Usaha Syariah/ Sharia Business Unit	Unit Konvensional/ Conventional Unit	Gabungan/ Combined				
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY			
LIABILITAS JANGKA PENDEK				SHORT TERM LIABILITIES			
Utang pajak	-	8.130.855.394	8.130.855.394	Taxes payable			
Utang penjaminan ulang	9.696.962.293	13.417.531.986	23.114.494.279	Guarantee payables			
Utang penjaminan bersama	8.025.048.109	7.809.621.559	15.834.669.668	Co - guarantee payables			
Utang sewa pembiayaan	-	567.487.213	567.487.213	Lease payables			
Beban akrual	2.419.317.234	20.578.065.258	22.997.382.492	Accrued expenses			
Cadangan klaim	20.652.757.618	168.431.915.854	189.084.673.472	Claim reserve			
Pendapatan ditangguhkan	4.027.110.908	28.008.893.280	32.036.004.188	Deferred income			
Liabilitas lain-lain dalam penyelesaian	5.302.723.567	22.695.481.398	27.998.204.965	Other liabilities in progress			
Utang segmen	-	10.136.172.191	-	Segmen payables			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	50.123.919.729	279.776.024.133	319.763.771.671	Total Short Term Liabilities			
LIABILITAS JANGKA PANJANG				LONG TERM LIABILITIES			
Utang sewa pembiayaan	-	201.804.528	201.804.528	Lease payables			
Pendapatan ditangguhkan	33.694.721.556	157.408.783.459	191.103.505.015	Deferred income			
Liabilitas imbalan kerja	-	1.588.139.000	1.588.139.000	Employee benefits liability			
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	33.694.721.556	159.198.726.987	192.893.448.543	Total Long Term Liabilities			
JUMLAH LIABILITAS	83.818.641.285	438.974.751.120	512.657.220.214	TOTAL LIABILITIES			
EKUITAS				EQUITY			
Modal saham	135.500.000.000	464.500.000.000	600.000.000.000	Capital stock			
Komponen Ekuitas Lainnya	25.983.006	1.175.458.475	1.201.441.481	Other equity components			
Saldo laba				Retained earnings			
Ditentukan penggunaannya	-	10.923.031.275	10.923.031.275	Appropriated			
Belum Ditentukan Penggunaannya	3.914.160.361	22.055.055.616	25.969.215.977	Unappropriated			
Jumlah Ekuitas	139.440.143.367	498.653.545.366	638.093.688.733	Total Equity			
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	223.258.784.652	937.628.296.486	1.150.750.908.947	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY			

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

38. SEGMENT INFORMATION (continued)

	2024			
	Laporan Laba Rugi Segmen/ Segment Statement of Profit or Loss			
	Unit Usaha Syariah/ Sharia Business Unit	Unit Konvensional/ Conventional Unit	Gabungan/ Combined	
PENDAPATAN PENJAMINAN				GUARANTEE REVENUES
Pendapatan penjaminan	54.604.926.276	270.301.220.735	324.906.147.011	Guarantee revenues
Pendapatan penjaminan lainnya	2.923.728.285	21.188.031.168	24.111.759.453	Other guarantee revenues
Jumlah pendapatan penjaminan	57.528.654.561	291.489.251.903	349.017.906.464	Total guarantee revenues
BEBAN PENJAMINAN				GUARANTEE EXPENSES
Beban klaim	16.369.469.024	107.642.999.511	124.012.468.535	Claim expense
Beban restitusi	187.886.910	1.087.961.705	1.275.848.615	Restitution expense
Beban penjaminan ulang dan bersama	28.466.369.164	108.902.253.389	137.368.622.553	Re-guarantee and co-guarantee expense
Beban fee based income	2.057.270.840	14.004.957.047	16.062.227.887	Fee based income expense
Penurunan estimasi klaim	7.890.211.684	24.733.740.775	32.623.952.459	Decrease in estimated claims
Jumlah beban penjaminan	54.971.207.622	256.371.912.427	311.343.120.049	Total guarantee expenses
LABA BERSIH PENJAMINAN	2.557.446.939	35.117.339.476	37.674.786.415	NET GUARANTEE INCOME
PENDAPATAN INVESTASI	10.172.158.535	39.078.407.760	49.250.566.295	INVESTMENT INCOME
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban sumber daya manusia	4.314.521.719	20.224.941.606	24.539.463.325	Personnel expense
Beban operasional	915.849.330	3.925.003.139	4.840.852.469	Operating expense
Beban administrasi dan umum	752.702.253	7.219.745.521	7.972.447.774	General and administrative expense
Beban sistem, teknologi, dan pengembangan usaha	113.440.335	584.883.724	698.324.059	System, technology, and operating development expense
Beban kerugian penurunan nilai	3.620.260.960	10.622.956.633	14.243.217.593	Impairment loss expense
Jumlah beban usaha	9.716.774.597	42.577.530.623	52.294.305.220	Total operating expenses
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan lain-lain	87.207.686	(64.210.116)	22.997.570	Others income
Beban lain-lain	(12.614.193)	(1.283.811.957)	(1.296.426.150)	Others expense
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	74.593.493	(1.348.022.073)	(1.273.428.580)	Others income (expenses) - net
LABA USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	3.087.424.370	30.270.194.540	33.357.618.910	OPERATING PROFIT BEFORE INCOME TAX

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah risiko penjaminan, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko penjaminan kredit, risiko likuiditas, dan risiko kredit.

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from the Company's financial instruments are credit guarantee risk, credit risk and liquidity risk. The operational activities of the Company are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Risk management is the responsibility of the Board of Directors (BOD). The BOD has the responsibility to determine the basic principles of the Company's risk management as well as principles covering specific areas, such as credit guarantee risk, liquidity risk and credit risk.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Penjaminan Kredit

Risiko penjaminan kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya *default rate* dan tingkat NPL kredit yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi.

Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka pada proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Conditions, dan Collateral*. Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait.

Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk setiap aspek 5C. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan 56 *scoring* dan atau kelayakan risiko termasuk mitigasi risiko melalui pendekatan *Installment to Disposable Income Ratio (IDIR)* untuk melihat kemampuan bayar, 56 *scoring* informasi debitur Bank Indonesia, 56 *scoring* keuangan dan *Loan To Value (LTV)* untuk melihat kecukupan jaminan yang diberikan. Berdasarkan *score* ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing Terjamin atau sekelompok Terjamin, atau suatu produk baru.

Penjaminan Ulang

Perusahaan mengadakan perjanjian penjaminan ulang dengan PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi, PT Best One Asia Reinsurance Broker dan PT Esa Bina Sejati, sehubungan dengan manajemen risiko atas sertifikat penjaminan. Jumlah risiko retensi sendiri Perusahaan di tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Credit Guarantee Risk

Credit guarantee risk is the risk arising from the failure to fulfill obligations guaranteed. Risk can be seen in the amount of default risk and a guaranteed level of non-performing loan, and returns subrogation receivables.

To minimize the risk of guarantee, then on the process of guarantee, there is a risk identify using the 5C's, Character, Capacity, Capital, Conditions, and Collateral. Items that must be considered for each of these aspects are adapted to the characteristics of credit to be secured, and elaborated on in the system and the related guarantee procedures.

The results of the risk identification process and then followed with the establishment of guarantee risk prediction to determine the amount of guarantee risk. In the implementation, risk prediction can be done qualitatively and / or quantitatively to every aspect of the 5C. Quantitative predictions made by the scoring system and or risk worthiness including the risk mitigation through 56 installment approach to Disposable Income Ratio (IDIR) to look at the ability to pay, Bank Indonesia debtor information system, financial analysis and loan to value (LTV) to look at the adequacy of the guarantee provided. Based on the underwriting risk prediction score is assigned to each Secured or Secured Group, or a new product.

Re – Guarantee

The Company entered into re-guarantee agreements with PT Jakarta Raya Reinsurance Broker, PT Best One Asia Reinsurance Broker and PT Esa Bina Sejati, in connection with the risk management of the guarantee certificates. The amount of the Company's own retention risk in 2024 and 2023 is as follows:

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Penjaminan Ulang (lanjutan)

PT Best One Reinsurance Broker dan PT Esa Bina Sejati

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Re – Guarantee (continued)

PT Best One Reinsurance Broker and PT Esa Bina Sejati

2024			
Jenis Produk/ Type of Product	Batas Perjanjian/ Treaty Limit	Retensi Sendiri/ Own Retention	Sesi Reasuransi/ Reinsurance Session
a. Kredit non produktif/ <i>Non-productive credit</i> (konsumer/ multiguna)/ <i>consumer/ multipurpose</i>)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 2.000.000.000	75% 25.000.000 60%	25% excess 25.000.000 40%
b. Kredit produktif/ <i>Productive credit</i> (Kredit mikro)/ <i>(micro credit)</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 750.000.000	75% 25.000.000 60%	25% excess 25.000.000 40%
c. Kredit produktif/ <i>Productive credit</i> (Kredit usaha/umum)/ <i>(Business/general credit)</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 40.000.000.000	75% 25.000.000 75%	25% excess 25.000.000 25%
d. Kredit konstruksi dan pengadaan barang dan jasa/ <i>Construction credit and procurement of goods and services</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 40.000.000.000	75% 25.000.000 70%	25% excess 25.000.000 30%
e. <i>Surety bond, custom bond</i> dan bank garansi/ <i>Surety bond, custom bond and bank guarantee</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 20.000.000.000	75% 25.000.000 80%	25% excess 25.000.000 10%
f. Kredit produktif (Kredit usaha rakyat)/ <i>Productive credit (People's Business Credit)</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 750.000.000	80% 25.000.000 80%	20% excess 25.000.000 20%
g. Kafalah non produktif/ <i>Non-productive kafalah</i> (konsumer/multiguna)/ <i>(consumer/multipurpose)</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 2.000.000.000	87,5% 25.000.000 80%	12,5% excess 25.000.000 20%
h. Kafalah produktif / <i>Productive kafalah</i> (Kredit mikro)/ <i>(micro credit)</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 750.000.000	87,5% 25.000.000 80%	12,5% excess 25.000.000 20%
i. Kafalah produktif/ <i>Productive kafalah</i> (Kredit usaha/umum)/ <i>(Business/general credit)</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 39.000.000.000	87,5% 25.000.000 87,50%	12,5% excess 25.000.000 12,5%
j. Kafalah konstruksi dan pengadaan barang dan jasa/ <i>Construction kafalah and procurement of goods and services</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 39.000.000.000	87,5% 25.000.000 87,5%	12,5% excess 25.000.000 12,5%
k. <i>Surety bond</i> dan <i>custom bond</i> / <i>Surety bond and custom bond</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 20.000.000.000	87,5% 25.000.000 80%	12,5% excess 25.000.000 20%
l. Bank garansi/ <i>Bank guarantee</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 20.000.000.000	87,5% 25.000.000 87,5%	12,5% excess 25.000.000 12,5%

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Penjaminan Ulang (lanjutan)

PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Re – Guarantee (continued)

PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi

2024			
Jenis Produk/ Type of Product	Batas Perjanjian/ Treaty Limit	Retensi Sendiri/ Own Retention	Sesi Reasuransi/ Reinsurance Session
a. Kredit non produktif/ <i>Non-productive credit</i> (konsumer/multiguna)/ (consumer/multipurpose)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 2.000.000.000	75% 25.000.000 70%	25% excess 25.000.000 30%
b. Kredit produktif/ <i>Productive credit</i> (Kredit mikro)/ (micro credit)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 750.000.000	75% 25.000.000 75%	25% excess 25.000.000 25%
c. Kredit produktif/ <i>Productive credit</i> (Kredit usaha/umum)/ (Business/general credit)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 39.000.000.000	75% 25.000.000 90%	25% excess 25.000.000 10%
d. Kredit konstruksi dan pengadaan barang dan jasa/ <i>Construction credit and procurement of goods and services</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 39.000.000.000	75% 25.000.000 80%	25% excess 25.000.000 20%
e. Kafalah non produktif/ <i>Non-productive kafalah</i> (konsumer/multiguna)/ (consumer/multipurpose)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 2.000.000.000	75% 25.000.000 70%	25% excess 25.000.000 30%
f. Kafalah produktif/ <i>Productive kafalah</i> (Kredit mikro)/ (micro credit)	< 25.000.000 > 50.000.000 - 750.000.000 25.000.000 - 50.000.000	75% 25.000.000 75%	25% excess 25.000.000 25%
g. Kafalah konstruksi dan pengadaan barang dan jasa/ <i>Construction kafalah and procurement of goods and services</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 39.000.000.000	75% 25.000.000 80%	25% excess 25.000.000 20%
h. <i>Surety bond/ Surety bond</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 20.000.000.000	75% 25.000.000 80%	25% excess 25.000.000 20%
i. <i>Custom bond</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 20.000.000.000	75% 25.000.000 70%	25% excess 25.000.000 30%
j. Bank garansi/ <i>Bank guarantee</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 20.000.000.000	75% 25.000.000 80%	25% excess 25.000.000 20%

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Penjaminan Ulang (lanjutan)

PT Best One Reinsurance Broker dan PT Esa Bina Sejati (lanjutan)

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Re – Guarantee (continued)

PT Best One Reinsurance Broker and PT Esa Bina Sejati (continued)

2023			
Jenis Produk/ Type of Product	Batas Perjanjian/ Treaty Limit	Retensi Sendiri/ Own Retention	Sesi Reasuransi/ Reinsurance Session
a. Kredit non produktif/ <i>Non-productive credit</i> (konsumer/multiguna)/ <i>consumer/multipurpose</i>)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 2.000.000.000	75% 25.000.000 60%	25% excess 25.000.000 40%
b. Kredit produktif/ <i>Productive credit</i> (Kredit mikro)/ <i>(micro credit)</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 750.000.000	75% 25.000.000 60%	25% excess 25.000.000 40%
c. Kredit produktif/ <i>Productive credit</i> (Kredit usaha/umum)/ <i>(Business/general credit)</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 39.000.000.000	75% 25.000.000 75%	25% Excess 25.000.000 25%
d. Kredit konstruksi dan pengadaan barang dan jasa/ <i>Construction credit</i> <i>and procurement of goods and</i> <i>services</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 39.000.000.000	75% 25.000.000 70%	25% excess 25.000.000 30%
e. Kafalah non produktif/ <i>Non-productive kafalah</i> (konsumer/multiguna)/ <i>(consumer/multipurpose)</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 2.000.000.000	75% 25.000.000 60%	25% excess 25.000.000 40%
f. Kafalah produktif/ <i>Productive</i> <i>kafalah</i> (Kredit mikro)/ <i>(micro credit)</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 750.000.000	75% 25.000.000 60%	25% excess 25.000.000 40%
g. Kafalah produktif/ <i>Productive kafalah</i> (Kredit usaha/umum)/ <i>(Business/general credit)</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 39.000.000.000	75% 25.000.000 75%	25% excess 25.000.000 25%
h. Kafalah konstruksi dan pengadaan barang dan jasa/ <i>Construction kafalah and</i> <i>procurement of goods and</i> <i>services</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 39.000.000.000	75% 25.000.000 70%	25% excess 25.000.000 30%
i. <i>Surety bond dan custom bond /</i> <i>Surety bond and custom bond</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 20.000.000.000	75% 25.000.000 60%	25% excess 25.000.000 40%
j. Bank garansi/ <i>Bank guarantee</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 20.000.000.000	75% 25.000.000 75%	25% excess 25.000.000 25%

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Penjaminan Ulang (lanjutan)

PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (lanjutan)

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Re – Guarantee (continued)

PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (continued)

2023			
Jenis Produk/ Type of Product	Batas Perjanjian/ Treaty Limit	Retensi Sendiri/ Own Retention	Sesi Reasuransi/ Reinsurance Session
a. Kredit non produktif/ Non-productive credit (konsumer/multiguna)/ (consumer/multipurpose)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 2.000.000.000	75% 25.000.000 70%	25% excess 25.000.000 30%
b. Kredit produktif/ Productive credit (Kredit mikro)/ (micro credit)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 75.000.000 - 750.000.000	75% 25.000.000 75%	25% excess 25.000.000 25%
c. Kredit konstruksi dan pengadaan barang dan jasa/ Construction credit and procurement of goods and services	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 39.000.000.000	75% 25.000.000 80%	25% excess 25.000.000 20%
d. Kafalah non produktif/ Non-productive kafalah (konsumer/multiguna)/ (consumer/multipurpose)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 2.000.000.000	75% 25.000.000 70%	25% excess 25.000.000 30%
e. Kafalah produktif/ Productive kafalah (Kredit mikro)/ (micro credit)	< 25.000.000 > 50.000.000 - 750.000.000 25.000.000 - 50.000.000	75% 25.000.000 75%	25% excess 25.000.000 25%
f. Kafalah konstruksi dan pengadaan barang dan jasa/ Construction kafalah and procurement of goods and services	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 39.000.000.000	75% 25.000.000 80%	25% excess 25.000.000 20%
g. Surety bond/ Surety bond	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 20.000.000.000	75% 25.000.000 80%	25% excess 25.000.000 20%
h. Custom bond	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 20.000.000.000	75% 25.000.000 70%	25% excess 25.000.000 30%
i. Bank garansi/ Bank guarantee	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 20.000.000.000	75% 25.000.000 80%	25% excess 25.000.000 20%

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

31 Desember 2024/ December 31, 2024					
	<= 1 tahun/ <= 1 year	1-2 tahun/ 1-2 year	3-5 tahun/ 3-5 year	Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported
Liabilitas					
Utang penjaminan ulang	18.162.080.254	4.952.414.025	-	23.114.494.279	23.114.494.279
Beban akrual	22.997.382.492	-	-	22.997.382.492	22.997.382.492
Utang penjaminan bersama	15.816.240.696	18.428.972	-	15.834.669.668	15.834.669.668
Utang sewa pembiayaan	567.487.213	201.804.528	-	769.291.741	769.291.741
Cadangan klaim	189.084.673.472	-	-	189.084.673.472	189.084.673.472
Jumlah	246.627.864.127	5.172.647.525	-	251.800.511.652	251.800.511.652

31 Desember 2023/ December 31, 2023					
	<= 1 tahun/ <= 1 year	1-2 tahun/ 1-2 year	3-5 tahun/ 3-5 year	Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported
Liabilitas					
Utang penjaminan ulang	17.295.021.944	2.946.372.684	-	20.241.394.628	20.241.394.628
Beban akrual	15.027.581.780	-	-	15.027.581.780	15.027.581.780
Utang penjaminan bersama	7.763.910.566	-	-	7.763.910.566	7.763.910.566
Utang sewa pembiayaan	647.690.950	850.622.257	-	1.498.313.207	1.498.313.207
Cadangan klaim	100.585.743.014	-	-	100.585.743.014	100.585.743.014
Jumlah	141.319.948.254	3.796.994.941	-	145.116.943.195	145.116.943.195

Risiko Pasar

Perusahaan menghadapi eksposur risiko pasar, yaitu risiko akibat dari menurunnya nilai suatu investasi karena kondisi pasar misalnya suku bunga. Risiko pasar berasal dari posisi terbuka yang terkait dengan produk suku bunga, dan ekuitas yang seluruhnya dipengaruhi oleh pergerakan pasar baik secara spesifik maupun umum dan perubahan volatilitas tingkat suku bunga pasar atau harga seperti suku bunga dan produk ekuitas.

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Company is not enough to cover the liabilities which become due.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash deemed adequate to finance the Company's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

The table below summarizes the maturity profile of financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of December 31, 2024 and 2023:

31 Desember 2024/ December 31, 2024					
	<= 1 tahun/ <= 1 year	1-2 tahun/ 1-2 year	3-5 tahun/ 3-5 year	Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported
Liabilities					
Co-guarantee payable	18.162.080.254	4.952.414.025	-	23.114.494.279	23.114.494.279
Accrued expenses	22.997.382.492	-	-	22.997.382.492	22.997.382.492
Co-guarantee payables	15.816.240.696	18.428.972	-	15.834.669.668	15.834.669.668
Lease payables	567.487.213	201.804.528	-	769.291.741	769.291.741
Claim reserve	189.084.673.472	-	-	189.084.673.472	189.084.673.472
Total	246.627.864.127	5.172.647.525	-	251.800.511.652	251.800.511.652

31 Desember 2023/ December 31, 2023					
	<= 1 tahun/ <= 1 year	1-2 tahun/ 1-2 year	3-5 tahun/ 3-5 year	Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported
Liabilities					
Co-guarantee payable	17.295.021.944	2.946.372.684	-	20.241.394.628	20.241.394.628
Accrued expenses	15.027.581.780	-	-	15.027.581.780	15.027.581.780
Co-guarantee payables	7.763.910.566	-	-	7.763.910.566	7.763.910.566
Lease payables	647.690.950	850.622.257	-	1.498.313.207	1.498.313.207
Claim reserve	100.585.743.014	-	-	100.585.743.014	100.585.743.014
Total	141.319.948.254	3.796.994.941	-	145.116.943.195	145.116.943.195

Market Risk

The company faces market risk exposure, which is the risk arising from the decline in the value of an investment due to market conditions such as interest rates. Market risk originates from open positions related to interest rate products, and equities that are entirely influenced by market movements both specifically and generally, and changes in the volatility of market interest rates or prices such as interest rates and equity products.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko suku bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko nilai suku bunga wajar adalah risiko dimana nilai dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Perusahaan menghadapi dampak dari fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku baik atas risiko nilai wajar maupun arus kas. Marjin suku bunga bisa meningkat sebagai hasil dari perubahan tersebut namun juga dapat mengurangi kerugian ketika terdapat pergerakan yang tidak diharapkan. Direksi menetapkan batas atas tingkat ketidaksesuaian dari suku bunga *repricing* dan *value at risk* yang bisa dilakukan, yang dimonitor secara harian oleh Divisi yang membidangi investasi.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih.

Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Kas dan setara kas	102.617.678.526	97.169.719.740	Cash and cash equivalents
Aset penjamin ulang	81.650.075.422	25.775.097.322	Re-guarantee assets
Investasi - deposito berjangka	129.610.000.000	55.750.000.000	Investment - time deposits
Investasi - simpanan berjangka	-	100.000.000	Investment - time savings
Deposito yang dibatasi penggunaannya	83.000.000.000	63.000.000.000	Restricted time deposits
Reksa dana	84.772.474.689	49.811.542.123	Mutual funds
Piutang hasil investasi	7.881.299.768	6.144.699.914	Interest receivable
Obligasi	614.241.634.349	459.722.169.829	bond
Jumlah	1.103.773.162.754	757.473.228.928	Total

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Interest Rate Risk

Interest rate cash flow risk is the risk where the future cash flows of a financial instrument fluctuate due to changes in market interest rates. Fair value interest rate risk is the risk where the value of a financial instrument fluctuates due to changes in market interest rates. Companies face the impacts of fluctuations in market interest rates, both on fair value and cash flows. The interest rate margin may increase as a result of these changes but can also reduce losses when unexpected movements occur. The board sets the upper limits of the mismatch level of repricing interest rates and value at risk that can be undertaken, which are monitored daily by the investment division.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from the customers or counterparties failure to fulfill their contractual obligations. The Company manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, setting internal policies on verifications and authorizations of credit, and regularly monitoring the collectability of receivables to reduce the exposure to bad debts.

The table below shows statement of financial position maximum exposures related to credit risk as of December 31, 2024 and 2023:

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

40. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian dan perikatan, sebagai berikut:

- PT Bank DKI perihal penjaminan kredit mikro dan kecil, penjaminan kredit usaha, penjaminan kredit multiguna, penjaminan kredit konstruksi, pengadaan barang atau jasa, bank garansi, *kafalah* pembiayaan multiguna dan multijasa.
- PT Bank DKI perihal penjaminan kredit pemilikan rumah program pemerintah.
- PT Bank DKI perihal penjaminan kredit usaha rakyat.
- PT Radana Bhaskara Finance, Tbk perihal penjaminan pembiayaan *factoring* (anjak piutang).
- PT Mandiri Tunas Finance perihal penjaminan kredit usaha dan kredit modal kerja anjak piutang.
- LPDB-KUMKM tentang penjaminan pinjaman/pembiayaan KUMKM.
- PT Mitra Proteksi Madani tentang pengelolaan program penjaminan dan pembiayaan mikro Mekaar untuk kepentingan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM), Grup PNM, dan/atau nasabah/klien/mitra atau afiliasinya, yang meliputi kegiatan administrasi untuk proses penutupan penjaminan, pembayaran IJP/kontribusi dan pengajuan klaim.
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, perihal pemberian fasilitas *Commercial Line* - kontra garansi bank.
- PT Bringin Sejahtera Makmur tentang pengelolaan program penjaminan untuk kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Grup Bank BRI atau afiliasinya, yang meliputi kegiatan administrasi untuk proses penutupan penjaminan, pembayaran IJP/kontribusi dan pengajuan klaim.
- Pusat Investasi Pemerintah perihal *kafalah* pembiayaan kepada penyalur pembiayaan ultra mikro.
- PT Pegadaian (Persero) perihal penjaminan modal produktif.
- PT Bank Syariah Indonesia perihal *Kafalah* Kontra Bank Garansi dan *Kafalah* Pembiayaan Value Chain.
- PT Bank Niaga perihal Penjaminan Kredit Usaha untuk modal kerja BPR kepada *end user* pembiayaan.
- PT Bringin Sejahtera Makmur (PT BSM) tentang penjaminan untuk kepentingan PT Bank Raya Indonesia Tbk terhadap produk Pinang Mikro dan Pinang Ritel.
- PT Bank Raya Indonesia Tbk perihal Penjaminan Kredit Karyawan Tetap.
- PT Bank MNC perihal Penjaminan Kredit Usaha.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) perihal penjaminan Kontra Bank Garansi.

40. AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The Company entered into various agreements, as follows:

- *PT Bank DKI on credit guarantee for micro and small, credit guarantee, multipurpose guarantee, credit guarantee construction, procurement of goods or services, bank guarantee and financing kafalah multipurpose and multiservice.*
- *PT Bank DKI on credit guarantee for government program housing loan.*
- *PT Bank DKI on credit guarantee for people's business credit.*
- *PT Radana Bhaskara Finance, Tbk on factoring financing guarantees.*
- *PT Mandiri Tunas Finance on business credit guarantees and factoring working capital loans.*
- *LPDB-KUMKM on KUMKM loan/financing guarantee.*
- *PT Mitra Proteksi Madani for managing the guarantee program and micro-financing representing PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM), PNM Group, and/or customers/clients/partners or affiliates, which includes administrative activities of guarantee closing process, IJP payments/ contributions and filing a claim.*
- *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, on provision of Commercial Line facility- counter bank guarantee.*
- *PT Bringin Sejahtera Makmur regarding the management of the guarantee program for the benefit of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and the BRI Bank Group or affiliates, which includes administrative activities of guarantee closing process, IJP payments/ contributions and filing a claim.*
- *Government Investment Center on financing kafalah to ultra micro financing distributors.*
- *PT Pegadaian (Persero) regarding the guarantee of productive capital.*
- *PT Bank Syariah Indonesia regarding Kafalah Cons Bank Guarantee and Kafalah Value Chain Financing.*
- *PT Bank Niaga regarding Business Credit Guarantee for BPR working capital to end users of financing.*
- *PT Bringin Sejahtera Makmur (PT BSM) regarding the guarantee for the benefit of PT Bank Raya Indonesia Tbk for Micro Pinang and Retail Pinang products.*
- *PT Bank Raya Indonesia Tbk regarding Permanent Employee Credit Guarantee.*
- *PT Bank MNC regarding Business Credit Guarantee.*
- *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) regarding the guarantee of Counter Bank Guarantee.*

**PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**40. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

Penjaminan bersama:

- PT Jamkrida Jawa Barat.
- PT Sinarmas Penjaminan Kredit
- PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)

Penjaminan Ulang

- PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi.
- PT Best One Asia Reinsurance.
- PT Esa Bina Sejati

Kontinjensi

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung

Berdasarkan surat permohonan penerbitan Sertifikat Penjamin (SP) *Surety Bond* tanggal 10 November 2020 yang di ajukan oleh PT Polowijo Gosari kepada Perusahaan dengan nilai kontrak Rp23.000.000.000, Perusahaan menyetujui penjaminan tersebut dengan nilai penjaminan maksimal sebesar 100% dari nilai kontrak.

Pada tanggal 23 September tahun 2022, Perusahaan memutuskan untuk menolak pengajuan klaim sebesar Rp21.300.000.000 (dua puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah) atas *Surety Bond* Jaminan Pembayaran yang diajukan oleh PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP). Klaim tersebut diajukan sehubungan dengan adanya kegagalan PT Polowijo Gosari dalam memenuhi kewajiban pembayaran atas pengadaan bahan baku pupuk NPK yang sudah dilakukan oleh PT JIEP.

Pengajuan klaim tersebut tidak sesuai karena pelaksanaannya berbeda dengan isi perjanjian kerjasama yang disepakati, hal ini terbukti dari adanya perbedaan tujuan penggunaan sebagaimana dalam Perjanjian, tujuannya untuk pengadaan bahan baku pembuatan Pupuk NPK, sedangkan berdasarkan invoice tagihan nomor 7355/LOG-JIEP/XI/20 dari PT JIEP kepada PT Polowijo Gosari menyebutkan tujuan penggunaannya untuk Pembelian Pupuk NPK 15.15.15.

Pada tanggal 13 Juni 2023 PT JIEP telah mendaftar kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sangketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) perihal Arbitrase untuk penyelesaian penjaminan dengan Perusahaan.

**40. AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

Joint Guarantee:

- PT Jamkrida Jawa Barat.
- PT Sinarmas Penjaminan Kredit
- PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)

Re-Guarantee

- PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi.
- PT Best One Asia Reinsurance.
- PT Esa Bina Sejati

Contingencies

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung

Based on the application letter for the issuance of a Surety Bond Guarantee Certificate (SP) dated November 10, 2020 submitted by PT Polowijo Gosari to the Company with a contract value of Rp23,000,000,000, Company approved the guarantee with a maximum guarantee value of 100% of the contract value.

On September 23, 2022, the Company decided to reject the submission of a claim of Rp21,300,000,000 (twenty-one billion three hundred million rupiah) for the Payment Guarantee Surety Bond submitted by PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP). The claim was filed in connection with the failure of PT Polowijo Gosari to 64enga payment obligations for the procurement of raw materials for NPK fertilizer which had been carried out by PT JIEP.

The submission of the claim is not appropriate because the implementation is different from the contents of the agreed cooperation agreement, this is evident from the difference in the purpose of use as in the Agreement, the purpose is to procure raw materials for making NPK Fertilizer, while based on the invoice number 7355/LOG-JIEP/XI/20 from PT JIEP to PT Polowijo Gosari states the purpose of use for the purchase of NPK Fertilizer 15.15.15.

On June 13, 2023 PT JIEP has registered with the Financial Services Sector Sangketa Alternative Settlement Agency (LAPS SJK) regarding Arbitration for guarantee settlement with the Company.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

40. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

Kontinjensi (lanjutan)

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
(lanjutan)

Pada tanggal 5 Juli 2023 LAPS SJK mengirimkan undangan pertemuan Pra-Arbitrase kepada Perusahaan untuk penyelesaian sengketa dengan PT JIEP, namun Perusahaan tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023 Perusahaan memenuhi undangan LAPS SJK menghadiri pertemuan Pra-Arbitrase II, namun dalam pertemuan tersebut belum tercapai kesepakatan.

Pada tanggal 12 Januari 2024 para pihak mengadakan pertemuan Pra-Arbitrase III. Didalam pertemuan tersebut para pihak membahas mengenai draft Perjanjian Arbitrase bersama-sama secara garis besar. Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan Perjanjian Arbitrase final masih dalam proses pembahasan oleh para pihak.

Berdasarkan surat dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) No. 404/ARB273/LAPS-SJK/XII/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 kepada Kantor Hukum Dewi Djalal & Partners sebagai Kuasa Hukum PT JIEP (Pemohon) menyampaikan putusan Arbitrase Perkara No. 273/ARB-001/LAPSSJK.08/VI/2024 memutuskan menolak Eksepsi termohon untuk keseluruhan. Dengan hal ini menyatakan bahwa Perusahaan tidak perlu membayar nilai perkara sebesar Rp20.800.000.000 kepada PT JIEP.

Berdasarkan pendapat hukum dari Konsultan Hukum Perusahaan menyatakan bahwa "Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak" (Catatan 41).

41. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan surat dari Konsultan Hukum HSH & Partners No. 019/HSH&P-LO/I/2025 pada tanggal 24 Januari 2025 yang ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan, pada surat tersebut menjelaskan bahwa adanya permohonan pembatalan putusan Arbitrase LAPS – SJK No.273/ARB-001/LAPSSJK.08/VI/2024 tanggal 2 Desember 2024 oleh PT JIEP (Catatan 40).

40. AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Contingencies (continued)

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
(continued)

On July 5, 2023 LAPS SJK sent an invitation to a Pre-Arbitration meeting to the Company to resolve the dispute with PT JIEP, but the Company was unable to attend the meeting. Subsequently, on August 30, 2023, the Company complied with LAPS SJK's invitation to attend the Pre-Arbitration II meeting, but no agreement was reached during the meeting.

On January 12, 2024 the parties held a Pre-Arbitration III meeting. In the meeting, the parties discussed the draft Arbitration Agreement together in outline. Until this financial report is published, the final Arbitration Agreement is still under discussion by the parties.

Based on a letter from the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK) No. 404/ARB273/LAPS-SJK/XII/2024 dated December 2, 2024 to the Law Office of Dewi Djalal & Partners as the Legal Representative of PT JIEP (the Applicant) submitted the Arbitration decision of Case No. 273/ARB-001/LAPSSJK.08/VI/2024 deciding to reject the respondent's Exclusion in its entirety. This states that the Company does not need to pay the value of the case of Rp20,800,000,000 to PT JIEP.

Based on the legal opinion of the Company's Legal Consultant, it is stated that "The Arbitration Award is final and has permanent legal force and is binding on the parties" (Note 41).

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

Based on a letter from HSH & Partners Legal Consultant No. 019/HSH&P-LO/I/2025 dated January 24, 2025 addressed to the Company's President Director, the letter explained that there was an application for annulment of the LAPS – SJK Arbitration award No.273/ARB-001/LAPSSJK.08/VI/2024 dated December 2, 2024 by PT JIEP (Notes 40).

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

Konsultan Hukum berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak". Maka dari itu pembatalan putusan arbitrase oleh PT JIEP tidak memiliki alasan-alasan yang kuat sebagai dasar pembatalan putusan karena:

- a. Pada proses pemeriksaan perkara, tidak ada dokumen Perusahaan yang terindikasi palsu;
- b. Tidak ada dokumen-dokumen bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Perusahaan;
- c. Tidak ada tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Perusahaan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut.

42. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS
LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2025.

41. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

The Legal Consultant argued that based on Article 60 of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution which states that "The arbitral award is final and has permanent legal force and is binding on the parties". Therefore, the annulment of an arbitral award by PT JIEP does not have strong reasons as a basis for annulment of the award because:

- a. In the process of examining the case, there were no Company documents that were indicated to be false;*
- b. No definitive documents are concealed by the Company;*
- c. There is no act of deception committed by the Company in the process of examining the case.*

42. MANAGEMENT RESPONSIBILITY OF
FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and presentation of financial statements is the responsibility of management, and has been approved by the Board of Directors to be published on January 30, 2025.



2024

Laporan Tahunan
Annual Report

Meraih Peluang Bisnis Menuju Pertumbuhan yang Maksimal dan Optimal

Seizing Business Opportunities Towards Maximum and Optimal Growth



PT Jamkrida Jakarta

Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai 14
Jl. Abdul Muis No.66, RT 004/RW 003
Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10160

Telp : (021) 21203204
Fax : (021) 22346335
Email : mail@jamkrida-jakarta.co.id